METODE *ISTINBAṬ* HUKUM LEMBAGA BAHTSUL MASAIL

(Studi Terhadap Hasil Keputusan Lembaga Bahtsul Masail NU Kabupaten Mojokerto Dalam Menjawab Problematika Keagamaan Masyarakat)

DISERTASI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Doktor Dalam Program Studi Studi Islam

Oleh :
Muhammad Nizar
NIM. F23416217

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Nizar

NIM : F18312057

Program : Doktor (S-3)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Maret 2020

Saya yang menyatakan,

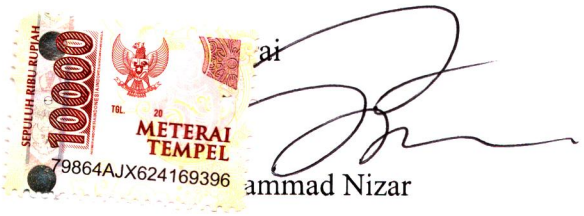

ammad Nizar

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi berjudul "Metode *Istinbāṭ* Hukum Lembaga Bahtsul Masail" (Studi Terhadap Hasil Keputusan Lembaga Bahtsul Masail NU Kabupaten Mojokerto Dalam Menjawab Problematika Keagamaan Masyarakat) yang ditulis oleh Muhammad Nizar ini telah disetujui tanggal 08 Januari 2020

Oleh
PROMOTOR

Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, M.A.

PROMOTOR

Prof. Dr. H. Faishal Haq, M.Ag.

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERTUTUP

Disertasi berjudul "METODE *ISTINBAṬ* HUKUM LEMBAGA BAHTSUL MASAIL" (Studi Terhadap Hasil Keputusan Lembaga Bahtsul Masail NU Kabupaten Mojokerto Dalam Menjawab Problematika Keagamaan Masyarakat) yang ditulis oleh Muhammad Nizar ini telah diuji dalam ujian disertasi tertutup pada tanggal 11 Mei 2020.

TIM PENGUJI :

1. Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag (Ketua/Penguji) .....
2. Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I (Sekretaris/Penguji) .....
3. Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA (Promotor/Penguji) .....
4. Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag (Promotor/Penguji) .....
5. Prof. Dr. H. Said Agil Husein Al Munawar (Penguji Utama) .....
6. Prof. Dr. H. A.Yasid, MA, LLM (Penguji) .....
7. Dr. H. Abd. Salam Nawawi, M.Ag (Penguji) .....

Direktur,
Pascsarjana

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP. 196004121994031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Nizar
NIM : F23416217
Fakultas/Jurusan : Doktor Studi Islam
E-mail address : muhammadnizar.gus@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Skripsi ☐ Tesis ☑ Disertasi ☐Lain-lain (……)
yang berjudul :

"Metode *Istinbāṭ* Hukum Lembaga Bahtsul Masail"
(Studi Terhadap Hasil Keputusan Lembaga Bahtsul Masail NU Kabupaten Mojokerto Dalam Menjawab Problematika Keagamaan Masyarakat)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Februari 2022

Penulis

(Muhammad Nizar)

ABSTRAK

Judul : Metode *Istinbāṭ* Hukum Lembaga Bahtsul Masail (Studi Terhadap Hasil Keputusan Lembaga Bahtsul Masail NU Kabupaten Mojokerto Dalam Menjawab Problematika Keagamaan Masyarakat)
Penulis : Muhammad Nizar
Promotor : Prof. Dr. H.Ahmad Zahro, M.A dan Prof. Dr.H.Faishal Haq,M.Ag.
Kata kunci : Metode *Istinbāṭ* Hukum, Keputusan Lembaga Bahtsul Masail, Problematika Keagamaan Masyarakat.

Rumusan ulama' terdahulu yang terangkum dalam *kutub turāth* diyakini sebagai hasil ijtihad yang final dan bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Hal ini menjadi penyebab para kyai (intelektual) NU kabupaten Mojokerto lebih suka merujuk pada *aqwāl* ulama. Mereka tidak melakukan telaah kitab kuning secara kontekstual berdasarkan (sosio-historisnya). Kegelisahan akademik ini menuntut peneliti melakukan penelitian yang terfokus dalam tiga rumusan; Bagaimanakah kategori permasalahan-permasalahan fiqh masyarakat kabupaten Mojokerto?. Bagaimanakah metode istibat hukum lembaga batsul masail kabupaten Mojokerto?. Bagaimanakah karakteristik lembaga bahtsul masail Nahdlatul Ulama kabupaten Mojokerto dalam melakukan istinbat hukum?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dan pendekatan *uṣul fiqh*, yang berkaitan dengan metode istinbāṭ hukum, dan upaya membangun metode *istinbāṭ* hukum yang dinamis dan produktif. Ada tiga metode pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu telaah dokumenter, wawancara dan pengamatan lapangan terhadap sidang bahtsul masail. Menganalisis data kualitatif dengan metode analisis kualitatif dengan cara berpikir reflektif (deduksi-induksi), dan kritis. Prosedur analisis yang ditempuh, terhadap data kualitatif dikoleksi, diklasifikasi, diseleksi, dikomparasi kemudian dikritisi.

Hasil penelitian ini meliputi:1).Permasalahan fiqh bahtsul masail dikelompokkan menjadi 7 kategori,yaitu: fiqh ibadah, fiqh ṭaharah, fiqh mu'amalah, fiqh munakahah, dan fiqh mawarith, Ada juga yang dikategorikan *fiqh mu'āmalah dan fiqh ṭahārah*, dan Ada juga yang dikategorikan *fiqh ibādah dan fiqh mu'āmalah*. 2).Terdapat 6 metode istinbāṭ hukum lembaga bahtsul masail kabupaten mojokerto, yaitu: *qawli, ilhāqi, manhaji*, *qawli ilhāqi*, *qawli manhaji,* dan *istinbāṭ jamā'iy*. 3). Ada 4 metode istinbat hukum yang menjadi karakteristik lembaga tersebut, yaitu: metode *manhaji*, *intiqāl al-maẓhab* dalam lingkup *al-Madhāhib al-Arba'ah*, *istinbāṭ jamā'iy*, dan pola pikir kontekstul terkesan tekstual.

Nahdlatul Ulama (NU) dengan semboyannya *"al-Muhāfaẓah alā al-qadīm al-Ṣālih wa al-akhdh bi al-jadīd al-aṣlah",* hendaknya membuka diri menerima saran, kritikan dari berbagai komponen masyarakat. LBM seyogyanya menerapkan metode istinbaṭ hukum dengan metode *manhaji*, demi mengembalikan fiqh pada wataknya yang asli sebagai produk dan hasil ijtihad, yaitu: fleksibel, dinamis, realistis, temporal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRACT

Title : Istinbāṭ Methoḏ Law of the Bahtsul Masail Institution (Study of the Decisions of the Bahtsul Masail Institute NU Mojokerto Regency in Responding to the Religious Problems of the Community)
Author : Muhammad Nizar
Promoter : Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, M.A and Prof. Dr. H.Faishal Haq, M.Ag.
Keywords : Istinbāṭ Methoḏ Law, Bahtsul Masail Institution Decision, Religious Community Problems.

Formulation of the ulama 'which is summarized in the *kutub turats* is believed to be the result of final ijtihad and can adapt to the times. This is the reason why the Kyai NU (intellectuals) who participated in the bahtsul masail in Mojokerto preferred to refer to *aqwāl* (the results of interpretation) of the ulama. They did not study the kitab kuning contextually based on (socio-historical).This academic anxiety requires researchers to conduct focused research in three formulas; What is the category of community fiqh problems in Mojokerto district ?. What is the method of legal procedure for the batsul masail institution in Mojokerto district? What are the characteristics of the Nahdlatul Ulama Bahtsul Masail institute in Mojokerto district in carrying out legal services ?.

This research uses the historical approach and ushul fiqh approach, which is related to the method of *istinbāṭ* law, and efforts to build a dynamic and productive method istinbath law. There are three data collection methods in this study, namely documentary study, interviews and direct field observations of the Bahtsul Masail. Analyzing qualitative data with qualitative analysis methods by thinking reflective (deduction-induction), comparative, and critical. The analysis procedures adopted are qualitative data collected, classified, selected, compared and then criticized.

The results of this study include: 1). The problems of the fiqh of bahtsul masail are grouped into 7 categories, namely: fiqh ibadah, fiqh t} aharah, fiqh mu'amalah, fiqh munakahah, and fiqh mawaritls, There are also categorized as fiqh mu'amalah and fiqh thaharah, and There are also those that are categorized as fiqh ibadah and fiqh mu'amalah. 2). There are 6 istinbath law methods of the bahtsul masail institution in Mojokerto , namely: *qawli, ilhāqi, manhaji, qawli ilhāqi, qawli manhaji, and taqrīr jamā'iy*. 3). There are 4 legal istinbat methods that characterize the institution, namely: the method of *manhaji, intiqāl al-maẓhab within the scope of al-Madhāhib al-Arba'ah, istinbath jamā 'iy*, the contextual mindset seems textual .

Nahdlatul Ulama (NU) with the motto "*al-Muhā faẓ ah alā al-qadī m al-Ṣālih wa al-akhdh bi al-jadīd al-aṣlah*", should open yourself to accept suggestions, criticisms from various components of society. LBM should apply the legal istinbat} method with the manhaji method, in order to restore fiqh to its original character as a product and ijtihad product, namely: flexible, dynamic, realistic, temporal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الملخص
العنوان: "طريقة استنباط الحكم في لجنة بحث المسائل" (دراسة على مقررات لجنة بحث المسائل في جمعية نهضة العلماء مقاطعة مجاكرطا. في مواجهة المشكلات الدينية للمجتمع)
المؤلف: محمد نزار
المروج: الأستاذ الدكتور أحمد زهرا الحاج ، والأستاذ الدكتور فيصل الحق الحاج
الكلمات المفتاحية: طريقة استنباط الحكم ، مقررات لجنة بحث المسائل ، مشكلات المجتمع الدينية.

يعتقد أن صياغة العلماء الموجزة في أعمدة الثورة "الكتب التراثية"هي نتيجة الاجتهاد النهائي ويمكن أن تتكيف مع تطورالزمن.هذا هو سبب لعلماء الدين في جمعية نهضة العلماء(المثقفين) المشاركين في بحث المسائل في مقاطعة مجاكرطا أن يرجعوا إلى أقوال العلماء السابقين.فهم لايدرسون الكتب التراثيةالمستندة إلى السياق(الاجتماعي-التاريخي).يتطلب هذا القلق الأكاديمي الباحثين بإجراء بحث مركز في ثلاث صيغ ؛ ما هي فئة مشاكل الفقه المجتمعي في مقاطعة مجاكرطا؟. ما هي الاجراءات القانونية للجنة بحث المسائل في مقاطعة مجاكرطا؟. ما هي مميزات لجنة بحث المسائل لنهضة العلماء في مقاطعة مجاكرطا في تقديم الخدمات القانونية؟.

يستخدم هذا البحث المنهج التاريخي ومنهج الفقه ،فيما يتعلق بأساليب استنباط الاحكام ، والجهود المبذولة لبناء أساليب دينامية ومنتجة للاستنباءهناك ثلاث طرق لجمع البيانات في هذه الدراسة ، وهي الدراسة الوثائقية والمقابلات والملاحظات الميدانية المباشرة لمحاكمة بحث المسائل. تحليل البيانات النوعية باستخدام طرق التحليل النوعي من خلال التفكير الانعكاسي (الاستقراء - الاستقراء) والمقارنة والنقدي. يتم جمع الإجراءات التحليلية المعتمدة للبيانات النوعية وتصنيفها واختيارهاومقارنتها ثم انتقادها.

نتائج هذه الدراسة تشمل: ١) تنقسم مشكلة فقه البحث المسائل إلى7 فئات هي: فقه العبادة ، فقه الطهارة ، فقه المعاملة ، فقه المناكحة ، و فقه الورثة ،وهناك من يصنف على أنه فقه المعاملة و فقه الطهارة, وهناك من يصنف على أنه فقه العبادة وفقه المعاملة. ٢). توجد ٦ طرق استنباط الحكم للجنة بحث المسائل في مقاطعة مجاكرطا ، وهي: قولي ،الحاقى ، منهاج ، قولي الحاقى ، قولي منهاجي ، و استنباط جماعي. ٣). هناك 4 طرق استنباط الحكم تميز المؤسسة ، وهي: منهجي ، انتقال المذهب في نطاق المذاهب الأربعة ، استنباط جماعي ، تبدو أنماط الفكر السياقية نصية.

نهضة العلماء بشعارها"المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصلح "،يجب أن تكون مفتوحة لقبول الاقتراحات والانتقادات من مختلف مكونات المجتمع. يجب(لجنة بحث المسائل) أن تطبق طريقة استنباط الحكم مع طريقة المنهج ،من أجل إعادة الفقه إلى طبيعته الأصلية كمنتج ونتيجة للاجتهاد وهي: مرونة وديناميكية وواقعية وزمانية.

UCAPAN TERIMA KASIH

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Halaman Sampul i
Halaman Judul ii
Halaman Persetujuan Promotor iii
Halaman Pernyataan Keaslian iv
Halaman Pengesahan Tim Penguji Verifikasi Naskah Disertasi v
Halaman Pengesahan Tim Penguji Ujian Disertasi Tertutup vi
Abstrak vii
Ucapan Terima Kasih x
Daftar Isi xv
Pedoman Transliterasi xviii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan Masalah 11
C. Rumusan Masalah 12
D. Tujuan Penelitian 13
E. Kegunaan Penelitian 13
F. Kerangka Teoritik 14
G. Penelitian Terdahulu 41
H. Metode Penelitian 51
I. Sistematika Pembahasan 53

BAB II METODE ISTINBAT HUKUM 56
A. Pengertian Istinbāṭ 56
B. Metode Istinbāṭ Hukum 59
C. Metode Istinbāṭ Hukum Dengan Pendekatan Tata Bahasa 60
1. Lafaz dilihat dari sisi makna yang diciptakan atau cakupannya 62
2. Lafadz dilihat dari sisi penggunaannya terhadap makna .. 74
3. Lafadz dilihat dari sisi kejelasan dan tidaknya dalam menunjukkan makna 76
4. Lafadz dilihat dari sisi cara pengungkapannya terhadap makna 85
D. Metode *Istinbāṭ* Hukum Dengan Pendekatan *Maqāṣid al-Sharī'ah* 91
1. Pengertian *Maqāṣid al-Sharī'ah* 94
2. Klasifikasi *Maqāṣid al-Sharī'ah* 97
3. *al-Kulliyyāt al-Khams* menjadi acuan *Maqāṣid al-sharī'ah* 99
4. Metode Istinbat Hukum *Maqāṣid al-sharī'ah* 104

E. Metode Istinbat Hukum Nahdlatul Ulama 105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Metode *qauliy* 105
2. Metode *Ilhāqiy* 106
3. Metode *Manhaji/Istinbāt* 107

BAB III GAMBARAN UMUM LAPANGAN PENELITIAN 111
A. Sejarah Berdirinya Nahdlatul Ulama 111
1. Struktur Organisasi NU 115
2. Struktur Kepengurusan NU 116
3. Struktur Organisasi Lembaga dan Banom 117
B. Nahdlatul Ulama Di Mojokerto 124
1. Sejarah Berdirinya Nahdlatul Ulama Di Mojokerto 124
2. Susunan Pengurus Cabang Nahdlatul Kabupten Mojokerto Periode 2018 – 2023 128
3. Daftar Nama Ketua Lembaga PCNU Kabupaten Mojokerto Masa Khidmah 2018 – 2023 132
4. Daftar Nama Banom (Badan Otonom) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto 133
C. Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU Kabupaten Mojokerto .. 134
1. Asal-usul Lembaga Bahsul Masail 134
2. Peran Lembaga Bahsul Masail (LBM) 137
3. Metode Pengambilan Keputusan Bahtsul Masail 139
4. Masail Diniyah Lembaga Bahthul Masail Mojokerto 144
5. Model Dan Prosedur Penyelesaian Masalah 145
6. Respon Ulama Mojokerto Terhadap Hasil Keputusan Bahsul Masail 148

BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA PENELITIAN..... 151
A. Permasalahan-Permasalahan Fiqh Masyarakat Yang Dibahas Dalam Bahtsul Masail dan pengkategoriannya 152
1. Kategori permasalahan *fiqh ibādah.* 153
2. Kategori permasalahan *fiqh mu'āmalah* 158
3. Kategori permasalahan *fiqh Ṭahārah* 161
4. Kategori permasalahan *fiqh munākahah* 162
5. Kategori permasalahan *fiqh mawārith* 163
6. Kategori permasalahan *fiqh ṭahārah dan fiqh mu'āmalah* 164
7. Kategori permasalahan *fiqh ibādah dan fiqh mu'āmalah* 164
B. Metode istinbāṭ hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama' kabupaten Mojokerto 165
1. Permasalahan fiqh yang keputusan hukumnya dengan metode *qawli* 168
2. Permasalahan fiqh yang keputusan hukumnya dengan metode *ilhāqi* 257

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Permasalahan fiqh yang keputusan hukumnya dengan metode *manhaji* 279
4. Permasalahan fiqh yang keputusan hukumnya dengan metode gabungan *qawli ilhāqi* 301
5. Permasalahan fiqh yang keputusan hukumnya dengan metode *qawli manhaji* 314
6. Permasalahan fiqh yang keputusan hukumnya dengan metode *istinbat jamā'iy* 315

C. Karakteristik Bahtsul Masail Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto 318
1. Prosedur dan cara menghimpun masalah-masalah (*as'ilah*) fiqh 319
2. Jenis permasalahan fiqh berdasarkan komisi bahtsul masail 319
3. Peserta bahtsul masail diperlakukan secara adil dan proporsional 320
4. Metode penetapan hukum lembaga bahtsul masail kabupaten Mojokerto 321
5. *al-Kutub al-Mu'tabarah* sebagai refrensi dan rujukan bahtsul masail 326

BAB V PENUTUP 327
A. Kesimpulan 327
B. Implikasi Teoritik 332
C. Keterbatasan Studi 333
D. Rekomendasi 336

DAFTAR PUSTAKA 338

LAMPIRAN WAWANCARA

PEDOMAN TRANSLITERASI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nahdlatul Ulama (yang kemudian disingkat NU) merupakan *jam'iyyah dīniyyah Islāmiyyah* yang berarti Organisasi Keagamaan Islam, didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 M/16 Rajab 1344 H. NU mempersatukan solidaritas ulama tradisional dan para pengikut mereka yang berfaham salah satu dari empat mazhab fiqh. Basis sosial NU dahulu dan kini adalah mereka yang masih berada di pesantren.[1]

NU di samping merupakan *jam'iyyah dīniyyah Islāmiyyah*, juga merupakan *jam'iyyah dīniyyah ijtimā'iyyah* (organisasi keagamaan dan kemasyarakatan) yang sejak awal mencita-citakan ketinggian harkat dan martabat manusia. Tujuan NU adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut faham ahlussunnah wal jama'ah[2] untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat dan

[1] Ahmad Zahra, *Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2004) 5

[2] Pengikut ajaran Islam, yang berlandaskan pada: Al-qur'an al-karim, Sunnah (perkataan, perbuatan dan taqrir) Nabi Muhammad SAW sebagaimana telah dilakukan bersama para sahabatnya, Sunnah Khulafaurrasyidin: Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ustman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Terminologi ini menjadi berkembang, sebagai penegasan kaum tradisionalis menanggapi gerakan pembaharuan (yang memahami Islam hanya berlandaskan Al-qur'an dan Hadist). Bagi NU memberlakukan ajaran Islam menurut aliran *Ahlussunah Wal Jama'ah* tidak terlepas dari pengakuan terhadap ajaran pemikir terdahulunya seperti, dalam bidang teologi merujuk pada pemikiran Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, dalam bidang Fiqih mengikuti empat madzab: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, kemudian dalam bidang Tasawuf, mengembangkan metode al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syari'at.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terciptanya rahmat bagi semesta alam (*rahmatan li al 'ālamīn*).[3] Hal ini sesuai dengan misi diutusnya Muhammad sebagai Rasul dengan membawa ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin,* sebagaimana firman Allah saw:

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.

Artinya: Dan Kami tidak mengutus Engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam. (QS. *al-Anbiyā'*:107)

NU dalam struktur organisasinya untuk memberikan panduan terkait problematika yang sedang dihadapi oleh umat Islam dan warga nahdliyyin khususnya, mempunyai sebuah forum yang dinamakan lembaga bahtsul masail yang dikoordinasi oleh lembaga syuriah. Forum ini bertugas mengambil keputusan tentang hukum-hukum Islam baik yang berkaitan dengan *masā'il fiqhiyyah* (masalah fiqh) maupun masalah ketauhidan dan masalah-masalah tasawuf (tarekat).[4]

Bahtsul Masail NU dari segi historis operasionalitas, merupakan forum yang sangat dinamis, demokratis dan berwawasan luas. Dikatakan dinamis sebab persoalan (*masā'il*) yang digarap selalu mengikuti perkembangan (*trend*) hukum di masyarakat. Demokratis karena dalam forum tersebut tidak ada perbedaan antara kyai dan santri baik yang tua maupun yang muda. Pendapat siapapun yang paling kuat itulah yang diambil. Dikatakan berwawasan luas sebab dalam bahtsul masail tidak ada dominasi madzhab dan selalu sepakat dalam khilaf. Salah satu contoh untuk

[3] Hasan Mutawakkil Alallah, *NU Menjawab problematika Ummat,* (Surabaya: Khalista, 2010 M) 19.

[4] Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha' Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, (Surabaya: Khalista, 2010 M) vi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan fenomena “sepakat dalam khilaf” ini adalah mengenai status hukum bunga bank.

Dalam memutuskan masalah krusial ini tidak pernah ada kesepakatan. Ada yang mengatakan halal, haram dan syubhat. Itu terjadi sampai dengan muktamar NU tahun 1971 di Surabaya. Muktamar tersebut tidak mengambil sikap. Keputusannya masih tiga pendapat: halal, haram dan syubhat. Ini sebenarnya langkah antisipatif NU. Sebab ternyata setelah itu berkembang berbagai bank dan lembaga keuangan modern yang dikelola secara profesional. Orang pada akhirnya tidak bisa menghindar dari persoalan bank.

Nahdlatul Ulama Mojokerto sebagai organisasi keagamaan dan sosial didirikan oleh KH. Zainul Alim dan dibantu KH. Muhammad Nawawi,[5] bertugas mengabdi kepada umat Islam dan warga nahdliyyin di Mojokerto khususnya. Lembaga Bahtsul Masail (yang kemudian disingkat LBM) telah memberikan andil dan peran aktif dalam pengabdian tersebut. Sesuai dengan fungsinya LBM bertugas mengambil keputusan tentang hukum-hukum Islam yang dihadapi umat dan masyarakat Mojokerto. Forum ini biasanya diikuti oleh syuriyah dan ulama-ulama NU yang berada di luar

[5] KH Nawawi lahir di Dusun Les Padangan Desa Terusan Kabupaten Mojokerto pada tahun 1886. Beliau merupakan pendiri organisasi Nahdlatul Ulama’ (NU) pertama kali di Mojokerto, Jawa Timur pada tahun 1928. Beliau pernah menjadi santri Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur. Selain itu, pernah menjadi santri KH Qosim Siwalan Panji Buduran Sidoarjo, serta KH Sholeh Mojosari dan KH Kholil Kademangan Bangkalan. . Beliau komandan laskar Sabilillah dan pemimpin pergerakan melawan penjajah di wilayah pergerakannya yakni di Mojokerto, Kedamean Gresik, Sepanjang dan Sukodono Sidoarjo. gugur pada 22 Agustus 1946 dan dimakamkan di pemakaman umum Desa Losari Gedek Kabupaten Mojokerto. Dikutip dari Kisah Nasionalisme KH. Nawawi: Kerikil Mortar di Pertempuran Sepanjang, Kedurus dan Kletek., oleh Ahmad Baso.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

struktur organisasi termasuk para kyai pengasuh pesantren. Masalah-masalah yang dibahas umumnya merupakan kejadian sehari-hari yang dialami masyarakat (*masā'il dīniyyah wāqi'iyyah*) di samping masalah fiqh kontemporer (*masā'il dīniyyah mawḍū'iyyah*). Masalah-masalah itu setelah diinventarisasi oleh LBM, lalu dikonsultasikan kepada syuriyah, kemudian diadakan skala prioritas pembahasan, dan syuriah menugaskan LBM untuk membahasnya.

Forum bahtsul masail di beberapa tempat baik yang diselenggarakan oleh beberapa MWC dan PCNU kabupaten Mojokerto sejauh pengamatan penulis berlangsung dinamis[6], walaupun hanya berorientasi pada *qawl* (pernyataan verbal)[7] ulama dan *Shāfi'iyyah* sentris. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antar lain: *pertama*, para kyai peserta bahtsul masail lebih suka merujuk pada *aqwāl* (hasil interpretasi) ulama yang termaktub dalam kitab-kitab *Shāfiiyyah*. *Kedua*, mereka tidak melakukan qiyas yang notabene merupakan domain para mujtahid, sementara para kiai NU merasa belum berada di level mujtahid itu. Mereka hanya kemungkinan melakukan *ilhāq al-masā'il bi naẓā'irihā* (menetapkan hukum sesuatu berdasarkan hukum sesuatu yang sama yang telah ada). Dalam *ilhāq*, yang dijadikan *mulhaq bih* adalah *aqwāl al-ulamā'*, sementara *aqwāl al-ulamā'* itu sendiri adalah produk ijtihad para ulama yang terikat dengan ruang dan

[6] Termasuk bahtsul masail yang diselenggarakan beberapa kali oleh LBM PWNU selama penulis aktif mengikutinya sebagai ketua dan utusan LBM PCNU kabupaten Mojokerto (selama 2008-2013).

[7] Sebagian besar hasil keputusan bahtsul masail NU kabupaten Mojokerto dengan pendekatan *qawli*, ada beberapa yang dengan pendekatan *ilhaqi* dan *manhaji*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu. *Ketiga*, mereka tidak terbiasa melakukan telaah kitab kuning secara kontekstual. Ini berarti mereka memahami teks kitab klasik tidak dengan konteks sosio-historisnya. *Keempat,* beberapa ulama yang tergabung dalam bahtsul masail adalah pengikut *ṭarīqah*, mereka meyakini hasil rumusan ulama terdahulu yang terangkum dalam *kutub turāth* merupakan hasil ijtihad yang final dan bisa beradaptasi dengan perekembangan zaman. Beberapa hal inilah, menimbulkan kesan bahwa kyai dan intelektual NU yang tergabung dalam *bahtsul masail* adalah kaum tradisionalis,[8] mereka

[8] Penulis mengikuti tipologi pemikiran keislaman yang dibuat oleh sarjana Indonesia, Deliar Noer dalam karyanya "*Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*", beliau memetakannya menjadi dua tipologi "Islam Tradisionalis dan Islam Modernis", Islam modernis yang diwakili oleh Muhammadiyah, Persis, dan lain-lain, dan Islam tradisi yang diwakili NU dan organisasi semacamnya. walaupun menurut Azyumardi Azra distingsi yang selanjutnya menjadi dikotomi antara "Islam tradisionalis" dan "Islam modernis" tidak lagi terlalu tepat setelah sekian puluh tahun sejak kemunculan kajian-kajian tersebut, karena semakin tidak mampu menggambarkan dengan lebih akurat peta bumi perkembangan gerakan dan pemikiran Islam. Sehingga perlu adanya studi-studi yang secara kritis dan komprehensif menguji kembali distingsi dan tipologi "modernis-tradisionalis". Kalaupun tipologi itu digunakan, agaknya perlu dilakukan kualifikasi-kualifikasi tertentu; misalnya upaya telah dilakukan untuk merevisi tipologi tersebut. Fazlur Rahman, memperkenalkan distingsi dan tipologi semacam modernis (yang mencakup modernis klasik dan neo-modernis) dan revivalis (yang mencakup revivalis klasik dan neo-revivalis). Kerangka yang ditawarkan Fazlur Rahman bermanfaat untuk melihat kembali posisi NU dan Muhammadiyah. Menurutnya NU agaknya termasuk ke dalam tipologi "neo-modernis"; sementara Muhammadiyah kelihatannya termasuk ke dalam tipologi "revivalis"; ini setidaknya jika dilihat dari sudut wacana keagamaan kedua organisasi tersebut. Penjelasannya cukup sederhana. NU sebagaimana terlihat dalam beberapa referensi ternyata cukup adaptif dalam merespon tantangan intelektual dan institusional modern yang semakin banyak muncul dalam masa belakangan ini. misalnya dalam pembentukan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NU-Summa, di mana NU melakukan penafsiran ulang dan kontekstualisasi terhadap konsep-konsep fiqh klasik yang berkenaan dengan masalah "riba", dan juga tentang "kebolehan" bekerjasama (*ta'āwun*) dengan pihak non muslim dalam pengembangan sosial-ekonomi ummat Islam. Sedangkan Muhammadiyah, pada pihak lain, meski pada dasarnya juga sangat adaptif dan akomodatif terhadap institusi modern, tetapi pada tingkat ideologi keagamaan adalah revivalis, karena orientasi yang kuat dalam paham keagamaannya kepada Salafisme. Paradigma ideologis Muhammadiyah adalah kembali kepada Islam pristine, Islam yang "murni" sebagaimana dipraktekkan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. NU berdasarkan kerangka Rahman bahkan telah dilakukan Barton dalam studinya mengenai gerakan atau pemikiran neo-modernisme di Indonesia. Ia memasukkan Abdurrahman Wahid (gusdur) ke dalam kelompok pemikir kontemporer Islam Indonesia, yang secara khas, menurut Barton, mewakili fenomena neo-modernisme. Mereka, selain Abdurrahman Wahid, juga Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, dan Ahmad Wahib. Nakamura dalam beberapa artikelnya tidak menggunakan tipologi neo-modernis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berpegang teguh kepada Al-qur'an dan Sunnah, juga kepada produk-produk pemikiran (hasil ijtihad) para ulama yang dianggap unggul dan kokoh dalam berbagai bidang keilmuan. Pemikiran para ulama dalam berbagai bidang yang pada hakikatnya merupakan hasil penalaran terhadap Al-qur'an dan Sunnah tersebut harus dipegang teguh dan tidak boleh diubah. Dalam hal demikian Islam tradisionalis tidak lagi membedakan antara ajaran yang terdapat dalam Al-qur'an dan al-Sunnah dengan ajaran yang merupakan hasil pemahaman dan ijtihad terhadap keduanya.[9] Kaum tradisionalis tidak mau melakukan adaptasi dan kompromi termasuk menerima kemajuan IPTEK yang berasal dari barat karena mereka

---

untuk melihat NU. Secara eksplisit maupun implisit, tipologi yang digunakan adalah tipologi tradisionalis. Atau tipologi yang merupakan sedikit penyesuaian, persisnya tipologi tradisionalis radikalis. Seyyed Hossein Nasr melihat esensi Islam tradisionalis yang dianut NU mengacu kepada wahyu Allah dan pengungkapan atau pengejawantahan wahyu tersebut dalam kehidupan historis manusia di lingkungan tertentu. Karena itu tradisi mencakup tiga aspek penting. Pertama, *al-dīn* dalam pengertian seluas-luasnya, yang mencakup seluruh aspek agama dan ramifikasinya; kedua, *al-sunnah*, yang terbentuk dan berkembang berdasarkan model-model sakral, sehingga menjadi tradisi; dan ketiga, *silsilah*, yakni mata rantai yang menghubungkan setiap periode, episode, atau tahap kehidupan dan pemikiran dalam dunia tradisional kepada Yang Maha Awal. Abuddin Nata, dalam "Peta Keragaman Pemkiran Islam di Indonesia" telah menginventaris sedikitnya 12 tipologi pemikiran Islam di Indonesia. Yakni, Islam Fundamentalis, Teologis-Normatif, Eksklusif, Rasional, Transformatif, Aktual, Kontekstual, Esoteris, Tradisionalis, Modernis, Kultural, dan Inklusif-pluralis. Islam modernis menurutnya, diartikan sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan re-interpretasi terhadap pemahaman, pemikiran dan pendapat tentang masalah ke-Islaman yang dilakukan oleh pemikir terdahulu untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian yang diperbaharui adalah hasil pemikiran atau pendapat, dan bukan memperbaharui atau mengubah apa yang terdapat dalam Al-qur'an maupun al-Hadits, tetapi merubah atau memperbaharui hasil pemahaman terhadap *Al-qur'an* dan *al-Hadits*. Kaum modernis bersikap rasional, ilmiah serta sejalan dengan hukum-hukum Tuhan baik yang terdapat dalam al-Quran maupun alam raya. Islam modernis memiliki pemikiran yang dinamis, progressif dan mengalami penyesuaian dengan ilmu pengetahuan. Sedangkan Islam Fundamentalis menurut Khoiru Huda dalam ebook Islamica, yaitu kelompok Islam *al-thābit* (menurut istilah Adonis), kelompok Islam *Revivalis* (menurut istilah Charles Kurzmen dan Akbar S. Akhmad), atau kelompok Islam *Ideal-Totalistik* (menurut istilah Issa J. Boullata). Ciri-ciri kelompok aliran ini yaitu: tekstual, menyerukan keutamaan Islam pada periode Nabi dan *al-Khulafā' al-Rāshidīn* (*al-Salaf al-Ṣālih*), kembali ke sumber pokok Islam (*Al-qur'an* dan *al-Sunnah*), dan menolak unsur-unsur asing dari Barat.

[9] Abuddin Nata, *Peta Keberagaman Pemikiran Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001) 141-142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendapat bahwa barat adalah musuh Islam, maka baik politik maupun budayanya harus ditolak. Mereka berpandangan bahwa umat Islam tidak perlu mengikuti pemikiran barat, karena Islam adalah agama yang sempurna. Ulama tradisionalis lebih cenderung kembali ke masa lalu dalam usaha mencari jawaban Islam terhadap tantangan masa kini. Mereka yakin bentuk kehidupan umat Islam abad ketujuh sudah sempurna dan tidak perlu diubah dan disesuaikan dengan abad baru.[10] Gerakan Islam di Indonesia yang berada atau masih bertahan pada jalur tradisional di antaranya adalah Nahdhatul Ulama[11], tarikat *Qādiriyyah Naqshābandiyyah*, dan gerakan *Jamā'ah Tablīgh*, walaupun beberapa dari gerakan ini telah mengalami banyak perkembangan dan memiliki kecenderungan modernitas dalam aktivitasnya.[12]

Nahdhatul Ulama (NU) dipandang sebagai pelembagaan tradisi keagamaan yang sudah mengakar di wilayah Jawa. Kultur masyarakat Jawa sebagai tempat kelahiran NU memberikan banyak pengaruh pada karakteristik gerakan dakwah NU selanjutnya. Peleburan antara tradisi lokal dengan praktik keagamaan adalah salah satu karakteristik yang menjadi ciri khas masyarakat NU. Sejak awal berdirinya NU dipandang sebagai

---

[10] Mambaul Ngadimah, Ebook, *Potret Keberagaman Islam Indonesia*, (Ponorogo, 2008) 270

[11] Aspek yang mencerminkan hal tersebut terdapat dalam bidang hukum-hukum Islam karena NU yang merupakan penganut faham Ahlussunnah wal jama'ah menganut salah satu ajaran dari empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali). Dalam praktik keagamaan, para kyai merupakan penganut kuat madzhab Syafi'i, sedangkan dalam hal tauhid, menganut ajaran-ajaran Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Aspek lainnya yang juga mencirikan paham Ahlussunnah wal Jama'ah adalah dalam bidang tasawuf yang menganut dasar-dasar Imam Abu Qosim al-Junaidi.

[12] Intan Dwi Kemala, *Gerakan Islam Literatur*, (Jakarta : FIB UI, 2008) 39-40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

organisasi para ulama di daerah pedesaan yang secara agama bersifat kultural, secara intelektual sederhana, secara kultural bersifat sinkretik, dan secara politik bersifat oportunis.

NU pada persoalan-persoalan hukum, merupakan pengikut madzhab Imam Syafi'i yang dikenal sebagai "jalan tengah" dari dua Imam sebelumnya yakni Imam Hanafi dan Imam Maliki. Imam Hanafi adalah Imam yang terkenal dengan rasionalitasnya dalam menetapkan hukum-hukum, sedangkan Imam Maliki dikenal dengan tradisionalisnya.

NU sangat menekankan *taqlīd* dan cenderung tidak mendorong ijtihad. Sebab, berbahaya jika seseorang berpegang hanya kepada bacaan dan pengertiannya sendiri mengenai Al-qur'an dan Hadits. Bahkan tindakan seperti ini dapat membawa kepada dosa besar. Oleh sebab itulah kaum Muslimin ditekankan untuk mengikuti secara ketat ijtihad yang telah distandardisasikan dalam empat mazhab fiqh sunni, yakni Hanafi, Maliki, Syafi`i, dan Hanbali.

Kaum modernis dan reformis, sangat menekankan ijtihad dan menolak keras apa yang mereka sebut sebagai "taqlid buta", yakni mengikuti saja pendapat ulama masa lampau tanpa pemikiran kritis. Karena itu, jika kaum Muslimin ingin maju, mereka harus meninggalkan sikap taqlid buta dan sebaliknya, mengembangkan ijtihad; berpikir secara independen untuk menghasilkan rumusan-rumusan baru yang lebih sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan zaman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa hal tersebut di atas, menimbulkan kesan bahwa kyai dan intelektual NU yang tergabung dalam bahtsul masail hanya bermadzhab "*fī al-aqwāl*" (pendapat Ulama) dan tidak *"fī al-manhaj"* (dalam metodologis). Penulis yakin para kyai NU kabupaten Mojokerto sebenarnya memiliki kemampuan intelektual untuk melakukan *istinbāṭ* hukum langsung pada teks dasar (*istinbāṭ al-ahkām min maṣādirihā al-aṣliyyah*), dengan cara men-*taṭbīq*-kan (memberlakukan) secara dinamis *naṣ-naṣ fuqahā'* dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya.

Pendekatan *manhaji* (metodologis) sebagaimana yang dicita-citakan NU sejak tahun 1926-an hendaknya secara operasional digunakan dalam forum bahtsul masail untuk memperkuat pemahaman atas *masā'il furū'iyah* (masalah-masalah cabang dan tidak prinsip) yang ada pada kitab-kitab fiqh di samping juga menerapkan langkah *ilhāq/tanẓīr al-masā'il binaẓāirihā* (menetapkan hukum sesuatu berdasarkan hukum sesuatu yang sama yang telah ada). Di sinilah bahtsul masail akan berjalan sesuai dengan watak dan karakteristik fiqh yang fleksibel, dinamis, realistis, dan temporal, tidak kaku dan permanen.

Bagaimanapun rumusan fiqh yang dikontruksikan ratusan tahun yang lalu jelas tidak memadai untuk menjawab semua persoalan yang terjadi saat ini. Situasi sosial politik dan kebudayaan sudah sangat berbeda. Hukum sendiri harus berputar sesuai dengan ruang dan waktu. Jika hanya berlandaskan pada rumusan nash dan teks, bagaimana jika ada hukum yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ditemukan dalam rumusan tekstual fiqh?, apakah harus *mauqūf* (tidak terjawab)…?, sebagaimana yang pernah terjadi dalam bahtsul masail tentang status dan hukum wanita yang haidnya tidak teratur karena mengkonsumsi pil atau menggunakan alat kontrasepsi atau sejenisnya.[13] Padahal me*mauquf*kan persoalan hukum, tidak boleh bagi *fuqahā'* (termasuk kyai dan intelektual NU yang tergabung dalam bahtsul masail).

Gambaran di atas menjadi awal kegelisahan peneliti, sehingga termotivasi untuk memikirkan perlunya fiqh yang mengakomodir permasalahan-permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat. Untuk itu kita harus kembali ke *manhaj*, yakni mengambil metodologi yang dipakai ulama terdahulu, men-*taṭbīq*-kan (memberlakukan) secara dinamis *uṣūl al-fiqh*, *qawā'id* (kaidah-kaidah fiqih) dan *naṣ-naṣ fuqahā'* dalam kontek permasalahan yang dicari hukumnya.

Dalam merealisasikan harapan tersebut, peneliti melakukan penelitian pada aktifitas bahtsul masail yang berlangsung di beberapa MWC, PCNU dan pesantren di kabupaten Mojokerto dengan mengamati secara langsung; bagaimanakah permasalahan-permasalahan fiqh yang muncul dalam masyarakat dan mengkategorikannya, bagaimanakah metode *istinbāṭ* yang mereka gunakan dalam penetapan hukum atas problematika keagamaan masyarakat yang dihadapi, serta mengamati kecenderungan terhadap penggunaan metode istinbat hukum para aktivis (kyai dan

[13] Kegiatan bahtsul masail LBM MWC NU Kutorejo Mojokerto di LPIS "Bustanut Tarbiyah" Dsn. Ngudi – Ds. Pesanggrahan – Kec. Kutorejo – Kab. Mojokerto, Minggu, 7 Pebruari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

intelektual NU) dalam pelaksanaan bahtsul masail, sehingga menjadi karakteristik tersendiri bagi Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama kabupaten Mojokerto.

Oleh karenanya peneliti mengangkat judul: "Metode *Istinbāṭ* Hukum Lembaga Bahtsul Masail" (Studi Terhadap Hasil Keputusan Lembaga Bahtsul Masail NU Kabupaten Mojokerto Dalam Menjawab Problematika Keagamaan Masyarakat).

B. Batasan Masalah

Cakupan masalah yang muncul dalam penelitian tentang Lembaga Bahtsul Masail ini sangatlah banyak dan luas, di antaranya: kajian tentang metode ijtihad NU terhadap keputusan bahtsul masa'il pada masalah-masalah fiqh Kontemporer, metode ijtihad *ta'lily* (didasarkan pada *'illat*) dan *istislahy* (bertumpu pada asas kemaslahatan) yang menjadi pijakan NU dalam penetapan hukum, studi tentang pola pengkajian dan penetapan hukum Islam Lembaga Bahtsul Masa'il Syuriah NU, upaya Lembaga Bahtsul Masail NU dalam mengembangkan sistem bermadzhab secara *manhaji*. Untuk menghindari meluasnya pembahasan penelitian, maka perlu dilakukan pembatasan ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti. Adapun batasan penelitian ini terfokus pada upaya pengelompokan permasalahan-permasalahan fiqh yang muncul dalam masyarakat yang dibahas dalam bahtsul masail menjadi beberapa kategori, mengamati metode istinbat hukum Lembaga Bahtsul Masail dalam menetapkan hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keputusan bahtsul masail Nahdlatul Ulama kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu 2011 s/d 2018 dan menganalisanya, serta mengeksplorasi metode istinbat hukum para aktivis (kyai dan intelektual NU) dan menentukannya menjadi sebuah karakteristik lembaga bahtsul masail dalam memutuskan dan menetapkan hukum.

C. Rumusan Masalah

Sebagaimana digambarkan pada uraian terdahulu tentang keberlangsungan forum Bahtsul Masail di beberapa MWC dan pesantren di kabupaten Mojokerto yang dinilai kurang dinamis, beku (*jumūd*), hanya berorientasi pada *qawl* (pernyataan verbal) Ulama, dan belum adanya keberanian para kyai dan intelektual NU yang tergabung dalam bahtsul masail untuk melakukan qiyas yang merupakan domain para mujtahid dan mereka merasa belum berada pada level itu, serta mereka tidak terbiasa melakukan telaah kitab kuning secara kontekstual, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kategori permasalahan-permasalahan fiqh yang muncul dalam masyarakat kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimanakah metode istinbāṭ hukum lembaga batsul masail Nahdlatul Ulama kabupaten Mojokerto dalam menjawab permasalahan-permasalahan fiqh yang muncul dalam masyarakat?
3. Bagaimanakah karakteristik bahtsul masail yang diselenggarakan oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama kabupaten Mojokerto?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mempunyai beberapa tujuan. Adapun tujuan-tujuan itu adalah:

1. Untuk mendeskripsikan kategori permasalahan-permasalahan fiqh yang terjadi dalam masyarakat kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mendeskripsikan metode istinbāṭ hukum lembaga bahtsul masail Nahdlatul Ulama kabupaten Mojokerto dalam menjawab permasalahan-permasalahan fiqh yang muncul dalam masyarakat.
3. Untuk menemukan karakteristik bahtsul masail yang diselenggarakan oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama kabupaten Mojokerto.

E. Kegunaan Penelitian

Sedangkan signifikansi penelitian dan studi ini diharapkan berguna :

1. Dalam tataran teoritis penelitian ini berguna bagi praktisi-praktisi hukum Islam, khususnya para kyai yang terlibat dalam bahtsul masail dan intelektual NU lainnya sebagai kajian obyektif terhadap hukum fiqih.
2. Menjadi sumbangsih pemikiran dalam kaitannya metode yang efektif dalam bahtsul masail untuk menggali dan memutuskan hukum terhadap masalah yang terjadi di masyarakat.
3. Dalam tataran praktis bermanfaat bagi lembaga bahtsul masail sebagai masukan dan bahan pertimbangan untuk mengadakan evaluasi, kemudian membangun tradisi *bahtsu* yang dinamis, sesuai dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karakteristik fiqh yang fleksibel, realistis, dan temporal, tidak kaku dan permanen.

F. Kerangka Teoritik

1. Kajian Tentang Metode Istinbat Hukum

Persoalan umat semakin berkembang dan tidak mungkin semuanya terakomodasi dalam Al-qur'an dan al-Sunnah, maka Rasulullah telah memberikan contoh melalui pembicaraannya dengan Mu'az bin Jabal, bahwa penyelesaian persoalan umat itu berpedoman kepada Al-qur'an atau al-Sunnah, kalau tidak ditemukan solusinya maka diselesaikan melalui ijtihad yang tentu saja tidak boleh bertentangan dengan kedua sumber utama tersebut.

Para sahabat dan tabi'in berijtihad di saat mereka tidak menemukan dalil dari Al-qur'an atau Sunnah yang secara tegas mengatur suatu persoalan. Ijtihad para sahabat dan tabi'in inilah kemudian melahirkan fiqih. Perbedaan kuantitas hadits oleh kalangan tabi'in, ditambah pula perbedaan mereka dalam menetapkan standar kualitas hadits serta situasi dan kondisi daerah yang berbeda menyebabkan terjadinya perbedaan dalam hasil ijtihad mereka. Perbedaan hasil ijtihad juga ditunjang oleh kadar penggunaan nalar (rasio), yang pada akhirnya menyebabkan timbulnya beberapa mazhab dalam fiqih. Penyelesaian persoalan umat dengan cara memahami,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggali dan merumuskan dari teks-teks suci Al-qur'an dan Sunnah menjadi keniscayaan.

a. Pengertian *Istinbāṭ* Hukum

Kata *istinbāṭ* berasal dari bentuk *thulāthiy* (نبط- ينبط- نبطا- نبوطا- الماء) yang berarti air terbit dan keluar dari dalam tanah yang kali pertama digali.[14] Secara bahasa (etimologi) kata *istinbāṭ* berasal dari kata "استنبط- يستنبط- استنباط" yang berarti menemukan, melahirkan, menciptakan, memperlihatkan. Secara terminologi *istinbāṭ* diartikan mengeluarkan dari sumbernya melalui ijtihad untuk menetapkan hukum.[15] Seperti: إستنبط الفقيه : إستخرج الفقه الباطن بفهمه واجتهاده....[16]. Adapun yang dimaksud dengan *istinbāṭ* bila dihubungkan dengan fiqh/hukum seperti dijelaskan oleh al-Qarafi: الإستنباط في الفقه إستخراج المجتهد المعاني والأحكام الشرعية من النصوص ومصادر الأدلة الأخرى.[17], istinbat dalam kaitannya dengan fiqh adalah upaya seorang mujtahid untuk mengeluarkan dan menemukan makna dan hukum-hukum syar'i dari dalil-dalil nas Al-qur'an dan al-hadith dan sumber dalil yang lain.

---

[14] Muhammad ibn Ya'qub ibn Muhammad ibn Ibrahim Abu al-Ṭāhir Majduddin al-Fairuzabadi, *al-Qāmūs al-Muhīṭ*, (Muassasah al-Risalah, 2005), 1139.

[15] Ibid, *al-Qāmūs al-Muhīṭ*, (Muassasah al-Risalah, 2005), 1139. Lihat juga Abu Abdirrahman Imam al-Khalil bin Ahmad al-Farāhīdi al-Azadi al-Yahmadi, *Kitāb al-Ain*, *Tahqīq*: Mahdi al-Makhzumi dan Ibrahim al-Samira'i, (Dār al-Maktabah al-Hilal, 2003) 184.

[16] Muhammad bin Mukrim ibn Ali, Abu al-Faḍli Jamal al-din ibn al-Manẓūr, *Lisān al-Arab*, (Dār Ṣādir, Berut, 2010), jilid 13: 438. Lihat juga Ibrahim Anis, Abdul Halim Muntasir, Atiyah al-Sawalihi, dan Muhammad Khalafullah Ahmad, *al-Mu'jam al-Wasit*, (Majma'al lughah al-Arabiyah, 2004), 894. Louis Ma'luf al-Yassu'i dan Bernard Tottel al-Yassu'I, *al-Munjid fī al-lughah wa al-A'lām*, (Beirut, Dar al-Masyriq) 786.

[17] Ahmad bin Idris al-Qarafi, *Anwār al-Burūq fī Anwā'i al-furūq*, *Hāshiyah bin Husain al-makkiy al-malikiy*, (Alam al-kutub, tt) Juz 2, 128-129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Definisi ini mirip dengan istilah istinbāṭ menurut uṣul fiqh: في علم أصول الفقه الإستنباط هو إستنتاج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية وإستخراجها وإستخلاصها منها[18], menemukan dan menghasilkan hukum-hukum syar'i dari dalil-dalil yang terperinci. Muhammad Bin Ali al-fayyumi ahli bahasa arab dan fiqh, adalah upaya menggali dan mengeluarkan hukum dari sumber-sumbernya (Al-quran dan Al-sunnah) dengan jalan ijtihad untuk mencari hukum syara' yang bersifat *zhanni*.[19]

Makna *istibāṭ* ini hampir sama dengan *ijtihad*, mengambil hukum secara langsung dari sumber aslinya, Al-qur'an dan Hadits. Oleh karenanya istilah *istinbāṭ* ini dalam bahtsul masail tidak banyak digunakan. Jadi yang dimaksud peneliti adalah istilah *istinbāṭ* yang dikenal dalam bahtsul masail NU, yakni penggalian hukum yang dilakukan dengan men-*tathbiq*-kan secara dinamis *naṣ-naṣ fuqahā*.

Upaya *istinbāṭ* tidak akan membuahkan hasil yang memadahi tanpa pendekatan yang tepat. Pendekatan ini terkait dengan sumber hukum. Menurut Ali Hasaballah sebagaimana dikutip oleh Nasrun Rusli,[20] ada dua cara pendekatan yang dikembangkan oleh pakar hukum

---

[18] Badruddin Bin Muhammad Bahadir al-Zarkasyi, *al-Bahru al-Muhīṭ* dalam muqaddimah, (Dār alkutbi, 1994) Juz 1, 37-38.
[19] Effendi,Satria.2009. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group. hl 178. Lihat pula Haidar Baqir dan Syafiq Basri, *Ijtihad dalam sorotan*, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1996) 25
[20] Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Asy-Syaukani, Relevansinya bagi pembaharuan hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) 110-118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam melakukan istinbāṭ, yakni melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan melalui pengenalan maksud syari'ah (مقاصد الشريعة).

Penulis dalam hal ini, memaparkan kedua pendekatan istinbat tersebut, walaupun yang dijadikan landasan teori dalam pembahasan berikutnya adalah istinbāṭ dengan pendekatan tata bahasa. Di samping itu, penulis ingin menjadikan istinbat hukum dengan pendekatan Maqasid sebagai alternative dan solusi atas ke-*jumūd*-an bahtsul masail di LBM NU kabupaten Mojokerto yang dinilai kurang dinamis.

1). Kontruksi Hukum Dengan Pendekatan Tata Bahasa

Kontruksi hukum dengan analisa tata bahasa adalah memahami bahasa teks yang tampak. Teks ini dapat diucapkan, ditulis dan dipahami pengertiannya.[21] Objek utama yang di bahas dalam kajian teks ini adalah ayat-ayat Al-qur'an dan sunnah Nabi yang termaktub dalam kitab-kitab hadits. Untuk memahami teks-teks dua sumber yang berbahasa arab tersebut para Ulama telah menyusun semacam 'semantik' yang akan digunakan dalam praktik penalaran fiqh. Untuk itu para ahlinya telah membuat beberapa ketegori lafal atau redaksi diantanya yang sangat penting adalah masalah *amar, nahi* dan *takhyir*. Pembahasan lafal dari segi umum dan khusus, pembahasan lafal dari segi mutlak dan muqayyad, pembahasan lafal dari segi mantuk dan mafhum.

[21] Hamka Haq, Falsafah Ushul Fiqh, (Ujung Pandang, Yyasan al-Ahkam, 1998) 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari segi cakupannya, ada pernyataan hukum yang sifatnya umum dan ada juga yang bersifat khusus. Sasaran hukum dalam pernyataan hukum yang umum adalah tanpa pengecualian. Misalnya: ungkapan ”barang siapa” berarti menunjuk kepada siapapun, jenis kelamin apapun, generasi manapun tanpa pembatasan. Sedangkan pernyataan khusus mengandung pengertian tunggal atau beberapa pengertian yang terbatas. Pakar studi hukum Islam sepakat bahwa pernyatan hukum yang khusus bersifat final dan pasti, sehingga menutup pengertian yang lain. Namun demikian, pernyatan hukum yang khusus ini ada yang bersifat mutlak tanpa pembatasan dan ada pula yang dibatasi.[22]

Suatu pernyataan dianggap mutlak jika tidak ada pembatasan sama sekali yang mempersempit keluasan pengertiannya. Sebaliknya pernyataan dianggap terbatas karena ada pembatasan yang mempersempit pengertiannya.

Dalam Al-qur’an banyak terjadi pengulangan kata, baik yang mutlak maupun yang terbatas. Pakar studi hukum Islam membuat rumusan tentang hal ini. Jika kata yang diulang bermakna mutlak semua, maka maknanya juga mutlak dan sebaliknya. Akan tetapi jika pengulangan itu membuat kata yang mutlak dan terbatas dalam tempat yang berlainan, maka terdapat dua kemungkinan makna. *Pertama*, kata

[22] Effendi,Satria. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2005) 205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mutlak diberi pembatasan sesuai kata yang terbatas. Kedua, kata yang mutlak tidak dibatasi sebagaimana kata yang terbatas, jika masing-masing berbeda dalam hukum dan sebabnya.

Selain mutlak dan terbatas, pernyatan hukum yang umum dan khusus, juga disertai perintah dan larangan. Perintah adalah tuntutan untuk melakukan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah. Larangan adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah tingkatannya.[23]

2). Kontruksi Hukum Dengan Pendekatan *Maqāsid Sharī'ah*

Kompleksitas ranah historis manusia dengan berbagai wacana, model, dan aktivitas yang mengitarinya yang setiap hari berubah dan bahkan tampak rumit seakan tidak tertampung dalam nilai dan norma hukum yang ada dalam *nash* (Al-qur'an - al-Sunnah) saat ini. *Tatanāhā al-nuṣūṣ walā tatanāhā al-waqā'i* (wahyu sudah tidak lagi diturunkan, sementara peristiwa/kebutuhan hukum terus berkembang) sehingga mengharuskan para mujtahid (cendikiawan/pakar hukum) untuk dapat melakukan ijtihad dalam rangka pembaharuan (reformasi) terhadap hukum itu sendiri.

[23] Ibid, 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemikiran fiqih Islam secara preskriptif ini bertujuan menggali norma-norma Islam yang dipandang ideal untuk dapat mengatur tingkah laku manusia dan menata kehidupan bermasyarakat yang baik.[24]

Menurut istilah Harold J. Berman,[25] perubahan hukum menunjukan pada pengertian bahwa hukum selalu mengalami pertumbuhan. Dalam pertumbuhannya, hukum berinteraksi dengan sektor-sektor kehidupan sosial manusia secara sistemik.[26]

Hammadi al-Ubaydi menyatakan bahwa orang yang pertama membahas masalah *al-maqāṣid al-sharī'ah* adalah salah seorang tabi'in yang bernama Ibrahim an-Nakhaiy (w.91 H)[27]. Hammadi al-Ubaydi menjelaskan bahwa Ibrahim an-Nakhaiy pernah berkata "bahwa sesungguhnya hukum-hukum Allah memiliki tujuan, hikmah, dan

---

[24] Yusdani, "*Fiqh Dan Hak Asasi Manusia: Prespektif Dialogis-Preskriptif- Akomodatif*".(al-Mawarid, Jurnal Hukum Islam. Vol. XV, No. 1, Februari- Agustus 2014. Yogyakarta: FIAI UII) 18.

[25] Harold J Berman, *Law And Revolution: The Formation Of The Western Legal Tradition*, (Cambridge: Harvad University Press), 1983, hlm. 9.

[26] Mashudi, *Legal Responbility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) 2.

[27] Nama lengkap beliau adalah Abu Imran Ibrohim bin Yazid bin Qois ibnu Al-Aswad bin Amru bin Rubaj'ah bin Dzukhl bin Sa'ad bin Malik bin Nakha' al-Nakha'iy al-Yamani al-Kufy, Be;iau seorang faqih dari Irak. Dia lahir 39 H dan wafat 91 H. Dia ter masuk tabiin yang banyak riwayat haditsnya, Imam di bidang fiqh, segolongan ulama di masa tabi'in meriwayatkan darinya, antara lain: al-Sabi'i, Habib bin Abi Tsabit, Sammak bin Harb, al-Hakam, al-A'mash, Ibn 'Aun, Hammad ibn Abi Sulaiman (guru Abu Hanifah). www.islamstory.com, *Qiṣṣat al-Islām: Ahamm Muqtaṭafāt al-Maqāl min sīrat al-Tābi'īn.* 05-08-2019, 11:00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mashlahat untuk manusia".[28] Sebagai landasan pemikirannya, Ibrahim mengunakan sejumlah ayat, di antaranya adalah Q.S. al-Baqarah: 222.[29]

Sebagian ulama dan sejarawan menyebutkan bahwa dalam perkembangan hukum Islam muncul ulama yang mencurahkan perhatiannya pada kajian tentang *al-maqāṣd al-sharī'ah*, seperti Abu Mansur al-Maturidi (w.333 H) yang menulis "*Ma'khadh al-Sharī'ah*, Abu Bakar al-Abhari (w.375 H.) dengan karyanya seperti "*Mas'alah al-Jawāb wa ad-Dalā'il wa al 'Illah*", Al-Baqilani (w.403 H.) yang menulis tentang " *al-Taqrīb wa al-Irsyād fī Tartīb Thurūq al-Ijtihād*".

Setelah itu, semakin bertambah ulama yang membahas tentang tema ini, di antaranya: Al-Juwaini (w.478 H.)[30]. Ia menganggap *al-Maqāṣid* sama dengan *al-Maṣāliḥ* (maslahat-maslahat). Al-Juwaynī termasuk ulama pertama yang memulai pengembangan teori *al-Maqāṣid*. al-Juwaynī menggunakan istilah *al-Maqāṣid* dan *al-Maṣāliḥ*

---

[28] Hammadi al-Ubaydi, *al-Shātibiy wa Maqāṣid al-Shari'ah*, (Mansyurat Kulliyat al-Da'wah al-Islamiyyah wa Lajnah al-Huffadz 'ala al-Turas al-Islami, 1992) 134-135.

[29] Ayat tersebut memuat larangan hubungan intim suami –isteri pada saat haid. Secara implisit larangan tersebut memiliki tujuan dan hikmah, bahwa hubungan seks saat haid dapat merugikan kesehatan kedua pasangan. Beberapa resiko kesehatan yang bisa terjadi akibat melakukan seks saat haid antara lain: Penyakit menular seksual (HIV dan hepatitis), Resiko infeksi (infeksi saluran kencing, sperma dan prostat pada pria), *endometriosis* (rasa nyeri saat haid), *Sudden Death* (mati mendadak disebabkan adanya penyumbatan pembuluh darah ketika emboli masuk ke dalamnya. Beberapa resiko di atas sebagaimana yang dikatakan Laura Berman, PhD seorang pakar seks dan terapis dari Feinberg school of medicine, Northwestern University, Cicago seperti yang dilansir wahdah.or.id. official website wahdah islamiyah.

[30] Nama lengkap beliau Abu al-Ma'āli Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad bin Abdillah bin Hayyuwiyah al-Juwaini al-Nisaburi. Bila didapati dalam kitab fiqh Madzhab Syafi'i kata al-Imam (الامام), maka yang dimaksud adalah Ḍiyā'uddin Abdul Malik al-Juwaini. Baliau lebih dikenal dengan sebutan *Imam al-Haramain*. Di antara kitab-kitab karya beliau adalah *Nihāyat al-Maṭlab fī Dirāyat al-Madhhab, al-Talkhīs fī Uṣūl al-Fiqh, Al-Shāmil fī Uṣūl al-Fiqh, al-Irsyād ilā Qawāṭi' al-Adillah fī Uṣūl al-'Itiqād.* Beliau merupakan ulama besar mazhab Syafi'i abad ke 5. Beliau wafat tahun 478. Sumber: https://islam.nu.or.id/post/read/118905/imam-haramain-al-juwaini--sanad-keilmuan-dan-karya-karyanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-'āmmah (maslahat-maslahat publik) sebagai sinonim. Kemudian al-Ghazali (w.505 H.)[31], menyusul dengan membangun atas karya al-Juwaynī dengan mengklasifikasi *al-Maqāṣid* dan memasukkannya di bawah kategori al-*Maṣāliḥ al-Mursalah* (Kemaslahatan lepas, atau maslahat-maslahat yang tidak disebut secara langsung dalam teks suci). Kemudian al-Razi (w.606 H.)[32] dan al-Amidi (w.631 H.)[33], mereka berdua mengikuti al-Ghazālī dalam peristilahannya. Kemudian al-Qarafi (w.684 H.)[34], yang meletakkan kaidah: *"Lā yu'tabaru al-Syar'u min al-Maqāṣid illā mā ta'allaqa bihi garaḍun ṣaḥiḥun, muḥaṣilun li-maṣlaḥatin aw dari'un li-mafsadatin"* yang artinya: "Suatu bagian dari

[31] Nama lengkap al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin ahmad al-Thusi al-Ghazali, diberi gelar *Hujjat al-Islam*. Beliau lahir di Ghazaleh suatu desa dekat Thus, bagian dari kota Khurasan, Iran pada tahun 450 H. Sepanjang hidupnya dia telah menulis lebih dari 70 karya tentang teologi, yurisprudensi, mistisisme, dan filsafat Islam. Karya-karya al-beliau yang dianggap penting di antaranya adalah *al-Munqidh min al-Ḍalāl, Tahāfut al-Falāsifah dan Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*. Lihat Zainal Abidin Ahmad, *Riwayat Hidup Imam al-Ghazali* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 28. M. Syarif, *Para Filosof Muslim*, (Bandung: Mizan 1993), 220. Al-Subki, *Ṭabaqāt, al-Shāfi'iyyāt al-Kubrā*, Juz IV, (Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi, t.th.), 102. Baca selanjutnya: https://ganaislamika.com/al-ghazali-4-karya-karya-dan-akhir-hayatnya

[32] Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin al-Husain al-Taymi al-Bakri al-Tabaristani. Karya-karyanya meliputi banyak bidang, antara lain: kedokteran, astronomi, matematika, logika, fisika, kalam, fikih, ushul fikih, hingga tafsir Alquran. Dalam disiplin fikih dan ushul fikih, ia telah menulis buku *al-Mahṣūl fī al-Fiqh dan al-Mahṣūl fī Uṣūl Fiqh*.

[33] Nama lengkap imam Al-Amidi yaitu Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Salim dan lebih dikenal dengan sebutan Saifuddin Al-Amidi. Ia lahir pada tahun 551 H/1156 M di daerah Amid. Ia dikenal pakar fikih dan usul fikih serta ahli kalam (teolog). Ia memulai belajar dan menghafal kitab *Al-Hidayah* yang beraliran madzhab Imam Hambali. Setelah itu, ia beralih mengikuti madzhab syafi'i.Beliau memiliki beberapa karangan diantaranya adalah kitab *Al-Abkār fī Uṣūliddin, Al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām* kitab tentang usul fikih. Imam al-Amidi meninggal dunia pada hari selasa 4 shafar pada tahun 631 H. Baca *https://masholeh.com/ situs keislaman yang moderat aktual, https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sayf_al-Din_al-Amidi.*

[34] Nama lengkapnya adalah Imam Syihabuddin al-Qarafi al-Mishry, seorang ulama madzab Maliki pada abad ketujuh (w. 684 H/1254 M) memperkenalkan 4 tipologi dalam memahami Sunnah Nabi, yaitu posisi Nabi sebagai: (1) sebagai seorang Nabi, (2) sebagai seorang mufti, (3) sebagai seorang hakim, dan (4) sebagai seorang kepala negara. Di antara kitab karyanya*:Anwār al-Burūq Fī Anwā'i al-Furūq, Hāshiyah ibn Husain al-Makki al-Mālikī.* Lihat https://en.wikipedia.org/wiki/Shihāb_al-Dīn_al-Qarafi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islami, yang didasari oleh syariat, tidak dapat dianggap sebagai *al-Maqāṣid*, kecuali tersangkut padanya sebuah sasaran yang sah, yang dapat meraih kemaslahatan atau mencegah kemafsadatan". Kutipan itu bermakna bahwa tujuan apapun yang termasuk *al-Maqāṣid*, tidak lain, adalah untuk menyatakan kemaslahatan manusia (mendatangkan manfaat dan/atau mencegah mafsadat).

Najmuddin al-Thufi (w.716 H.)[35], mendefinisikan *al-Maṣāliḥ* sebagai sebab yang mengantarkan kepada maksud *al-Syāri'*, pembuat arahan-arahan syariat, Allah swt dan RasulNya saw. Ibn Qayyim

[35] Nama lengkapnya adalah Abu al-Rabi' Sulaiman Ibn Abdu al-Qawiy ibn Abdul Karim ibn Sa'id. al-Thufi al-sarsari al- Baghdadi al-Hanbali. al-Thufi menggagas konsep maslahah yang liberal dan kontroversial. Karena ia meletakkan *maslahah* di atas teks wahyu. Konsep *taqdīm al-maslahah 'alā al-naṣ wa al-ijmā',* memprioritaskan maslahah atas teks (Al-Quran dan Sunnah) juga ijmak adalah puncak pemikaran al-Thufi. Di antara karya-karyanta: *Mukhtasar al-Rauḍah al-Qadamiyyah, Ma'ārij al-Uṣūl ilā 'ilm al-Uṣūl, al-Riyāḍ al-Nawādir fī al-Ashbāh wa an-Naẓāir, Syarh Mukhtaṣar al-Tibrizi, al-isyārāt al-Ilāhiyyah ilā al-Mabāḥith al-Uṣūliyyah, dan Iddah al-Bayān 'an Ma'ānī Umm al-Qur'ān.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Jauziyyah (w.751 H.),[36] al-Subki (756 H)[37], al-Asnawi (772 H)[38], dan al-Suyuṭi (911 H)[39].

Upaya ijtihad hukum menuju tujuan hukum, tidak bisa lepas dari aspek *Maqāṣid al-Sharī'ah*[40] yang telah dipopulerkan oleh al-Shatibi (w.790 H).[41] Karena dengan konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah,* hukum Islam mampu beradaptasi dengan perubahan sosial.

Di antara para pemikir muslim kontemporer yang menaruh concern pada reformasi atau perubahan hukum dalam kerangka berfikir filsafat hukum Islam (*uṣūl al-fiqh*) adalah Jasser Auda, yang

---

[36] Ahmad Raysuni, *Nadhariyyat al-Maqashid 'inda al-Imam asy-Syatibiy*, (Beirut: al Muassasah al-Jami'iyyah li ad-Dirasat wa an-Nasyr wa at-Tauzi, 1992), 32.

[37] Nama lengkapnya: A'li Bin A'bdul Kafi Bin A'di Bin Tamam as-Subki Al-Ansari Al-Khazraji Abul Hasan, Ia dilahirkan pada 1 shafar 683 H di kota Sabak Al-Abid. Ia belajar pendidikan dasar agama pada ayahnya, kemudian pindah ke Kairo. ulama ahli bidang hadis, tafsir, *ushul fiqh*, nahwu, shorof, dan sastra dari madzhab Syafi'i. Ia diangkat oleh pemerintah Nashiriyah untuk menjadi Hakim Qaḍi di Damaskus. Ia pengajar di beberapa perguruan tinggi disana. Ia menjabat sebagai hakim ketua selama tujuh belas tahun, kemudian kembali ke Kairo dan meninggal di sana pada 3 Jumadil Akhir 756 H. Lihat *Ṭabaqāt al-Syāfi'iyyah al-Kubrā*, X,139-239 dan 399, *Shadharat al-Dhahab*, VI,180, *Bughyatul Wu'āz*, 342, *Husnul Muhāḍarah*, I, 321, dan *al-Durrar al-Kāminah*, III, 134. Di antara karya-karyanya: *Takmilah Sharah al-Muhadhdhab dan al Ibtihāj Sharh* kitab *Minhāj* karangan Imam Al-Nawawi. Lihat *Ṭabaqāt al-Syāfi'iyyah al-Kubra*, 2, 244.

[38] Nama lengkapnya Abdurahim Ibn Hasan Ibn Ali Ibn Ibrahim al-Amuwi, dikenal dengan Jamaluddin Abu Muhammad al-Isnawi. Lahir di Isna, sebuah kota subur didataran tinggi pinggir kiri sungai Nil. Ia lebih masyhur disebut dengan al-Isnawi, nama nisbatnya terhadap kota kelahirannya. Karya-karyanya: al-Tamhid fi Takhrij al-furu' ala al-Usul, sharah Minhaj al-Talibin, dan kitab al-Muhimmat, kitab yang mengkritisi kitab al-Raudah karya Imam Nawawi.

[39] Nama lengkapnya Abdurrahman bin Kamaluddin Abu Bakr bin Muhammad bin Sabiquddin, Jalaluddin al-Misri as-Suyuthi al-Shafi'i al-Ash'ari; lahir 849 H - wafat 911 H adalah seorang ulama dan cendekiawan muslim yang hidup pada abad ke-15 di Kairo, Mesir . *al-Ashbāh wa al-Naẓāir* merupakan karya imam al-Suyuti di bidang uṣūl al-fiqh. Lihat *Tadrīb al-Rāwī Fī Sharḥ Taqrīb al-Nawawy karya as-Suyuṭy*

[40] Menurut al-Syatibi *maqāṣid al-sharī'ah* adalah pokok pemikiran hukum Islam yang di dalamnya terdapat konsep maslahat sebagai tujuan Tuhan selaku pembuat syari'at. Aplikasi maslahat terfokus kepada tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan atau menolak bahaya kemadaratan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta di dunia dan akhirat.

[41] Nama lengkapnya Ibrahim bin Musa bin Muhammad Abu Ishaq al-Gharnati al- Syatibi. Pemikiran- pemikiran ijtihad al-Syatibi ini dapat dijumpai dalam kitab *al- Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, sebagai sebuah karya monumental yang di dalamnya memuat berbagai pemikiran hukum al-Syatibi terutama tentang konsep mashlahat untuk menerangkan makna tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'at*) dengan memakai penalaran logis dan filosofis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan maqashid syari'ah sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berfikir dan pisau analisisnya.[42] *al-Maqāṣid* adalah sistem sekaligus pendekatan yang dinamis dalam hukum Islam.[43]

Kata *al-maqāṣid al-sharī'ah*, dalam pandangan Ahmad Raysuni, pada mulanya digunakan oleh al-Hakim.[44] Gagasannya tentang al-*maqāṣid al-sharī'ah* dituangkan ke dalam karyan-karyanya: *al-ṣalāh wa maqāṣiduh, al-Hajj wa Asrāruh, al-'Illah, 'ilal al-sharī'ah, 'ilal al-'Ubūdiyyah,* dan *al-Furūq.* Istilah *al-Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari kata bahasa Arab '*maqṣid*', yang menunjuk kepada tujuan, sasaran, hal yang diminati, atau tujuan akhir. Adapun dalam ilmu Syariat, *al–Maqāṣid* dapat menunjukkan beberapa makna seperti *al-hadaf* (tujuan), *al-garaḍ* (sasaran), *almaṭlūb* (hal yang diminati), ataupun *al-ghāyah* (tujuan akhir) dari hukum Islam.[45]

Maqāṣid al-sharī'ah berarti tujuan Allah dan Rasulnya dalam merumuskan hukum-hukum islam . tujuan itu dapat di telusuri dalam ayat-ayat Al-qur'an dan al-sunnah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

---

[42] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah Pendekatan Sistem*, (Terj. Rosidin dan Ali 'Abd El-Mun'im), (Bandung: Mizan , 2015) 11.
[43] Asmuni, dkk. *Pribumisasi Hukum Islam (Pembacaan Kontemporer Hukum Islam Di Indonesia).* (Yogyakarta: PPS FIAI UII, 2012) 10.
[44] Yang dimaksud adalah al-Hakim al-Tirmidzi, nama lengkap Abu Abdillah Muhammad Ibn 'Ali Ibn Hasan Ibn Bashir al-Hakim al-Tirmidzi al-Hanafi. Dia adalah ahli hukum (*faqīh*) Sunni dan tradisi Kharasan (*muhaddits*). Dia juga dikenal sebagai salah satu penulis besar tasawuf awal. (w. 285 H/869 M). https://en.wikipedia.org.wiki,
[45] Jasser Auda, *Maqashid Syari'ah Untuk Pemula* (terj. Ali Abdoel Moe'in), (t.t). hlm. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengetahuan tentang *maqāṣid sharī'ah* adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami ayat-ayat al-quran dan al-sunnah, menyelesaika dalil-dalil yang bertentangan dan menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung dalam al-quran dan sunnah secara kajian kebahasaan.

Metode *istinbāṭh* seperti , *Qiyas, Istihsan,Maslahah Mursalah, Istishab, Urf, dan Sadd al-Dzari'ah* adalah metode-metode pengembangan hukum islam yang didasarkan atas *maqasid syari'ah*. Contoh: Tentang kasus diharamkanya khamr (Q.S. al-Ma'idah:90) dari hasil penelitian Ulama ditemukan bahwa *maqāṣid sharī'ah* dari diharamkanya khamr[46] adalah karena sifat memabukkan yang bisa merusak akal pikiran. Dengan demikian alasan logis dari haramnya *khamr* adalah sifat memabukkanya. *Khamr* sendiri hanyalah salah satu contoh dari yang memabukkan.[47]

Dari sini dapat dikembangkan dengan metode analogi (qiyas) bahwa setiap yang sifatnya memabukkan adalah juga haram. Dengan

---

[46] Terminologi *khamr* menurut Abu Hanifah adalah jenis minuman yang dibuat dari perasan anggur sesudah dimasak hingga mendidih serta mengeluarkan buih dan kemudian bersih kembali. Sari dari buih itulah yang memabukkan. Adapun jenis minuman yang tidak terbuat dari anggur tidak disebut *khamr* melainkan dikategorikan *nabidh.* Ini juga pendapat ulama kufah, al-Nakha'i, al-Tsauri, dan Abu laila. Lihat Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Salim Saifuddin Al-Amidi *Al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām,* 193.

[47] Menurut al-Alusi ada juga zat (minuman) yang tidak terbuat dari perasan anggur, tapi juga dapat menutupi dan menghilangkan kesadaran akal, zat ini juga haram. Menurut al-Alusi *Khamr* adalah: المسكر المتخذ من عصير العنب أو كل ما يخامر العقل ويغطيه من الأشربة . Lihat al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani* dalam CD ROOM maktabah syamilah, (Pustaka Ridwan: 2008), 123, dan Muhammad Ali al-Baar *الخمر بين الطب و الفقه* , al-Dar al-Sa'udiyyah, Jeddah, cetakan ke 6, 1404 H.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian (*illat*) hukum dalam suatu ayat atau hadits bila diketahui, maka terhadapnya dapat dilakukan qiyas (analogi), artinya qiyas hanya bisa dilakukan apabila ada ayat atau hadits yang secara khusus dapat dijadikan tempat meng-qiyas-kanya *al-maqīs alaih* .

Jika tidak ada ayat atau hadits secara khusus yang akan dijadikan *al-maqis-alaih*, tetapi termasuk kedalam tujuan syari'at secara umum seperti memelihara sekurangnya salah satu kebutuhan diatas tadi dalam hal ini dilakukan metode *maṣlahah-mursalah*, dalam kajian uṣul fiqh apa yang dianggap maslahat bila sejalan atau tidak bertentanggan dengan petunjuk-petunjuk umum syari'at, dapat diakui sebagai landasan hukum yang dikenal dengan *maṣlahat mursalah*.

Jika yang akan diketahui hukumnya itu telah ditetapkan hukumnya dalam *naṣ* atau melalui qiyas, kemudian karena dalam satu kondisi bila ketentuan itu telah ditetapkan akan berbenturan dengan ketentuan atau kepentinggan lain yang lebih umum dan lebih layak menurut syara' untuk dipertahankan, maka ketentuan itu dapat ditinggalkan khusus dalam kondisi tersebut. Ijtihad seperti ini sering disebut dengan *istihsān* .

2. Kajian Tentang NU dan Tradisi Keagamaan

Dunia Islam Pada masa ini menampilkan tiga wajah buram, *pertama*; kehilangan kreatifitas yang ditandai dengan maraknya tradisi *sharah* dan *hashiyah* yaitu aktifitas menafsirkan atau menjelaskan karya-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karya ulama terdahulu. *Kedua*; kehilangan daya kontrol terhadap akulturasi budaya luar Islam dengan maraknya adopsi Islam terhadap budaya lokal dan meningkatnya kebutuhan untuk melakukan ritual dan *tawasul* terhadap orang-orang suci yang dianggap sebagai wali. *Ketiga;* menyibukkan diri membangun kesalehan teologis dan menghindar dari dinamika kehidupan antropologis, dengan menyibukkan pada kehidupan kelompok sufi yang membangun jaringan yang disebut dengan *tarekat*. Ketiga hal tersebut mengidentifikasikan munculnya gerakan Islam tradisional.

Charles Kurzman[48] mengidentifikasikan pola pemikran Islam ke dalam tiga kelompok. *Pertama*, Islam Adat (*Customary Islam*) yang ditandai oleh kombinasi kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat kedaerahan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di seluruh dunia Islam. *Kedua*, Islam Revivalis (*Revivalist Islam*) atau juga disebut Islam Fundamentalis yang mendefinisikan dirinya berbeda dengan Islam Adat, menyerukan keutamaan Islam pada periode awal (*al-salaf al-ṣālih*) dan mengembalikan kemurnian Islam sebagaimana pada masa jaya, menyerang interpretasi adat yang kurang memberi perhatian pada doktrin Islam adat. *Ketiga*, Islam

[48] Senada dengan Kurzman, Akbar S Ahmad mengidentifikasikan terdapat segitiga kesarjanaan muslim yaitu *Tradisionalis, Radikalis, Modernis*. Kelompok Tradisonalis adalah mereka yang memandang perlunya dialog antara Islam dan Barat karena di antara keduanya terdapat universalime pesan Tuhan dan dialog antar iman. Kelompok Modernis adalah mereka yang menganggap agama tidak lagi sebagai kekuatan atau bimbingan. Sedangkan kelompok Radikalis adalah mereka yang sudah kehilangan kesabaran terhadap Barat dan mengajak untuk melakukan revolusi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Liberal berpandangan sebagaimana Islam Revivalis terhadap Islam Adat, dengan menghadirkan kembali masa lalu untuk kepentingan modernitas.[49]

a. Nahdlatul Ulama Dan Tradisionalisme Islam

Kata tradisi berasal dari bahasa Inggris "*tradition*" yang artinya tradisi.[50] Sedangkan kata tradisi dalam kamus bahasa Indonesia adalah segala sesuatu seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, dan ajaran yang turun temurun dari leluhur.[51] Dalam bahasa Arab kata tradisi merupakan salah satu makna dari kata "sunnah" selain makna norma, aturan, dan kebiasaan.[52] Sedangkan kata "sunnah" mempunyai arti segala yang dinukilkan dari Nabi SAW., baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, baik sebelum Nabi diangkat menjadi rasul atau sesudahnya.[53]

Islam Tradisional mengandung pengertian yang luas, karena tradisi pada umumnya difahami sebagai hasil perlembagaan praktik-praktik keagamaan yang diyakini bersumber pada syariah, maka tradisionalisme islam diyakini oleh para pendukungnya sebagai Islam murni.[54]

Atas dasar pengertian ini, maka kaum orientalis barat menyebut kepada setiap orang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW.

---

[49] Khoirul Huda, *Ebook Islamica*, 2009 vol. 3
[50] John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 1979, cet.VII) 599.
[51] W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,(Jakarta : Balai Pustaka, 1991, cet.XII) 1088.
[52] Munir Baalbaki, Rohi Baalbaki, *Kamus Al-Maurid Arab-Inggris-Indonesia*, (Surabaya : Halim Jaya, 2006) 483
[53] M. Agus Solahudin, *Ulumul Hadis*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013, cet.III) 19.
[54] Mambaul Ngadimah, Ebook, *Potret Keberagaman Islam Indonesia*, (Ponorogo, 2008) 270.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahkan kepada mereka yang berpegang teguh kepada Al-qur'an sebagai kaum tradisionalis. Hal yang demikian itu mereka dasarkan pada pandangannya, bahwa Al-qur'an merupakan warisan ajaran dari Tuhan yang bersifat abadi, sedangkan sunnah merupakan warisan ajaran dari Nabi Muhammad SAW.[55]

Pada prinsipnya kaum tradisionalis yakin bahwa kebudayaan, pemikiran, dan kebudayaan modern adalah buruk, karena tidak berasaskan prinsip keagamaan dan keruhanian. Ulama tradisionalis tidak mau melakukan adaptasi dan kompromi termasuk kemajuan IPTEK dari barat. Mereka berpandangan bahwa umat islam tidak perlu mengikuti pemikiran barat, karena Islam adalah agama yang sempurna. Ulama tradisionalis lebih cenderung kembali ke masa lalu dalam usaha mencari jawaban Islam terhadap tantangan masa kini. Mereka yakin bentuk kehidupan umat Islam abad ketujuh sudah sempurna dan tidak perlu diubah dan disesuaikan dengan abad baru.[56]

Dalam perkembangan selanjutnya, Islam tradisionalis tidak hanya ditunjukkan kepada mereka yang berpegang teguh kepada Al-qur'an dan al-Sunnah saja, tetapi juga kepada produk-produk pemikiran (hasil ijtihad) para ulama yang dianggap unggul dan kokoh dalam berbagai bidang keilmuan. Pemikiran para ulama dalam berbagai bidang yang pada hakikatnya merupakan hasil penalaran terhadap Al-qur'an dan al-Sunnah

[55] Abuddin Nata, *Peta Keberagaman Pemikiran Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001) 141.
[56] Mambaul Ngadimah, Ebook Potret Keberagaman Islam Indonesia, (Ponorogo, 2008) 270.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut harus dipegang teguh dan tidak boleh diubah. Dalam hal demikian Islam tradisionalis tidak lagi membedakan antara ajaran yang terdapat dalam Al-qur'an dan al-Sunnah dengan ajaran yang merupakan hasil pemahaman terhadap keduanya.[57]

b. Nahdlatul Ulama Dan Metode Istinbāṭ Hukum

Pada beberapa gerakan Islam tradisional pengaruh kebudayaan lokal cukup kuat dalam implementasi ritual keagamaan, bahkan secara kultural dapat dikatakan bersifat sinkretik. Hal ini membuat tradisi pada wilayah tertentu melebur dengan praktik keagamaan masyarakat di daerah tersebut. Gerakan Islam di Indonesia yang pernah berada atau masih bertahan pada jalur tradisional diantaranya adalah Nahdhatul Ulama, tarikat *Qadiriyah Naqsyabandiyah*, dan gerakan *Jama'ah Tabligh*. Beberapa dari gerakan ini telah mengalami banyak perkembangan dan memiliki kecenderungan modernitas dalam aktivitasnya.[58]

Pengambilan keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dibuat dalam kerangka bermazhab pada salah satu mazhab empat, dengan beberapa metode diantaranya:

1) Metode *qauliy*

Metode ini adalah suatu cara istinbat hukum yang digunakan oleh ulama/intelektual NU dalam Lajnah Bahsul Masail dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh

[57] Abuddin Nata, *Peta Keberagaman Pemikiran Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001) 141-142

[58] Intan Dwi Kemala, *Gerakan Islam Literatur*,(Jakarta : FIB UI, 2008) 39-40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari mazhab empat, dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Ketika dijumpai beberapa *qaul/wajah* (pendapat) dalam satu masalah yang sama, maka dilakukan usaha memilih salah satu pendapat. Pemilihan pendapat tersebut sesuai dengan prosedur berikut: pendapat yang disepakati oleh *al-Shaikhān*[59] (al-Rafi'i dan al-Nawawi), lalu pendapat yang dipegang oleh al-Nawawi saja, lalu pendapat yang dipegang oleh al-Rafi'i saja, pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama, pendapat ulama yang terpandai, dan pendapat ulama yang paling wara' (berhati-hati terhadap hukum).[60]

2) Metode *Ilhāqiy*

Apabila metode qauliy tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari suatu kitab mu'tabar, maka dilakukan metode *ilhāqiy* (menyamakan hukum suatu masalah yang belum dijawab oleh kitab dengan masalah serupa yang ada dalam kitab). Prosedur yang kedua ini dilakukan dengan mengikuti logika analogi dalam metode al-qiyās. Prosedur ini sering disebut sebagai metode "*al-qiyās*" khas Nahdlatul Ulama.

---

[59] *al-Shaikhāni*, bila didapati dalam kitab-kitab fiqh, maka yang dimaksud adalah al-Rafi'i dan al-Nawawi (Nama lengkap al-Rafi'i adalah Abu al-Qasim Abdul Karim al-Quzwaini, wafat tahun 623/624 H, nasabnya sampai kepada Rafi' bin Khadij As-Shahabi r.a. Sedangkan al-Nawawi bernama lengkap Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syarf al-Hizami, wafat tahun 676 H).

[60] Busyairi Harits, *Islam NU (Pengawal Tradisi Sunni Indonesia)*, (Khalista: Surabaya, 2010), 59-61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Metode *Manhaji/Istinbāṭ*

Metode *manhaji/istinbāṭ* adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh Lembaga Bahtsul Masail dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam mazhab.

Istilah *istinbat* dalam bahtsul masail tidak banyak digunakan. Karena pengertian *istinbat* itu mengambil hukum secara langsung dari sumber aslinya, Al-qur'an dan hadis. Akan tetapi, istilah *istinbāṭ* yang dikenal dalam bahtsul masail NU adalah penggalian hukum dilakukan dengan men-*tathbiq*-kan secara dinamis *nash-nash fuqaha*.[61] Hal ini dikarenakan ulama-ulama NU meyakini bahwa mereka tidak memiliki kemampuan sebagaimana mujtahid pada masa lalu. Sebuah sikap yang arif dan tawadlu'.

Bagi ulama NU, term ini lebih dikonotasikan pada (*istikhrāj al-hukm min al-nas*) (mengeluarkan hukum dari teks-teks primer; Al-qur'an dan al-Sunnah) yang dilakukan oleh mujtahid mutlak, yang menurut ulama NU sangat berat untuk dilakukan ulama sekarang dengan segala keterbatasannya baik dalam ilmu pokok yaitu penguasaan ilmu tentang Al-qur'an dan al-Sunnah maupun ilmu bantu yaitu penguasaan dalam bidang bahasa Arab dan sebagainya. Untuk itu sebagai gantinya adalah istilah *ittifāq al-hukm* (kesepakatan hukum).[62]

Munculnya istilah bermazhab *manhajy* dan timbulnya gagasan untuk mempopulerkannya dapat ditelusuri sejak tahun 1987 ketika intlektual muda

[61] MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta : LKiS,1994),
[62] Imam Yahya, *Akar Sejarah Bahtsul Masail: Penjelasan Singkat*, dalam M. Imdadun Rahmad (ed.), *Kritik Nalar Fiqih NU*, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NU mengadakan kajian-kajian kritis terhadap kitab kuning, walaupun akhirnya mendapat tanggapan negatif dan hambatan dari beberapa ulama senior dengan melarang pelaksanaan diskusi di kantor PBNU. Namun demikian para intlektual dan Ulama muda NU tetap mengadakan diskusi-diskusi kritis di tempat lain, di antaranya yaitu di P3M (Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat). Melalui diskusi di P3M inilah hasil-hasil diskusi tersebut dipublikasikan oleh Jurnal Pesantren.[63]

Atas dukungan KH. MA. Sahal Mahfudh dan KH. Imron Hamzah, para intlektual muda NU mengadakan *mudhākarah* (seminar) dengan tema "Telaah Kitab Secara Konseptual" di pondok pesantren Watucongol Muntilan Magelang Pada tanggal 15-17 Desember 1988, yang menghasilkan pokok-pokok pikiran berikut; *pertama*; memahami teks kitab harus dibarengi dengan konteks sosial historisnya, *kedua*; mengembangkan pengetahuannya melalui kemampuan observasi dan analisis terhadap teks kitab, *ketiga*; memperbanyak muqabalah (komparasi mengenai hal-hal yang berbeda) dengan kitab-kitab lain, *keempat*; mengingatkan intensitas diskusi intelektual antara pakar disiplin ilmu terkait dengan materi yang tercantum dalam kitab klasik, dan *kelima*; menghadapkan kajian teks kitab klasik dengan wacana aktual dan bahasa yang komunikatif.[64]

---

[63] Martin van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-Relasi kuasa. Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: LKiS,1994) 222.

[64] Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masail* 1926-1999, Tradisi intlektual NU (Yogyakarta: LKiS,2004), 128-129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Sahal Mahfud, istinbat hukum langsung dari sumber primer yang cenderung kepada pengertian ijtihad mutlaq, bagi ulama NU masih sangat sulit dilakukan karena keterbatasan-keterbatasan yang memang disadari terutama dalam ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid. Sementara jika ijtihad dilakukan dalam batas mazhab yang lebih praktis, dapat dilakukan oleh semua ulama NU yang telah mampu memahami ibarat kitab-kitab fiqh sesuai dengan terminologinya yang baku.[65]

Istinbat hukum diartikan bukan untuk memgambil hukum secara langsung dari sumber hukum yang asli yakni Al-qur'an dan al-Sunnah, tetapi melakukan *taṭbīq* (penerapan) secara dinamis terhadap *Nas-nas* (teks-teks) yang telah dielaborasi ulama fiqh periode klasik dan menengah kepada persoalan *wāqi'iyyah* (kasuistik) yang dicari hukumnya. Secara definitif, NU memberikan definisi *istinbāt* hukum sebagai suatu upaya mengeluarkan hukum syara' dengan *al-qawā'id al-fiqhiyyah* dan *al-qawā'id al-uṣūliyyah* (*Islamic legal teory*) baik berupa *adillah ijmāliyyah* (dalil global), *adillah tafṣīliyyah* (dalil terperinci) maupun *adillah al-ahkām* (dalil hukum). Dengan demikian produk hukum yang dihasilkan merupakan hasil ijtihad ulama atas nas-nas Al-qur'an dan al-Sunnah yang sesuai dengan prinsip-prinsip ijtihad yang di gunakan para mujtahid di masa lalu.

[65] MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 1994) 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penggunaan kaidah *fiqhiyyah* di kalangan NU, dilatarbelakangi oleh konsep bermazhab dalam mengembangkan hukum Islam, yang menjadi pilihan bagi NU di masa awal. Dengan demikian, apa yang dipilih NU adalah akumulasi pendapat masyarakat dalam memahami dan mengamalkan hukum Islam yang dielaborasi dari teks Al-qur'an dan al-sunnah. Akumulasi tersebut selanjutnya terformat dalam konsep bermazhab, dengan cara mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkungan mazhab tertentu, yakni berupa *aqwal* (pendapat-pendapat) hasil ekplorasi hukum yang dilakukan oleh seorang mujtahid, sekaligus menggunakan *manhaj* (metode) tersebut, bila memang diperlukan.[66]

MA. Sahal Mahfudh sendiri menyatakan bahwa kaidah-kaidah pengambilan hukum yang di rumuskan ulama terdahulu masih tetap relevan hingga kini. Jadi yang perlu di lakukan adalah pengembangan fiqh melalui kaidah-kaidah tadi, menuju fiqh yang kontekstual.[67]

Garis besar metode penetapan hukum dalam bahtsul masail NU secara hirarki sebagai berikut:

a) Jika dinilai cukup menetapkan hukum dengan satu pendapat yang sama (*qaul/wajah*) di berbagai kitab empat madzhab, maka pendapat tersebut digunakan sebagai jawaban.

---

[66] Ahmad Arifi, *Pergulatan Pemikiran Fiqih dalam Nahdlatul Ulama'* "Analisis Paradigma atas Nalar Fiqh Tradisi" (Yagyakarta: PPs UIN Yogyakarta, 2007) 284.
[67] MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*,(Yogyakarta : LKiS,1994), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Jika ternyata jawaban masalah sangat beragam dari pendapat Ulama (*qawl/wajah*), maka dilakukan *taqrīr jamā'i*[68]:

1) Sesuai dengan keputusan MUNAS alim ulama 1992 di Lampung, maka dilakukan *taqrir jama'i* untuk memilih satu pendapat yang dinilai lebih maslahat atau lebih kuat serta dengan pertimbangan klasifikasi Ulama yang sudah ditetapkan di atas.

2) Dalam praktiknya, ulama sering memutuskan dengan sepakat untuk khilaf. Sepertinya hal ini merupakan interpretasi dari yang lebih maslahat.

c) Jika tidak ada *ibarah* kitab atau pendapat ulama yang menjelaskan/menjawab secara tekstual tentang permaslahan yang dibahas, maka dilakukan ilhaq atau *ilhaqul masail bi nazhairiha* secara *jama'iy*. yaitu, menyamakan hukum suatu masalah yang belum dijawab oleh kitab dengan masalah serupa yang ada dalam kitab. Sedangkan prosedur *ilhaq* adalah dengan memperhatikan unsur (persyaratan berikut), yaitu *mulhaq bih* (sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya), *mulhaq alaih* (sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya) dan *wajh al-ilhaq* (faktor keserupaan antara *mulhaq bih* dengan *mulhaq alaih*) oleh para *mulhiq* (pelaku *ilhaq*).

---

[68] Sesuai keputusan MUNAS alim ulama 1992 di Bandar Lampung, jika ternyata jawaban masalah sangat beragam dari pendapat ulama (*qawl/wajah*), maka dilakukan *taqrīr jamā'i*, untuk memilih satu pendapat yang dinilai lebih maslahat atau lebih kuat serta dengan pertimbangan klasifikasi ulama yang sudah ditetapkan di atas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Jika tidak ada penjelasan tekstual dalam kitab dan tidak mungkin dilakukan *ilhaq*, maka dilakukan *istinbat jama'i* dengan prosedur bermadzhab secara manhaji. Proses *istinbāṭ* atau *manhaj* ini adalah setelah tidak dapat dirujukkan kepada teks suatu kitab mu'tabar, juga tidak dapat di-*ilhaq*-kan kepada hukum suatu masalah yang mirip dan telah terdapat rujukannya dalam suatu kitab mu'tabar maka digunakanlah metode istinbāṭ atau manhajiy dengan mendasarkan jawaban mula-mula pada Al-qur'an, setelah tidak ditemukan lalu pada hadits dan begitu seterusnya yang akhirnya sampailah pada jawaban dari qaidah fiqhiyyah "*daf' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣālih*" (menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada upaya memperoleh kemaslahatan). Hal demikian dimungkinkan karena prosedur istinbāṭ hukum bagi metode manhajiy adalah dengan mempraktekkan *qawā'id uṣuliyyah* (kaidah-kaidah ushul al-fiqh) dan *qawā'id fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fiqh).[69]

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai jam'iyyah dan gerakan *dīniyah islāmiyyah* telah menganut satu dari empat mazhab sebagai pegangan dalam berfiqih, yaitu Imam Abu Hanifah,[70] Malik bin Anas,[71] Muhammad

---

[69] A. Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama'*, (Surabaya: PP. RMI dan Dinamika Press 1997) 367

[70] Nama lengkapnya; Nu'mān ibn Thābit ibn Zūṭā ibn Marzubān al-Taymi. Lahir di Kufah, 5 September 699M dan wafat di Baghdad 14 Juni 767 M.

[71] Nama lengkapnya; Abu Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abī 'Āmir ibn 'Amr ibn al-Ḥārith ibn Ghaimān. Lahir di Madinah, 711 M dan wafat di Madinah, 795 M.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bin Idris al-Syafi'i[72] dan Ahmad bin Hanbal.[73] NU dalam kesehariannya lebih banyak menggunakan fiqih masyarakat Indonesia yang bersumber dari mazhab Imam Syafi'i. Hampir dapat dipastikan bahwa fatwa, petunjuk, dan keputusan hukum yang diberikan oleh ulama NU dan kalangan pesantren selalu bersumber dari Imam Syafi'i, karena madzab ini paling banyak diikuti kaum muslimin dan lebih sesuai dengan kondisi sosial, budaya dan geografis Indonesia. Hal ini tampak dalam teks-teks dasar yang dijadikan rujukan dalam seluruh atau kebanyakan fatwa NU masih didominasi kitab mazhab Syafi'i[74]. Hanya kadang-kadang dalam keadaan tertentu, jika pendapat Imam Syafi'i tidak tersedia untuk melawan budaya konfensional, maka berpaling dan mengambil pendapat ulama lain. sejauh masih dalam lingkungan madzhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali). Para ulama NU mengarahkan orientasinya dalam pengambilan hukum kepada *aqwal al-mujtahidin* (pendapat para mujtahid) yang mutlak maupun muntashib. Meskipun semua dasar selalu merujuk

[72] Nama lengkapnya; Abu Abdillah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i al-Muṭṭalibi al-Qurashiy. Lahir di Gaza, 28 Agustus 767 M dan wafat di Mesir, 20 Januari 820 M.

[73] Nama lengkapnya; Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad al-Marwazi al-Baghdadi, diberi kunyah Abu Abdillah al-Syaibani. Lahir di Baghdad, November 780 M dan wafat di Baghdad, 855 M.

[74] Seperti kitab *Minhāj at-Tālibīn* karya an-Nawawi, *al-Muharrar* karya al-Dimasyqi, *Fath al-Mu'īn* karya Syamsuddin al-Malibari, *I'Ānah At-Tālibīn* karya Sayyid Bakri al-Dimyati, *Kanz ar-Rāgibīn* karya Jalaluddin al-Mahalli, *Syarh Kanz ar-Rāghibīn* karya al-Qalyubi,*Tuhfah al-Muhtāj* karya Ibn Hajar al-Haitami, *Mugnī al-Muhtāj* karya Syarbini dan*Nihāyah al-eMuhtāj* karya ar-Ramli.Lihat MB.Hooker, *Islam Mazhab Indonesia:Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*, (Teraju: Jakarta, 2002) 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada pendapat ulama pendahulu, namun kondisi masyarakat selalu dijadikan pertimbangan dalam penerapannya.[75]

Tak bisa dipungkiri mengenai terlalu dominannya fikih-madzhab Syafii di lingkungan NU. Ini menurut (Alm.) Kiai Sahal Mahfudz, bukan karena para kiai NU menolak *aqwāl* di luar fikih Syafii, melainkan karena keterbatasan referensi fikih non-Syafii yang dimiliki para kiai NU.[76] Para kiai lebih menyukai hasil interpretasi ulama Syafi'iyah ketimbang langsung merujuk pada buku-buku fikih karya Imam Syafii sendiri. Karena itu, tak heran sekiranya para santri pondok pesantren mengetahui fikih Syafii *via* penjelasan para ulama Syafiiyah bukan dari buku-buku Imam Syafii secara langsung.

Bahkan, di lingkungan ulama Syafiiyah sendiri, seperti dianjurkan Syatha al-Dimyathi,[77] para kiai NU secara formal telah bersepakat untuk bersandar pertama-tama pada pendapat yang disepakati Imam Nawawi dan Imam Rofii, kemudian pendapat ulama *Syafiiyah* lain seperti Imamul Haramain, Imam Ghazali, Ibnu Daqiqil 'Id, Zakaria al-Anshari, Khathib al-Syarbini, dan lain-lain.

Atas dasar itu, sebagian intelektual NU secara terus terang berkata bahwa NU sebenarnya bukan bermadzhab Syafii tapi bermadzhab Nawawi atau Rofii dan syafi'iyah. (bukan *syafi'iyyul mazhab* tapi *nawawiyyul*

---

[75] Soeleiman Fadeli dan Moh. Subhan, *Antologi NU,* (Khalista: Surabaya,2008), 35-36

[76] Oleh K.H Sahal mahfudz dalam "*Ahkamul fuqaha', solusi problematika aktual hukum Islam*". ix

[77] واعلم أنه سيذكر المؤلف - رحمه الله تعالى- فى باب القضاء أن المعتمد في المذهب للحكم والفتوى ما إتفق عليه الشيخان فما جزم به النووي فالرافعي فما رجحه الأكثر فالأعلم والأورع. Shata al-Dimyati, *I'anatu al-Talibin,* (Dar al-fikr), jild. 1, 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mazhab, bukan *syafi'iyyul mazhab* tapi *syafi'iyyatul mazhab*). Hal itu tampak jelas terutama dalam kajian-kajian *wāqi'iyyah, qānūniyyah*, dan *maudū'iyyah* di forum-forum *bahsul masāil* yang merupakan forum ilmiah di lingkungan NU untuk membahas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum.[78]

G. Penelitian Terdahulu

Telah banyak penelitian dan karya ilmiah yang membahas tentang NU dengan kecenderungan mengambil tema-tema yang bernuansa politik, faham keagamaan, maupun tokohnya.[79] Penelitian tentang NU yang terkait dengan fiqh masih sangat sedikit, itupun dengan kecenderungan tematis.[80] Ada juga beberapa

---

[78] Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur* (Yogyakarta: LKiS, 2000), h. 365

[79] Ahmad Zahra, *Tradisi Intelektual NU* (LKiS Yogyakarta: Yogyakarta, 2004), hal. 7 disebutkan Seperti Zul Asyri. "*NU. Studi tentang Faham Keagamaan dan Pelestariannya Melalui Pendidikan Pesantren.*" (Disertasi Doktor. IAIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 1990) yang memusalkan kajiannya pada kaitan faham keagamaan NU dengan pendidikan pesantren: Andree Feillard. "*Islam et Amiee Dans L"indonesie Contemporaine Les pionniers de la lradition.'*(Disertasi Doktor. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Paris. 1993) dan telah diterjemahkan oleh Lesmana dengan judul *NU vis~·viS Negara* (Yogyakarta: *LKiS.* 1999) yang merupakan studi ko~mengenai *interaksi NU dan negara pada masa Orde Baru*: Martin Van Bruinessen. *NU, Tradisl, Relas~Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: *LKiS* dan Pustaka Pelajar. 1994) yang walaupun ada pembahasan tentang Bahtsul Masa'il (Martin sering menyebutnya dengan fatwa), namun hanya sedikit dan sepintas: dan S. Sinansari Ecip (ed.), *NU, Khittah dan Godaan Politik* (Bandung: Mizan, 1994). Menyusul kemudian Gregory John Fealy, ·utama and Politics in Indonesia: A Histoiy of NU 1952-1967." (Disertasi Doktor. Monash University, VICloria. 1998) yang merupakan *kajian historis kiprah politik ulama' NU*; dan Said Jamhuri, "*Kepemimpinan Karismatik NU: Studi Kasus Abdurrahman Wahid*" (Disertasi Doktor, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1999). Dapat disebutkan juga karya Muchlar Naim,"*The NU Party 1952-1955,*" (Tesis MA., Mc.Gil University, Montreal, 1960); Musthofa Sonhadji, "*NU Organisasi Sosial Keagamaan lahun 1926-1952.*" (Tesis MA, JAIN Sunan Kalijaga, 1987); M. Nad"Jid Muchlar, "*Konsep Ulama' dalam Islam dan Pemikiran tentang Kedudukannya dalam lingkungan NU.*" (Tesis MA, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. 1988); Hilmy Mochtar, "Dinamika NU, Suatu *Studi tentang Elite Kekuasaan Politik Islam di Jombang Jawa Timur*: (Tesis MA. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. 1989); dan Laode Ida. "Dinamika Internal NU setelah Kembafi ke Khittah 1926." (Tesis MA, Universitas Indonesia. Jakarta. 1995).

[80] Seperti Ali Haidar. *Nahdlatul Ulama' dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fikih dalam Politik* (Jakarta: Gramedia, 1994) yang merupakan penelitian tentang fiqh NU, namun bukan fiqh dalam Lajnah Bahtsul Masa'il melainkan dalam lapangan fiqh politik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

studi terdahulu yang memusatkan kajiannya pada produk hukum maupun metode ijtihad lembaga sejenis Lajnah Bahtsul Masa'il dari institusi atau organisasi kemasyarakatan Islam yang lain.[81]

Ada beberapa penelitian ilmiah yang membahas tentang Lajnah Bahtsul Masa'il, antara lain: skripsi Slamet Basyir, "Majlis Bahtsul Masa'il Syuriah NU: Studi tentang Pola Pengkajian dan Penetapan Hukum Islam" (IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1991) yang baru sepintas membahas tentang Lajnah Bahtsul Masa'il. Secara garis besar skripsi ini menyatakan Majlis Bahtsul Masa'il dalam memahami ajaran Islam mendasarkan kepada empat sumber hukum yang disepakati, yaitu Al-Qur' an, hadis, *ijma'* dan *qiyas*, di samping mengakui adanya sumber-sumber hukum lain yang diperselisihkan; NU rnenganut faharn *taqlid* bermadzhab yang dianggap merupakan jalan terbaik; dan dalam menghadapi tantangan modernitas Lajnah Bahtsul Masa'il NU berusaha mengembangkan sistem bermadzhab secara *manhaji* (yang pada saat skripsi ini selesai ditulis, hal tersebut belum menjadi keputusan).

Penelitian ilmiah yang lebih intensif mengenai Lajnah Bahtsul Masa'il baru yang ditemukan peulis ada empat belas buah, yaitu:

---

[81] Seperti Mohammad Atho Mudzhar. *Fatwa-Fatwa Maje/is Ulama' Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia. 1975 · 1988* (Jakarta: INIS, 1993) yang memfokuskan pada pengujian fatwa-fatwa Majelis Ulama' Indonesia; Fathurrahman Djamil. *Metode ljtihad Maljlis Tar,jih Muhammadiyah* (Jakana: Logos Publishing House. 1995); Dede Rosyada, *Metode Kajisn Hukum Dewan ~ Persis* (Jakana: PT. Logos Wacana lmu, 1999) dan Kholidah, "Melode l~ihad Dewan Fatwa al-Jam'iyatul Washliyah Periode 1988 - 1998" (Tesis MA, IAIN Sumatera Utara. Medan. 2000) yang ketiganya terfokus pada kajian metodologis mengenai ijtihad di Muhammadiyah. Persis (Persatuan Islam) ataupen al-Jam'iyatul Washliyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Radino, "Metode Ijtihad NU, Kajian Terhadap Keputusan Bahtsul Masa'il NU Pusat Pada Masalah-Masalah fiqh Kontemporer" (Tesis MA, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 1997). Tesis ini membahas enam masalah fiqh kontemporer yang diambil dari keputusan Lajnah Bahtsul Masa'il dalam Munas Alim Ularna tahun 1992 di Bandar Lampung dan Muktamar XXIX tahun 1994 di Tasikmalaya. Kesimpulan yang dikemukakan Radino adalah NU lebih banyak menggunakan metode ijtihad *ta'lily (*didasarkan pada *'illat)* dan *istislahy* (bertumpu pada asas kemaslahatan), serta sedikit sekali mengembalikan kepada kitab-kitab fiqh klasik.
2. Muhammad Atho' Mudzhar,"Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia" (Studi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia).[82] Penelitian ini menggunakan pendekatan usul fiqh dan sosiologis. Fokus kajiannya pada metode yang digunakan dalam menyusun fatwa Majelis Ulama Indonesia dan menyelidiki bagaimana fatwa-fatwa itu mencerminkan atau berlainan dengan teks klasik dari yurisprudensi. Studi ini juga berusaha untuk mengenal lingkungan sosiopolitik yang telah mendorong lahirnya fatwa-fatwa dan mengenal soal reaksi masyarakat; apakah dapat menerima atau menolak fatwa-fatwa itu termasuk pertentangan yang ditimbulkan. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 1975-1988, dan fatwa diteliti 22 dari 39 fatwa.

[82] Disertasi – University Of California Los Angeles, 1990.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Iskandar Usman, " Istihsan Sebagai Suatu Metode Istinbat Hukum Dan relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam".[83] Hasil penelitian menjelaskan konsep Istihsan yang berkembang dalam fiqh Maliki dan Hanafi yang mengatakan bahwa Istihsan merupakan salah satu metode Istinbat hukum yang dapat dijadikan hujjah. Dalam Usul Fiqh Maliki Istihsan dibagi empat macam, yaitu: Istihsan dengan maslahah, Istihsan dengan Urf, Istihsan dengan Ijma', Dan Ijma' dengan ra' al-haraj. Sedangkan dalam usul fiqh Hanafi, Istihsan dibagi empat macam, yaitu: Istihsan dengan Nas, Istihsan dengan Ijma', Istihsan dengan darurat, dan Istihsan dengan qiyas khafi. Penalaran hukum dengan metode istihsan sangat memperhatikan tujuan hukum yang hendak dicapai untuk kepentingan umat manusia. Dengan demikian metode Istihsan sangat relevan dengan pembaharuan hukum Islam.
4. Helmi Karim, "Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam" (Kajian Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonsia Tahun 1975-1980).[84] Pendekatan yang digunakan adalah historis dengan kajian usul fiqh. Disertasi ini membahas 49 fatwa Najelis Ulama Indonesia yang terdiri dari 25 fatwa yang berkaitan dengan ibadah (shalat, puasa, zakat dan haji) dan 24 fatwa yang berkaitan dengan mu'amalah. Kesimpulan yang disampaikan oleh Helmi Karim adalah metode ijtihad yang digunakan MUI dalam menghasilkan suatu fatwa menggunakan

[83] Disertasi IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1992.
[84] Disertasi IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1993

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaidah istihsan, maslahah atau dzari'ah. Sedangkan dalam melakukan ijtihad, MUI mengutamakan ijtihad mazhab dan ijtihad tarjih.

5. Fathurrahman Jamil, "Ijtihad Muhammadiyah Dalam Masalah Fiqh Kontemporer" (Studi Tentang Penerapan Maqasid al-Shari'ah).[85] Pendekatan yang digunakan adalah yuridis filosofis dengan menggunakn tolak ukur usul fiqh. Fokus penelitiannya adalah hasil keputusan majlis Tarjih Muhammadiyah tentang beberapa masalah fiqh kontemporer, yaitu tentang kedokteran dan rekayasa manusia, ekonomi dan keuangan, dan perkawinan antar pemeluk agama. Dalam melaksanakan istinbat hukum, Muhammadiyah menjadikan Al-qur'an sebagai sumber hukum Islam. Kemudian dalam menyelesaikan masalah-masalah kontemporer, muhammadiyah menggali hukum Islam dengan cara menelusuri aspek kemaslahatan yang merupakan inti dari Maqasid al-Shari'ah. Dalam menyelesaikan masalah bank, Muhammadiyah menggunakan metode qiyas, Metode Istihsan dipakai menyelesaikan masalah keluarga berencana, Dalam masalah bayi tabung, menggunakan metode maslahah mursalah, dan Sadd al-dzari'ah digunakan untuk menyelesaikan masalah perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahl al-kitab.

6. Imam Yahya, "Bahtsul Masa'il NU dan Transformasi SosiaI: Telaah *Istinbāṭ* Hukurn Pasca Munas Bandar Lampung 1992," (Tesis MA, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1998). Tesis ini membahas hasil-hasil

[85] Disertasi IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1994. Diterbitkan dengan judul Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah (Jakarta: Logos, 1995.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keputusan Lajnah Bahtsul Masa'il dalam Munas Alim Ulama tahun 1992 di Bandar Lampung, Muktamar XXIX tahun 1994 di Tasikmalaya dan Munas Alim Ularna tahun1997 di Nusa Tenggara Barat. Menurut Imam Yahya, metode penetapan hukum yang dipergunakan NU secara berurutan adalah bermadzhab secara *qauli* (rnengutip langsung dari naskah kitab rujukan), *manhaji* (menelusuri dan mengikuti metode *istinbat* hukum madzhab empat), *ilhaq* (menganaiogikan hukum permasalahan tertentu yang belum ada dasar hukumnya dengan kasus serupa yang sudah ada dalarn suatu kitab rujukan) dan *istinbat jama'i* (penggalian dan penetapan hukum secara kolektif).

7. Rifyal Ka'bah, dalam bukunya yang bertitel "Keputusan Lajnah Tarjih Muhammadiyyah dan Lajnah Bahtsul Masa'il NU sebagai Keputusan *Ijtihad Jama'i* di Indonesia," (Disertasi Doktor, Universitas Indonesia, Jakarta, 1998). Disertasi ini membandingkan Lajnah Tarjih Muhammadiyyah dengan Lajnah Bahtsul Masa'il NU dalam hal obyek kajian tentang beberapa masalah hukum kontemporer, istilah-istilah yang digunakan, cakupan dan bentuk keputusan, metodologi, sifat perubahan dalam keputusan, usaha kodifikasi/ kompilasi hukum, antisipasi tantangan masa depan dan lain-lain. Mengenai Lajnah Bahtsul Masa'il, yang dikemukakan adalah tentang buku-buku yang sering dikutip, metode tanya-jawab dengan menggunakan empat langkah penentuan hukum, yakni merujuk kitab-kitab fiqh madzhab tertentu, *taqrir jama'i* (penetapan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara kolektif), *ilhāq al-masā'il bi naẓāirihā* (menganalogikan hukum permasalahan tertentu dangan hukum kasus yang serupa), *istinbāṭ jamā'i;* dan jenis-jenis keputusan Lajnah Bahtsul Masai'l.

8. Abd. Basid, "Bahts al-Masa'il dan Wacana Pernikiran *Fiqh*, Sebuah Studi Perkembangan Pemikiran Hukum Islam NU Tahun 1985-1995," (Tesis MA, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1999). Tesis ini memaparkan secara deskriptif hasil-hasil keputusan Lajnah Bahtsul Masa'il dalam Muktamar XXVIIItahun 1989 di Yogyakarta dan Muktamar XXlX tahun 1994 di Tasikmalaya. Mengenai metode tidak ada penegasan dari penulisnya, selain hanya mengutip hasil keputusan Munas Alim Ulama tahun 1992 di Bandar Lampung mengenai prosedur penjawaban masalah, yaitu untuk menjawab masalah yang jawabannya mampu dengan menggunakan *'ibarah kitab,*[86] dan dalam kitab tersebut hanya ada satu *qawl/wajah,*[87] maka *qawl/wajah* yang ada dalam *'ibarat kitab* itulah yang digunakan sebagai jawaban. Namun bila dalam *'ibarat kitab* ada lebih dari satu *qawl/wajah,* maka dilakukan *taqrir jama'iy* yang berfungsi untuk memilih satu *qawl/wajah.* Untuk menyelesaikan masalah yang tidak ada *qawl/wajah,* maka menggunakan prosedur *ilhāq al-masā'il bi naẓāirihā* secara kolektif. Dalam kasus penyelesaian yang tidak ada *qaul/wajah*

[86] *'lbarah kitab* adalah ungkapan atau bunyi tekstual yang ada dalam kitab-kitab rujukan lajnah bahtsul masa'il.

[87] *Qaul* adalah pendapat imam madzhab, sedang *wajah* adalah pendapat ulama' madzhab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama sekali dan tidak mungkin dilakukan *ilhaq*, maka dapat diJakukan *ijtihad jama'i* dengan prosedur bennadzhab secara *manhajiy*.

9. Ahmad Zahro "Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, 1926-1999" (Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqh), (Disertasi Doktor Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001), ini merupakan penelitian lanjutan dalam kaitannya dengan Lajnah Bahtsul Masa'il, mengenai kitab-kitab *mu'tabarah* dan validitas keputusannya, serta mengenai metode *istinbat* hukum yang dalam penelitian terdahulu, antara peneliti satu dengan yang lain terdapat perbedaan yang cukup berarti, sehingga memerlukan klarifikasi dan pelacakan lebih lanjut.

10. A. Faishal Haq,"Bahtsul Masail Di Bidang Fiqh Siyasah" (Studi Tentang Pemaknaan PWNU Jatim Terhadap Proses Dan Metode Penetapan Hukum Dan Hasil Bahtsul Masail Di Bidang Fiqh Siyasah).[88] Dalam penelitian ini didapati adanya temuan teori baru tentang bermaẓhab yang benar menurut salah satu dari mazhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Penelitan ini juga memberikan apresiasi tentang pemaknaan individu PWNU Jatim 1997-2007 terhadap proses dan metode penetapan hukum dalam bahtsul masail, serta hasil keputusan bahtsul masail di bidang fiqh siyasah (politik). Dalam penelitian ini juga didapati adanya perbedaan persepsi Para kyai yang berada dalam jajaran PWNU Jatim dalam menilai proses dan metode penetapan hukum dalam bidang fiqh siyasah.

[88] Disertasi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11. Abd. Salam, "Tradisi Fiqh Nahdlatul Ulama" (Analisis terhadap konstruksi elit NU Jawa Timur tentang penentuan awal bulan Islam).[89] Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi yang menekankan dan menfokuskan perhatian pada pemahaman atas pengalaman dan interpretasi subyektif manusia. Kesimpulan Abd. Salam adalah bahwa konstruksi elite NU Jatim terpetakan dalam empat kategori, yaitu: pertama, konsep hilal: hilal aktual, hilal potensial, dan hilal aktuensial. Kedua, Cara mengetahui hilal: rukyat sederhana, rukyat cermat, hisab alternatif, dan hisab dominan. Ketiga, Akibat hukum kemunculan hilal matla' global, matla' negara, matla' lokal, dan matla' kawasan hukum al-rukyat. Keempat, otoritas penentuan awal bulan, otoritas jama' dan otoritas tunggal.
12. Ahmad Muhtadi Anshor, "Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur" (Studi Tentang Dinamika Bermazhab).[90] Penelitian ini ingin menjawab empat hal: pertama, Bagaimana dinamika penggunaan sumber rujukan dalam bahtsul masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur ?. kedua, Bagaimana dinamika penggunaan metode pengambilan keputusan dalam bahtsul masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur?. Ketiga, Bagaimana dinamika permasalahan yang dikaji dalam bahtsul masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur ?.Keempat, apa makna dinamika bermazhab

[89] Disertasi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008.
[90] Disertasi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam bahtsul masail bagi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur.

13. Luthfi Hadi Aminuddin, "Sistem Pengambilan Keputusan Hukum Nahdlatul Ulama" (Telaah *Taqrīr, Ilhāq, dan Istinbāt Jamā'i*).[91] Peneliti melakukan penelitian dan telaah secara detail terhadap penggunaan metode *Taqrīr, Ilhāq, dan Istinbāt Jamā'i* serta penerapannya dalam dalam sistem pengambilan keputusan hukum Forum bahtsul masail Nahdlatul Ulama.

14. Syafi'i, "Istinbat Hukum Islam Di Lingkungan Ahli Tariqah" (Analisis Bahtsul Masail Diniyyah Jam'iyyah Ahl al-Tariqah al-Mu'tabarah al-Nahdiyah).[92] Penelitian ini mengkhususkan dan menfokuskan penelitian pada lajnah bahtsul masail diniyah sufiyah di lingkungan tarekat mu'tabarah dalam kurun waktu 1957- 2005.

Penelitian penulis ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lanjutan dan pendalaman dalam kaitannya dengan Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama. Posisi penelitian ini adalah memusatkan kajiannya pada 3 hal: *Pertama*, pengelompokan permasalahan-permasalahan fiqh yang muncul dalam masyarakat kabupaten Mojokero yang dibahas dalam bahtsul masail menjadi beberapa kategori. *Kedua*, mengamati metode istinbat hukum Lembaga Bahtsul Masail kabupaten Mojokerto dalam memutuskan hukum suatu masalah. *Ketiga*,

[91] Disertasi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.
[92] Disertasi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengeksplorasi metode istinbat hukum kyai (intelektual) NU dan menentukannya menjadi sebuah karakteristik lembaga bahtsul masail kabupaten Mojokerto dalam memutuskan hukum.

H. Metode Penelitian

Sumber data yang digunakan adalah sumber data tertulis, baik kitab, buku, dokumen hasil bahtsul masail, karya ilmiah, majalah, maupun jurnal keilmuan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data tak tertulis adalah para ulama, kyai dari kalangan NU (struktural dan kultural), kyai pesantren dan mereka yang terlibat dalam bahtsul masail, serta para intelektual lainnya.

Sumber data yang terkait langsung dengan bahtsul masail, hasil keputusan Lembaga Bahtsul Masail dan pelakunya dikategorikan sebagai sumber data primer. Sedangkan yang tidak berhubungan langsung dengan bahtsul masail, keputusan ataupun pelakunya digolongkan sebagai sumber data sekunder.

Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian agama sebagai gejala budaya[93] dengan pendekatan sejarah, karena membahas permasalahan yang terjadi dalam rentang waktu 2011-2018, dan pendekatan *uṣul fiqh*, karena mengkaji masalah hukum fiqh, baik yang berkaitan dengan metode istinbat hukum lembaga bahtsul masail, penggunaan kitab-kitab empat mazhab yang menjadi rujukan dalam kegiatan bahtsul masail, maupun upaya membangun tardisi bahtsul masail yang dinamis.

[93] M. Atho Mudzhar, *Pendekata Studi Islam Dalam Teori dan Praktek.* (Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 1998) 11-22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dengan telaah dokumenter terhadap kitab, buku, karya ilmiah, majalah, jumal keilmuan dan wawancara dengan para ulama yang berkompeten dalam bahtsul masail dan intelektual lainnya, serta pengamatan lapangan secara langsung terhadap sidang lembaga bahtsul masail (tingkat MWC dan cabang) dan di beberapa pesantren, serta perilaku sebagian warga *Nahdliyyin*.

Untuk memperoleh sumber data tertulis, dilakukan pelacakan ke berbagai tempat yang memungkinkan, seperti arsip-arsip keputusan bahtsul masail, toko buku, perpustakaan, pondok pesantren dan perorangan yang memiliki sumber data yang dibutuhkan.

Sedangkan untuk menentukan sumber data tak tertulis ditetapkan dengan mencari dan mewawancarai sejumlah kyai dan intelektual NU. Sebagai sampel peneliti mewawancarai 9 orang yang terlibat langsung dalam kegiatan bahtsul masail, dan intelektual lainnya untuk menemukan data dan informasi yang valid, serta mengamati langsung sidang lembaga bahtsul masa' il di beberapa MWC dan cabang serta beberapa pesantren dan perilaku sebagian warga nahdliyyin.

Terhadap data kualitatif digunakan metode analisis kualitatif dengan cara *berpikir reflektif*, yakni dengan menghubungkan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari dalam menganalisa masalah, mengevaluasi, serta menarik kesimpulan terbaik terhadap masalah yang dihadapi. Cara *berfikir deduksi-induksi*, yaitu dengan penalaran logis yang berawal dari kasus yang umum (universal) untuk menarik kesimpulan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khusus (spesifik) atau sebaliknya, yaitu penalaran yang logis yang berawal dari kasus-kasus yang khusus (spesifik) untuk menarik kesimpulan yang umum (universal). Data kualitatif tersebut dianalisis secara kritis, dengan merespon sebuah pemikiran dan obyek kemudian menganalisis secara sistematis.

Adapun Prosedur analisis yang ditempuh dapat dijelaskan sebagai berikut terhadap data kualitatif dikoleksi, diklasifikasi, diseleksi, dikomparasi kemudian dikritisi.

I. Sistematika Pembahasan

Disertasi ini terdiri dari V bab sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II mengurai tentang Metode Istinbat Hukum yang meliputi lima hal, pertama tentang Pengertian Istinbat Hukum, kedua tentang Macam-macam Metode Istinbat Hukum, ketiga tentang Metode Istinbat Hukum dengan pendekatan kebahasaan, keempat tentang Metode Istinbat Hukum dengan pendekatan Maqasid al-Shari'ah, kelima tentang Metode Istinbat Hukum Nahdlatul Ulama.

Bab III menjelaskan tiga hal, pertama mengurai tentang Nahdlatul Ulama mulai Sejarah Berdirinya Nahdlatul Ulama, Bidang Perjuangannya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Struktur Organisasi NU, Struktur Kepengurusan NU, Struktur Organisasi Lembaga dan Banom. Kedua tentang Nahdlatul Ulama di Mojokerto yang meliputi: Sejarah Berdirinya Nahdlatul Ulama' di Mojokerto, Susunan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto Periode 2018 – 2023, Daftar Nama Ketua Lembaga PCNU Kabupaten Mojokerto Masa Khidmat 2018-2023, Daftar Nama Banom (Badan Otonom) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto. Ketiga tentang Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU Kabupaten Mojokerto, yang meliputi: Asal-usul Lembaga Bahsul Masail, Peran Lembaga Bahsul Masail (LBM), Metodologi Pengambilan Keputusan Bahtsul Masail, Model Dan Prosedur Penyelesaian Masalah, Respon Ulama Mojokerto Terhadap Hasil Keputusan Bahsul Masail.

Bab IV deskripsi dan paparan data hasil penelitian dan Pembahasannya yang meliputi: pertama, tentang kategori permasalahan-permasalahan fiqh masyarakat kabupaten Mojokerto yang dibahas dalam bahtsul masail. Kedua, tentang metode istinbāṭ hukum lembaga batsul masail Nahdlatul Ulama kabupaten Mojokerto dalam menjawab permasalahan-permasalahan fiqh yang muncul dalam masyarakat. Ketiga, tentang metode *istinbāṭ* hukum lembaga bahtsul masail yang biasa digunakan lembaga bahtsul masail NU kabupaten Mojokerto yang menjadi karaktersitik yang membedakan dengan LBM lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab V penutup yang berisi: kesimpulan, implikasi teoretik, keterbatasan studi, dan rekomendasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

METODE *ISTINBĀṬ* HUKUM

A. Pengertian *Istinbāṭ*

Secara etimologis kata "*istinbāṭ*" berasal dari kata *al-nabṭ*, bentuk masdar dari *thulāthiy* (نبط الماء- ينبط- نبطا- نبوطا) yang berarti air terbit dan keluar dari dalam tanah yang kali pertama digali.[1] Secara bahasa (etimologi) kata *istinbāṭ* berasal dari kata "استنبط- يستنبط- استنباط" yang berarti menemukan, melahirkan, menciptakan, memperlihatkan.

Secara terminologi *istinbāṭ* diartikan mengeluarkan dari sumbernya melalui ijtihad untuk menetapkan hukum. Seperti: إستنبط الفقيه : إستخرج الفقه الباطن بفهمه واجتهاده....[2], upaya seorang faqih dalam mengeluarkan hukum fiqh yang sangat dalam dengan pemahaman dan ijtihadnya.

Adapun yang dimaksud dengan *istinbāṭ* bila dihubungkan dengan fiqh/hukum seperti dijelaskan oleh al-Qarafi: الإستنباط في الفقه إستخراج

---

[1] Muhammad ibn Ya'qub ibn Muhammad ibn Ibrahim Abu al-Ṭāhir Majduddin al-Fairuzabadi, *al-Qāmūs al-Muhīṭ*, (Muassasah al-Risalah, 2005), 1139. Lihat juga Abu Abdirrahman Imam al-Khalil bin Ahmad al-Farāhīdi al-Azadi al-Yahmadi, *Kitāb al-Ain, Tahqīq*: Mahdi al-Makhzumi dan Ibrahim al-Samira'i, (Dār al-Maktabah al-Hilal, 2003) 184.

[2] Muhammad bin Mukrim ibn Ali, Abu al-Faḍli Jamal al-din ibn al-Manẓūr, *Lisān al-Arab*, (Dār Ṣādir, Berut, 2010), jilid 13: 438. Lihat juga Ibrahim Anis, Abdul Halim Muntasir, Atiyah al-Sawalihi, dan Muhammad Khalafullah Ahmad, *al-Mu'jam al-Wasit*, (Majma'al lughah al-Arabiyah, 2004), 894.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

المجتهد المعاني والأحكام الشرعية من النصوص ومصادر الأدلة الأخرى.[3]

istinbat dalam kaitannya dengan fiqh adalah upaya seorang mujtahid untuk mengeluarkan dan menemukan makna dan hukum-hukum syar'i dari dalil-dalil nas Al-qur'an dan al-Hadith dan sumber dalil yang lain. Dengan demikian, kata *istinbāṭ* digunakan dalam arti *al-istikhrāj* (mengeluarkan) yaitu mengeluarkan atau menjelaskan sesuatu yang sebelumnya masih belum jelas.[4]

Definisi ini mirip dengan istilah istinbāṭ menurut uṣul fiqh: في علم أصول الفقه الإستنباط هو إستنتاج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية وإستخراجها وإستخلاصها منها[5], menemukan dan menghasilkan hukum-hukum syar'i dari dalil-dalil yang terperinci. Muhammad Bin Ali al-fayyumi ahli bahasa arab dan fiqh, ijtihad adalah upaya menggali dan mengeluarkan hukum dari sumber-sumbernya[6] dengan jalan ijtihad untuk mencari hukum syara' yang bersifat *zhanni*.[7]

---

[3] Ahmad bin Idris al-Qarāfi, *Anwār al-Burūq fī Anwā'i al-furūq*, *Hāshiyah bin Husain al-makkiy al-malikiy*, (Alam al-kutub, tt) Juz 2, 128-129.

[4] Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010) 67.

[5] Badruddin Bin Muhammad Bahadir al-Zarkasyi, *al-Bahru al-Muhīṭ* dalam muqaddimah, (Dār alkutbi, 1994) Juz 1, 37-38.

[6] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011) Sumber hukum Islam pada dasarnya ada dua macam: 1). Sumber tekstual atau sumber tertulis (disebut juga *Nuṣūṣ*) yaitu langsung berdasarkan teks Al-quran dan Sunnah Nabi. 2). Sumber nontekstual atau sumber tak tertulis (disebut juga *ghairu nuṣūṣ*) seperti *istihsān* dan *qiyās*. Meskipun sumber hukum keduanya tidak langsung mengambil dari Al-quran dan Sunnah, tapi hakikatnya digali dari (berdasarkan atau menyandar) Al-quran dan Sunnah.

[7] Effendi,Satria.. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group 2009) 178. Lihat pula Haidar Baqir dan Syafiq Basri, *Ijtihad dalam sorotan*, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1996) 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian secara istilah tersebut masih bersifat umum sehingga *istinbāṭ* bisa saja dilakukan oleh ulama fiqh/ushul fiqh dan ulama yang ahli di bidang selain fiqh. Oleh karena itu, pengertian *istinbāṭ* secara terminologi harus dibatasi pada wilayah fiqh (hukum Islam). Dengan adanya pembatasan pada wilayah hukum Islam, maka secara ringkas istinbāṭ diartikan sebagai upaya untuk menarik hukum dari nash (Al-qur'an dan al-Sunnah) yang berkaitan dengan hal-hal yang sulit dan penting dengan jalan ijtihad.[8]

Penggunaan istilah ijtihad memberikan isyarat bahwa istinbāṭ harus dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah ushuliyyah sebagai pedoman operasional dalam menjelaskan nash-nash syar'i berdasarkan perspektif hukum Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik satu pemahaman bahwa *istinbāṭ* adalah suatu upaya menemukan hukum-hukum syara' dari nash Al-qur'an dan al-Sunnah yang dilakukan dengan cara mencurahkan kemampuan nalar dan pikiran. Sepintas memang nampak ada persamaan antara pengertian istinbāṭ dan ijtihad.[9] Namun pada hakekatnya antara *istinbāṭ* dan ijtihad terdapat perbedaan.

Ijtihad mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan istinbāṭ, karena istinbāṭ merupakan kerangka kerja dari ijtihad. Fokus istinbāṭ adalah nash

---

[8] Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 155. Lihat juga Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana 2009), 177.

[9] Menurut fuqaha ijtihad adalah menghabiskan kemampuan dan mencurahkan daya upaya untuk menemukan hukum syar'i. Sementara menurut ulama ushul fiqh, ijtihad adalah mencurahkan daya dan upaya untuk sampai pada menemukan hukum syar'i yang amali yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Definisi tersebut menurut Abu Ishaq al-Syairazi dalam kitabnya *al-Tabṣirah Fī Usūl al-Fiqh*, (Dār al-Kutub al-Misriyyah, 2012), 258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-qur'an dan al-Sunnah. Oleh karena itu, usaha pemahaman, penggalian dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut istinbāṭ. Sedangkan pemahaman, penggalian dan perumusan hukum yang dilakukan melalui metode *qiyās, istiṣhāb,* dan *istiṣlāh* dan dalil rasional lainnya disebut ijtihad.[10]

B. Metode *Istinbāṭ* Hukum

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa istinbāṭ merupakan usaha untuk mengeluarkan hukum dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Sedangkan al-Qur'an dan al-Sunnah -sebagai dalil hukum Islam yang asasi- dalam menunjukkan hukum menggunakan berbagai cara, ada yang tegas dan ada yang tidak tegas, ada yang melalui arti bahasa dan ada juga yang melalui maksud hukumnya.

Di sisi lain, terdapat pula pertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya yang tentunya memerlukan penyelasaian. Oleh karena itu, agar bisa mendapatkan hukum yang tepat dibutuhkan metode yang tepat pula, dan para ulama ushul fiqh telah membahas dan merumuskan metode-metode yang dapat digunakan untuk melakukan istinbāṭ hukum dari Al-qur'an dan al-Sunnah.

Secara garis besar metode dan kaidah yang digunakan untuk melakukan istinbāṭ hukum diklasifikasikan menjadi dua, yaitu melalui pemahaman langsung dari teks dengan pendekatan kebahasaan (*ṭūruq lafẓiyyah*) atau biasa disebut *(ṭūruq lughawiyah)* dan pendekatan makna atau *ruh naṣ* (*ṭuruq ma'nawiyyah atau*

[10] Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maqāṣid al-sharī'ah).[11]Selanjutnya akan dijelaskan kedua metode istinbat hukum tersebut.

C. Metode Istinbāṭ Hukum Dengan Pendekatan Tata Bahasa

Kontruksi hukum dengan analisa tata bahasa *(ṭūruq lughawiyah)* adalah memahami bahasa teks[12] yang tampak. Teks ini dapat diucapkan, ditulis dan dipahami pengertiannya.[13] Hal pertama yang mendapat perhatian dari para ulama ushul fiqh adalah pengertian lafaẓ dalam kaitannya dengan posisi lafaz di dalam kalimat. Untuk selanjutnya pembahasan tentang lafaz melebar sampai pada kajian lafaẓ dengan melihatnya dari berbagai sisi. Oleh karena itu, ulama ushul fiqh pada periode klasik[14] telah membahas tentang keberadaan lafaz dan maknanya[15] secara panjang lebar dalam kitab-kitab mereka.

---

[11] Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Fikr al-Arabiy, 2010), 115.

[12] Teks Alquran yang berbicara tentang hukum Islam dari 6000-an ayat-ayat Alquran sekitar 500-an ayat. Jumlah ayat yang terbatas itu, pada umumnya berisi ketentuan-ketentuan hukum secara umum pula. Sementara hadist, sebagai penjabar lebih lanjut tentang maksud ayat-ayat Alquran, dan tidak menjelaskan secara langsung semua ketentuan hukum tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kedua sumber ini berbentuk teks/*nash* berbahasa Arab. Dikutip dari Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh,* (Jakarta:Amzah,2011), 243.

[13] Hamka Haq, *Falsafah Ushul Fiqh*, (Ujung Pandang: Yayasan al-Ahkam, 1998), 203.

[14] Di antaranya seperti Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i dalam kitabnya (*al-Risālah*). Beliau seorang imam yang dikenal sebagai *founder* dari metode ini *(ṭūruq lughawiyah).* Seorang tokoh yang masyhur dalam penggunaan pendekatan ini ialah Abu Bakr Al-Baqilani al-Maliki dalam kitabnya "*al-Taqrib wa al-Irshad al-Kabir*". Selain imam dan tokoh yang mencetuskan dan mengembangkan metode ini, ada pula kitab-kitab yang telah dikarang berdasarkan dengan metode ini. Di antara kitab-kitab tersebut adalah *Al-Mu'tamad* oleh Abu Hasan Muhammad Ibnu Ali Al-Bashri, seorang ulama Mutazillah yang wafat pada tahun 413 H, *al-Mustashfa* oleh al-Ghazali dan *Al-Burhān fī uṣūl al-fiqhi, al-Talkhīs fī Uṣūl al-Fiqh. al-Shāmil fī Uṣūl al-Fiqh,al-Irsyād ilā Qawāṭi' al-Adillah fī Uṣūl al-'Itiqād. al-Waraqāt fī Uṣūl al-Fiqh* oleh imam Haramain seorang ulama madzhab Syafi'i yang wafat tahun 487 H.
Sumber: https://islam.nu.or.id/post/read/118905/imam-haramain-al-juwaini--sanad-keilmuan-dan-karya-karyanya

[15] Contoh penetapan hukum yang dilakukan oleh imam Syafi'i dengan menerapkan metode kebahasaan adalah persoalan mengenai masa '*iddah*. Dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 228 tentang '*iddah* menyatakan bahwa *"perempuan-perempuan yang bercerai dari suami hendaklah ber-'iddah selama tiga quru"*. Imam Syafi'i mengartikan kata *Qurū'* dengan arti "suci". Salah satu alasan yang dikemukakan oleh imam Syafi'i adalah mengenai kata *qurū'* yang bersifat *mudzakar*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu panjang dan luasnya kajian tentang lafaz yang dilakukan oleh ulama ushul fiqh periode klasik, maka beberapa ulama kontemporer mencoba melakukan klasifikasi dalam beberapa kategori.

An-Nasyimi mengklasifikasikan kajian tentang lafaz dan maknanya dalam empat kategori, yaitu: *pertama*, lafaz dilihat dari sisi makna yang diciptakan atau cakupannya. Kategori ini meliputi *'āmm, khāṣ* dan *mushtarak*. *Kedua*, lafaz dilihat dari sisi penggunaannya terhadap makna. Kategori ini meliputi *haqīqah, majāz, ṣarīh,* dan *kināyah*. *Ketiga*, lafaz dilihat dari sisi kejelasan dan tidaknya dalam menunjukkan makna. Kategori ini meliputi dua kelompok yaitu (a) *wāḍih al-dalālah* atau lafaz yang jelas maknanya yang meliputi yaitu *ẓāhir, naṣ, mufassar dan muhkam,* dan *gair wāḍih al-dalālah* atau lafaz yang tidak jelas maknanya yang meliputi *khafi, mushkil, mujmal dan mutashābih*. *Keempat*, lafaz dilihat dari sisi cara pengungkapannya terhadap makna. Kategori ini meliputi *ibārah al-naṣ, isyārah al-naṣ, dalālah al-naṣ, dan iqtiḍā' al-naṣ.*[16]

---

sehingga untuk *mudzakar* tentu tidak berlaku haid, maka kata *qurū'* dalam ayat tersebut berarti suci. Identifikasi *quru* sebagai kata *mudzakar* adalah dengan kaidah bahasa Arab yang menyatakan bahwa ketika kata bilangan dituliskan dalam bentuk *muannast* sebagaimana *"stalastah"* dalam ayat tersebut maka yang dibilang harus ditulis dalam bentuk *mudzakar*. Oleh karenanya lafaz *quru* mesti dalam bentuk *mudzakar*. Jadi menurut imam Syafii masa *'iddah*nya perempuan yang ditalak suami adalah selama tiga kali masa suci. Penetapan hukum ini dirumuskan dengan menggunakan kaidah bahasa Arab dalam memahami lafaz-lafaz al-Quran yang tidak jelas *(ghairu ṣarīh)*.

[16] Muhammad bin Mahmud bin bin Ahmad al-Hanafi, *al-Rudūd wa al-Nuqūd Sharah Mukhtasar ibn al-Hājib*, Maktabah al-Rusyd, 2005. Lihat pula Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Dār al-Fikr al-Arabiy, 2010) 115. Menurutnya, kajian tentang lafaz dalam empat kategori, yaitu (1) lafaz dilihat dari sisi kejelasan dan kekuatan penunjukannya terhadap makna, (2) lafaz dilihat dari sisi cara pengungkapannya terhadap makna yang terkandung di dalam lafaz, (3) lafaz dilihat dari sisi cakupannya terhadap makna, dan (4) lafaz dilihat dari sisi bentuknya dalam menenjukkan taklif hukum. Klasifikasi ini hampir mempunyai sisi perbedaan dalam pemberian istilah dan ruang lingkupnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada bagian selanjutnya akan dijelaskan secara ringkas klasifikasi tersebut beserta obyek kajiannya.

1. Lafadz dilihat dari sisi makna yang diciptakan atau cakupannya meliputi *ām, khāṣ* dan *mushtarāk.*

   a. ‘Ām

   ‘Ām menurut ulama ushul periode klasik adalah lafaz yang maknanya mencakup dua hal atau lebih. Sedangkan menurut jumhur ulama ushul ‘ām adalah lafaz yang diciptakan untuk menunjukkan pengertian umum sesuai dengan pengertian lafaz itu sendiri tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu. Dari definisi tersebut bisa dipahami bahwa lafaz ‘ām merupakan lafaz yang sejak pertama diciptakan untuk menunjukkan arti umum yang tidak terbatas yang tentunya masih dalam ruang lingkup lafaz.

   Lafaz *‘ām* mempunyai banyak bentuk. Berikut ini akan disebutkan bentuk-bentuk lafaz ‘ām.

   1) Isim mufrad (tunggal) yang di-ma’rifat-kan dengan alif-lam atau *iḍāfah*. Misalnya kata *al-insān* dalam ayat berikut:

   اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ٢ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ٣ (العصر: 2-3)

   ....“Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang yang beriman….”(Q.S. al-Ashr: 2-3)[17]

[17] (Al-Qur’an dan Terjemahnya, 1418 H; 1099)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Lafaz jamak (plural) yang dima'rifatkan dengan alif dan lam,seperti terdapat pada lafaz *al-wālidāt* pada ayat berikut:

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ... (البقرة: 233)

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh....." *(Q.S. al-Baqarah: 233)*[18]

3) Lafaz كل (setiap) dan جميع (seluruhnya), seperti kata كل yang terdapat pada ayatberikut:

....كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ. (الطور/52: 21)

….Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya.(al-Ṭūr : 21).[19]

4) Isim Syarat (kata benda untuk mensyaratkan), seperti lafaz *man, mā, aina, haitsu.* Misalnya kata *man* yang terdapat dalam ayat berikut:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ١٨٥ (البقرة/2: 185)

…."Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu…."(Q.S. al-Baqarah: 185).[20]

Lafaz "man" pada ayat tersebut meliputi semua orang yang mengetahui datangnya bulan Ramadhan maka dia wajib berpuasa.

[18] Ibid, 1418 H, 57.
[19] Ibid, 1418 H, 866
[20] Ibid, 1418 H, 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Isim mauṣul(kata ganti penghubung), seperti : الذي, التي, الذين, اللاتي. Misalnya ayat berikut :

اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا (النسآء/4: 10)

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (An-Nisa'/4:10).[21]

6) Isim nakirah yang jatuh setelah *nafi*, *nahy*, atau *syaraṭ*. Misalnya ayat:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ... الممتحنة/60: 10)

….Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya”….(Q.S. al-Mumtahanah: 10).[22]

Lafaz ām dilihat dari segi makna yang dimaksud dikelompokkan menjadi tiga, yaitu lafaz ām yang dimaksudkan untuk umum, lafaz ‘ām tetapi yang dimaksud adalah khusus, dan lafaz ‘ām yang berisfat mutlak.

Pertama, lafaz ‘ām yang dimaksudkan untuk umum, yaitu ‘ām yang disertai dengan petunjuk yang menghilangkan

[21] Ibid, 1418 H, 116.
[22] Ibid, 1418 H, 924.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemungkinan untuk dikhususkan. Lafaz ‘ām yang seperti ini hukumnya *qaṭ’i al-dalālah*. Sebagai misal ayat berikut:

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا..... (هود/11: 6)

Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah pasti memberi rizkinya…..”[23]

Lafaz *al-dābbah* (binatang melata) mencakup semua binatang yang melata di muka bumi, dan menjadi sunnah Allah bahwa semua binatang yang melata akan mendapat rizki.

Kedua, lafaz ‘ām tetapi yang dimaksud adalah khusus, yaitu ‘ām yang disertai petunjuk yang menghilangkan arti umumnya dan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ‘ām tersebut adalah makna khusus. Misalnya ayat berikut:

...وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا (اٰل عمران/3: 97)

….Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana….[24]

Arti lafaz *al-nās* pada ayat tersebut adalah semua manusia, namun yang dimaksud sebenarnya adalah makna khusus yaitu orang mukallaf yang berakal.

Ketiga, lafaz ‘ām yang bersifat mutlak, yaitu ‘ām yang tidak disertai dengan petunjuk yang menghilangkan kemungkinan dikhususkan dan tidak disertai petunjuk yang menghilangkan

[23] Ibid, 1418 H, 327.
[24] Ibid, 1418 H, 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keumumannya. Lafaz ‘ām yang bersifat mutlak banyak dijumpai dalam teks yang terdapat lafaz ‘ām yang tidak dibarengi dengan *qarīnah lafẓiyyah, fi’liyyah,* atau *urfiyah* (adat kebiasaan). Misalnya, lafaz *al-muṭallaqāt* yang terdapat dalam ayat berikut:

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍ..... (البقرة/2: 228)

Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū*…..[25]

Lafaz ‘ām yang bersifat mutlak menunjukkan makna umum selama tidak ada dalil yang men-takhṣīṣ-kannya.

b. *Khāṣ*

Lafaz *khāṣ* adalah lafaz yang dibuat untuk menunjukkan kepada sesuatu yang terbatas jumlahnya, mencakup segala sesuatu yang bisa diterapkan kepadanya atau diterapkan kepada individu-individu tertentu.[26]

Mengenai petunjuk lafaz khāṣ para juris Islam sepakat bahwa lafaz khāṣdalam nash syara‟ menunjukkan kepada pengertiannya yang khas secara qaṭ’i(pasti) dan hukum yang dikandungnya juga bersifat qaṭ’i selama tidak ada indikasi yang menunjukkan pengertian lain.[27] Misalnya ayat berikut ini:

...فَكَفَّارَتُه اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ

[25] Ibid, 1418 H, 55.
[26] Muhammad bin Ahmad bin Sahal Shamsuddin Shamsu al-Aimmah al-Sarakhsi, *al-Mabsūṭ*, (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1989) 24.
[27] Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqhi* (Jakarta: Sinar Grafika,2008) 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ .... (المآئدة/5: 89)

> …Maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya… (Al-Ma'idah/5:89).[28]

Lafaz *'asharah* dalam ayat tersebut diciptakan hanya untuk menunjukkan arti bilangan sepuluh tepat, tidak lebih dan tidak pula kurang. Di samping itu, arti sepuluh itu juga sudah pasti tidak ada kemungkinan pengertian lain. Begitulah ayat *khaṣ* dalam Al-qur"an, selama tidak ada dalil yang memalingkannya kepada pengertian lain seperti makna majazi (metafora).

Sesuai dengan pengertian lafaz *khaṣ* sebagai lafaz yang menunjukkan makna yang khusus, maka lafaz *khaṣ* mempunyai empat bentuk, yaitu: *amr, nahy, muṭlaq* dan *muqayyad*.[29]

1). *Amr*

Menurut ulama ushul fiqh, *amr*[30] adalah lafaz yang menunjukkan tuntutan untuk mengerjakan sesuatu yang berasal

---

[28] Ibid, 1418 H, 176.

[29] Sya'ban Muhammad Ismail, *Uṣūl al-Fiqhi, Nash'atuhu wa Taṭawwuruhu wa Madārisuhu wa al-Da'watuh ilā Tajdīdihi*, (Dār al-Salām, tt) 299.

[30] Lihat Muhammad al-Khudari Bek, dalam *Uṣūl al-Fiqh*, (al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, 1969) 24-26, *Amr* di dalam al-Qur'an dijelaskan dalam berbagai redaksi. Di antara redaksi lafaz *amr* adalah (1) Perintah tegas dengan menggunakan kata *amara* (أمر) dan yang seakar dengannya.(2) Perintah dalam bentuk pemberitaan bahwa perbuatan itu diwajibkan kepada manusia dengan memakai kata *kutiba* (كتب). (3) Perintah dengan memakai redaksi pemberitaan (jumlah khabariyah) namun yang dimaksudkan adalah perintah. (4) Perintah dengan memakai kata kerja perintah secara langsung. (5) Perintah dengan menggunakan kata kerja (*fi'il muḍāri*) yang disertai dengan *lam al-amr*. (6) Perintah yang menggunakan kata *faraḍa*. (7) Perintah dalam bentuk menjanjikan kebaikan yang banyak atas pelakunya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari yang lebih tinggi kedudukan kepada pihak yang rendah kedudukannya.[31]

Jumhur ulama berpendapat bahwa lafaz *amr* selalu menunjukkan pengertian wajib kecuali ada indikasi yang menunjukkan pengalihan dari *dalālah* aslinya kepada hukum yang lain. Jika indikasi menunjukkan makna *ibāhah*, maka lafaz amr akan menunjukkan makna *ibāhah*. Jika ada indikasi yang menunjukkan makna *nadb*, maka lafaz amr akan menunjukkan makna *nadb*. Jika ada indikasi yang menunjukkan makna *irsyād*, maka lafaz amr akan menunjukkan makna *irsyād*. Jika ada indikasi yang menunjukkan makna *ta'dīb*, maka lafaz *amr* akan menunjukkan makna *ta'dīb*.[32]

2). *Nahy*

Nahy[33] adalah lafaz yang menunjukkan adanya tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan dari yang lebih tinggi derajatnya kepada yang lebih rendah.[34] Pada dasarnya antara *nahy* (larangan) dan *amr* (perintah) adalah sama-sama perintah. Hanya

---

[31] Sya'ban Muhammad Ismail, *Uṣūl al-Fiqhi, Nash'atuh wa Taṭawwuruh wa Madārisuh wa al-Da'watuh ilā Tajdīdih*, (Dār al-Salām, tt), 310.

[32] Ibid, 312.

[33] Di dalam al-Qur"an larangan dinyatakan dalam berbagai ragam bentuk dan gaya bahasa. Di antaranya:(1) Larangan dengan menjelaskan bahwa suatu perbuatan itu diharamkan. (2) Larangan dengan menegaskan bahwa perbuatan itu tidak dihalalkan.(3) Larangan dengan menggunakan kata yang berarti perintah meninggalkan.(4) Larangan secara tegas dengan menggunakan kata "naha" atau yang seakar dengannya. (5) Larangan dengan mengancam pelakunya dengan siksa di akhirat, (6) Larangan dengan memberi ancaman atas suatu perbuatan, (7) Larangan dalam bentuk kalimat pemberitaan.

[34] Muhammad Mustafa al-Shalabi, *Uṣūl al-Fiqhi al-Islāmiy: al-Muqaddimah al-Ta'rifiyyah bi al-Uṣūl wa Adillat al-Ahkām wa Qawā'id al-Istinbāṭ,* (Dār al-Nahḍah al-Arabiyyah, 2010), 401.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja kalau *amr* adalah perintah untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan *nahy* adalah perintah untuk tidak melakukan perbuatan.

Para ulama ushuliyyun merumuskan beberapa kaidah yang berkenaan dengan *nahy*. Di antara kaidah-kaidah tersebut adalah:

a) الأصل في النهي للتحريم

Arti kaidah tersebut adalah bahwa pada prinsipnya suatu larangan menunjukkan hukum haram, seperti firman Allah swt. :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ اِلَّا بِالْحَقِّ... (الاسرآء/17: 33)

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar… (Al-Isra'/17:33).[35]

Kaidah tersebut sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dan jumhur ulama ushul. Sedangkan menurut Hanafiyah, lafaz *nahy* menunjukkan makna *tahrīm* bila dalil yang menjelaskan larangan bersifat *qath'i*, dan apabila dalil yang menjelaskan larangan bersifat *ẓanny* maka nahy menunjukkan makna *makrūh tahrīm*.[36]

Dalam pandangan jumhur ulama ushul, lafaz *nahy* yang menunjukkan arti *tahrīm* (haram) bisa saja mengalami perubahan makna aslinya apabila ada indikasi yang

[35] Al-Qur'an dan Terjemahnya, 1418 H; 429.
[36] Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-fīqi al-Islāmiy*, (Dār al-Fikr al-Mu'āsir, 2009), 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan adanya makna lain selain makna *tahrīm* seperti: *al-karāhah* (makruh), *al-du'ā* (permohonan), dan *al-irsyād* (petunjuk). Penunjukkan lafaz *nahy* yang menunjukkan makna *karāhah* dapat ditemukan pada Al-qur'an misalnya ayat :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ...
(الجمعة/62: 9)

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli... (al-Jumu'ah/62:9).[37]

Kata وَذَرُوا الْبَيْعَ menjelaskan bahwa transaksi jual beli pada saat adzan shalat jum'at dikumandangkan hukumnya makruh, karena ada indikasi lain yang mengalihkan makna asli *nahy*, yaitu dilarangnya jual beli bukan pelarangan esensi jual beli itu sendiri, tetapi dikarenakan kekawatiran terabaikannya shalat jum'at akibat sibuk dengan transaksi jual beli.

Selain menunjukkan makna *karāhah*, lafaz *nahy* juga ada yang menunjukkan makna *irsyād* seperti yang terdapat dalam ayat 101 surat al-Maidah:

[37] Ibid, 1418 H; 933.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْيَاۤءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ.....
(المآئدة/5: 101)

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu (justru) menyusahkan kamu …….. (al-Ma'idah/5:101).[38]

Ayat ini memberikan petunjuk untuk tidak melakukan sesuatu yang pada ujungnya akan mendatangkan *maḍarrat* dan mempersulit diri sendiri. Adanya *maḍarrat* dan mempersulit diri sendiri merupakan indikasi yang mengalihkan makna *tahrīm* kepada makna *irsyād*.[39]

b) الأصل في النهي يقتضي الفساد مطلقا

Arti kaidah ini adalah suatu larangan menunjukkan *fasād* (rusak) perbuatan yang dilarang itu jika dikerjakan. Kaidah ini

---

[38] Ibid, 1418 H;179

[39] Sya'ban Muhammad Ismail, *Uṣūl al-Fiqhi, Nash'atuh wa Taṭawwuruh wa Madārisuh wa al-Da'watuh ilā Tajdīdih*, (Dār al-Salām, tt) 321. Selain makna-makna tersebut, masih ada makna lain yang ditunjukkan oleh *nahy* yaitu (1*) al-du'ā* (permohonan), contohnya firman Allah swt : رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi." (Ali 'Imran/3:8) (2) *al-tahdīd* (menakuti), misalnya majikan berkata kepada pembantunya, "Jangan kamu taati perintahku", (3) *Tahqīr* (mencemooh), misalnya firman Allah: وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka, (sebagai) bunga kehidupan dunia (Taha/20:131), (4) *Bayan al-Aqibah* (menjelaskan balasan perbuatan), seperti firman Allah swt: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ
Dan janganlah engkau mengira, bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. (Ibrahim/14:42), dan (5) *tay ̄ts* (putus asa), seperti dalam firman Allah swt. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ
janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan". (QS. 66:7).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disepakati apabila larangan berkaitan dengan perbuatan atau perkataan yang esensinya memang diharamkan (*harām li żātihi*), bukan diharamkan karena ada indikasi tertentu (*harām li ghairihi*). Contoh dari perbuatan yang *harām li żātihi* adalah larangan zina, larangan menjual bangkai, atau dalam bidang ibadah seperti larangan shalat dalam keadaan tidak suci. Larangan- larangan ini apabila tetap dikerjakan maka perbuatan yang dilakukan menjadi batal. Implikasi lain dari kaidah ini adalah manakala ditujukan kepada perbuatan atau perkataan yang diharamkan karena ada faktor eksternal, seperti larangan menyetubuhi istri yang sedang haid. Dalam hal ini, menurut jumhur ulama bahwa larangan yang disebabkan oleh faktor eksternal tidak menyebabkan batal apabila perbuatan yang dilarang tetap dilakukan, dan akibat-akibat hukum dari perbuatan tersebut tetap berlaku bagi pelakunya. Dengan istilah lain, perbuatan tersebut berstatus hukum *makrūh*.[40]

3). Mutlaq dan Muqayyad

Muṭlaq adalah lafadz yang menunjukkan satu makna dari beberapa satuan yang menjadi cakupannya tanpa adanya ikatan yang terpisah secara lafdzi. Sedangkan *muqayyad* adalah lafadz yang menunjukkan satu makna dari beberapa satuan yang menjadi

[40] Muhammad Mustafa al-Shalabi, *Uṣūl al-Fiqhi al-Islāmiy: al-Muqaddimah al-Ta'rifiyyah bi al-Uṣūl wa Adillat al-Ahkām wa Qawā'id al-Istinbāṭ,* (Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 2010), 405.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cakupannya dengan disertai ikatan yang terpisah secara lafdzi.[41] Menurut al-Amidi, *muṭlaq* adalah lafadz yang menunjukkan makna yang jelas tanda dukungan suatu sifat (keterangan) tertentu. *Muqayyad* adalah lafadz yang menunjukkan makna yang jelas dengan dukungan suatu sifat (keterangan) tertentu.[42]

Dalam al-Qur"an terdapat banyak ayat yang bersifat *muṭlaq* dan ada juga yang bersifat *muqayyad*. Oleh karena itu, berdasarkan kaidah Ushul Fiqh bahwa ayat yang di dalamnya terdapat lafadz *muṭlaq* maka harus dipahami secara mutlak selama tidak ada dalil yang membatasinya. Demikian pula, ayat yang di dalamnya terdapat lafadz *muqayyad*, maka harus dipahami secara *muqayyad* sesuai dengan batasan yang disebutkan.

2. Lafadz dilihat dari sisi penggunaannya terhadap makna

Lafaz dilihat dari segi penggunaan maknanya terbagi menjadi empat yaitu *haqīqi*, *majāzi*, *ṣarih* dan *kināyah*. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing dari keernpat macam lafadh tersebut.

a. Haqiqi dan Majazi

Haqīqi adalah kata yang digunakan menunjukkan makna

---

[41] Lihat Muhammad al-Khudari Bek, dalam *Uṣūl al-Fiqh*, (al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, 1969), 192.

[42] Abu Hamid bi Muhammad al-'Amidi al-Samarqandiy al-Hanafi, *al-Tarīqah al-'Amīdiyyah*, (Dār al-Kutub al-Misriyyah, tt), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau pengertian yang asli baik secara bahasa, *syar'i*, kebiasaan atau terminologi.

Majāzi (metaforis) adalah kata yang untuk menunjukkan makna sesuatu selain makna yang sebenarnya karena adanya hubungan antara makna asli dan makna baru dan ada petunjuk (*qarīnah*) yang menghalangi penggunaan makna *haqīqi*.

Kaidah yang berlaku dalam masalah lafadz *haqīqi* adalah mengamalkan makna yang semula diciptakan untuk lafadz haqīqi baik lafadz haqīqi tersebut bersifat „*am*, *khaṣ*, „*amr* atau *nahy*, selama tidak ada *qarinah* yang memalingkan makna *haqīqi*-nya. Contohnya adalah firman Allah:

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ (البقرة/2: 43)

Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. (Al-Baqarah/2:43).[43]

Yang dimaksud dari kata shalat dan zakat pada ayat tersebut adalah makna *haqīqi syar'i* dan perintah bersifat *'ām* (umum) yang ditujukan kepada semua orang mukmin.[44]

Sedangkan kaidah yang berlaku bagi lafadz *majazi* sama persis dengan kaidah lafadz *haqīqi*. Artinya bahwa yang dijadikan pegangan adalah arti baru yang melekat padanya. Contohnya adalah firman Allah:….. اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ……(النسآء/4: 43)

[43] Al-Qur"an dan Terjemahnya, 1418 H; 16.

[44] Muhammad Mustafa al-Shalabi, *Uṣūl al-Fiqhi al-Islāmiy: al-Muqaddimah al-Ta'rifiyyah bi al-Uṣūl wa Adillat al-Ahkām wa Qawā'id al-Istinbāṭ,* (Dār al-Nahḍah al-Arabiyyah, 2010), 456.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

….atau kamu telah menyentuh perempuan, ….(An-Nisa'/4:43).[45]

Kata "*lāmastum"* pada ayat tersebut mempunyai makna *majāzi* yaitu bersetubuh, dan ayat tersebut secara umum ditujukan kepada semua orang mukmin.[46]

b. *Ṣarīh* dan *Kināyah*

Ṣarīh adalah lafadz yang maksudnya tidak tersembunyi karena sering digunakan, baik dengan makna *haqīqi* atau makna *majāzi*. Sedangkan yang dimaksud dengan *kināyah* adalah lafadz yang tersembunyi maksudnya baik secara *haqīqi* maupun *majāzi.*

Lafal *ṣarih* mempunyai akibat hukum secara langsung kepada hal yang lain. Misalnya dalam masalah talak, bila suami berkata kepada istrinya, "engkau aku cerai", maka dengan perkataan tersebut terjadi penceraian sekalipun tidak disertai dengan niat. Sedangkan kepastian hukum yang diakibatkan oleh lafadz *kināyah* sangat tergantung dengan niat. Misalnya seorang suami berkata kepada istrinya, "Pulanglah engkau ke rumah orang tuanmu". Ucapan ini sangat tergantung pada niat suami ketika mengucapkannya, jika suami bermaksud menceraikan istrinya maka telah jatuh talak. Jika suami tidak bermaksud menceraikan istrinya, maka tidak terjadi talak.[47]

---

[45] Al-Qur"an dan Terjemahnya, 1418 H; 125.
[46] Ibid, 456.
[47] Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-fiqi al-Islāmiy*, (Dār al-Fikr al-Mu'āsir, 2009), 308-309.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Lafadz dilihat dari sisi kejelasan dan tidaknya dalam menunjukkan makna

Dilihat dari segi kejelasan penunjukannya, lafadz dibedakan menjadi dua yaitu lafadz yang jelas penunjukannya (*wāḍih al-dalālah*) dan lafadz yang tidak jelas penunjukannya (*ghair wāḍih al-dalālah*).

a. *Wāḍih al-dalālah*

Waḍih ad-dalālah adalah lafadz yang menunjukkan makna melalui bentuk asalnya tanpa terikat oleh faktor lain. Lafadz yang masuk dalam kategori *Waḍih ad-dalālah* dibagi menjadi empat yaitu yaitu *naṣ, ẓāhir, mufassar* dan *muhkam*. Dalam kaitannya dengan penunjukan makna, empat istilah tersebut mempunyai tingkatan yang berbeda. Tingkat yang paling rendah adalah *ẓāhir, naṣ, mufassar* dan *muhkam* yang menempati tingkatan paling tinggi.[48]

1) *Ẓāhir*

Ulama Ushul Fiqh memberikan pengertian tentang *Ẓāhir* dengan redaksi yang berbeda namun saling melengkapi. Menurut al-Bazdawi,[49] *Ẓāhir* merupakan istilah yang digunakan untuk

[48] Ibid, 312. 72.

[49] Nama lengkapnya Abu al-Yusri Muhammad bin Muhammad Abdul Qasim al-Bazdawi. Dia pengikut al-Maturidi, namun tidak selamanya sepaham dengan al-Maturidi. Kadang-kadang fahamnya lebih dekat dengan faham mu'tazilah. Di bidang fiqh, dia pengikut mazhab Hanafi. Dia dikenal sebagai seorang *Faqīh, Ahli Uṣūl al-Fiqh, Muhaddits* dan *Mufassir*. Lihat Ali Abdul Fattah al-Maghribi, *Imām ahl –al-Sunnah wa al-Jamā'ah Abū Mansur al-Māturīdi wa Arā'uhu*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan kata yang sudah jelas maksudnya bagi orang yang mendengarkannya melalui bentuk kata itu sendiri.[50]

Menurut Ibnu Subkhi *ẓahir* adalah lafadz yang menunjukkan suatu pengertian yang hanya sampai pada tingkat *dzanni.*[51] Istilah *dzanni* disini mengandung makna bahwa sekalipun makna lafadz *ẓahir* itu dapat dipahami dengan cepat dan mudah, tetapi tidak menutup kemungkinan ada makna lain selain makna yang dipahami melalui mendengarkan.[52]

Menurut ulama‟ ushul, kaidah yang berlaku dalam lafaz *ẓāhir* adalah bahwa setiap lafadz *ẓāhir* harus dipegang makna *ẓāhir*-nya selama tidak ada petunjuk yang menjelaskan adanya pengalihan makna. Misalnya, ayat berikut:

وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا .....(البقرة/2: 275)

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (al-Baqarah/2:275).

Ayat ini jelas sekali mengandung pengertian bahwa jual beli itu hukumnya halal dan riba itu hukumnya haram, karena

---

al-Kalāmiyyah, (Maṭba'ah al-Da'wah al-Islāmiyyah, 1985) dan Yusran Asmuni Dirosah Islamiyah II, Pengantar Studi Sejarah Kebudayaan Islam Dan Pemikiran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).

[50] Abu Abd Allah Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, *Ṣahīh al-Bukhāri*, (Riyād: Dār al-Salām,tt)

[51] Subhi al-Salih, *Ma'ālim al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, (Dār al-Ilmi li al-Malāyīn, 1982).

[52] Adanya makna lain selain dari makna asal lafadz *ẓahir* misalnya lafadz *ẓahir* tersebut berupa lafaz '*am* sehingga mungkin saja perlu di*takhsis*, berupa lafadz *mutlak* yang perlu dibatasi melalui *muqayyad*, atau berupa lafadz *haqīqi* tetapi yang dikehendaki adalah makna *majāzi.* Lihat Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqhi*, (Dār al-Qalam Maktabat al-Da'wah Shihāb al-Azhār,2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makna inilah yang mudah dan cepat ditangkap oleh akal seseorang tanpa memerlukan petunjuk yang menjelaskannya. Walaupun sebenarnya pengertian tersebut bukan pengertian asasi yang dikehendaki oleh ayat berdasarkan susunan redaksinya.[53]

2) *Naṣ*

Naṣ adalah suatu lafazh yang menunjukkan hukum yang jelas, yang diambil menurut alur pembicaraan, namun mempunyai kemungkinan ditakhsish dan ditakwil yang kemungkinannya lebih lemah dari pada kemungkinan yang terdapat dari lafazh *ẓahir*. Selain itu, ia dapat dinasakh pada zaman risalah (zaman Rasul).[54] Contohnya adalah ayat berikut:

...فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ ...(النسآء/4: 3)

.....maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat… (An-Nisa'/4:3).[55]

Bila diamati berdasarkan makna lafadz *ẓahir,* ayat tersebut menerangkan hukum diperbolehkannya nikah. Tetapi apabila diamati dari makna lafadz *naṣ* maka ayat tersebut menjelaskan hukum poligami dan batas-batasannya, karena hukum poligami dan batasannya merupakan makna asal yang ditunjukkan oleh ayat dengan dasar adanya *qarīnah* (petunjuk)

---

[53] Muhammad Mustafa al-Shalabi, *Uṣūl al-Fiqhi al-Islāmiy: al-Muqaddimah al-Ta'rifiyyah bi al-Uṣūl wa Adillat al-Ahkām wa Qawā'id al-Istinbāṭ,* (Dār al-Nahḍah al-Arabiyyah, 2010), 463.

[54] Muhammad Adib Salih, *Tafsīr al-Nuṣūs fī al-Fiqhi al-Islāmiy*, (al-Maktabah al-Islamiy, tt), 149.

[55] Al-Qur'an dan Terjemahnya, 1418 H; 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dijelaskan sendiri oleh *shāri'*, yaitu firman Allah:

...فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ... (النسآء/4: 3)

> …Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki…. (An-Nisa'/4:3).

Dengan demikian, maka maksud dari ayat tersebut adalah makna kedua, yaitu diperbolehkannya poligami dengan batasan empat istri.[56]

3) *Mufassar*

Pengertian *mufassar* adalah lafadz yang menunjukkan kepada maknanya secara jelas dan rinci tanpa ada kemungkinan untuk dipalingkan kepada pengertian lain (*ta'wīl*) atau di*takhsis*.[57] Menurut Muhammad Abu Zahrah, *mufassar* adalah:

اللفظ الدال على معناه المقصود من السياق من دليل اخر وقد يكون مجملا في الأصل فجاء النص الأخر فيفسره.[58]

Dengan demikian, term *mufassar* menjadi tidak mutlak, karena masih memerlukan term lain sebagai penyempurna pengertiannya. Menurut Adib Shalih, lafadz *mufassar* dilihat dari sisi faktor yang menyebabkan kejelasan maknanya dibagi

---

[56] Ahmad bin Muhammad bin Abdi Rabbih, *al-'Iqd al-Farīd*, (Beirut Lebanon : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), 266.

[57] Tidak adanya ruang bagi upaya mentakwilkan lafadz *mufassar* mengindikasikan bahwa makna yang dijelaskan oleh lafadz *mufassar* menduduki peringkat di atas lafadz *naṣ* dan lafadz *ẓahir*. Karena di dalam lafadz *naṣ* dan lafadz *ẓahir* masih memungkinkan adanya takwil, sedangkan dalam lafadz *mufassar* tertutup untuk di*takwil*kan. Lihat Muhammad Adib Ṣālih, *Tafsīr al-Nuṣūs fī al-Fiqhi al-Islāmiy*, (al-Maktabah al-Islāmiy, tt), 165.

[58] Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, *op, cit*, 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi dua:[59]

a. Kejelasan makna yang bersumber dari bentuk lafadz sehingga tidak membuka ruang bagi takwil atau takhsis.

b. Kejelasan makna karena ada penjelasan dari dalil lain yang *qaṭ'i*.

4) Muhkam

Pengertian *muhkam* dalam kontek ini adalah:

اللفظ الذي دل على معناه دلالة واضحة قطعية لاتقبل تأويلا ولا تخصيصا.[60]

Lafaz yang mnunjukkan makna secara tegas dan jelas dan tidak menyisakan ruang interpretasi dan spesifikasi pemaknaan). Lafaz ini maknanya sudah jelas berdasarkan bentuknya sendiri dengan tingkat kejelasan yang kuat melebihi kejelasan *mufassar* dan tidak memiliki kemungkinan untuk *ta'wil* atau *nasakh.*[61]

Indikasi tidak adanya takwil terhadap lafaz muhkam disebabkan oleh derajat kejelasan maknanya yang mencapai batas maksimal. Demikian pula tidak adanya *naskh* karena makna yang ditunjukkan oleh lafadz *muhkam* adalah makna asli yang tidak mungkin menerima perubahan dan

[59] Ibid, 169.
[60] Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, *op, cit*, 96.
[61] Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pergantian.

b. *Ghair Wāḍih al-Dalālah*

Ghair wādih al-dalālah adalah lafadz yang tidak jelas penunjukkannya terhadap makna. Lafadz yang masuk dalam kategori ini bisa menunjukkan makna apabila didukung oleh indikasi eksternal.[62] Ulama Hanafiyah membagi lafadz yang masuk dalam kategori ini menjadi empat bagian yaitu *khafi, musykil, mujmal,* dan *mutasyābih*.

1). Khafiy

Khafi adalah lafadz yang mempunyai ketidakjelasan yang bukan disebabkan oleh bentuk lafadz, tetapi disebabkan oleh penerapan makna lafaz tersebut pada kasus yang serupa.[63]

Contoh dari khafi adalah arti *as-sāriq* yang terdapat dalam ayat berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (المآئدة/5: 38)

"Pencuri laki-laki dan perempuan potonglah tangan keduanya" (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagi siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha bijaksana. (Q.S. al-Maidah:38).[64]

Arti lafadz *as-sāriq* sebenarnya sudah jelas yaitu orang

[62] Muhammad Mustafa al-Shalabi, *op.cit*, 474.
[63] Muhammad Abu Zahrah, Uṣūl al-Fiqh, *op, cit*, 124.
[64] Al-Qur"an dan Terjemahnya, 1418 H; 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengambil harta yang bernilai milik orang lain dalam tempat penyimpanannya secara sembunyi-sembunyi. Ke-tidakjelas-an timbul ketika menerapkan ayat tersebut kepada tukang copet yang secara lihai bisa memanfaatkan kelalaian seseorang untuk menguras hartanya. Apakah pencopet bisa dikategorikan dalam pengertian pencuri? Untuk mencari jawaban tersebut diperlukan ijtihad dengan meneliti apakah pengertian "mencopet" termasuk dalam pengertian ayat sesuai dengan cara suatu lafadz menunjukkan suatu pengertian.

2). *Musykil*

Musykil adalah lafadz yang tidak jelas makna yang dikehendaki yang disebabkan oleh lafadz itu sendiri, sehingga untuk menemukan makna yang dikehendaki harus dilakukan pemahaman yang intensif dan didukung dengan petunjuk (*qarīnah*) yang menjelaskan makna yang sebenarnya.[65] Ke-tidakjelas-an makna lafadz *musykil* bisa juga disebabkan karena mempunyai banyak makna, sedangkan yang dimaksud hanya satu makna.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa lafadz *musykil* adalah lafadz yang ketidakjelasan makna disebabkan oleh bentuk lafadz itu sendiri. Sedangkan untuk lafadz *khafi*, ketidakjelasan makna disebabkan oleh faktor eksternal.

[65] Syamsuddin al-Sarakhsiy, *al-Mabsūṭ*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1989), 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh lafadz musykil adalah lafadz *qurū'* yang terdapat dalam ayat:

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍ .....(البقرة: 228)

"wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *qurū'*…. (Q.S. al-Baqarah: 228).[66]

Lafaz *qurū'* yang terdapat dalam ayat tersebut mempunyai arti ganda yaitu masa suci dan masa haid. Adanya arti ganda itu jelas menunjukkan hukum yang berbeda pula. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengartikannya dengan masa haid.[67] Sedangkan Syafi"iyah mengartikannya dengan masa suci.[68] Masing-masing mengambil kesimpulan yang berbeda setelah melakukan penelitian dan mendasarkan kepada *qarīnah* atau dalil dari luar yang berbeda pula.

3). *Mujmal*

Mujmal adalah lafadz yang mempunyai banyak makna dan antara makna tersebut terdapat keserupaan yang tidak bisa ditemukan melalui lafadz itu sendiri, sehingga dibutuhkan usaha menjelaskannya melalui keterangan dari *syāri'*. Secara ringkas, *mujmal* merupakan lafadz yang maknanya tidak jelas yang hanya bisa diketahui melalui penjelasan dari *syāri'* sendiri (az-Zuhaili,

---

[66] Al- Qur"an dan Terjemahnya, 1418 H; 55.

[67] Ulama Hanafiyah dan Hanabilah mendasarkan pendapatnya kepada ayat 4 Q.S. at-Talaq. dan juga ilandasi *qarīnah* yaitu pensyariatan *iddah* untuk mengetahui kesucian kandungan dari hamil yang bisa diketahui dengan haid.

[68] Syafi"iyah mendasarkan pendapatnya kepada ayat 1 Q.S. at-Talaq, dan *qarīnah* yaitu kata bilangan („adad) –lafadz ṡalāsah- berbentuk muannaṡ. Ini artinya bahwa ma"dūd (yang terbilang) harus dalam bentuk mużakkar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1986; 340).[69] Ketidakjelasan makna lafadz *mujmal* disebabkan oleh:

a) Makna etimologi dari lafadz itu sendiri, misalnya lafadz *halū'ā* yang terdapat dalam ayat :

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ١٩ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا ٢٠ وَّإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا ٢١ (المعارج/70: 19-21)

Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagikikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir. (Q.S. al- Ma'arij: 19-21).[70]

Lafadz *halū'a* adalah lafadz yang *mujmal* dan untuk menemukan maknanya *syāri'* menjelaskannya sendiri sebagaimana pada ayat-ayat berikutnya.

b) Pengalihan makna lafaz dari makna *lughāwi* kepada makna *syar'i*, seperti lafaz *aṣ-ṣalah* yang secara etimologi berarti do'a, namun yang justru dipakai adalah makna syar'i yang hanya bisa dipahami melalui hadits (az-Zuhaili, 1986; 341).[71]

4). *Mutasyābih*

Mutasyābih adalah lafadz yang bentuknya sendiri tidak menunjukkan kepada makna yang dimaksud, tidak ada indikasi yang menerangkannya, dan *syāri'* sendiri tidak menjelaskan

[69] Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-fiqi al-Islāmiy*, (Dār al-Fikr al-Mu'āsir, 2009) 308-309. Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-fiqi al-Islāmiy*, (Dār al-Fikr al-Mu'āsir, 2009), 340.
[70] Al-qur'an dan Terjemahnya, 1418 H, 974.
[71] Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-fiqi al-Islāmiy*, *op. cit,* 341.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maknanya.[72] Bentuk lafadz *mutasyābih* lebih banyak ditemukan pada ayat atau teks hadits yang berhubungan dengan masalah teologi dan ushuluddin.

4. Lafadz dilihat dari sisi cara pengungkapannya terhadap makna

Lafadz dilihat dari cara pengungkapannya terhadap makna ada empat, yaitu *ibārat al-naṣ, isyārat al-naṣ, dalālah al-naṣ*, dan *iqtiḍā' al-naṣ*.

a. *'Ibārat al-Naṣ*

'Ibārat al-naṣ adalah makna yang ditunjukkan oleh nash sesuai redaksi kalimat, baik makna pokok (*aṣālah*) atau tambahan (*taba'iyah*), dan berdasarkan redaksi kalimat makna tersebut terangkum di dalamnya.[73]

Bila diamati sekilas nampak adanya persamaan antara lafadz *naṣ* dengan "*ibārat an-naṣ*. Tetapi pada hakikatnya berbeda. Perbedaan antara *naṣ* dan "*ibārat an-naṣ* terletak pada cakupan makna, kalau "*ibārat an-naṣ* mencakup makna pokok (*aṣālah*) dan makna tambahan (*taba'iyah*), sedangkan *naṣ* hanya mencakup makna pokok saja.[74] Contohnya firman Allah swt. berikut:

.... فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ... (النسآء: 3)

.....maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga

[72] Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, *op, cit*, 135.
[73] Musthafa Sa'id Al-Khin, *Sejarah Ushul Fikih*, (Pustaka Al-Kautsar, 2000), 295.
[74] Muhammad Adib Salih, *Tafsīr al-Nuṣūs fī al-Fiqhi al-Islāmiy*, (al-Maktabah al-Islamiy, tt), 470-471

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki… (An-Nisa'/4:3).[75]

Ayat ini menunjukkan kepada tiga hukum, yaitu: *Pertama*, kebolehan menikah. *Kedua*, kebolehan menikah lebih dari satu wanita sampai empat. *Ketiga*, wajib membatasi hanya satu apabila khawatir tidak dapat berlaku adil. Dua makna yang terakhir adalah yang dimaksud secara asli dari konteks ayat. Adapun yang pertama adalah makna sekunder. "*Ibārat an-naṣ* mencakup ketiga makna tersebut, sedangkan *naṣ* hanya menunjukkan dua point yang terakhir. Karena secara istilah *naṣ* adalah makna yang dimaksud secara asli, dan point yang pertama bukan makna yang dimaksud.[76]

b. *Isyārat al-Naṣ*

Isyārat al-naṣ adalah penunjukan lafadz terhadap suatu makna yang bukan makna yang dimaksud oleh redaksi nash, tetapi merupakan makna yang terkait (lazim) dengan hukum yang disebutkan di dalam nash.[77] Contohnya adalah ayat berikut :

...وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَه رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ .....

"…Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma`ruf… (Q.S. al-Baqarah: 233).[78]

c. *Dalālah al-naṣ*

---

[75] Al-Qur"an danTerjemahnya, 1418 H, 115
[76] Musthafa Sa'id Al-Khin, *Sejarah Ushul Fikih*, *op.cit,* 295.
[77] Musthafa Sa'id Al-Khin, *Sejarah Ushul Fikih*, *ibid,* 296.
[78] Al-Qur'an dan Terjemahnya, 1418 H, 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalālah an-naṣ[79] adalah apabila ada nash yang secara tekstual menunjukkan hukum suatu kasus dan kemudian hukum tersebut dapat diterapkan pada kasus lain karena adanya faktor penyebab hukum yang sama.[80] Menurut as-Sarakhsi *dalālah al-naṣ* adalah hukum yang ditetapkan melalui makna struktur kalimat dengan pendekataan kebahasaan dan bukan melalui cara *istinbāṭ* dengan menggunakan daya nalar.[81] Sebagai contoh dari *dalālah al-naṣ* adalah ayat berikut:

اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ۗ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا (النسآء/4: 10)

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (al-Nisa'/4:10).[82]

Dengan *ibārat al-naṣ* ayat tersebut menjelaskan larangan memakan harta anak yatim secara *ẓalim*. Secara nalar bahwa sebab larangan tersebut adalah menghabiskan dan menghambur-hamburkan harta anak yatim dengan cara yang tidak benar. Maka dengan pendekatan *dalālah al-naṣ* bahwa segala perbuatan menghabiskan dan menghambur- hamburkan harta anak yatim dikategorikan sama dengan

---

[79] *Dalālah an-naṣ* ini juga disebut juga *fahw al-khiṭāb*, sebagian fuqaha menyebutnya dengan istilah *Qiyās Jali*, dan di kalangan jumhur ulama disebut dengan *mafhūm muwāfaqah* (Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-fiqi al-Islāmiy*, *op.cit,* 353). Di kalangan ulama Hanafiyah terjadi perbedaan pendapat mengenai pengertian *dalālah an-naṣ*. Namun mereka menemukan titik temu bahwa yang dimaksud dengan *dalālah an- naṣ* adalah hukum yang disebutkan dalam nash (*manṭūq*) berlaku pula pada kasus yang tidak disebutkan dalam nash (*maskūt*) karena terdapat makna yang sama (Musthafa Sa'id Al-Khin, *Sejarah Ushul Fikih*, (Pustaka Al-Kautsar, 2000, 298).

[80] Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, *op, cit*, 141.

[81] Syamsuddin al-Sarakhsiy, *al-Mabsūṭ*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1989), 241.

[82] Al-qur'an dan Terjemahnya, 1418 H, 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memakannya dengan cara *ẓalim*.

d. *Iqtiḍā' al-Naṣ*

Iqtiḍā' al-Naṣ adalah dilalah lafadz terhadap suatu makna yang tidak dapat berdiri sendiri kecuali dengan mentakdirkan (menyisipkan) lafazh yang lain.[83]

Dalam kaitannya dengan keberadaan lafadz yang menjadi sisipan yang bertujuan untuk menjelaskan keabsahan kalimat, ulama ushul dari kalangan Hanafiyah, Syafi"iyah dan Mu'tazilah membagi dalam tiga bagian :

1). Sesuatu yang wajib ditakdirkan (dimunculkan) kebenaran suatu ucapan. Misalnya Hadits Nabi Muhammad saw. berikut :

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه إبن ماجه

"Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah mengangkat dari umatku perbuatan yang salah, lupa, dan keterpaksaan." (H.R. Ibnu Majah).

Secara tekstual hadits ini mengandung makna bahwa kesalahan, lupa dan keterpaksaan telah dicabut sehingga tidak ada lagi lupa, kesalahan dan keterpaksaan

[83] Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, *op, cit*, 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terjadi pada umat manusia. Namun kenyataan yang ada bertentangan dengan hadits tersebut, karena manusia mempunyai sifat lupa dan juga tidak bisa terhindar dari kesalahan. Oleh karena itu, hadits tersebut wajid ditakdirkan dengan *iṡm* (dosa). Maksudnya *iṡm al-khaṭā' wa an-nisyān* (dosa kesalahan dan lupa), agar kalimat tersebut jadi benar.

2). Sesuatu yang wajib dimunculkan untuk kebenaran suatu ungkapan atau kalimat secara akal. Contohnya firman Allah dalam ayat berikut:

واسأل القرية التي كنا فيها

Dan tanyalah (penduduk) negeri yang Kami berada disitu" (Q.S. Yusuf: 82).[84]

Redaksi ayat tersebut terasa ada yang kurang, karena tidak mungkin bertanya kepada kampung yang bukan makhluk hidup. Karena itu perlu dimunculkan suatu kata sehingga ungkapan itu menjadi benar dan selaras maknanya. Adapun kata yang layak dimunculkan adalah "penduduk" sebelum kata "kampung", karena yang bisa ditanya dan memberi jawaban adalah penduduk kampung.

3). Sesuatu yang wajib ditaqdirkan (dimunculkan) untuk sahnya

[84] Al-Qur'an dan Terjemahnya, 1418 H, 361.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu ungkapan secara syar"i. Misalnya dalam potongan ayat

....فتحرير رقبة مؤمنة.....

….maka ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman (Q.S. an-Nisa": 92).[85]

Untuk memperjelas makna تحرير رقبة maka dimunculkan kata perintah *harrirū* (merdekakan) untuk menjelaskan bahwa sebenarnya ayat tersebut mengandung perintah memerdekakan budak.[86]

D. Metode *Istinbāṭ* Hukum Dengan Pendekatan *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Al-qur'an dan al-Hadist sebagai sumber hukum Islam yang utama telah sempurna untuk mengatur kehidupan manusia dari berbagai sendi kehidupan, baik yang berhubungan dengan Allah swt, dengan alam sekitarnya, maupun dengan sesama manusia. Hukum-hukum tersebut ada yang sudah jelas, sebagaimana yang tersurat dalam Al-qur'an dan al-Hadits ada pula yang tersirat di balik hukum yang tersurat tersebut.

Selain yang tersurat dan yang tersirat tersebut, ada hukum-hukum Allah yang tersembunyi di balik kedua sumber tersebut. Hukum-hukum yang tersembunyi inilah yang harus dicari, digali, ditemukan oleh manusia yang kompeten di bidangnya melalui penalarannya.[87]

Dalam rangka mencari dan menemukan hukum-hukum yang

---

[85] Al-Qur'an dan Terjemahnya, 1418 H, 136.
[86] Muhammad Adib Salih, *op. cit.* 548-549
[87] Asmawi, *Studi Hukum Islam: Dari Tekstualis – Rasionalis – Sampai Rekonsiliatif*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersembunyi tersebut, diperlukan wawasan dan kemampuan untuk menggali hakikat hukum Allah dan tujuan Allah menciptakan hukum-hukumnya itu.[88]

Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia, peristiwa-peristiwa hukum bersifat dinamis dan berkembang terus secara "tidak terbatas" sampai hari kiamat. Peristiwa-peristiwa baru itu memerlukan adanya ketentuan hukum.[89]

Kompleksitas ranah historis manusia dengan berbagai wacana, model, dan aktivitas yang mengitarinya yang setiap hari berubah dan bahkan tampak rumit seakan tidak tertampung dalam nilai dan norma hukum yang ada dalam *nash* (Al-qur'an - al-Sunnah) saat ini. *Tatanāhā al-nuṣūṣ walā tatanāhā al-waqā'i* (wahyu sudah tidak lagi diturunkan, sementara peristiwa/kebutuhan hukum terus berkembang) sehingga mengharuskan para mujtahid (cendikiawan/pakar hukum) untuk dapat melakukan ijtihad dalam rangka pembaharuan (reformasi) terhadap hukum itu sendiri.

Pemikiran fiqih Islam secara preskriptif ini bertujuan menggali norma-norma Islam yang dipandang ideal untuk dapat mengatur tingkah laku manusia dan menata kehidupan bermasyarakat yang baik.[90]

---

[88] Ibid, 107.
[89] Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 304.
[90] Yusdani, "*Fiqh Dan Hak Asasi Manusia: Prespektif Dialogis-Preskriptif- Akomodatif*".(al-Mawarid, Jurnal Hukum Islam. Vol. XV, No. 1, Februari- Agustus 2014. Yogyakarta: FIAI UII), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya Allah menciptakan dan menetapkan hukum bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan keselamatan hidup manusia. Kemaslahatan tersebut baik berupa manfaat ataupun menolak madharat (kerugian) bagi kehidupan manusia. Hakikat tujuan hukum ilahi inilah yang harus senantiasa dijadikan pegangan dan pedoman para mujtahid dalam berijtihad merumuskan hukum-hukum yang tersembunyi itu.[91]

Upaya ijtihad hukum menuju tujuan hukum, tidak bisa lepas dari aspek *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang telah dipopulerkan oleh Ibrahim bin Musa bin Muhammad Abu Ishaq al-Shatibi (w.790 H). Karena dengan konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah,* hukum Islam mampu beradaptasi dengan perubahan sosial. Konsep tersebut termaktub dalam kitab karyanya *al-Muwāfaqāt*[92] yang oleh Imam al-Hāfiẓ bin Marzuq disebut sebagai kitab yang paling cerdas.[93]

Hammadi al-Ubaydi menyatakan bahwa orang yang pertama membahas masalah *al-maqāṣid al-sharī'ah* adalah salah seorang tabi'in yang bernama Ibrahim al-Nakhaiy (w.91 H).[94] Hammadi al-Ubaydi

---

[91] Masyfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1987), 27.

[92] Karya al-Shatibi yang dpat dilacak hingga sekarang selain *al-Muwāfaqāt* adalah *Sharh al-Jalīl 'alā al-Khulāṣah fī Ilm al-Nahw, al-I'tiṣām, al-Ifādāt wa al-Iinshādāt, Unwān al-Ittifāq fī Ilm al-Ishtiqāq, dan Uṣūl al-Nahw.*

[93] Abdullah Mustafa al-Maraghi, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Terj.Husein Muhammad, (Yogyakarta: LKPSM, 2001), 276.

[94] Nama lengkap beliau adalah Abu Imran Ibrohim bin Yazid bin Qois ibnu Al-Aswad bin Amru bin Rubaj'ah bin Dzukhl bin Saʼad bin Malik bin Nakha' al-Nakha'iy al-Yamani al-Kufy, juga dikenal dengan nama Ibrahim al-Nakha'i. Ia adalah seorang teolog , ahli hukum dan sarjana Islam yang lahir pada tahun 670. Ia bertemu banyak sahabat Muhammad termasuk, Anas ibn

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan bahwa Ibrahim an-Nakhaiy pernah berkata "bahwa sesungguhnya hukum-hukum Allah memiliki tujuan, hikmah, dan mashlahat untuk manusia". Sebagai landasan pemikirannya, Ibrahim mengunakan sejumlah ayat, di antaranya adalah Q.S. al-Baqarah/2:222.[95]

1. Pengertian *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Secara bahasa *Maqāṣid al-Sharī'ah* terdiri dari dua kata yaitu *Maqāṣid* dan *al-Sharī'ah*. Maqāṣid berarti kesengajaan atau tujuan, Maqāṣid merupakan bentuk jamak dari maqsud yang berasal dari suku kata *qaṣada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan, Maqāṣid berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.[96] Sedangkan Syari'ah secara bahasa berart المكان الذي ينحدر منه الماء ,[97] artinya: jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.[98]

Di dalam Al-qur'an Allah Swt menyebutkan beberapa kata Syari'ah diantaranya sebagai mana yang terdapat dalam surat al-Jatsiyat:

Malik dan Aisha binti Abu Bakar. Lihat Lecomte, G., "al-Nakhaʿī, Ibrāhīm", dalam: *Encyclopaedia of Islam, Edisi Kedua*, Diedit oleh: P. Bearman, Th. Bianquis, CE Bosworth, E. van Donzel, WP Heinrichs. http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_SIM_5771. Pertama kali dipublikasikan secara online: 2012. Edisi cetakan pertama: ISBN: 9789004161214, 1960-2007. Disalin dari riwayat Ibrahim an Nakha'iy dalam *Tahdhīb al-Asma'I wa al-Lughāt al-Nawawi dan Tahdhīb al-Tahdzīb karya Ibnu Hajar asqalani.*

[95] Hammadi al-Ubaydi, *al-Shātibiy wa Maqāṣid al-Shari'ah*, (Manshūrāt Kulliyāt ad-Da'wah al-Islāmiyyah wa Lajnah al-Huffādz 'alā at-Turās al-Islāmiy, 1992), 134-135.

[96] Ahmad Qorib, *Uṣūl Fiqh 2*, (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997, Cet, II), 170.

[97] Dikutip oleh Asafri Jaya dalam kitab *lisān al-'Arab,* kepunyaan Ibnu Mansur al-Afriqi, (Bairut: Dār al-Sadr, tt),VIII, 175.

[98] Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa: Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1994), 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ١٨ (الجاثية/45: 18)

"Artinya: kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. (Q.S.45:18).

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ.. الشورى: 13)

"Artinya: Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama[99]dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya…" (Q.S. 42:13).

Adapun Pengertian Maqashid Syari'ah secara istilah tidak ada definisi khusus yang dibuat oleh para ulama Usul fiqh, boleh jadi hal ini sudah maklum di kalangan mereka. Berikut ini beberapa pendapat dari pakar *maqāṣid asy-syarīah* tentang definisi *maqāṣid asy-syarīah* secara terminologis.

a. Menurut Abu Ishaq al-Shatibi dalam kitab al-muwafaqat:

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا....

Pada bab berikutnya al-Shatibi juga mengemukakan:[100]

وأن الأحكام مشروعة لمصالح العباد

"Dan sesungguhnya hukum-hukum disyariatkan untuk

[99] Yang dimaksud agama di sini ialah meng-Esakan Allah s.w.t., beriman kepada-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya dan hari akhirat serta mentaati segala perintah dan larangan-Nya.
lihat foot note 1340 Alqur'an dan terjemahan (Jakarta:Kitab suci Alqur'an Dep. Agama RI,1983), 785.

[100] al-Shatibi, *al-Muwāfaqāt, Ibid.* 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan hamba".

Dari kedua definisi di atas, dapat dipahami bahwa al-Shathibi itu sendiri tidak membuat ta'rif yang khusus, beliau Cuma mengungkapkan tentang syari'ah dan fungsinya bagi manusia.

b. Menurut Ibnu Asyur (w. 1973 M), *maqāṣid asy-syarīah* yang bersifat umum adalah:

المعاني والحكم المحفوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظته بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة

"makna dan hikmah yang diperhatikan oleh *al-Shāri'* dalam keseluruhan atau sebagian besar aturan syariat, dengan tanpa memberikan perhatian secara khusus pada satu bidang hukum."[101]

c. Menurut Allal al-Fasi (w. 1974 M), *maqāṣid asy-syarīah* adalah:

الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

Tujuan dan rahasia dari syariat yang ditetapkan olah *al-Shari'* pada setiap hukum.[102]

d. Menurut al-Raisuni, *maqāṣid asy-syarīah* adalah:

إن مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد

Tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariat untuk merealisasikan kemaslahatan hamba.[103]

---

[101] Muhammad al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid al-sharī'ah al-Islamiyyah,* (Qaṭar: Wazarat al-Auqāf al-Qaṭriyyah, 2001), 215

[102] Allal ibn Abd al-Wahid ibn Abd al-Salam ibn Allal al-Fasiy, *Maqāṣid al-sharī'ah al-Islāmiyyah wa makārimuhā,* (Dar al-Gharb al-Islamiy,1993), 7.

[103] Ahmad al-Raisuni, *Madkhal Ilā Maqāṣid al-sharī'ah,* (Dār al-Kutub, 2010), 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari empat definisi menurut keempat pakar tersebut di atas, dapat dipahami bahwa definisi *Maqāṣid al-sharī'ah* pada prinsipnya mengacu pada tujuan disyariatkannya hukum, yaitu untuk kemaslahatan dan kebaikan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.[104]

Tujuan disyariatkannya hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari kerusakan atau mafsadah. Terkait hal itu al-Shatibi mengatakan:[105]

إن الأحكام الشرعية إنما شرعت لجلب المصالح أو درء المفاسد وهي مسبباتها قطعا.

"Sesungguhnya hukum-hukum syariat tersebut disyariatkan untuk menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan, dan hal tersebut merupakan sebab-sebab adanya hukum dengan pasti".

2. Klasifikasi *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Berdasarkan tingkat kebutuhan mukallaf, tujuan disyariatkannya hukum adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat, baik melalui cara mendatangkan manfaat atau menolak madharat. Untuk menentukan apakah suatu perbuatan hukum mengandung nilai manfaat atau madharat, maka tolak ukurnya adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, *maqāṣid al-sharī'ah* berdasarkan kemaslahatan yang menjadi kebutuhan manusia dalam kehidupan dibagi dalam tiga tingkatan, yaitu

[104] Asmawi, *op.cit.* 108.
[105] al-Shatibi, *al-Muwāfaqāt, Ibid.* 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ḍarūriyyat, *hājjiyat*, dan *tahsīniyyat*.[106]

a. *Ḍarūriyyāt*

Ḍarūriyyat adalah segala sesuatu yang harus ada demi tegaknnya kemaslahatan agama dan dunia. Kemaslahatan yang bersifat *ḍarūriyyat* apabila tidak ada maka kemaslahatan dunia tidak berjalan dengan normal, bahkan akan membawa kerusakan dan hilangnnya kehidupan dunia, dan bagi kehidupan di akhirat akan kehilangan keselamatan dan tidak mendapatkan nikmat.[107] *Maqāṣid al-sharī'ah* yang mempunyai keterkaitan dengan kemaslahatan *ḍarūriyyat* mencakup lima hal pokok (*al-kulliyāt al-khams*), yaitu *hifẓ al-din* (memelihara agama), *hifẓ al-nafs* (memelihara jiwa), *hifẓ al-nasl*/*nasb* (memelihara keturunan), *hifẓ al-'aql* (memelihara akal), *hifẓ al- māl* (memelihara harta).[108]

b. *Hājjiyāt*

Hājjiyāt adalah maslahah sekunder atau disebut pula dengan maslahat *jalb al-maṣālih*. Maslahat *hājjiyāt* adalah maslahat yang apabila tidak sampai terwujud tidak mengancam keselamatan manusia, namun hanya manusia akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya. *Maqāṣid asy-syarīah* yang berkaitan dengan kategori ini merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan demi memberikan keleluasaan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menghilangkan segala

[106] Muhammad al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid al-sharī'ah al-Islamiyyah,* (Qaṭar: Wazarat al-Auqāf al-Qaṭriyyah, 2001), 300.
[107] al-Shatibi, *al-Muwāfaqāt, Ibid.* 221.
[108] Muhammad bin Muhammad Abu Hamid al-Ghazali, *al-Fikr al-Maqāsidi 'Inda al-Imām al-Ghazāli*, (Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), 251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk kesulitan yang akan menimpa manusia. Di antara ayat al-Qur'an yang menjadi landasan adanya keringanan hukum adalah ayat berikut:

....مَا يُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ .....(المآئدة/5: 6)

"….Dan Dia (Allah) tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu suatu kesempitan"… (Q.S. al-Maidah:6).[109]

c. *Tahsīniyyāt*

Tahsīniyyāt adalah maslahat bersifat tersier. Yang dimaksud dengan *tahsīniyyat* adalah segala sesuatu yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok tujuan hukum Islam dan juga tidak menimbulkan kesulitan. Maslahah dalam tingkat ini adalah maslahah yang bersifat pelengkap. Yang termasuk dalam kategori maslahat *tahsīniyyāt* adalah hal-hal yang merupakan kepatutan berdasarkan adat istiadat, menghindari hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak. Tujuan syariat dalam kategori ini berlandaskan kepada ayat-ayat al-Qur"an. Misalnya, ayat berikut:

وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَه عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (المآئدة/5: 6)

"…..Tetapi Dia (Allah) hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur".(Q.S.al-Maidah:6).[110]

3. *al-Kulliyyāt al-Khams* menjadi Acuan *Maqāṣid al-sharī'ah*

[109] Al-Qur"an dan Terjemahnya, 1418 H; 159
[110] Al-Qur'an dan Terjemahnya, 1418 H; 159

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menetapkan hukum, semua ketetapan bertujuan kepada lima hal pokok yang disebut dengan *al-Kulliyyāt al-Khams* (lima hal pokok yang harus dijaga, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal, dan memelihara harta. Hal ini kemudian dibedakan lagi menjadi tiga peringkat, yaitu: *ḍarūriyyah, hājiyyah, dan tahsīniyyah.*[111] Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritas. *Ḍarūriyyah* menjadi peringkat yang pertama, kedua *hājiyyah,* kemudian *tahsīniyyah.* Selain peringkat prioritas tersebut, pada prinsipnya urutan ketiga melengkapi urutan kedua, dan peringkat kedua melengkapi urutan yang pertama.[112] Berikut ini akan diuraikan hukum-hukum Islam yang disyariatkan untuk melindungi *al- kulliyat al-khams* sesuai dengan peringkatnya yaitu *ḍarūriyyāt, hājjiyāt,* dan *tahsīniyyāt.*

a. *Hifẓ al-Din* (memelihara agama).

Dalam peringkat *ḍarūriyyāt* ditetapkan ajaran-ajaran yang bertujuan untuk mewujudkan pemeliharaan agama, seperti ajaran tentang keimanan, perintah menjalankan ibadah wajib, anjuran melaksanakan ibadah yang bersifat sunnah, dan senantiasa berpegang teguh dan mendakwahkan agama. Sedangkan dari sisi upaya melindungi agama dari hal-hal yang merusak agama ditetapkan ajaran tidak mempersekutukan Allah, disyariatkan jihad di jalan Allah, menyadarkan

[111] al-Shatibi, *al-Muwāfaqāt, Ibid.* Juz II, 8.
[112] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali orang yang murtad, dan memberlakukan hukuman bagi pelaku maksiat.[113]

Dalam peringkat *hājjiyat* sebagai upaya untuk menghindari kesulitan Islam menetapkan hukum diperbolehkannya shalat *jama'* dan shalat *qaṣar* bagi orang yang sedang bepergian, diperbolehkannya tidak berpuasa bagi orang yang sedang bepergian dan sakit.[114]

Dalam peringkat *tahsīniyyat* sebagai upaya menjunjung tinggi martabat manusia dan sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Allah ditetapkan hukum menutup aurat baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Ketentuan-ketentuan ini sangat erat sekali hubungannya dengan akhlak yang terpuji.[115]

b. *Hifẓ an-Nafs* (memelihara jiwa)

Dalam peringkat *ḍanūriyyāt* demi terwujudnya perlindungan jiwa disyariatkan pernikahan sebagai sarana lahirnya jiwa manusia, untuk melindungi jiwa disyariatkan terpenuhinya kebutuhan biologis manusia berupa sandang, pangan dan papan. Dalam peringkat *hājjiyāt* diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Dalam peringkat *tahsīniyyāt* seperti ditetapkanya tata cara makan dan minum.

---

[113] Muhammad al-Shaḥat al-Jundi, *al-Mīrāth Fī al-Sharī'at al-Islāmiyyah,* (Kairo: Dār al-Fikr al-Arabi, 2008), 183-200.
[114] Abdul Karim Zaedan, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh,* (Mu'assasah Qurṭubiyyah, 1976), 377.
[115] Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, Yogyakarta: Logos, tt), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Hifẓ al-Nasl/Nasb* (memelihara keturunan),

Dalam peringkat *ḍarūriyyāt* disyariatkan menikah dan dilarang zina. Dalam peringkat *hājjiyāt* ditetapkannnya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akan nikah dan diberikannya hak talak padanya. Jika mahar tidak disebutkan dalam akad nikah maka suami akan mengalami kesulitan karena harus membayar mahar *miṡli*. Sedangkan mengenai hak talak suami akan mengalami kesulitan jika dia tidak menggunakan hak talaknya padahal kondisi dalam rumah tanggganya tidak harmonis. Dalam peringkat *tahsīniyyāt* disyariatkannya khitbah atau walimah dalam perkawinan. Ketentuan ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak akan mempersulit orang yang melakukan perkawinan.[116]

d. *Hifzal-Aql* (memelihara akal)

Dalam peringkat *ḍarūriyyāt* diharamkan meminum minuman keras. Dalam peringkat *hājjiyāt* dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Kalau hal ini tidak dilakukan tidak akan merusak akal, tetapi mempersulit diri seseorang dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam peringkat *tahsīniyyāt*

[116] Fathurrahman Djamil, *ibid*, 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianjurkan untuk menjauhkan diri dari mengkhayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat.[117]

e. *Hifẓ al-Māl* (*memelihara* harta)

Dalam peringkat *ḍarūriyyāt* disyariatkan tentang tata cara pemilihan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan ini dilanggar maka terancam eksistensi harta. Dalam peringkat *hājjiyāt* seperti disyariatkan jual beli dengan cara akad salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal. Dalam peringkat *tahsīniyyāt* disyariatkan ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan dan penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika dalam bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.[118]

Secara substansial *maqāṣid al-sharī'ah* mengandung kemashlahatan, baik ditinjau dari *maqāṣid al-shāri'* (tujuan Tuhan) maupun *maqāṣid al-mukallaf* (tujuan Mukallaf*).*[119] Dilihat dari sudut tujuan Tuhan, *Maqasid*

---

[117] Fathurrahman Djamil, *ibid*, 131.
[118] Fathurrahman Djamil, *ibid*,
[119] Begitu pula dari sudut *maqāṣid al-mukallaf*, *maqāṣid al-sharī'ah* mengandung empat aspek pula, yaitu(1) Pembicaraan *mashlahah*, pengertian, tingkatan, karakteristik, dan relativitas atau keabsolutannya. (2).Pembahasan dimensi linguistik dari problem *taklif* yang diabaikan oleh *juris* lain. Suatu perintah yang merupakan *taklif* harus bisa dipahami oleh semua subjeknya, tidak saja dalam kata-kata dan kalimat tetapi juga dalam pengertian pemahaman linguistik dan kultural. Al Syathibi mendiskusikan problem ini dengan cara menjelaskan *dalalah asliyah* (pengertian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al- Syariah mengandung empat aspek, keempat aspek inilah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam makalah ini, (1). Tujuan awal dari *Shāri'* (Allah dan rasul-Nya) menetapkan syariah yaitu untuk kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat. (2). Penetapan syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami. (3). Penetapan syariah sebagai hukum taklifi yang harus dilaksanakan. (4). Penetapan syari'ah guna membawa manusia ke bawah lindungan hukum yakni terhindar dari mengikuti hawa nafsu.

4. Metode Istinbāṭ Hukum Maqāṣid al-Sharī'ah

Pengetahuan tentang *maqāṣid sharī'ah* adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami ayat-ayat al-quran dan al-sunnah, menyelesaika dalil-dalil yang bertentangan dan menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung dalam al-quran dan sunnah secara kajian kebahasaan.

Metode *istinbāṭh* seperti, *Qiyas, Istihsan,Maslahah Mursalah, Istishab, Urf, dan Sadd al-Dzari'ah* adalah metode-metode pengembangan hukum islam yang didasarkan atas *maqasid syari'ah*. Contoh: Tentang kasus diharamkanya khamr (Q.S. al-Ma'idah:90) dari hasil penelitian Ulama ditemukan bahwa *maqāṣid sharī'ah* dari diharamkanya khamr adalah karena sifat memabukkan yang bisa merusak akal pikiran. Dengan

---

esensial) dan *umumiyah* (bisa dipahami orang awam). (3) Analisa pengertian *taklif* dalam hubungannya dengan kemampuan, kesulitan dan lain-lain. (4). Penjelasan aspek *huẓūẓ* dalam hubungannya dengan hawa dan *ta'abbud.* Lihat Ibrahim bin Musa bin Muhammad Abu Ishaq al-Shatibi, *al-Muwāfaqāt*, (Beirut: Dār al-Arafah, tt), Juz 2, 2-3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian alasan logis dari haramnya khamr adalah sifat memabukkanya. Khamr sendiri hanyalah salah satu contoh dari yang memabukkan.

Dari sini dapat dikembangkan dengan metode analogi (qiyas) bahwa setiap yang sifatnya memabukkan adalah juga haram. Dengan demikian (*illat*) hukum dalam suatu ayat atau hadits bila diketahui, maka terhadapnya dapat dilakukan qiyas (analogi), artinya qiyas hanya bisa dilakukan apabila ada ayat atau hadits yang secara khusus dapat dijadikan tempat meng-qiyas-kanya *al-maqīs alaih* .

Jika tidak ada ayat atau hadits secara khusus yang akan dijadikan *al-maqis-alaih*, tetapi termasuk kedalam tujuan syari'at secara umum seperti memelihara sekurangnya salah satu kebutuhan diatas tadi dalam hal ini dilakukan metode *maṣlahah-mursalah*, dalam kajian uṣul fiqh apa yang dianggap maslahat bila sejalan atau tidak bertentanggan dengan petunjuk-petunjuk umum syari'at, dapat diakui sebagai landasan hukum yang dikenal dengan *maṣlahat mursalah*.

Jika yang akan diketahui hukumnya itu telah ditetapkan hukumnya dalam *naṣ* atau melalui qiyas, kemudian karena dalam satu kondisi bila ketentuan itu telah ditetapkan akan berbenturan dengan ketentuan atau kepentinggan lain yang lebih umum dan lebih layak menurut syara' untuk dipertahankan, maka ketentuan itu dapat ditinggalkan khusus dalam kondisi tersebut. Ijtihad seperti ini sering disebut dengan *istihsān* .

E. Metode Istinbāṭ Hukum Nahdlatul Ulama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengambilan keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dibuat dalam kerangka bermazhab pada salah satu mazhab empat, dengan beberapa metode diantaranya:

1). Metode *qauliy*

Metode ini adalah suatu cara istinbat hukum yang digunakan oleh ulama/intelektual NU dalam Lajnah Bahsul Masail dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari mazhab empat, dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Ketika dijumpai beberapa *qaul/wajah* (pendapat) dalam satu masalah yang sama, maka dilakukan usaha memilih salah satu pendapat. Pemilihan pendapat tersebut sesuai dengan prosedur berikut: pendapat yang disepakati oleh al-Syaikhan (Imam An-Nawawi dan Rafi'i), pendapat yang dipegang oleh al-Nawawi saja, pendapat yang dipegang oleh al-Rafi'i saja, pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama, pendapat ulama yang terpandai, dan pendapat ulama yang paling wara'(berhati-hati terhadap hukum).[120]

2). Metode *Ilhāqiy*

Apabila metode qauliy tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari suatu kitab mu'tabar, maka dilakukan

[120] Busyairi Harits, *Islam NU (Pengawal Tradisi Sunni Indonesia)*, (Khalista: Surabaya, 2010), 59-61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

metode *ilhāqiy* [121](menyamakan hukum suatu masalah yang belum dijawab oleh kitab dengan masalah serupa yang ada dalam kitab). Prosedur yang kedua ini dilakukan dengan mengikuti logika analogi dalam metode al-qiyās. Prosedur ini sering disebut sebagai metode "*al-qiyās*" khas Nahdlatul Ulama.

3). Metode *Manhaji/Istinbāṭ*

Metode *manhaji/istinbāṭ* adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh Lembaga Bahtsul Masail dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam mazhab.

Istilah *istinbat* dalam bahtsul masail tidak banyak digunakan. Karena pengertian *istinbat* itu mengambil hukum secara langsung dari sumber aslinya, Al-qur'an dan hadis. Akan tetapi, istilah *istinbāṭ* yang dikenal dalam bahtsul masail NU adalah penggalian hukum dilakukan dengan men-*tathbiq*-kan secara dinamis *nash-nash fuqaha.*[122] Hal ini dikarenakan Ulama-Ulama NU meyakini bahwa mereka tidak memiliki

---

[121] Ada perbedaan antara ilhaq dan Qiyas. Qiyas adalah: القياس هو اشتباه الفرع والاصل علة حكم الاصل في نظر المجتهد على وجه يستلزم تحصيل الحكم في في الفرع Artinya: adanya *keserupaan antara cabang dan asal pada illat hukum asal menurut pandangan mujtahid dari segi kemestian terdapatnya hukum asal tersebut pada cabang.* Lihat Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Salim Saifuddin Al-Amidi *Al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām,* 185.

[122] MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*,(Yogyakarta : LKiS,1994).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan sebagaimana mujtahid pada masa lalu. Sebuah sikap yang arif dan tawadlu'.

Bagi ulama NU, term ini lebih dikonotasikan pada (*istikhrāj al-hukm min al-nas*) (mengeluarkan hukum dari teks-teks primer; Al-qur'an dan al-Sunnah) yang dilakukan oleh mujtahid mutlak, yang menurut ulama NU sangat berat untuk dilakukan ulama sekarang dengan segala keterbatasannya baik dalam ilmu pokok yaitu penguasaan ilmu tentang Al-qur'an dan al-Sunnah maupun ilmu bantu yaitu penguasaan dalam bidang bahasa Arab dan sebagainya. Untuk itu sebagai gantinya adalah istilah *ittifāq al-hukm* (kesepakatan hukum). Hal ini dikarenakan Ulama-Ulama NU meyakini bahwa mereka tidak memiliki kemampuan sebagaimana mujtahid pada masa lalu. Sebuah sikap yang arif dan tawadlu'.

Bagi ulama NU, term ini lebih dikonotasikan pada (*istikhrāj al-hukm min al-nas*) (mengeluarkan hukum dari teks-teks primer; Al-qur'an dan al-Sunnah) yang dilakukan oleh mujtahid mutlak, yang menurut ulama NU sangat berat untuk dilakukan ulama sekarang dengan segala keterbatasannya baik dalam ilmu pokok yaitu penguasaan ilmu tentang Al-qur'an dan al-Sunnah maupun ilmu bantu yaitu penguasaan dalam bidang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahasa Arab dan sebagainya. Untuk itu sebagai gantinya adalah istilah *ittifāq al-hukm* (kesepakatan hukum).[123]

Garis besar metode penetapan hukum dalam bahtsul masail NU secara hirarki sebagai berikut:

a) Jika dinilai cukup menetapkan hukum dengan satu pendapat yang sama (*qaul/wajah*) di berbagai kitab empat madzhab, maka pendapat tersebut digunakan sebagai jawaban.

b) Jika ternyata jawaban masalah sangat beragam dari pendapat Ulama (*qawl/wajah*), maka dilakukan *taqrīr jamā'i*:

   1) Sesuai dengan keputusan MUNAS 1992 di atas maka dilakukan *taqrir jama'i* untuk memilih satu pendapat yang dinilai lebih maslahat atau lebih kuat serta dengan pertimbangan klasifikasi Ulama yang sudah ditetapkan di atas.

   2) Dalam praktiknya, Ulama sering memutuskan dengan sepakat untuk khilaf. Sepertinya hal ini merupakan interpretasi dari yang lebih maslahat.

c) Jika tidak ada *ibarah* kitab atau pendapat Ulama yang menjelaskan/menjawab secara tekstual tentang permaslahan yang dibahas, maka dilakukan ilhaq atau *ilhaqul masail bi nazhairiha* secara *jama'iy*. yaitu, menyamakan hukum suatu masalah yang belum dijawab oleh kitab dengan masalah serupa yang ada dalam

[123] Imam Yahya, *Akar Sejarah Bahtsul Masail: Penjelasan Singkat*, dalam M. Imdadun Rahmad (ed.), *Kritik Nalar Fiqih NU*, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kitab. Sedangkan prosedur *ilhaq* adalah dengan memperhatikan unsur (persyaratan berikut), yaitu *mulhaq bih* (sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya), *mulhaq alaih* (sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya) dan *wajh al-ilhaq* (faktor keserupaan antara *mulhaq bih* dengan *mulhaq alaih*) oleh para *mulhiq* (pelaku *ilhaq*).

d) Jika tidak ada penjelasan tekstual dalam kitab dan tidak mungkin dilakukan *ilhaq*, maka dilakukan *istinbat jama'i* dengan prosedur bermadzhab secara manhaji. Proses *istinbāṭ* atau *manhaj* ini adalah setelah tidak dapat dirujukkan kepada teks suatu kitab mu'tabar, juga tidak dapat di-*ilhaq*-kan kepada hukum suatu masalah yang mirip dan telah terdapat rujukannya dalam suatu kitab mu'tabar maka digunakanlah metode istinbāṭ atau manhajiy dengan mendasarkan jawaban mula-mula pada Al-qur'an, setelah tidak ditemukan lalu pada hadits dan begitu seterusnya yang akhirnya sampailah pada jawaban dari qaidah fiqhiyyah "*daf' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣālih*" (menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada upaya memperoleh kemaslahatan). Hal demikian dimungkinkan karena prosedur istinbāṭ hukum bagi metode manhajiy adalah dengan mempraktekkan *qawā'id uṣuliyyah* [124](kaidah-kaidah ushul al-fiqh) dan *qawā'id fiqhiyyah* [125](kaidah-kaidah fiqh).[126]

---

[124] *Qaidah Ushuliyyah* atau kaidah ushul fiqih adalah kaidah yang membahas seputar penggunaaan lafadz atau bahasa. Dengan kaidah-kaidah tersebut, seorang alim dapat menyimpulkan makna dari sebuah lafadz bahasa Arab. Misal kaidah **الأَمْرُ لِلْوُجُوْبِ** (lafadz perintah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asalnya menunjukkan akan wajibnya hal tersebut) atau kaidah النَّهْيُ يَقْتَضِى التَّحْرِيْمُ (lafadz pelarangan asalnya menunjukkan akan haramnya hal tersebut).

[125] *Qaidah fiqhiyyah* (kaidah fiqih) adalah kaidah yang merupakan kesimpulan dari banyak permasalahan fiqih yang memiliki hukum-hukum yang sama sehingga muncullah kaidah yang mewakili persamaan tersebut. Sebagai gambaran, seorang ahli fiqih dihadapkan dengan ratusan permasalahan fiqih. Setelah dia menelaahnya, dia mendapatkan adanya kesamaan di dalam semua permasalahan tersebut, kesamaan itulah yang kemudian disimpulkan menjadi kaidah fiqih.Misalnya, setelah menelaah banyak permasalahan fiqih maka diperoleh kesimpulan bahwa kemudharatan itu harus dihilangkan, dibuatlah kaidah اَلضَّرَرُ يُزَالُ (*ad-dhararu yuzaalu*, kemudharatan harus dihilangkan).

[126] A. Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama'*, (Surabaya: PP. RMI dan Dinamika Press 1997) 367.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

GAMBARAN UMUM LAPANGAN PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Nahdlatul Ulama

Nadhatul Ulama merupakan salah satu organisasi keagamaan yang terbesar jumlah anggotanya di Indonesia, Nadhatul Ulama didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 atau 31 Januari 1926 M di Surabaya atas prakarsa KH Hasyim Asy'ari dan KH Abdul Wahab Hasbullah.[1]

Di samping dibantu oleh KH Wahab Hasbullah, dalam mendirikannya KH Hasyim Asy'ari juga dibantu oleh ulama-ulama lain diantaranya yaitu : K.H. Bisri Samsuri Jombang, K.H. Ridwan Semarang, K.H. Nawawi Pasuruan. KH. R. Asnawi Kudus, K.H. R. Hambali Kudus, K. Nakhrowi Malang, K.H. M. Alwi Abdul Aziz , K.H. Doromuntaha Bangkalan dan lain-lain.[2]

NU berdiri berdasarkan ajaran "Ahlusunnah wal Jama'ah" yang dianut sebagai sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah Antara ekstrim *aqli* (rasionalis) dengan kaum ekstrim *naqli* (skripturalis), berasaskan Pancasila, yang dalam aqidah mengikuti aliran Asy-ari'yah Maturidiyah, dalam syariah/fiqh mengikuti salah satu madzhab empat Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, dan dalam tashawuf mengikuti Al-Junaid dan Al-Ghozali.[3]

---

[1] Abdul Mun'im Al-Hafni, *Ensiklopedia Golongan, Kelompok Aliran, Mazhab, Partai dan Gerakan Islam*, Jakarta : Grafindo Khazanah Ilmu 2006, 914-917. Lihat juga Dewan Redaksi *Ensiklopedi Islam*, 345.

[2] *Op. cit.* Ahmad Syaukani, 133.

[3] Muhammad Tholhah Hasan, *Ahlussunnah Wal Jama'ah Dalam Persepsi dan Tradisi NU*, (Jakarta: Lantaroba Press, 2005), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nahdhatul Ulama lahir dengan melalui proses yang panjang. Secara organisatoris, hal ini dimulai ketika para tokoh islam pesantren, Wahab Hasbullah dan Mas Mansur mendirikan madrasah yang bernama Nahdhatul Wathan pada 1916 di Surabaya. Staf pengajar Nahdhatul Wathan didominasi oleh ulama pesantren, seperti Bisri Syansuri (1886-1980), Abdul Hakim Lei Munding dan Abdullah Ubai (1899-1938).

Pada 1918, Abdul Wahab Hasbullah dan K.H Ahmad Dahlan dari Kebon dalem mendirikan Tashwirul Afkar, yaitu sebuah forum diskusi ilmiah keagamaan yang mempertemukan kelompok pesantren dan modernis. Pada tahun yang sama Abdul Wahab Hasbullah bersama K.H Hasyim Asy'ari mendirikan sebuah koperasi dagang yang bernama Nahdhatul Tujjar. Hanya saja memasuki tahun 1920-an, kebersamaan dan upaya saling pengertian antara kelompok Islam pesantren dan modernis berubah menjadi persaingan yang mengelompok.

Menjelang kelahiran NU, ditingkat internal umat islam Indonesia telah terbentuk forum formal kongres al-Islam, yang berfungsi untuk mempertemukan para tokoh Islam di Indonesia. Pada 1921 para Ulama menyelenggarakan kongres al-Islam di Cirebon untuk mengurai persoalan khilafiah sehingga diharapkan tercipta iklim yang lebih sejuk. Kemudian pada bulan Desember 1922 kongres Al-Islam kedua digelar di Garut menyusul kemudian kongres luar biasa al-Islam di Surabaya pada 1924. Diantara tokoh-tokoh Islam yang intens mengikuti pertemuan-pertemuan tersebut adalah HOS. Tjokroaminoto, K.H Abdul Wahab Hasbullah, K.H Mas Mansur, H. Agus Salim, K.H Abdul Halim Majalengka, K.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sangadji, R. Wondoamiseno, dan lainnya. Sebelum kongres luar biasa berlangsung, K.H Abdul Wahab Hasbullah menyatakan Mundur dari kepanitiaan.[4]

Kelahiran NU tidak terlepas dari adanya reaksi terhadap situasi umat islam ketika itu. pada permulaan abad ke-20 umat islam mengalami kegoncangan akibat kekalahan Turki Utsmani pada perang Dunia 1 yang dipandang sebagai kejatuhan dunia islam. Hal ini terjadi karena kekuasaan sultan Turki sebagai Khalifah umat islam itu telah diakui keberadaannya oleh semua wilayah islam termasuk Indonesia. Kegoncangan umat islam ini diperburuk lagi oleh keputusan Majelis Nasional Agung Turki yang menghapuskan Kekuasaan Sultan pada tahun 1922 dibawah pimpinan penguasa Turki yang baru, Mustafa Kemal Ataturk.

Pengikut gerakan wahabi pada waktu itu dibawah pimpinan Ibnu Sa'ud berhasil menguasai wilayah Hejaz. Gerakan ini, dengan tujuan memurnikan paham tauhid umat islam, telah memusnahkan semua yang dipandangnya menimbulkan bid'ah dan khurafat. Disamping menentang taklid kepada pendapat imam-imam madzhab dan menyeru untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini menimbulkan pengaruh yang sangat besar terhadap umat Islam, termasuk umat Islam Indonesia, terutama terhadap para ulama yang kuat berpegang pada tradisi dan melestarikan ajaran bermadzhab.

Ketika itu di Indonesia muncul pula gerakan-gerakan keagamaan yang dikenal dengan gerakan pembaharun, sebagai akibat dari pengaruh pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab dari Saudi Arabia dan Muhammad Abduh di

[4] Hilmy Muhamadiyah dan Sulthan Fatoni.. *NU identitas Islam Indonesia*, 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mesir. Berkembangnya gerakan yang bersemboyan kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah ini dirasakan oleh para Ulama tradisional sebagai "ancaman" terhadap kelestarian tradisi Ahlusunah Waljama'ah.[5]

Pada tanggal 31 Januari 1926 bertepatan tanggal 16 Rajab 1344 H, Komite Hejaz mengadakan rapat dirumah K.H Abdul Wahab Hasbullah yang dihadiri oleh ulama-ulama terkemuka. Pertemuan tersebut membicarakan perkembangan dunia Islam mutakhir hingga memikirkan langkah bersama untuk mempertahankan kepentingan masayarakat islam pesantren. Mereka kemudian memutuskan K.H. Asnawi sebagai utusan para ulama untuk menghadiri muktamar dunia islam di Mekkah. Rapat juga memutuskan untuk sepakat mendirikan organisasi yang diberi nama Nahdhatul Ulama.[6]

Tujuan Nahdhatul Ulama (NU) seperti tersebut dalam Anggaran Dasar Tahun 1926 (sebelum menjadi partai politik) adalah perkumpulan sosial keagamaan yang mementingkan pendidikan dan pengajaran agama islam.

Dalam ikut serta mempertinggi kecerdasan masyarakat Indonesia dan menggembleng budi pekertinya, NU mendirikan beberapa Madrasah di tiap-tiap cabang dan ranting. Pada masa pemerintahan Belanda dan penjajahan Jepang, NU tetap memajukan pesantren-pesantren, mengadakan dakwah dan pengajian-pengajian dan lain-lainya. NU juga bergerak dalam bidang lainnya seperti di bidang pendidikan, bidang sosial dan di bidang ekonomi.

---

[5] Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam.1999. *Ensiklopedi Islam,* 353.
[6] Hilmy Muhamadiyah dan Sulthan Fatoni. *NU identitas Islam Indonesia*, 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai perkumpulan sosial keagamaan yang mementingkan pendidikan dan pengajaran agama islam, NU melaksanakan usahanya di berbagai bidang. Di bidang agama, melaksanakan dakwah Islamiyah hingga terlaksananya ajaran Islam yang menganut paham *ahlussunnah waljamaah* dan menurut salah satu mazhab empat, serta meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dalam perbedaan.

Di bidang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, untuk membentuk muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas.

Di bidang sosial budaya, mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai keislaman dan kemanusiaan.

Di bidang ekonomi, mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan, dengan mengutamakan berkembangnya ekonomi rakyat. Hal ini ditandai dengan lahirnya BMT dan Badan Keuangan lain yang yang telah terbukti membantu masyarakat.

1. Struktur Organisasi NU :[7]
   a. PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) untuk tingkat pusat, berkantor di Ibu kota Negara.
   b. PWNU (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) untuk tingkat provinsi berkantor di Ibu kota Provinsi.

[7] https://my-dock.blogspot.com/ixzz5uSQvnnpV.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) untuk tingkat Kabupaten / Kota, berkantor di daerah Kabupaten atau Kota Madya (Kodya).

d. PCINU (Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama) untuk luar negeri, berkantor di Ibu kota Negara dimana di negara itu sudah dibentuk kepengurusan NU.

e. MWCNU (Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama) untuk tingkat kecamatan.

f. PRNU (Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama) untuk tingkat Desa.

g. PARNU (Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama) untuk tingkat Dukuhan / Lingkungan.

2. Struktur Kepengurusan NU.[8]

a. Mustasyar (Penasehat)

b. Syuriah (Pimpinan tertinggi) terdiri dari:

- Rais Aam
- Wakil Rais Aam
- Beberapa Rais
- Katib Aam
- Beberapa Wakil Katib
- A'wan

[8] Soelaiman Fadeli dan Muhammad Subhan, *Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amaliyah, Uswah, Khalista* Surabaya, bekerja sama dengan LTN NU Jawa Timur. Buku I, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tanfidziyah (Pelaksana Harian) terdiri dari :

- Ketua Umum
- Beberapa Ketua
- Sekretaris Jendral
- Beberapa Wakil Sekretaris Jendral
- Bendahara
- Beberapa Wakil Bendahara.

3. Struktur Organisasi Lembaga dan Banom :

a). PP (Pimpinan Pusat) untuk tingkat Pusat.

b). PW (Pimipinan Wilayah) untuk tingkat Provinsi.

c). PC (Pimpinan Cabang) untuk tingkat Kabupaten / Kodya.

d). PAC (Pimpinan Anak Cabang) untuk tingkat Kecamatan.

e). Ranting untuk tingkat Desa / Kelurahan.

f). Komisariat untuk kepengurusan di suatu tempat tertentu.

Lembaga[9] yang merupakan perangkat departementasi organisasi Nahdlatul Ulama ada delapan belas antara lain: [10]

1). Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LD-NU). Melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan dakwah agama Islam yang menganut faham ahlussunnah wal jamaah.

[9]Adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan.
[10] http://www.nu.or.id/about/lembaga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2). Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif NU). Melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan dan pengajaran formal.

3). Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI-NU). Melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan pondok pesantren.

4). Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LP-NU). Melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi warga.

5). Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPP-NU). Melaksanakan kebijakan di bidangan pengembangan pertanian, lingkungan hidup dan eksplorasi kelautan.

6). Lembaga Pelayanan Kesehatan Nahdlatul Ulama (LPK-NU). Melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan.

7). Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK-NU). Melaksanakan kebijakan di bidang kesejahteraan keluarga, sosial, dan kependudukan.

8). Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM-NU). Melaksanakan kebijakan di bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia.

9). Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH-NU). Melaksanakan penyuluhan dan pemberian bantuan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10). Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama (LESBUMI-NU). Melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan seni dan budaya.

11). Lembaga Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZIS-NU). Bertugas menghimpun, mengelola, dan mentasharufkan (menyalurkan) zakat, infaq, dan shadaqah.

12). Lembaga Waqaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWP-NU). Mengurus, mengelola serta mengembangkan tanah dan bangunan, serta benda wakaf lainnya milik NU.

13). Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM-NU).[11] Membahas dan memecahkan persoalan-persoalan di tengah masyarakat yang memerlukan kepastian hukum syari'at Islam. Dari sisi metodologi keilmuan, bahsul masail mengalami dua kali

[11] Menurut M. Cholil Navis dalam *Antologi NU, Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah*,: Sebenarnya persoalan bahsul masail telah ada sejak sebelum NU didirikan pada tahun 1926. Sebab budaya memecahkan persoalan dengan mencari dalil-dalilnya dari kitab-kitab kuning sudah menjadi tradisi keilmuan di pesantren nusantara sejak awal. Demikian pula sejak NU didirikan, budaya itu terus melekat di dalamnya. Dalam setiap muktamar dan pada kondisi-kondisi tertentu, NU selalu menggelar bahsul masail yang ditangani langsung oleh syuriah. Hasil muktamar Cipasung (1994) merekomendasikan dibentuknya wadah resmi yang menangani masalah itu, dengan nama lajnah bahsul masail (LBM). Namun rekomendasi itu tidak efektif. Ide untuk mndirikan wadah resmi itu bagai hilang ditiup angin. Sampai akhirnya pada tahun 2002 KH. Irfan Zidny merekomendasikan nama Prof. Dr. KH. Anwar Ibrahim untuk menjadi ketua dan KH. M Cholil Navis sebagai sekretarisnya. Itupun kurang berjalan fektif akibat kesibukan ketua yang lebih banyak di tempat lain (sebagai ketua komisi fatwa MUI pusat) pada waktu itu. Meski demikian keberadaan LBM sangat nyata dibutuhkan oleh NU. Meski keberadannya di pengurus pusat kurang maksimal, namun di tingkat PC dan PW sangat bergairah dan banyak mndapatkan sambutan. Dalam muktamar Solo (2004) stautus LBM ditingkatkan dari lajnah menjadi lembaga dengan ketuanya KH. Hasyim Abbas, MHI. Dalam perjalannnya di tingkat pusat kembali menemukan kendala, karena pada tahun 2006 KH. Hasyim Abbas mengundurkan diri. Sejak itu KH. M. Cholil Navis ditunjuk sebagai pelaksana harian (Plh). Pada awal tahun 2007 terjadi revisi lagi. PBNU menunjuk KH. Zaki Anwar sebagai ketua dengan KH. M. Cholil Navis sebagai wakil dan Muhtarom sebagai sekretaris.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penambahan jenis masalah. Pada masa-masa awal hingga sepanjang perjalanannya bahsul masail hanya membahas persoalan *waqi'iyyah* (aktual), sejak munas NU di Lampung (1992) ditambah dengan persoaln *maudlu'iyah* (tematik), dan sejak munas NU di Surabaya (2006) ditambah dengan persoalan *Qanuniyah* (berkaitan dengan hukum positif)[12]

14). Lembaga Ta'mir Masjid Nahdlatul Ulama (LTM-NU). Melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan dan pemberdayaan masjid.

15). Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LK-NU). Melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan.

16). Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LF-NU). Bertugas mengurusi masalah hisab dan rukyah, serta pengembangan ilmu falak (astronomi).

17). Lembaga Ta'lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama (LTN-NU). Bertugas mengembangkan penulisan, penerjemahan dan penerbitan kitab/buku, serta media informasi menurut faham Ahlussunnah wal jama'ah.

18). Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI-NU). Berkhidmah untuk umat dalam bidang

[12] Soelaiman Fadeli dan Muhammad Subhan, *Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amaliyah, Uswah,* Khalista Surabaya, bekerja sama dengan LTN NU Jawa Timur. Buku II, 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penanggulangan bencana, baik pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.

Badan Otonom [13] Nahdlatul Ulama dikelompokkan dalam dua katagori, *pertama:* Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu, dan *kedua:* Badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya.

Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu adalah:[14]

1). Muslimat Nahdlatul Ulama (Muslimat NU). Melaksanakan kebijakan pada anggota perempuan NU.

2). Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama (GP Ansor NU). Melaksanakan kebijakan pada anggota pemuda NU. GP Ansor menaungi Banser (Barisan Ansor Serbaguna) yang menjadi salah satu unit bidang garapnya.

3). Fatayat Nahdlatul Ulama (Fatayat NU). Melaksanakan kebijakan pada anggota perempuan muda NU.

4). Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU). Melaksanakan kebijakan pada pelajar, mahasiswa, dan santri laki-laki. IPNU menaungi CBP (Corp Brigade Pembangunan), semacam satgas khususnya.

5). Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU). Melaksanakan kebijakan pada pelajar, mahsiswa, dan santri perempuan. IPPNU

[13] Adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan.

[14] http://www.nu.or.id/about/badan+otonom.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menaungi KKP (Kelompok Kepanduan Putri) sebagai salah satu bidang garapnya.

6). Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Organisasi kemahasiswaan Nahdliyin yang membentuk pribadi muslim Indonesia yang bertaqwa, intelektual dan profesional.

7). Mahasiswa Ahli al-Thariqah al-Mu'tabarah an-Nahdliyah (MATAN). Merupakan Lajnah Mustaqillah[15] dari Jam'iyyah Ahlit Thariqoh Al-Mu'tabaroh An-Nahdliyyah (JATMAN) yang juga merupakan Banom dari Nahdlatul Ulama, dan merupakan kader thariqah yang cinta NU dan NKRI.

Badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya:

1). Jam'iyyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah (JATMAN) Membantu melaksanakan kebijakan pada pengikut tarekat yang mu’tabar (diakui) di lingkungan NU, serta membina dan mengembangkan seni hadrah.

2). Jami'iyyatul Qurro’ wal Huffadz Nahdlatul Ulama (JQHNU). Melaksanakan kebijakan pada kelompok qari’/qari’ah (Pembaca Tilawah Al-Quran) dan hafizh/hafizhah (penghafal Al-Quran).

3). Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU). Membantu melaksanakan kebijakan pada kelompok sarjana dan kaum intelektual.

[15] Menurut KH Hamdani Mu'in Ketua Umum Mahasiswa Ahlith Thariqoh Al-Mu'tabaroh An-Nahdliyyah (MATAN), yang juga Dosen Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dalam sambutan dan pengarahannya pada Rabu (18/03/2015) untuk meninjau langsung lokasi Munas yang diadakan pada 10-14 April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4). Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI). Melaksanakan kebijakan di bidang kesejahteraan dan pengembangan ketenagakerjaan.

5). Ikatan Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa (IPSNU Pagar Nusa). Melaksanakan kebijakan pada pengembangan seni beladiri.

6). Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU). organisasi profesi guru punya tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kesejahteraan, dan meningkatkan spiritualitas, serta mempertahankan Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah (Aswaja) An-Nahdliyah.

7). Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU).[16] Serikat ini dijadikan sebagai basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat.

8). Ikatan Seni Hadroh Indonesia (ISHARI). Organisasi yang menjadi salah satu pilar yang mampu menyelamatkan negeri ini dengan shalawatnya.

9). Ansor Banser Cyber Nahdlatul Ulama (ABCNU). Jejaring nasional, memproteksi kegiatan komunitas NU dan NKRI di Jawa Timur dan Indonesia yang berhubungan dengan perang siber untuk bebas dari *cyber attack* serta unit khusus guna menanggulangi dampak negatif perkembangan teknologi informasi.[17]

---

[16] Didirikan pada Muktamar NU ke 33 di Jombang, Jawa Timur

[17] Sebagaimana dijelaskan Wakil Ketua PW GP Ansor Jatim bidang IT-Media dan Infokom M Nur Arifin Senin 16 Januari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Nahdlatul Ulama Di Mojokerto

1. Sejarah Berdirinya Nahdlatul Ulama Di Mojokerto

Mojokerto yang berdekatan dengan Surabaya dan Jombang, menjadikannya sebagai daerah perlintasan penting dalam sejarah Nahdlatul Ulama. Sebagaimana kita ketahui, NU didirikan di Surabaya pada 31 Januari 1926. Penggerak utamanya adalah tokoh-tokoh besar yang berasal dari Jombang. Tentu saja, posisi yang senantiasa dilewati tersebut, menjadikan daerah bekas istana kerajaan Majapahit itu tak luput dari gelora ke-NU-an.[18]

Salah satu contohnya adalah ketika Kiai Abdul Wahab Chasbullah - salah seorang pendiri NU - menggalakkan pendirian madrasah di Mojokerto, beliau pun ikut serta. Dipelopori oleh KH. Zainul Alim dari Suronatan, Magersari, Kota Mojokerto, berdiri sebuah madrasah pada tahun 1926. Madrasah tersebut kini dikenal sebagai Madrasah Al-Muhsinun, sebuah nama yang diambil dari orang yang memberi wakaf tanah, H. Muhsinun.[19]

Geliat kebangkitan para ulama di Mojokerto terekam tatkala NU memutuskan untuk mendirikan cabang di berbagai daerah. Dengan sigap

[18] Sumber : Isno Kayyis, ketua Lembaga Ta'lif Wan Nashr NU (LTN NU kab. Mojokerto) masa khidmat 2018-2023. Mengutip tulisan Ayung Notonegoro (PCNU Banyuwangi,Pegiat Komunitas Pegon): "*Riwayat Pendirian NU Mojokerto*" https://www.halaqoh.net/2019/02/riwayat-pendirian-nu-mojokerto. html.

[19] Radar Mojokerto, 11 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para kiai di sana meresponnya dengan cukup baik.[20] Pada Ahad malam, 18 Dzulhijah 1347 H atau bertepatan dengan 28 Mei 1929, KH. Wahab Chasbullah bertandang ke Mojokerto. Ia didampingi oleh KH. Bisri Syansuri yang saat itu menjabat sebagai Katib Syuriyah NU Cabang Jombang. Keduanya menghadiri sebuah musyawarah yang diikuti oleh para kiai dan tokoh masyarakat setempat.

Dalam pertemuan tersebut, secara bergantian Kiai Wahab dan Kiai Bisri menjelaskan tentang pentingnya ikatan di antara umat Islam. Ikatan yang mampu menjaga syiar "*li i'lā' kalimātillāh*" dalam menghadapi tantangan zaman saat itu. Yakni, gerakan puritanisasi beragama (*Wahabi*) maupun kristenisasi oleh penjajah.

Dengan berhujjah berbagai dalil dari Al-Qur'an dan Al-Hadits, keduanya memberikan solusi yang tepat, agar para kiai dan tokoh masyarakat setempat bergabung di NU serta mendirikan cabangnya di Mojokerto pada malam itu juga 28 Mei 1929.[21] Solusi tersebut langsung disepakati oleh para kiai yang hadir serta semua peserta musyawarah.

Pada malam itu juga, dilakukan pembentukan kepengurusan. Dimana, KH. Zainul Alim terpilih sebagai Rais Syuriyah yang pertama. Ia didampingi oleh Kiai Muhammad Rozihan selaku Katib.

---

[20] Sebagaimana terekam dalam Swara Nahdlatoel Oelama edisi nomor 7 tahun kedua, Rajab 1347. Pada edisi tersebut diberitakan perihal pendirian NU Cabang Mojokerto.

[21] Beda dengan tulisan Ahmad Baso dalam: Kisah Nasionalisme KH Nawawi: Kerikil Mortar di Pertempuran Sepanjang, Kedurus, dan Kletek. Menurutnya NU Mojokerto pertama kali didirikan pada tahun 1928 oleh KH. Nawawi, dua tahun setelah berdirinya NU di Surabaya pada 16 Rajab 1344 H atau 31 Januari 1926 M.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pemilihan tersebut, juga dipilih beberapa A'wan (pembantu syuriyah). Antara lain adalah KH. Muhammad Nawawi.[22] Ia adalah seorang ulama yang gugur syahid saat perang revolusi menghadapi agresi militer Belanda pada 22 Agustus 1946.[23] Nama lain di posisi A'wan ini antara lain Kiai Muhammad Imam, Kiai Abdul Barri, Kiai Muhammad Hafidz, Kiai Muhammad Dimyathi, Kiai Muhammad Muridan. Kiai Muhammad Sa'id ditunjuk sebagai Mustasyar.

Adapun yang ditunjuk sebagai ketua tanfidziyah adalah Muhammad Kahfani (محمد كهفان). Ia ditemani seorang wakil yang bernama H. Abdurrahim. Sedangkan sekretarisnya bernama Astro Husain (استرا حسين) dan wakilnya, H. Dahlan. Posisi kasier yang saat ini dikenal dengan sebutan bendahara dijabat oleh H. Muhammad Idris.

Struktur pengurus NU pada masa awal, tidak selengkap kepengurusan sebagaimana dewasa ini. Belum dilengkapi dengan lembaga. Tugas-tugas ke-NU-an dalam bidang-bidang tertentu dijalankan oleh komisaris. Pada struktur perdana kepengurusan Cabang NU Mojokerto sendiri ada enam orang yang ditunjuk sebagai komisaris.

---

[22] KH. Muhammad Nawawi lahir di Dusun Les Padangan Desa Terusan Kabupaten Mojokerto pada tahun 1886. Beliau pernah menjadi santri Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur. Selain itu, pernah menjadi santri KH Qosim Siwalan Panji Buduran Sidoarjo, serta KH Sholeh Mojosari dan KH Kholil Kademangan Bangkalan. Beliau pernah menjadi komandan laskar Sabilillah dan turun langsung memimpin pergerakan melawan penjajah di wilayah pergerakannya yakni di Mojokerto, Kedamean Gresik, Sepanjang dan Sukodono Sidoarjo.

[23] Menurut keterangan H. Hulaim Junaedi (cicit KH. Nawawi): "Kiai Nawawi gugur pada 22 Agustus 1946 saat dikeroyok pasukan Belanda dengan menancapkan empat tusukan pisau bayonet tepat di lehernya. Jenazahnya ditandu oleh pasukan laskar Sabilillah menuju rumah duka di Kelurahan Jagalan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto. Kemudian beliau dimakamkan di pemakaman umum Desa Losari Kecamatan Gedek Kabupaten Mojokerto."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut adalah nama-namanya: Muhammad Subhan, Muhammad Kholil, Muhammad Dimyathi, Astro Bana, H. Abdurrahman, dan Abu Khiar.

Semenjak terbentuknya kepengurusn tersebut, NU di Mojokerto eksis hingga saat ini. Bahkan saat ini ada dua kepengurusan cabang, di kabupaten dan di kota madya sendiri.

Meski mendapatkan tekanan dari Penjajah Jepang dan pembatasan terhadap segenap kegiatan organisasi politik maupun organisasi kemasyarakatan, segenap pengurus NU tetap menghidupkan kegiatan-kegiatan ke-NU-an dengan memakai nama "Ahlussunnah Wal Jama'ah". Meski secara keorganisasian NU tidak diperbolehkan muncul di ruang publik, tapi dakwah keagamaan tetap berjalan seperti biasa.[24]

Untuk memperkuat basis pendidikan umat Islam di Mojokerto, bersama sejumlah pengurus NU, Kiai Nawawi kemudian mendirikan madrasah. Awalnya madrasah itu ditempatkan di teras musalla milik KH. Zainal Alim yang letaknya di sebelah pasar pahing kota Mojokerto. Kemudian dipindah ke Gang Kauman, sehingga masyarakat menyebutnya madrasah Kauman.

Dalam perkembangannya kemudian, pada tahun 1976 madrasah tersebut berganti nama menjadi Madrasah Ibtida'iyah Al-Muhsinun. Lewat madrasah ini segenap pengurus NU pada masa awal, termasuk kiai Nawawi mengajarkan kepada anak-anak semangat patriotisme bela negara

[24] Disampaikan oleh Ahmad Baso. *Kisah Nasionalisme KH Nawawi: Kerikil Mortar di Pertempuran Sepanjang, Kedurus, dan Kletek.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di samping mengajarkan ilmu-ilmu agama seperti yang ditunjukan di pesantrennya. Guru beliau di pondok Siwalan Panji, Kiai Chozin, juga ikut mengajar di madrasah tersebut, termasuk Kiai Muhammad dari Porong, Sidoarjo.

Mereka menanamkan rasa cinta tanah air dan bangsa kepada para murid dengan cara yang kreatif. Teks lagu Indonesia Raya beliau terjemaahkan dengan lengkap kedalam bahasa Arab. Selain untuk mengajarkan pelajaran bahasa Arab, juga ditunjukan untuk menghindari sensor polisi kolonial Belanda yang waktu itu memang sangat ketat pengawasannya terhadap sekolah-sekolah swasta.

Dalam menggerakkan semangat juang dan jiwa patriotisme rakyat Mojokerto kiai Nawawi dibantu mobilisasi pemuda oleh Kiyai Ahyat Halimy, Mansur Solikhi, Munasir, Manadi, Mustakim dan Abdul Halim. Kiai Nawawi mengkader anak-anak muda untuk pendidikan bela agama dan bela negara.

2. Susunan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto Periode 2018 – 2023.[25]

   a. Mustasyar

      1) KH.Chusaini Ilyas

      2) KH.Ali Mas'adi

      3) KH.Mahfudz Syaubari

[25] Dokumen : SK PBNU Nomor: 294/A.II.04.d/11/2018. 21 Rabi'ul Awal 1440 H / 29 Nopember 2018 M tentang: Pengesahan PCNU Kabupaten Mojokerto Masa Khidmat: 2018 – 2023.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) KH.Zainul Arifin

5) KH.Samian

6) KH.Asmui Idris

7) KH.Abdul Ghofur

8) KH.Mutoharun Afif

9) KH.Makinudin Qomari

10) KH.Ismail Arif

11) KH.Syihabul Irfan Arif

12) KH.Muslihuddin Abas

13) KH.Makhsus Dawam

b. Syuriyah

1). RAIS : KH. Mashul Ismail

2). Wakil Rais :

a) KH. Masrur Sa'dulloh

b) KH.Jamzuri

c) KH.Sifaur Romli

d) K.Ma'mun AR

e) KH. Abdul Wahid Rozaq

f) KH.Mundzir Masruri

g) KH.Sholeh

h) KH.Saifudin Zuhri

i) KH.Mubayin Syafi'i

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3). Katib : K.Faiz El-Muttaqin

Wakil Katib :

a) KH.Falaqul Alam

b) KH.Islahuddin

c) KH.Sholihin

d) KH.Sami'an

e) KH. Siddiq

f) KH.Ach.Hanafi, S.Ag

g) KH.Mahfudz Said

h) KH.Rifai Dimyati

i) H.Muhammad Ahdal Sidqolloh

A'wan:

a) H. Pungkasiadi,SH

b) Drs. H. Mahsun Arief,S.Sos

c) KH. Ahmadun

d) H. Abdul Muhid

e) Drs. H. Azhari Husnan, MM

f) Gus. Masykuri Hakam

g) KH. Husen Shomad

h) Drs. Sholikin

i) H. Chamim Kohari,M.Pd.I

Tanfidziyah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketua : KH.Abdul Adzim Alwi

Wakil Ketua :

a. H. Muslim Bahri

b. Gus. H. Sa'dulloh Syarofi Chusain

c. Drs. H. Shobirin,M.Si

d. K. Ahmad Saifulloh

e. Drs. H. Nurrohmad,MM

f. Gus. H. Muhammad Nizar, S.Ag. MHI

g. DR. Purwanto

h. Gus Zainal Abidin

i. Gus Ubaidillah Zuhri,S.Pd

Sekretaris: Taufik, M.Pd

Wakil Sekretaris :

a. Gus Zamroni Ahmad Umar

b. Gus Moh.Rodli

c. Muhammad Syafiudin

d. M. Sofiyan Amin,S.Pd.I

e. H. Lukman Hakim

f. Abd. Khafidz Busyri

g. Gus H. Fahmi Husaini

h. Gus Ma'ruf Al-Hasani

i. Gus H. Eriyana, S.Pd.I

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bendahara: H. Riza Pahlevi.SE, M.Si

Wakil Bendahara :

a. H. Imam Muslim

b. H. Edy Sutrisno, SE

c. H. Mulyono, SE

d. H. Rubiono

e. Moh. Afif

3. Daftar Nama Ketua Lembaga Pcnu Kabupaten Mojokerto Masa Khidmah 2018 - 2023

a. Lembaga Da'wah NU (LDNU) KH.Mahrus Ali

b. Lembaga Pendidikan Ma'arif NU (LPM NU) H. Masruchan, M.Pd.

c. Rabithah Ma'ahid Al-Islamiyah NU (RMI NU) Gus.Wahyudi.

d. Lembaga Perekonomian NU (LPNU) Oetomo Sapto Amien

e. Lembaga Pengembangan Pertanian NU (LP2NU) H. Edi Ikhwanto

f. Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU (LKKNU) H.Moch Asy'ari

g. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia NU (LAKPESDAM NU) Mi'rojul Huda, M.Pd

h. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU (LPBH NU) dr.Anshoru

i. Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (LESBUMI) Abdul Wahid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh NU (LAZISNU) Gus Rofi'udddin

k. Lembaga Waqaf dan Pertanahan NU (LWPNU) H. Ahirizzen, S.Pd.I, MHI

l. Lembaga Bahtsul Masail NU (LBMNU) Gus. Abd Ghofar

m. Lembaga Ta'mir Masjid NU (LTMNU) H.Suwarno, S.Pd

n. Lembaga Kesehatan NU (LKNU) dr. Roisul Umam

o. Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim NU (LPBI NU) Saiful Anam,S.Ag

p. Lajnah Falakiyah NU (LFNU)Syamsul Ma'arif, SH

q. Lembaga Ta'rif Wan Nasr NU (LTN NU) Isno Kayyis, M.Pd

r. Lembaga Pendidikan Tinggi NU (LPT NU) DR. H. Nashirudin, M.Pd.I

4. Daftar Nama Banom (Badan Otonom) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto

a. PC Muslimat (Hj.Istatik Rodiyah)

b. PC Fatayat (Sulami,S.Pd.I)

c. PC IPNU (Mujibatur Rohman,S.Pd)

d. PC IPPNU (Nur Afni Auliya,S.Pd)

e. PC Jatman (KH.Mahsus Dawam)

f. PC JQH (Fathur Rohman, M.Ag)

g. PC ISNU (H.Mukti Ali, S.Ag. MM)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. PC Sarbumusi (A.Suprapto)

i. PC GP Ansor (Gus Ali Muhammad Nasih,SE.M.Pd)

j. PC PERGUNU (Moh.Saiful Anam,S.Ag.MM)

k. PC Pagar Nusa (H. Budi Mulya)

l. PC ISHARI (Ubaidillah Zuhri).

C. Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU Kabupaten Mojokerto

1. Asal-usul Lembaga Bahsul Masail

Di kalangan Nadlatul Ulama, Bahtsul Masail merupakan tradisi intelektual yang sudah berlangsung lama. Sebelum Nahdlatul Ulama (NU) berdiri dalam bentuk organisasi formal (jam'iyah), aktivitas Bahtsul Masail telah berlangsung sebagai praktek yang hidup di tengah masyarakat muslim nusantara, khususnya kalangan pesantren. Hal itu merupakan pengejawantahan tanggung jawab ulama dalam membimbing dan memandu kehidupan keagamaan masyarakat sekitarnya.

Pada tingkat nasional dokumen-dokumen yang menginformasikan kelahiran dan perkembangan Lembaga Bahsul Masail (yang kemudian disingkat dengan LBM) baik latar belakang, metode, obyek, maupun pelaku sejarahnya masih sedikit. Karena masih minim atau jarangnya warga nahdliyyin yang mendokumentasikan hal-hal yang berkaitan dengan aktifitas NU. Hal ini disebabkan adanya sikap pragmatis mereka, dalam arti yang dipentingkan adalah hasilnya, sedangkan dokumen lain seperti latar belakang lahirnya, perdebatan yang terjadi di forum itu, serta para

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama' yang berperan di dalamnya tidak diarsipkan, sehingga yang ada sampai sekarang hanyalah hasil keputusan Lembaga Bahsul Masail.[26]

Hal yang sama juga terjadi pada beberapa tingkat cabang (termasuk LBM NU kabupaten Mojokerto), yakni masih minim dan jarangnya warga nahdliyyin yang mendokumentasikan hal-hal yang berkaitan dengan aktifitas bahsu baik yang berkaitan dengan latar belakang, metode, obyek, maupun pelaku sejarahnya masih sedikit. Namun bila ditinjau dari latar belakang munculnya bahsul masail adalah adanya kebutuhan masyarakat terhadap hukum Islam praktis (*amaliy*) bagi kehidupan sehari-hari yang mendorong para ulama untuk mencari solusinya dengan melakukan bahsul masail.

Bila ditelusuri, dokumen dan hasil-hasil bahsu tersebut menunjukkan bahwa kegiatan bahsu masail LBM PCNU kabupaten Mojokerto benar- benar berjalan aktif, bergiliran antar kecamatan dari semua MWC di tiap pelosok daerah mojokerto, mulai awal periode sampai akhir.[27] Ini membuktikan bahwa ruh NU dan santri disetiap daerah di masing-masing MWC masih kuat, dan dibuktikan dengan solidnya anggota LBM di tiap-tiap daerah yang nota bene alumni pondok pesantren, sehingga tidak perlu diragukan lagi terkait kualitas mereka. Umat berharap kepada LBM untuk istiqomah dalam *tafaqqquh fiddīn*, juga bisa memberi

[26] Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU, Lajnah Bahsul Masail NU 1926 – 1999. (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2004), hal: 67.
[27] Bukti dokumen itu antara lain terbitnya buku "Santri NU Menjawab, Keputusan Lembaga Bahsul Masail NU Mojokerto Tahun 2011-2018".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manfaat yang besar dilingkungan NU struktural khususnya, dan warga Nahdliyin pada umumnya.[28]

Menurutnya, generasi dan pegiat bahsul masa'il selanjutnya haruslah peka dan responsive terhadap kebutuhan umat Islam khususnya warga nahdliyyin, di saat masyarakat begitu sibuk dengan kehidupannya, hingga tidak ada investasi waktu yang cukup untuk memahami problematika umat, termasuk berbagai masalah keagamaan yang terkait dengan ibadah dan amaliyah sehari-hari.

Menurut Syihabul Irfan Arif,[29] seiring dengan perkembangan zaman, permasalahan sosial semakin komplek, apalagi terkait dengan hukum Islam yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, maka LBM PCNU kabupaten Mojokerto hendaknya mampu menyelesaikan problematika sosial yang dihadapi warga NU.

Para ulama yang aktif dalam bahsul masail tidak boleh berhenti pada teks kitab fiqih klasik saja, apalagi ketika menemukan permasalahan yang tidak ditemukan dalam rumusan teks fiqih klasik, maka apakah perlu mauquf (macet tidak terjawab), padahal memauqufkan masalah menurut fuqoha' tidak boleh, maka juga perlu menengok ilmu-ilmu lain (Ilmu

[28] Wawancara dengan KH. Mashul Ismail (Rais syuriyah PCNU kabupaten Mojokerto 2018-2023) pada hari Jum'at, 26 Juli 2019.
[29] Ketua Tanfidziyah PCNU kabupaten Mojokerto masa khidmat: 2013-2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ushul dan qaidah fiqh) yang menjadi sumber rujukan para faqih sebagai solusi masalah yang belum terjawab hukumnya.[30]

Menurut Ahmad Rodli, Pengurus LBM Mojokerto memiliki banyak kelemahan dan kekurangannya, terutama dalam menjalankan kegiatan lembaga yang berkaitan dengan arsip, dokumentasi dan inventarisasi kegiatan dan hasil-hasil bahsul masail. Banyak file hasil-hasil bahsul masail yang belum terdokumentasikan.[31]

Hasil-hasil bahsu yang terdokumentasi dalam satu buku merupakan arsip yang sangat berharga bagi pengurus NU, warga nahdliyyin, dan masyarakat umumnya. Dokumentasi tersebut menjadi sumber data utama bagi peniliti saat ini dan penelitian di masa akan datang.

2. Peran Lembaga Bahsul Masail (LBM)

Lembaga Bahsul Masail merupakan lembaga resmi dalam struktur organisasi NU yang membicarakan dan mengkaji *al-masā'il al-dīniyyah* (masalah-masalah keagamaan) yang berkaitan dengan *al-masā'il al-fiqhiyyah* (masalah-masalah fiqh), termasuk masalah-masalah *khilāfiyyah* dan kontroversi.

LBM berperan untuk menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang menuntut kepastian hukum. Oleh karena itu lembaga ini merupakan bagian terpenting dalam organisasi NU, sebagai

[30] Kata sambutan Saifuddin Zuhri (dewan perumus dan musahhih) PC LBM NU kabupaten Mojokerto.
[31] Wawancara dengan ketua PC LBM NU masa khidmat 2013-2018 kabupaten Mojokerto pada sabtu, 27 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

forum diskusi alim ulama (Syuriah) dalam menetapkan hukum suatu masalah yang keputusannya merupakan fatwa dan berfungsi sebagai bimbingan warga NU dalam mengamalkan agama sesuai dengan paham Ahlussunah Waljamaah.

Ketika menghadapi masalah serius kekinian yang dimasa lalu peristiwa itu belum pernah terjadi, LBM selalu meminta penjelasan terlebih dahulu kepada ahlinya. Setelah kasusnya jelas, barulah dikaji lewat kitab kuning.[32] Forum ini diadakan untuk menjembatani seluruh problematika masyarakat yang semakin rumit dan komplek.

Bahkan apabila masalah yang didiskusikan bersinggungan dengan hal-hal yang tidak mungkin diputuskan sepihak dari para peserta bahtsul masail, maka mereka mendatangkan orang-orang yang berkompeten dalam bidang tersebut, seperti masalah per-bank-an, mereka mendatangkan seseorang yang mampu menerangkan permasalahan tentang sistem per-bank-an yang hanya diketahui oleh orang-orang dalam saja, sehingga nantinya akan diputuskan sebuah hukum yang objektif serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam masalah SRB (Sistem Rujukan Berjenjang) BPJS kesehatan yang dalam prakteknya dibatasi zona, sehingga masyarakat tidak bisa leluasa berobat di rumah sakit yang

[32] Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah, (Khalista: Surabaya,2008), Hlm.35-36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikehendaki (rumah sakit yang memiliki fasilitas yang memadai),[33] Dalam hal ini LBM menghadirkan tim yang ahli di bidangnya,[34] untuk menjelaskan kebijakan pemerintah terkait pemberlakuan BPJS kesehatan secara teknis, agar keputusan hukmnya lebih obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil keputusan forum bahtsul masail yang berlangsung selama ini di Mojokerto yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama' mulai dari tingkat Ranting, MWC, Cabang, maupun antar pondok pesantren se kabupaten, ditindaklanjuti untuk disebarkan ke masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang diadakan NU,[35] kemudian dibukukan agar masyarakat bisa mengerti aturan hukum atas permasalahan yang mereka hadapi.

3. Metode Pengambilan Keputusan Bahtsul Masail

Untuk mengetahui metode-metode istinbat Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, perlu terlebih dahulu mengetahui macam-macam metode istinbat. al-Dawalibi, sebagaimana dikatakan oleh Wahbah membagi metode istinbat kepada tiga macam, yaitu *bayāni, qiyāsi* dan *istishlāhi.*[36]

---

[33] Kegiatan bahthul masa'il Kamis, 10 Oktober 2019 di Mengelo Selatan - Sooko - Mojokerto dalam rangka peringatan haul pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdliyyah (KH. Muhammad Syafi'I Chusni dan KH. Muhammad Masyruf Chusni).

[34] Tim ahli dari RSI Sakinah bersama Direkturnya dr.H. Hadi Lathifi.

[35] Semisal lailatul ijtima' di masing-masing ranting dan mwc, serta JIHAD (Ngaji Ahad) setiap minggu.

[36] Muhaimin, Abdul Mujib, Jusuf Mudzakir, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam* (Jakarta: Prenada Media,2005), hlm 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode *bayani*, yaitu metode istinbat hukum islam yang mana cara pemecahan kasus atau masalah langsung digali dari alqur'an dan as-sunah. Tugas mujtahid di sini adalah menjelaskan, menguraikan dan menganalisis isi kandungan kedua sumber hukum itu, sehingga dikeluarkan produk hukum.

Metode *qiyasi*, yaitu metode istinbat hukum islam yang mana cara pemecahan kasus atau masalah tidak langsung dirujuk dari alqur'an dan as-sunah, melainkan berdasarkan persamaan motif (*illat*). Karena peramasalahan yang dipecahkan belum ada dasar hukumnya, maka ia dapat dianalogikan dengan dasar hukum kasus atau masalah lain berdasarkan kesamaan motif.

Metode *istiṣlāhi*, menetapkan hukum islam yang mana cara pemecahan kasus atau masalah tidak langsung dirujuk dari al-qur'an dan al-sunah, melainkan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan yang diambil dari prinsip-prinsip dasar kedua sumber hukum islam.

Ketiga metode di atas terdapat perbedaan disamping kesamaan dengan metode lembaga bahsul masail NU dalam cara pengambilan keputusan hukum Islam,[37] antara lain: *qawli, ilhāqi,* dan *manhāji.*

Metode *qawli*, Para ulama NU mengarahkan orientasinya dalam pengambilan hukum untuk mengikuti *aqwāl al-mujtahidīn* (pendapat para

[37] sesuai dengan hasil keputusan munas alim ulama' Nahdlatul Ulama' tahun 1992 di Lampung dan hasil keputusanMuktamar NU XXXI tahun 2004 di Boyolali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mujtahid) yang sudah jadi dalam lingkup *al-madhāhib al-arba'ah*, baik yang mutlak maupun muntasib.

Metode *ilhāqi*, menyamakan hukum suatu kasus/masalah dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (menyamakan suatu kasus dengan pendapat yang sudah jadi).

Metode *manhaji*, dengan men- *taṭbīq*- kan (memberlakukan secara dinamis nash-nash fuqaha dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya, dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam madzhab empat.

Lembaga Bahsul Masail NU kabupaten Mojokerto sebagai forum ilmiyah, mempunyai aturan dan mekanisme yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta bahsul masail. Aturan dan mekanisme itu antara lain:[38]

a. Keputusan Bahsul Masail bersumberkan dari kitab-kitab *Madhāhib al- Arba'ah*. Diluar itu tidak boleh dipakai. Sebab madzhab-madzhab di luar *Madhāhib al- Arba'ah*, belum pernah terbukukan. Namun untuk permasalahan-permasalahan yang bisa ditemukan syarat dan rukunnya boleh juga diikuti (*intiqāl*), meski diluar *madhāhib al-arba'ah*.[39]

[38] Ada kesamaan konsep dengan mekanisme yang dibuat oleh M. Ridwan Qoyyum Said, *Rahasia sukses fuqahā'*, (Kediri: Mitra Gayatri Lirboyo).
[39] Shata al-Dimyati, *I'ānat al-Ṭālibīn*, (Dar al-fikr), jild:4, 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jika tidak ditemukan nash-nash madzhab yang menerangkan masalah yang sedang dibahas, tidak boleh menganalogikan (*ilhāq*) masalah tersebut pada permasalahan yang dicantumkan di dalam kitab-kitab madzhab, meskipun ada titik kesamaan di antara keduanya. Begitu pula tidak diperbolehkan memasukkan suatu permasalahan pada kaidah-kaidah yang bersifat umum. Namun untuk orang-orang yang sudah mencapai derajat faqih diperbolehkan menggunakan methode *ilḥāq* dengan syarat masalah-masalah yang di-*ilḥāq*-kan bukan masalah-masalah yang termasuk kategori sulit, yang membutuhkan pemikiran yang panjang untuk menemukan titik persamaannya.[40]

c. Tidak boleh menggunakan ta'bir berupa ayat-ayat al-Qur'an atau hadits yang masih mentah, tanpa interpretasi dari para ulama yang memenuhi kreteria sebagai mufassir. Jika menggunakan ta'bir dari al-Qur'an dan Hadits, maka harus disertai penjelasan-penjelasan dari para ulama' mengenai ayat-ayat atau Hadits tersebut.41

[40] Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi " *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab* " dalam muqaddimahnya, Dar al-Qalam, Damasykus.
[41] al- Sharif al-Haḍrami, *Bughyatul Mustarshidīn*, (Surabaya: al-Hidayah), 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Jika memakai madzhab di luar Syafi'i. supaya dijelaskan syarat dan rukun yang berkaitan dengan masalah tersebut menurut madzhab yang bersangkutan. Karena termasuk persyaratan *taqlid* yaitu harus mengetahui syarat, rukun dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan madzhab yang diikuti.[42]

e. Menurut konsep fiqih sosial dan juga keputusan Nahdlatul Ulama, qawl dlaif sebaiknya dipakai pegangan untuk memutuskan masalah-masalah yang sudah berlaku di masyarakat. Karena keputusan Bahtsul Masail bukan termasuk fatwa, namun hanya sekedar *irshād* (memberikan petunjuk). Dengan catatan *qawl* tersebut tidak sangat lemah. *Qawl-qawl* yang termasuk kategori dloif antara lain : *khilāf al-aṣah, khīlaf al- mu'tamad, khilāf al-aujah, khilāf al-muttajih.* Khusus untuk *khilāf al- ṣahīh* pada umumnya fasid, tidak bisa dipakai.[43]

f. Teks-teks fuqaha' mengenai suatu permasalahan yang dlahirnya terjadi takha>luf (perbedaan) dan tana>fi (saling menafikan) jika masih mungkin di-ja>mi'-kan (dicarikan titik temunya) maka wajib di-jami'-kan.

---

[42] Muhammad Amin al-Kurdi al-Irbili, *Tanwīrul Qulūb, Fī Mu'āmalati 'allāmi al-Ghuyūb,* (Indonesia: Dār ihyā' al-kutub al-arabiyyah), 396.
[43] Shata al-Dimyati, *I'ānatu al-Tālibīn*, (Dar al-fikr), jilid 1, 09.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Menurut qawl mu'tamad, pendapat-pendapat ulama' yang masih muthlaq (tanpa ada batasan) harus dipahami menurut ke-muthlaq-annya, meskipun ada sebagian ulama' yang menentangnya.[44]

4. Masail Diniyah Lembaga Bahtsul Masail Mojokerto

Sebagaimana Permasalahan yang dibahas di wilayah dan NU pusat, LBM NU Mojokerto juga merespon dan membahas permasalahan yang sedang berkembang di tengah masyarakat untuk dicarikan solusi dari sisi agama. Ada tiga komisi masail diniyah dalam bahsul masail, antara lain:

1. *Masāil Dīniyyah Wāqi'iyyah,*[45] yakni permasalahan kekinian yang menyangkut hukum suatu peristiwa. Misal masalah kesucian pakain layanan laundry.
2. *Masāil Dīniyyah Maudhū'iyyah,* yakni permasalahan yang bersifat tematis, menyangkut pemikiran. Misalnya fikrah Nahdliyah, Globalisasi.
3. *Masāil Dīniyyah Qānūniyyah*, penyikapan terhadap rencana UU yang diajukan pemerintah atau UU peralihan yang baru disahkan. Komisi ini bertugas mengkaji RUU atau UU baru dari sisi agama, untuk diajukan kepada pemerintah sebagai bahan masukan dan koreksi.[46]

---

[44] al- Sharif al-Haḍrami, *Bughyatul Mustarshidīn*, (Surabaya: al-Hidayah), 8.
[45] Masalah yang paling sering dibahas dalam forum bahsu di Mojokerto.
[46] Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi…, op. ci,* 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun permasalahan yang sering muncul di permukaan adalah masalah *wāqi'iyyah*, yakni permasalahan kekinian yang menyangkut hukum suatu peristiwa, misal masalah kesucian pakain layanan laundry, hukum aqiqah untuk keluarga yang sudah meninggal, hukum daging aqiqah dan qurban untuk suguhan hajatan, hukum membawa HP yang mengandung file lafaẓ al-Qur'an bagi orang hadith, dan masalah-masalah waqi'iyah lainnya. Jarang membahas masalah-masalah yang bersifat tematis (*maudhū'iyyah*), termasuk masalah *qānūniyyah*, penyikapan terhadap rencana UU yang diajukan pemerintah atau UU peralihan yang baru disahkan.

5. Model Dan Prosedur Penyelesaian Masalah

Mekanisme kerja lembaga bahsul masail kabupaten Mojokerto adalah menginventarisir semua masalah yang masuk ke lembaga, kemudian disebarkan ke seluruh ulama anggota syuriah dan para pengasuh pondok pesantren yang ada dibawah naungan NU. Selanjutnya para ulama melakukan penelitian terhadap masalah itu dengan merujuk kepada pendapat-pendapat ulama madzhab melalui kitab kuning (klasik). Selanjutnya mereka bertemu dalam satu forum untuk saling beradu argument dan dalil rujukan. Dalam forum ini seringkali mereka harus berdebat keras dalam mempertahankan dalil yang dibawanya, sampai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akhirnya ditemukan dasar yang paling kuat.Barulah ketetapan hukum itu diambil bersama.

Keputusan bahtsul masail di lingkungan NU dibuat dalam kerangka bermadzhab kepada salah satu madzhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermadzhab secara *qawli*. Oleh karena itu prosedur penjawaban masail disusun dalam urutan sebagai berikut :

1). Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dari *kutubul madzāhib al-arba'ah* dan disana terdapat hanya satu pendapat, maka dipakailah pendapat tersebut.

2). Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan disana terdapat lebih dari satu pendapat, maka dilakukan *taqrīr jama'iy* untuk memilih salah satu pendapat. Pemilihan itu dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Dengan mengambil pendapat yang lebih maslahah dan/atau yang lebih kuat.

b. Khusus dalam madzhab Syafi'i sesuai dengan keputusan muktamar I tahun 1926, perbedaan pendapat diselesaikan dengan cara memilih :

- Pendapat yang disepakati oleh *al-Syaikhāni* (al-Nawawi dan al-Rafi'i)
- Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawi.
- Pendapat yang dipegangi oleh al-Rafi'i.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- pendapat ulama yang terpandai (afqah wa a'lam); dan
- Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama'.
- Pendapat ulama' yang paling wara' (berhati-hati dalam hukum).

c. Dalam kasus tidak ada pendapat yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhāq al-masāil bi nazhāiriha* secara jama'iy oleh para ahlinya. *Ilhāq* dilakukan dengan memperhatikan mulhaq, mulhaqbih dan wajah ilhaq oleh mulhiq yang ahli. .

d. Dalam kasus tidak mungkin dilakukan *ilhāq*, maka dilakukan *istinbāṭ jamā'iy* dengan prosedur bermadzhab secara manhaji oleh para ahlinya, yaitu dengan mempraktekkan *qawā'id ushūliyyah* oleh ahlinya.[47]

Lembaga Bahsul Masail NU kabupaten Mojokerto juga menggunakan kerangka pembahasan masalah, *pertama*: analisa masalah (sebab mengapa terjadinya kasus ditinjau dari berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, politik, dll). *kedua*: analisa dampak positif dan negatif dari berbagai aspek. *ketiga*: analisa hukum (keputusan tentang suatu kasus) setelah mempertimbangkan latar belakang dan dampaknya di segala bidang. Keputusan ini

[47] Sistem Pengambilan Keputusan Hukum Islam Dalam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama'. Hasil keputusan Munas Alim Ulama' Nahdlatul Ulama' tahun 1992 di Lampung dan hasil keputusanMuktamar NU XXXI tahun 2004 di Boyolali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mepertimbangkan status hukum (*al-ahkām al-khamsah*), dasar dari ajaran Ahlussunnah Waljama'ah, hukum positif (hukum Negara yang berlaku saat ini). *keempat*: analisa tindakan, peran dan pengawasan (apa yang harus dilakukan sebagai konsekuensi keputusan hukum diatas).

6. Respon Ulama Mojokerto Terhadap Hasil Keputusan Bahtsul Masail

Umat muslim dan warga nahdliyyin khususnya sangat menunggu kreasi dan inovasi lembaga bahsul masail dalam merespon permasahan-permasalahan yang muncul di permukaan, serta memutuskan hukumnya. Pengurus NU juga demikian, mereka mengapresiasi dan memberi penghargaan setinggi-tingginya atas hasil keputusan produk hukum bahsul masail yang menunjukkan bahwa kegiatan Bahtsul masa'il LBM PCNU kabupaten Mojokerto benar-benar berjalan aktif tiap bulan, bergiliran antar kecamatan dari semua MWC di tiap daerah mojokerto, mulai awal periode sampai akhir, ini membuktikan bahwa ruh NU dan santri di setiap daerah di masing-masing MWC masih kuat, dan dibuktikan dengan solidnya anggota LBM di tiap-tiap daerah yang nota bene alumni pondok pesantren, sehingga tidak perlu diragukan lagi terkait kwalitas dari hasil keputusan hukum lembaga bahsul masail Mojokerto.[48]

[48] Kata Pengantar KH. Mashul Isma'il (Katib Syuriyah PCNU Kabupaten Mojokerto 2013-2018),Rais syuriyah PCNU kabupaten Mojokerto 2018-2023, Pengasuh Pondok Pesantren Husnul Hidayah, Gondang Mojokerto, dalam buku " *Santri NU Menjawab*, *Keputusan Lembaga Bahsul*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut KH. Saifuddin Zuhri[49] hasil keputusan bahsul masail dibutuhkan oleh kaum santri dan warga Nahdliyyin. Sebagai Perumus, beliau berharap teman-teman aktifis Bahtsul Masa'il tidak berhenti pada teks kitab fiqih klasik saja, apabila menemukan permasalahan yang tidak ditemukan dalam rumusan dalam teks fiqih klasik, maka apakah perlu mauquf (macet tidak terjawab), padahal memauqufkan masalah menurut fuqoha' tidak boleh, sehingga juga perlu menengok ilmu-ilmu lain (Ilmu ushul dan qaidah fiqh) yang menjadi sumber rujukan para faqih sebagai solusi masalah yang belum terjawab hukumnya. Beliau juga memberi nasehat kepada pegiat bahsul masail agar tidak bersifat kaku terhahadap sumber-sumber tertulis dalam buku/kitab. Jika ada seorang dari negeri lain datang kepadamu dengan maksud meminta fatwamu, jangan kamu sampaikan fatwa berdasar tradisi negerimu. Bertanyalah lebih dulu tentang tradisinya dan berikanlah fatwa berdasarkan tradisinya, bukan tradisimu, dan bukan pula menurut yang ada di buku-bukumu. Ini adalah cara yang benar dan jelas. Bersikap jumud terhadap nukilan-nukilan selamanya adalah kesesatan dalam agama dan kebodohan akan tujuan ulama kaum muslimin dan ulama'salaf terdahulu". dengan menukil pendapat Imam Syihabuddin al-Qarāfi berkata:[50]

Masail NU Mojokerto Tahun 2011-2018". Beliau juga sering hadir dalam kegiatan bahsul masail PCNU sebagai muṣahhih.

[49] Beliau Dewan Perumus dan Muṣahhih PC LBM NU Kabupaten Mojokerto, juga Pengasuh Pondok Pesantren MA'ABA (*Majma'al Bahraini*) Mojogeneng Jatirejo Mojokerto.

[50] https://fr-fr.facebook.com.posts. dan hekams//,حكم , Abdussalam Ajrir al-Ghamari, *Diniyyah, fikriyyah, ijtima'iyyah*, 21 Februari 2017 pukul 17.15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قال شهاب الدين القرافي في الفروق : ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك, بل اذا جاءك رجل من غير اهل اقليمك يستفتيك لاتجره على عرف بلدك, فهذا هو الحق الواضح. والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين.

Artinya: Shihāb al-Dīn al-Qarāfi berkata dalam kitab *al-Furūq*: Jangan bersikap kaku dan beku terhadap apa yang tertulis di dalam beberapa kitab seumur hidupmu. Sebaliknya, jika seseorang datang kepadamu dari selain orang-orang di daerahmu yang mencari/meminta fatwa, jangan kamu menyeretnya ke kebiasaan negaramu, ini adalah keniscayaan. Sebab *jumud* (kemandekan) pada dalil-dalil *naql* adalah kesesatan dalam beragama dan ketidaktahuan akan tujuan para ulama dan para pendahulu (*salaf ṣālih).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA PENELITIAN

Kegiatan bahtsul masail di kabupaten Mojokerto berjalan aktif dan dinamis. Kegiatan ini dilaksanakan hampir setiap bulan, bergiliran antar kecamatan dari semua MWC di setiap pelosok daerah Mojokerto, mulai awal periode sampai akhir. Ini membuktikan bahwa ruh warga nahdliyyin dan santri di setiap daerah di masing-masing MWC masih kuat, juga solidnya anggota LBM di tiap-tiap daerah yang notabene alumni pondok pesantren, sehingga tidak perlu diragukan lagi terkait kualitas mereka.

LBM yang terus istiqamah dalam *tafaqquh fī al-dīn* bisa memberi manfaat yang besar di lingkungan NU struktural khususnya, dan warga nahdliyyin pada umumnya. Namun kepengurusan LBM Mojokerto memiliki kelemahan dan kekurangan, terutama dalam menjalankan kegiatan lembaga yang berkaitan dengan peng-arsip-an, dokumentasi dan inventarisasi kegiatan dan hasil-hasil bahtsul masail. Banyak file hasil bahtsul masail yang belum terdokumentasikan.

Di bawah ini adalah arsip dan dokumen hasil keputusan bahtsul masail NU kabupaten Mojokerto yang berhasil dikumpulkan, dan telah dikodifikasi dalam satu buku.[1] Agar lebih jelas, rinci dan mudah difaham penulis mengurai dan menyajikan buku tersebut dalam bentuk narasi dengan mempertimbangkan

[1] Buku tersebut diberi judul *" Santri NU Menjawab", Keputusan Lembaga Bahtsul Masa'il NU Mojokerto Tahun 2011-2018.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa hal sebagai berikut: menuliskan (*as'ilah*) yang dibahas berdasarkan kategorinya, jawaban dan keputusan hukum atas masalah yang dibahas, menyertakan *ibarah* atau *ta'bir* dari berbagai referensi dan sumber *kutub turats* yang menguatkan status hukum tersebut, dan pendekatan serta metode yang digunakan dalam menetapkan suatu hukum.

A. Permasalahan-Permasalahan Fiqh Masyarakat Yang Dibahas Dalam Bahtsul Masail dan Pengkategoriannya

LBM NU Mojokerto sebagaimana LBM di tingkat wilayah dan pusat, merespon dan membahas permasalahan-permasalahan yang sedang berkembang di tengah masyarakat untuk dicarikan solusi dari sisi agama. Ada tiga komisi masail diniyah dalam bahtsul masail, yaitu:

1. *Masāil Dīniyyah Wāqi'iyyah*,[2] yakni permasalahan kekinian yang terjadi di tengah masyarakat yang menyangkut hukum suatu peristiwa. Masalah wāqi'iyyah inilah yang mendominasi dalam kegiatan bahtsul masail. Ada diantaranya yang dikategorikan fiqh ibadah, fiqh mu'amalah, fiqh ṭaharah, fiqh munākahah, fiqh mawarits, fiqh ibadah dan fiqh mu'amalah, serta fiqh ṭaharah dan fiqh mu'amalah.
2. *Masāil Dīniyyah Maudhū'iyyah*, yakni permasalahan yang bersifat tematis, menyangkut pemikiran, termasuk di dalamnya kategori fiqh mu'amalah. Misalnya fikrah Nahdliyah dan Globalisasi.

[2] Masalah yang paling sering dibahas dalam forum bahtsul masail di Mojokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Masāil Dīniyyah Qānūniyyah*, penyikapan terhadap rencana UU yang diajukan pemerintah atau UU peralihan yang baru disahkan. Komisi ini bertugas mengkaji RUU atau UU baru dari sisi agama, untuk direkomendasikan kepada pemerintah sebagai bahan masukan dan koreksi.

Hasil penelusuran terhadap keputusan hukum lembaga bahtsul masail NU kabupaten Mojokerto didapatkan beberapa temuan, yaitu:

a. Ada 47 permasalahan yang dikategorikan *fiqh ibādah*, yaitu:

1) Bolehkah aqiqah untuk orang tua dan untuk keluarga yang sudah meninggal atau qurban untuk orang tua dan keluarga yang sudah meninggal?

2) Bagaimanakah hukum mempergunakan daging Aqiqah dan Qurban untuk suguhan hajatan oleh orang yang baraqiqah dan berkorban?

3) Bagaimana hukum kerja bakti di pemakaman dan membersihkan daun, dahan dan rumput yang ada di atas kuburan?

4) Dengan prospeknya bisnis lewat KBIH yang menggiurkan, wajibkah pengelola KBIH mengeluarkan zakat ?

5) Apakah Jamaah Calon Haji wajib mengeluarkan zakat setelah melunasi ONH?

6) Bagaimana hukum bersedekah dengan cara disebar/dilempar ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Bagaimana hukum menyebar uang receh di tengah-tengah pembacaan salawat nabi (*syrakalan*) ?

8) Bagaimana hukum menyebar uang receh ketika pembacaan salawat nabi, apabila dilakukan di dalam masjid ?

9) Bagaimana hukum meninggalkan jum'atan bagi karyawan yang aturan kerjanya sangat ketat dan disiplin sehingga mereka rela untuk tidak jum'atan karena khawatir kehilangan pekerjaan mereka.?

10) Bagaimana perspektif hukum fiqih menyikapi asumsi pasien yang merasa kesulitan untuk melakukan ibadah utamanya wudlu' shalat dan berpuasa ketika sedang diinfus. Bahkan banyak pasien berasumsi hal tersebut merupakan udhur untuk tidak shalat (di qodlo' ketika sembuh) ?

11) Bagaimana hukum shalat pasien yang merasa kesulitan untuk melakukan ibadah utamanya wudlu' shalat dan berpuasa ketika sedang diinfus. Bahkan banyak pasien berasumsi hal tersebut merupakan udzur untuk tidak shalat (di qodlo' ketika sembuh), dan bagaimana caranya?

12) Sebatas mana fatihahnya ma'mum masbuq ditanggung imam ?

13) Bagaimana hukum shalatnya ma'mum masbuq yang imamnya batal kemudian diganti salah satu ma'mum?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

14) Bagaimana hukumnya menaruh HP yang ada file – file positif seperti di atas di dalam saku celana ?
15) Bagaimana hukum orang hadats membawa HP yang mengandung file lafaẓ ayat – ayat al-Qur'an ?
16) Dengan menabung di bank, apakah menjadikan seseorang wajib melaksanakan ibadah haji ?
17) Ketika sejumlah tabungan kita sudah cukup dibuat daftar haji, bolehkah kita mempergunakan uang tabungan tersebut untuk hajat lain ?
18) Bagaimana hukum perempuan haid mengaji dan mengajar ngaji di dalam masjid ?
19) Bagaimana hukum mendirikan dua jum'atan dalam satu dusun?
20) Sebatas mana perselisihan yang memperbolehkan mendirikan dua jum'atan dalam satu dusun ?
21) Adakah dalam madzhab Syafi'i pendapat yang memperbolehkan melakukan jum'atan kurang dari 40 orang ?
22) Bagaimana hukum mengubur mayit muslim dan non muslim dalam satu area?
23) Kalau tidak boleh siapakah yang berdosa? Dan Bagaimana solusinya?
24) Siapakah yang menjadi nadzir dari tanah wakaf masjid yang dimanfaatkan untuk beribadah, bersuci, dan buang hajat ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

25) Bolehkah salah satu wakif tersebut mengangkat dirinya sendiri sebagai nadzir jika dia memang ahlinya ?
26) Sahkah Aqiqoh dengan paket jadi ?
27) Siapa yang dimaksud Imam dalam Amil ?
28) Bolehkah membentuk panitia zakat tanpa ada surat pengangkatan dari imam atau na'ibul imam (dalam masalah zakat) dan bolehkan panitia tersebut menerima zakat atas nama amil ?
29) Jika tidak boleh menerima zakat atas nama amil bagaimana solusinya ?
30) Bagaimana hukum mengganti pelakasanaan ibadah hajinya orang yang masih hidup ?
31) Bagaimana hukum mengganti pelaksanaan ibadah hajinya orang yang sudah meninggal dengan tanpa wasiat ?
32) Bagaimana hukumnya menarik kembali uang untuk haji tersebut di atas untuk dibagikan kepada ahli waris ?
33) Sahkah aqiqah dengan cara berpesan pada warung yang menyediakan jasa aqiqah ?
34) Bagaimanakah hukum mengumandangkan adzan sebelum masuknya waktu jumat ?
35) Bagaimana hukum shalat qabliyah dengan mengikuti adzan tersebut ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

36) Bagaimana hukum melaksakan umroh bagi orang yang sedang iddah ?

37) Bagaimana hukum melaksanakan ibadah umroh bagi wanita tanpa mahrom ?

38) Adakah pendapat yang memperbolehkan (tidak membatalkan wudlu') bersentuhan (antara laki-laki dan perempuan ketika thowaf (madzhab Syafii) ?

39) Apa yang harus dilakukan wanita yang sedang haid, ketika sampai berakhirnya masa haji, dia belum suci dan belum sempat melakukan thowaf rukun ?

40) Bagaimana hukum menyerahkan uang untuk urusan dam kepada KBIH di tanah air, padahal belum pasti nanti wajib membayar dam atau tidak?

41) Adakah pendapat yang membolehkan dam dibayar dengan uang, dan mengikuti pendapat tersebut ?

42) Apakah sudah cukup membayar dam dengan pasrah bongkoan seperti kasus di atas ?

43) Apakah masih wajib bagi Mukidi yang dulu ketika muda kaya raya namun tidak melaksanakan haji sehingga sekarang dia kena musibah usahanya bangkrut dan jatuh miskin untuk melaksanakan ibadah haji ?

44) Bolehkah melaksanakan badal haji untuk kasus di atas ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

45) Bagaimana status shalatnya orang tersebut,yang notabennya dia tidak berkhitan, Dan apakah wajib Qodlo' ?

46) Bagaimana status jenazah pria (yang belum khitan) tersebut sudah terlanjur di makamkan, sementara anggota yang dibawah *qulfah* (kulit yang membungkus *hasyafah*) belum suci (mutanajis) ?

47) Bagaimana hukum jama' dan qasarnya pegunjung wisata pantai yang banyak mempertontonkan keindahan aurat, sah atau tidak?

b. Ada 32 permasalahan yang dikategorikan *fiqh mu'āmalah*, yaitu:

1) Bagaimana hukum mengkoordinir dana ONH dan hukum pemanfaatannya ?

2) Dinamakan aqad apa transaksi sales yang berkeliling menawarkan dagangan mereka ke toko-toko baik di kota maupun di desa, kemudian menitipkan barang dagangan mereka di toko tersebut dan akan menagih uangnya pada waktu yang telah disepakati ?

3) Bolehkan bisnis dengan cara mengadakan promosi serta iming-iming hadiah ?.Sebagaimana yang di lakukan pak Tejo, dalam bisnis kolam pancingnya pak Tejo menggelar lomba memancing dengan iming-iming hadiah sebagai berikut ; juara satu Rp. 2.000.000, juta, juara dua Rp. 1.000.000, juara tiga Rp. 500.000,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan ketentuan setiap peserta wajib membayar tiket Rp. 100.000 dan dibatasi waktu dua jam. Selanjutnya satu jam untuk galatama (semua peserta yang tidak mendapat hadiah boleh mengukuti acara tersebut bagi peserta yang yang mendapat ikan paling besar mendapat hadiah hiburan). Semakin banyak peserta semakin besar keuntungan P. Tejo.

4) Kalau tidak boleh bagaimana solusinya? karena bisnis seperti contoh di atas sudah menjamur.
5) Bagaimana hukum tritis (teras) batas yang menjorok keluar melampaui batas tanah ?
6) Bagaimana hukum tempat wudlu' yang menjorok keluar melampau batas tanah tersebut sebagaimana tersebut dalam deskripsi ?
7) Bolehkah dana masjid digunakan untuk kebutuhan lain, misalnya untuk menyumbang masjid lain, operasional lembaga pendidikan, dan kegiatan keagamaan ?
8) Bagaimana hukum donor darah ?
9) Bolehkah seorang muslim menerima donor darah dari non muslim atau sebaliknya ?
10) Bagaimana hukum menjual darah seperti yang di lakukan bank darah seperti PMI ?
11) Bagaimana hukum memindah janin secara gaib ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12) Kepada siapakah ilhaq nasab janin yang lahir dari pemindahan janin ghoib ?
13) Bolehkah masyarakat dan musafir memanfaatkan fasilitas masjid tersebut ?
14) Masalah zakatnya galian apakah termasuk orang yang wajib mengeluarkan zakat? dan siapa yang wajib zakat ?
15) Apakah pemilik dump truck diatas juga wajib zakat ?
16) Bagaimana hukum panitia zakat mencampur beras zakat yang ada kemungkinan kembali kepada muzakki ?
17) Bolehkah panitia zakat menerima bagian atas nama amil zakat? Jika tidak boleh bagaimana solusinya ?
18) Bagaimana hukum menjadikan sebagian besar daging kurban untuk hajatan seorang tokoh(mudin) ?
19) Bagaimana hukum menjual kulit sapi qurban seperti diatas ?
20) Bolehkah menjual kulit sapi kurban yang sudah di pesan sebelum disembelih seperti diatas ?
21) Bagaimana hukum penyembelihan dengan cara pembiusan (anestesi) ?
22) Lebih baik mana cara penyembelihan dengan cara tradisional atau pembiusan ?
23) Bagaimana fiqih menyikapi menggunaan lahan di atas sungai ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

24) Bagaimana hukumnya pemerintah mengkomersilkan lahan tersebut ?

25) Jika berdampak pada bencana -banjir misalnya- yang sampai merenggut nyawa atau kerugian materi pada orang lain, siapa yang bertanggung jawab ?

26) Apakah ucapan selamat hari raya agama lain seperti ucapan selamat natal dan tahun baru menjadikan kufur (Membatalkan Syahadat) ?

27) Apakah menggunakan atribut agama lain seperti atribut natal juga berdampak kufur ?

28) Bagaimana hukum memeriahkan dan menyemarakkan tahun baru dengan meniup tropet dan menyalakan kembang api?

29) Bagaimana definisi Biro jasa ?

30) Bagaimana hukumnya Biro jasa ?

31) Bagaimana hukumnya mengunjungi wisata pantai yang banyak mempertontonkan keindahan aurat, serta tempat-tempat wisata seperti candi bila tempat itu masih digunakan acara ritual.

32) Bagaimana hukumnya mengumpulkan antara laki-laki dan perempuan dalam satu bus ?

c. Ada 7 permasalahan yang dikategorikan *fiqh Ṭahārah*, yaitu:

1) Bagaimana hukum asap sampah yang kemungkinan besar dihukumi najis ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Bagaimana hukum pakaian yang terkena asap sampah tersebut?

3) Bagaimana hukum mesin cuci yang menampung air kurang dari dua qullah ?

4) Bagaimana solusi praktis dan mudah untuk di gunakan masyarakat awam dalam kedua masalah tersebut di atas apabila tidak memenuhi tuntutan syara' ?

5) Bolehkah Pria yang sudah terlanjur dewasa tidak mau berkhitan karena alasan takut dan berbagai alasan lainya sehingga ajal menjemput tetap tidak berkhitan ?

6) Bagaimanakah hukum telor asin tersebut bila ditinjau dari proses pembuatannya pengasinan dengan bantuan batu bata) adalah proses pembuatan bata yang kadang dicampur dengan kotoran hewan ?

7) Bagaimana hukum mengkonsumsi telor asin tersebut ?

d. Ada 5 permasalahan yang dikategorikan *fiqh mu'nākahah*, yaitu:

1) Sahkah aqad nikah yang dipaksa oleh aparat desa (ketua RT) karena hamil akibat perbuatan zina ?

2) Bolehkah aparat memaksa gondes untuk menikahi gadis (bunga) yang tidak ingin ia nikahi ?

3) Bagaimanakah hukum bagi ortu yang tidak merestui dan tidak mau menjadi wali pernikahan anaknya ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Sahkah pernikahan kedua mempelai yang dilakukan di tempat yang jauh dari wali, misalnya di Kalimantan ?

5) Apakah sikap mudin yang enggan menikahkan wanita yg di tinggal pergi suami selama enam tahun,dan wanita tersebut baru mengurus surat cerai ke pengadilan dan surat cerai belum keluar karena dalam surat masa iddah belum habis padahal tgl pernikahan sudah terlanjur di tetapkan bisa dibenarkan menurut syari'at ?

e. Ada 2 permasalahan yang dikategorikan *fiqh mawārith*, yaitu:

1) Ucapan si Bapak kepada anak yang mau pergi kerja keluar negeri tapi tidak punya uang dan meminta pada si Bapak untuk menjual sebagian sawahnya dan berupa ucapan "nak.. bapak tidak punya uang, harta bapak yang bisa kamu gunakan adalah tanah sebelah rumah itu. Jika kamu jual tanah tersebut maka nanti ketika aku meninggal kamu sudah tidak berhak mendapat warisan" si Adi menjawab "inggih pak, matur suwon, mboten angsal warisan mboten nopo-nopo, sing penting kulo saget kerjo teng luar negeri. Pangestune pak, nggih" dikategorikan akad apa ?, dan sahkah akad tersebut ?

2) Apakah ucapan si bapak tersebut dapat menggugurkan warisan si anak ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Ada 1 permasalahan yang dikategorikan *fiqh ṭahārah dan fiqh mu'āmalah*, karena memiliki dua kriteria tersebut, yaitu: Bagaimana hukum loundrey dengan menggunakan mesin yang kurang memperhatikan kesucian dan najisnya pakaian ?

g. Ada 3 permasalahan yang dikategorikan *fiqh ibādah dan fiqh mu'āmalah*, karena memiliki dua kriteria tersebut, yaitu:

1) Siapakah yang wajib menzakati harta barang dagangan mereka (sales dan pemilik toko) itu, apakah sales atau pemilik toko ?

2) Bolehkah bongkaran masjid ditasarrufkan ke masjid atau bangunan lain, seperti muṣalla atau tempat pendidikan ?

3) Bagaimana hukum mendirikan masjid di tanah waqaf untuk pendidikan, seperti tanah waqaf pondok pesantren ?.

Dari permasalahan-permasalahan fiqh tersebut, dikelompokkan menjadi 7 kategori, yaitu: fiqh ibadah, fiqh ṭaharah, fiqh mu'amalah, fiqh munakahah, dan fiqh mawarith. Ada juga beberapa masalah fiqh yang substansinya bisa dikategorikan fiqh taharah dan fiqh mu'amalah, serta dikategorikan fiqh ibadah dan fiqh mu'amalah. Dari data di atas menunjukkan fiqh ibadah mendominasi dibanding fiqh-fiqh yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Metode istinbat hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama' kabupaten Mojokerto dalam menjawab permasalahan-permasalahan fiqh masyarakat

Sistem pengambilan keputusan hukum dalam bahtsul masail Nahdlatul Ulama' kabupaten Mojokerto, secara garis besar sama dan mengacu pada Hasil keputusan Munas Alim Ulama' Nahdlatul Ulama' tahun 1992 di Lampung dan hasil keputusan Muktamar NU XXXI tahun 2004 di Boyolali. *Pertama* : bermadzhab secara *qawli*, artinya Para ulama NU mengarahkan orientasinya dalam pengambilan hukum untuk mengikuti *aqwāl al-mujtahidīn* (pendapat para mujtahid) yang sudah jadi dalam lingkup *al-madhāhib al-arba'ah*, baik yang mutlak maupun muntasib. *Kedua:* bermazhab secara *ilhāqi (ilhāq al-masāil bi naẓāirihā),* menyamakan hukum suatu kasus/masalah dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (menyamakan suatu kasus dengan pendapat yang sudah jadi). *Ketiga :* bermadzhab secara *manhaji* dengan men-*taṭbīq*-kan (memberlakukan secara dinamis nash-nash fuqaha dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya, dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam madzhab empat.

Keputusan bahtsul masail dilingkungan NU kabupaten Mojokerto dibuat dalam kerangka bermadzhab kepada salah satu madzhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermadzhab secara *qawli*.[3] Oleh karena itu prosedur

[3] Utamanya keputusan hukum terhadap penyelesaian *masāil dīniyyah wāqi'iyyah* di lingkungan dan tradisi NU.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjawaban masail disusun dalam urutan sebagai berikut : *pertama*, dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dari *kutub al-madhāhib al-arba'ah* dan disana terdapat hanya satu pendapat, maka dipakailah pendapat tersebut. *Kedua*, Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan disana terdapat lebih dari satu pendapat, maka dilakukan *taqrīr jamā'iy*[4] untuk memilih salah satu pendapat. Pemilihan itu dapat dilakukan dengan mengambil pendapat yang lebih maslahah dan/atau yang lebih kuat.

Khusus dalam madzhab Syafi'i sesuai dengan keputusan muktamar I tahun 1926, perbedaan pendapat diselesaikan dengan cara memilih pendapat yang disepakati oleh *al-Syaikhāni* (al-Rafi'i dan al-Nawawi), pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawi, pendapat yang dipegangi oleh al-Rafi'i, pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama', pendapat ulama' yang terpandai (*al-a'lam*), pendapat ulama' yang paling *wara'*. Untuk madzhab selain Syafi'i berlaku ketentuan-ketentuan menurut madzhab yang bersangkutan.

Dalam kasus tidak ada pendapat yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhāq al-masāil bi nazhāirihā* secara jama'iy oleh para ahlinya. Ilhaq dilakukan dengan memperhatikan mulhaq, mulhaq bih dan wajah ilhaq oleh mulhiq yang ahli.

Dalam kasus tidak mungkin dilakukan *ilhāq*, maka dilakukan *istinbath jama'iy* dengan prosedur bermadzhab secara manhaji oleh para ahlinya, yaitu

---

[4] Upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu diantara beberapa *qawl/wajah* dalam madzhab Syafi'i.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengeluarkan hukum syara' dengan mempraktekkan *qawā'id ushūliyyah* oleh ahlinya secara kolektif.

Ada juga beberapa kasus yang penyelesain status hukumnya dengan prosedur gabungan metode *qawli ilhāqi* dan *qawli manhaji*[5], hanya saja tidak banyak permasalahan yang diselesaikan dengan pendekatan gabungan metode tersebut.

Alur pembahasan masail diniyyah dilingkungan Lembaga Bahthul Masail Nahdlatul Ulama' kabupaten Mojokerto dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Penerimaan masail diniyyah dari tingkatan organisasi dibawahnya, perorangan atau kelompok masyarakat.
2) Masail yang diajukan biasanya sudah pernah dibahas dalam forum bahtsul masail ditingkat bawah, namun belum terpecahkan (*mauqūf*) atau belum terjawab dengan jawaban yang memuaskan.
3) Identifikasi dan penyeleksian masail guna memilih dan memilah masail yang akan dibahas dalam majlis pembahasan.
4) Pembahasan masail dengan merujuk pada kitab-kitab klasik maupun *mu'āṣarah* yang ditulis oleh ulama' madzhab empat khususnya madzhab Syafi'i.
5) Penjawaban masail beserta argumentasi dan kitab rujukannya dipandu pimpinan sidang (moderator) dan pengawasan team perumus dan dewan *taṣhih*.

[5] Pendekatan metode yang digunakan penulis dengan mendapatkan pertimbangan tim bahtsul masail kabupaten Mojokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Pimpinan sidang menyimpulkan rumusan jawaban sesudah mempertimbangan hasil analisa jawaban oleh team perumus dan selanjutnya ditawarkan kepada peserta bahtsul masail guna mendapatkan persetujuan.

7) Rumusan jawaban sedapat mungkin (tidak harus) dilengkapi dengan dalil al-Qur'an beserta tafsirnya dan al-Hadits beserta syarahnya.

8) Rumusan jawaban yang telah mendapat persetujuan, dimintakan *taṣhih* dari dewan *taṣhih* terdiri dari para ulama'/kyai di jajaran syuriyah.

Penelusuran terhadap hasil keputusan hukum lembaga bahtsul masail NU kabupaten Mojokerto yang didokumentasikan dalam satu buku "Santri NU Menjawab", Keputusan Lembaga Bahtsul Masail NU Mojokerto Tahun 2011-2018". didapatkan beberapa temuan, yaitu:

1. Ada 54 permasalahan fiqh yang hukumnya diputuskan dengan metode *qawli,* yaitu:

   1). Permasalahan aqiqah dan qurban. Bolehkah aqiqah atau qurban di-atasnama-kan untuk orang tua dan keluarga yang sudah meninggal?.

   Hukum : Aqiqah yang di-atasnama-kan untuk orang tua dan keluarga yang meninggalnya sudah baligh jika tidak ada wasiyat, hukumnya tidak boleh dan tidak sah, akan tetapi jika tetap melakukan aqiqah, maka dihukumi sadaqah dan pahalanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai pada mayit. Adapun qurban untuk orang tua dan keluarga yang meninggal, menurut *qawl aṣah* tidak sah. Tetapi menurut Syekh Abu al- Hasan al-Ubadi hukumnya sah, karena qurban adalah bagian dari sadaqah.

Ta'bir :[6]

a). Tuhfah al-Muhtāj Fī Syarh al-Minhāj:

(ولا) تجوز ولا تقع أضحية (عن ميت إن لم يوص بها) لما مر ويفرق بينهما وبين الصدقة بأنها تشبه الفداء عن النفس فتوقفت على الإذن بخلاف الصدقة ومن ثم لم يفعلها وارث ولا أجنبي وإن وجبت بخلاف نحو حج وزكاة وكفارة ؛ لأن هذه لا فداء فيها فأشبهت الديون.[7]

b). Hāshiyah al-Tarmasiy:

(قوله لا عن ميت لم يوص) اي لا يضحي احد عن ميت لم يوص لما مر وفرق بينها وبين الصدقة بأنها تشبه الفداء عن النفس فتوقفت على الاذن بخلاف الصدقة ومن ثم لم يفعلها وارث ولا أجنبي عن الميت وان وجبت بخلاف نحو حج وزكاة وكفارة لأن هذه لا فداء فيها فأشبهت المديون ولا كذلك التضحية والحق العتق بغيره مع أنه فداء ايضا لشدة تشوق الشارع اليه.[8]

c). Mughnī al-Muhtāj ilā ma'rifat ma'ānī al-Minhāj:

---

[6] Peneliti menggunakan istilah *ta'bīr* yang maksudnya sama dengan istilah *ibārah,* yaitu ungkapan, redaksi atau bunyi tekstual yang ada dalam kitab-kitab klasik yang menjadi rujukan lembaga bahtsul masail. Penulisan ta'bir sebagai dalil dan hujjah setiap hukum di dalam penelitian ini merujuk pada sumber data primer tertulis berupa buku dokumen "*Santri NU Menjawab*", berikutnya dapat dilacak dan ditelusuri di masing-masing kitab rujukan yang dimaksud.

[7] Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtāj Fī Syarh al-Minhāj*, (al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, Mesir 1983) 168.

[8] Muhammad Mahfuz bin Abdullah al-Tarmasiy, *Hashiyah al-Tarmasiy*, (Dār al-Manhaj, 1338 H), Juz 4, 643.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(ولا) تضحية (عن ميت لم يوص بها) لقوله تعالى:وأن ليس للإنسان إلا ما سعى[النجم: 39] فإن أوصى بها جاز -الى ان قال- وقيل تصح التضحية عن الميت وإن لم يوص بها لأنها ضرب من الصدقة، وهي تصح عن الميت وتنفعه.[9]

Ungkapan yang bergaris bawah dari ketiga sumber kitab tersebut di atas: (Tuhfat al-Muhtāj Fī Syarh al-Minhāj, Hāshiyah al-Tarmasiy, dan Mughnī al-Muhtāj ilā ma'rifat ma'ānī al-Minhāj) menyatakan secara *ṣarīh* tentang hukum qurban, bahwasanya: *pertama* tidak boleh dan tidak sah qurban atas nama orang tua dan keluarga yang sudah meninggal apabila si mayit tidak berwasiat. *Kedua* ada perbedaan hukum antara qurban dengan ibadah lainnya seperti haji, zakat dan kafarat. Qurban menyerupai *fidā'* (menebus diri), sehingga membutuhkan izin. Sedangkan haji, zakat dan kafarat bukan termasuk *fidā'*, akan tetapi serupa dengan hutang, sehingga bisa dilaksanakan tanpa izin (wasiat) ketika masih hidup. *Ketiga* aqiqah sama dengan qurban dalam berbagi hukmnya, sebagaimana yang tercantum dalam Fath al-Wahhab:

(وهي) أي العقيقة (كضحية) في جميع أحكامها ....

[9] Shihabuddin Muhammad bin Muhammad al-Sharbini, *Mughnī al-Muhtāj ilā ma'rifati ma'ānī al-Minhāj,* Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, Jilid 6, hal 137-138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2). Hukum kerja bakti di pemakaman dan membersihkan daun, dahan dan rumput yang ada di atas kuburan.

Hukum : Boleh, kecuali rumput yang masih hijau atau bunga yang belum kering yang berada di atas makam (makruh untuk mencabut dan memetiknya). Dan jika di pemakaman umum, tidak boleh meratakan tanah kuburan lama yang dimungkinkan mayat di dalamnya sudah rusak.

Ta'bir :

a). Barīqah Mahmūdiyyah :

ومنها قلع الشوك والحشيش الرطبتين على القبر فانه مكروه فان النباتات ما دامت رطبة تسبح الله فحينئذ ينتفع الميت ويستأنف بتسبيحها عن الخانية ويكره قطع الحطب والحشيش من المقبرة فان كان يابسا فلا بأس به لانه مادام رطبا يسبح فيؤنس الميت.[10]

b). al-Majmū' fi Sharh al-Muhadhdhab :

قال القاضي حسين والبغوي والمتولي وسائر الأصحاب رحمهم الله ولا يجوز بعد البلى أن يسوى عليه التراب ويعمر عمارة قبر جديد إن كان في مقبرة مسبلة لأنه يوهم الناس أنه جديد فيمتنعون من الدفن فيه بل يجب تركه خرابا ليدفن فيه من أراد الدفن قال المصنف والأصحاب رحمهم الله والرجوع في مدة البلى إلى أهل الخبرة بتلك الناحية والمقبرة.[11]

---

[10] Muhammad Abu Said al-Khadimi al-Hanafi, *Barīqah Mahmūdiyyah fī sharhi Ṭarīqah Muhammadiyyah wa sharī'ah Nabawiyyah fī sirati Ahmadiyyah*, Maṭba'ah al-Halabiy, 2010, Juz 5, hal. 411.

[11] Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, *al-Majmū' fī Sharhi al-Muhadhdhab*, Maktabah al-Irshād, 2008, Juz. 5, Hal. 284.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c). I'ānat al-Ṭālibīn, Juz 2, 136.

ويحرم أخذ شئ منهما ما لم ييبسا لما فى أخذ الاولى من تفويت حظ الميت المأثور عنه (ص) وفى الثانية من تفويت حق الميت بارتياح الملائكة النازلين لذلك.[12]

Ungkapan yang bergaris bawah dari ketiga sumber kitab tersebut di atas: (Barīqah Mahmūdiyyah, al-Majmū' fi Sharh al-Muhadhdhab, dan I'ānat al-Ṭālibīn) secara *ṣarīh* menjelaskan: *pertama*, tentang bolehnya (*lā ba'sa*) membersihkan daun, dahan dan rumput yang sudah kering di atas kuburan. Namun ketika tiga hal tersebut masih basah maka menurut Abu Said al-Khadimi al-Hanafi hukumnya makruh, dan haram menurut Abu Bakar Uthman Bin Shata al-Bakri, karena dianggap memusnahkan hak mayit. *Kedua*, tidak boleh meratakan tanah kuburan lama yang sudah membusuk apabila berada di maqbarah umum, karena kekhawatiran dianggap kuburan yang baru. Harus (wajib) membiarkan rusak dengan sendirinya.

[12] Abu Bakar Uthman Bin Shata al-Bakri, *I'ānatu al-Tālibīn,* Dār ihyā' al-kutub al-Arabiyyah, Juz 2, Ibid, 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3). Hukum mengumpulkan dan mengkoordinir dana ONH[13] dan pemanfaatannya.

Hukum : Hukum mengumpulkan dana ONH adalah dengan aqad wakalah. Sedang pemanfaatannya tidak boleh jika tidak ada izin dari calon haji tersebut.

Ta'bir :

a). Hāshiyah al-Bājuri, Juz. 2, 381.

(وكل ما جاز للانسان التصرف فيه بنفسه جاز له ان يوكل) فيه غيره (او يتوكل فيه) عن غيره.[14]

b) Bughyah al-Mustarshidīn Juz.1, 246.

ويجب على الوكيل موافقة ما عين له الموكل من زمان ومكان وجنس ثمن وقدره كالاجل والحلول وغيرها او دلت عليه قرينة قوية من كلام الموكل او عرف اهل ناحيته فان لم يكن شيء من ذلك لزمه العمل بالاحوط نعم. لو عين الموكل سوقا او قدرا او مشتريا ودلت القرائن على ذلك لغير غرض او لم تدل وكانت المصلحة في خلافه جاز للوكيل مخالفته ولا يلزمه فعل ما وكل فيه.[15]

c). al-Muhaẓẓab fī Fiqh al-Imām Shāfi'i, Juz 1, 159.

ولايصير العرض للتجارة الا بشرطين احدهما ان يملكه بعقد يجب فيه العوض كالبيع والاجارة والخلع

[13] ONH : Ongkos Naik Haji, sekarang diistilahkan BPIH : Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

[14] Ibrahim Bin Muhammad al-Bajuri al-Shafi'i, *Hāshiyah al-Bājuri alā Sharhi ibni Qāsim al-Ghiziy*, Dār al-Minhāj, Juz. 2, Hal. 381.

[15] Abdurrahman Ba "Alawiy, *Bughyah al-Mustarshidīn fī Talkhīṣi fatāwī Ba'ḍi al-Aimmah min al-Ulamā' al-Muta'akhirīn*, Dār al-fikr, 2011, Juz.1 hal. 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

والثانى ان ينوي عند العقد انه يتملكه للتجارة فأما اذا ملكه بارث او وصية او هبة من غير شرط الثواب لم يصر للتجارة بالنية وان ملكه بالبيع والاجارة ولم ينوعند العقد انه للتجارة لم يصر للتجارة.[16]

'Ibārat / redaksi yang bergaris bawah dalam kitab Hāshiyah al-Bājuri ini bersifat umum, segala sesuatu yang seseorang bisa bertasarruf sendiri, maka dia boleh mewakilkan pada orang lain. Dalam kaitannya dengan ONH seseorang boleh mewakilkan siapapun yang dikehendaki. Di dalam Bughyah al-Mustarshidīn, pada ungkapan yang bergaris bawa, hukumnya wajib (ويجب) bagi *wakīl* menepati segala yang telah ditentukan oleh *muwakkil*. Dalam kaitan ini *wakīl* tidak boleh memanfaatkan uang ONH tanpa sepengetahuan dan izin *muwakkil.*

4). Prospek bisnis KBIH yang menggiurkan, wajibkah KBIH mengeluarkan zakat ?.

Hukum : Pengelola KBIH wajib mengeluarkan zakat tijaroh karena termasuk ijaroh yang diniati tijaroh.

Ta'bir

a). Kifāyah al-Akhyār, Juz 1, 178

[16] Abu Ishaq Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf al-Fairuz Abadi al-Shairozi, *al-Muhaẓẓab Fī Fiqh al-Imām Shāfi'i*, Dār al-Fikri, Beirut, Juz 1, Hal. 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ولو أجر الشخص ماله او نفسه وقصد بالاجرة اذا كانت عرضا للتجارة تصير مال تجارة لأن الاجارة معاوضة, وكذا الحكم فيما اذا كان تصرفه في المنافع بأن كان يستأجر المستغلات ويؤجرها على قصد التجارة, فإذا أردت معرفة ما يصير مال تجارة وما لا يصير فاحفظ الضابط وقل كل عرض ملك بمعاوضة محضة بقصد التجارة فهو مال تجارة فإن لم يكن معاوضة او كانت ولكنها غير محضة فلا تصير العروض مال تجارة وان قصد التجارة ولهذا تتمة تأتى عند كلام الشيخ وتقوم عروض التجارة عند اخر الحول بما اشتريت به.[17]

b). al-Majmū' fi Sharhi al-Muhadhdhab, Juz. 6, Hal. 49

ومن أجر نفسه او شخصا أخر بعرض من العروض بقصد التجارة صار ذلك العرض مال التجارة فتجب الزكاة.[18]

Dari ta'bir Kifāyat al-Akhyār, telah jelas bahwa pengelola KBIH melakukan akad ijarah yang diniati tijarah, oleh karenanya menurut Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmū'* wajib baginya mengeluarkan zakat harta tijarah.

5). Bagaimana hukum zakat atas nominal ONH bagi jama'ah calon haji?

[17] Taqiyyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini al-Hisni, *Kifāyah al-Akhyār fī Halli Ghāyah al-Ikhtisār*, Dār al-Minhāj, 2008, Juz 1, 178.
[18] Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, *al-Majmū' fi Sharhi al-Muhadhdhab*, Maktabah al-Irshād, 2008, Juz. 6, Hal. 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum : Terkena kewajiban zakat jika sudah haul dan mencapai standart niṣab emas.

Ta'bir :

a). al-Qawl al-Munkih al-Maḍbūṭ, 4.

اقول قد علم من فتاوى هؤلاء العلماء الاعلام اختلاف نظرهم في الاوراق المذكورة المرتب عليه اختلافهم في الفتوى، فالاولان اعني ابن سمير وابن سميط نظرا الى ما تضمنته الاوراق من النقود المتعامل بها وجعلاها من قبيل الديون والاخران اعنى الشيخ الانبابي والحبيب عبد الله بن ابي بكر نظرا الى اعيان الاوراق وجعلاها كالفلوس المضروبة والتعامل بها عند الكل صحيح وتجب زكاة ما تضمنته الاوراق من النقود عند الاولين زكاة عين وزكاة التجارة عند الآخرين اذا قصد بها التجارة.[19]

b). al-Qawlu al-Munkih al-Maḍbūṭ, 6.

وحاصل هذا الجمع اننا نعتبر قصد المتعاملين فاما ان يقصد ما تضمنته الاوراق واما ان يقصد اعيانها ويترتب على كل احكام غير احكام الآخر وبقي في نفسي شيئ من الجمع المذكور وهو انه يلزم عليه زكاة التجارة في النقدين الى ان قال...
واقول ترجح الجهة الاولى وهو الاولى بل المتعين لانه يعلم بالضرورة ان المقصود عند المتعاقدين انما هو القدر المعلوم مما تضمنته الاوراق لا لذاتها لا يقل ان المتعاقدين لايصرحون بالنقدية مع ان المقصود من الاوراق هو النقد المقدر لانا نقول لما شاع اصطلاح واضعها على ذلك وكثر التعامل بها على الوجه

[19] Abu Bakar Bin Muhammad Shata, *al-Qawlu al-Munkih al-Maḍbūṭ Fī jawāz al-Ta'āmul wa wujūb al-Zakāt fī mā yata'allaqu bi Waraqi al-Nūt*, Dar al-Nashr, 1998, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

المصطلح عليه نزل ذلك منزلة تصريح ويترتب على ذلك أنه اذا اشترى الاوراق المذكورة وبقيت عنده حولا كاملا وكانت نصابا وجبت عليه زكا تها لانها من قبيل الدين وهو تجب فيه الزكاة.[20]

KBIH bergerak dalam bidang jasa, yakni jasa untuk memberikan bimbingan dan memberikan layanan pada para jamaah haji. Dalam bisnis model jasa ini, yang menjadi tujuan utama *(qashdu)* nya adalah *ujrah*. Dan dalam pelaksanaannya tidak bisa di lepaskan dari proses *mu'awadhah* (pertukaran dua belah pihak). Maka pengelola KBIH terkena kewajiban zakat jika sudah haul dan mencapai standart niṣab emas.

6). Hukum menyebar uang receh di tengah-tengah pembacaan salawat nabi (syrakalan).

Hukum : Boleh dengan catatan tidak riya' dan sum'ah, serta tidak ada unsur idza' bagi yang lain sebagaimana ketentuan di atas, dan bahkan mendapat kebaikan dan keberkahan apabila berniat *tabaruk* dengan berselawat dan bacaan maulid Nabi Saw.

Ta'bir :

a). Asnā al-Maṭālib fī Sharhi Raudlatu al-Tālib, Juz 5, 250.

(وَالْأَفْضَلُ أَنْ تَكُونَ) الصَّدَقَةُ (سِرًّا) لِآيَةٍ {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ} وَلِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي خَبَرِ السَّبْعَةِ الَّذِي

[20] Ibid, 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يُظِلُّهُمْ اللَّهُ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَدْرِي شِمَالُهُ مَا أَنْفَقَتْ يَمِينُهُ } نَعَمْ إِنْ أَظْهَرَهَا وَلَمْ يَقْصِدْ رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً بَلْ لِيَقْتَدِيَ بِهِ وَهُوَ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَأَذَّى الْآخِذُ بِهِ فَإِنْ تَأَذَّى بِهِ فَالْإِسْرَارُ أَفْضَلُ قَالَهُ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ.[21]

b). Asnā al-Maṭālib fī Sharhi Raudlatu alTālib, Juz 15, Hal. 434.

(فَصْلٌ يَجُوزُ نَثْرُ السُّكَّرِ وَالدَّنَانِيرِ) وَنَحْوِهِمَا كَلَوْزٍ وَجَوْزٍ وَتَمْرٍ وَزَبِيبٍ وَدَرَاهِمَ (فِي إمْلَاكٍ أَوْ خِتَانٍ) وَكَذَا سَائِرُ الْوَلَائِمِ فِيمَا يَظْهَرُ عَمَلًا بِالْعُرْفِ (وَتَرْكُهُ أَوْلَى) لِأَنَّهُ سَبَبٌ إلَى مَا يُشْبِهُ النَّهْيَ (وَيَجُوزُ الْتِقَاطُهُ) لِذَلِكَ(وَتَرْكُهُ أَوْلَى) لِأَنَّهُ يُشْبِهُ النَّهْيَ (إلَّا إذَا لَمْ يُؤْثِرُ النَّاثِرُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) بِأَنْ عَرَفَ مِنْهُ الْمُلْتَقِطُ ذَلِكَ (وَلَمْ يُزْرِ) الِالْتِقَاطُ فِي مُرُوءَتِهِ فَلَا يَكُونُ تَرْكُهُ أَوْلَى هَذَا مَا فِي الْأَصْلِ وَلَا يُخَالِفُهُ نَصُّ الشَّافِعِيِّ.[22]

Dua ta'bir yang bergaris bawah dari kitab Asnā al-Maṭālib fī Sharhi Raudlatu al-Tālib tersebut di atas, secara ṣarīh menjelaskan kebolehan menyebar (jowo: *mbarakno*) uang receh di tengah-tengah kegiatan walimah (walimah khitan ataupun walimah *imlāk*). Kedua ta'bir itu tidak sarih dalam kebolehan menyebar (jowo: *mbarakno*) uang receh di tengah-tengah bacaan shalawat Nabi. Akan tetapi bacaan shalawat Nabi lazim dalam berbagai acara walimah.

[21] Zakariya Bin Muhammad Bin Zakariya al-Ansari, *Asnā al-Maṭālib fī Sharhi Raudlatu al-Tālib, Dār al-Kitāb al-Islāmi*, 2010, Juz 5, Hal.250.
[22] Ibid, Juz 15, Hal. 434.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7). Bagaimana status hukum asap sampah yang belum jelas.

Hukum: Ditafsil: Jika sampah itu di yakini najis/mutanajjis, maka asapnya najis, Jika sampah itu belum di yakini najis/mutanajjis, maka menurut *qawl arjah* asapnya dihukumi suci.

Ta'bir :

قاعدة مهمة – هي ان ما اصله الطهارة وغلب على الظن تنجسه لغلبة النجاسة فى مثله . فيه قولان معروفان بقولى الاصل . والظاهر او الغالب ارجحهما انه طاهر عملا بالاصل المتيقن لانه اضبط من الغالب المختلف بالاحوال والأزمان.[23]

Kaidah tersebut secara *ṣarīh* menjelaskan tentang dua hal: pertama, sesuatu yang mulanya suci maka dia tetap hukumnya suci, karena itulah yang diyakini. Kedua, hal yang bersifat *ḍann* tidak bisa mengalahkan hal yang yakin, karena *ḍann* masih dipersilisihkan.

8). Bagaimana hukum pakaian yang terkena asap sampah yang najis tersebut.

Hukum : Asap yang najis/mutanajjis jika menghitam dan mengenai pakaian basah, jika sedikit hukumnya ma'fu, sedangkan jika banyak maka hukumnya najis.

Ta'bir :

[23] Abu Bakar Uthman Bin Shata al-Bakri, *I'ānatu al-Tālibīn,* Dār ihyā' al-kutub al-Arabiyyah, Juz 1, 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a). I'ānatu al-Tālibīn, Juz 1, 105

(قوله : من دخان النجاسة) اي ينبغى عن يسير عرفا من دخان النجاسة وهو المتصاعد منها بواسطة نار ولو من بخور يوضع على نحو سرجين .. الى ان قال .. وخرج بدخان النجاسة بخارها وهو المتصاعد منها لا بواسطة نار فهو طاهر.[24]

b). Hawāshī Tuhfah al-Minhāj bi Sharhi al-Minhāj, Juz 1, 98.

(قوله ومن دخان الخ) اعلم ان الشارح قد ذكر فى الحاشية ما يفيد ان قلة الدخان وكثرته تعرف بالاثر ينشأ عنه فى نحو الثوب كصفرة فان كانت صفرته فى الثوب قليلة فهو قليل والا فهو كثير.[25]

c). Nihāyah al-Muhtāj ilā Sharhi alminhāj, Juz 1, 247.

والذى يظهر ان النار المتصاعدة طاهرة حتى لو صعدت صافية من الدخان ومست ثوبا رطبا لم يحكم بنجاسته الا انها فى الغالب تختلط بالدخان بدليل ان الدخان يصعد من اعلاها فى حال التلهب والدخان يختلط بها ولهذا اذا لاقت النار شيأ رطبا اسود من الدخان الذى هو مختلط بها فعلى هذا اذا لاقاها شئ رطب تنجس.[26]

Ada 2 hal yang keluar dari najis dan berupa zat gas, yang pertama adalah *bukhor (uap),*yakni gas yang keluar dari najis/mutanajjis tidak melalui proses bersentuhan

[24] Ibid, Juz 1, 106.
[25] Abdul Hamid al-Sharwani dan Ibnu Qasim al-Ibadi, *Hawāshī Tuhfah al-Minhāj bi Sharhi al-Minhāj*, al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1938, Juz 1, 98.
[26] Shamsu al-Din Shihab al-Din al-Ramli, *Nihāyah al-Muhtāj ilā Sharhi alminhāj*, Dār al-Fikr Beirut, Juz 1, Hal.247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung dengan api. Untuk jenis ini, semua ulama' sepakat terhadap kesuciannya. Yang kedua adalah *dukhon (asap),* yaitu gas yang keluar dari najis/mutanajjis yang melalui proses bersentuhan langsung dengan api. Seperti yang di ungkapkan dalam kitab.[27]

Dalam hal ini berlaku juga hukum keumuman najis, yakni jika sedikit (*qalīl*) maka di ma'fu dan jika banyak (katsir), tetap di hukumi najis. Qalil dan Katsirnya bisa diketahui dengan dampak (*atsar*) yang di timbulkan pada barang yang terkena asap tersebut, seperti warna kuning pada pakaian yang terkena asap.

9). Hukum mesin cuci yang menampung air kurang dari dua qullah.

Hukum : Cara pencucian seperti itu tidak dibenarkan karena menimbulkan meratanya najis pada pakaian yang asalnya tidak terkena najis. karena dalam thoharoh yang airnya kurang dari dua qullah, airnya harus mengalir.

Ta'bir :

a). al-Majmū' fi Sharhi al-Muhadhdhab, Juz. 2, 592-593.

(الخامسة) إذا كانت النجاسة مائعا في اناء فصب عليه ماء غمره ولم يرقه فهل يطهر الاناء وما فيه: فيه وجهان ذكرهما المصنف بدليلهما وهما مشهوران الصحيح منهما لا يطهر ولو غمس الثوب النجس في

[27] *I'ānatu al-Tālibīn, op.cit. juz* 1, 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اناء دون قلتين من الماء فوجهان الصحيح وبه قطع الجمهور ينجس الماء ولا يطهر الثوب وقال ابن سريج يطهر الثوب ولا ينجس الماء ولو القت الريح الثوب في الماء وهو دون القلتين نجس الماء ولم يطهر الثوب بلا خلاف ووافق ابن سريج علي النجاسة هنا واستدلوا بهذا على اشتراطه النية في ازالة النجاسة وانكر امام الحرمين والغزالي وغيرهما هذا الاستدلال.[28]

b). al-Majmū' fi Sharhi al-Muhadhdhab, Juz. 1, 138.

(فرع) وأما قول المصنف لان الماء انما ينجس بالنجاسة إذا وردت عليه وهنا ورد عليها فلم ينجس ففيه بيان قاعدة لنا معروفة وهى الفرق بين الوارد والمورود وهذه القاعدة أخذها أصحابنا من قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها فانه لا يدرى أين باتت يده رواه البخاري ومسلم وقد سبق بيانه وبيان القاعدة وسنعيده حيث ذكره المصنف في أول صفة الوضوء ان شاء الله تعالى: ولنا وجه أن الثوب النجس إذا أورد علي الماء بنية غسله لم ينجس الماء بل يطهر الثوب وهذا القائل لا يفرق بين الوارد والمورود وسنوضحه مع القاعدة في باب ازالة النجاسة ان شاء الله تعالى وبالله التوفيق.[29]

Dalam kitab al-Majmū' tersebut di atas, ada dua pendapat yang berselisih, *pertama*, pendapat *jumhūr* (mayoritas Ulama) cara pencucian laundry seperti tersebut di atas airnya menjadi najis, dan pakaiannya tidak suci. Kedua, pendapat Ibn Suraij,

[28] Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, *al-Majmū' fi Sharhi al-Muhadhdhab*, Maktabah al-Irshād, 2008, Juz. 2, 592-593
[29] Ibid, Juz. 1, 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pakaiannya menjadi suci dan airnya tidak najis. Peserta bahtsul masail memilih pendapat *jumhūr* ulama.

10). Hukum shalat pasien yang merasa kesulitan untuk melakukan ibadah utamanya wudlu' shalat dan berpuasa ketika sedang diinfus. Bahkan banyak pasien berasumsi hal tersebut merupakan udzur untuk tidak shalat (diqadla' ketika sembuh), dan bagaimana caranya.

Hukum : Wajib melakukan shalat sebisa mungkin, jika shalat yang dilakukan tidak memenuhi syarat dan ada harapan sembuh maka dia diwajibkan untuk qodlo' ketika sembuh jika tidak ada harapan sembuh maka tidak wajib qodlo'.

Ta'bir :

a). Fiqh al-Ibādāt 'Alā al-Madhhab al-Shāfi'iy, 284.

ولا تسقط الصلاة عنه ما دام يعقل لأنه مخاطب بالصلاة لوجود العقل والإدراك فيؤدي ما في وسعه أداؤه لقوله صلى الله عليه و سلم فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه : (وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مااستطعتم) (البخاري ج 6/كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب6858/2).[30]

b). al-Majmū' fi Sharhi al-Muhadhdhab, Juz. 2, 287.

(فرع) الاقطع والمريض الذي لا يخاف ضررا من استعمال الماء إذا وجد ماء ولم يقدر علي استعماله فقد

[30] Al-Hajah Durriyyah al-'Aiṭah, *Fiqh al-Ibādāt 'Alā al-Madhhab al-Shāfi'iy*, (Mu'assasah al-Maktabah al-Shamilah, 2010) 284.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قدمنا في باب صفة الوضوء أنه يلزمه تحصيل من يوضئه باجرة أو غيرها فان لم يجد وقدر على التيمم وجب عليه أن يتيمم ويصلى ثم يعيد كذا نص عليه الشافعي.[31]

c). al-Majmū' fi Sharhi al-Muhadhdhab, Juz. 2, 279-280.

والفرق على المذهب ان المرض يعم وقال الصيدلاني في هذا وفى الغريق يتعلق بعود ويصلى بالايماء ان استقبل القبلة فلا اعادة كالمريض يصلى بالايماء والا وجبت الاعادة وقال البغوي في الغريق يصلى بالايماء لا يعيد ما صلى إلى القبلة ويعيد غيره في اصح القولين وأما المريض إذا لم يجد من يحوله الي القبلة فيجب أن يصلى على حسب حاله وتجب الاعادة على الصحيح المشهور لندوره قال الروياني ومن أصحابنا من قال في الاعادة قولان وهذا شاذ والله أعلم.[32]

d). Bughyah al-Mustarshidīn, Juz.1, 162.

فائدة : يجب على المريض أن يؤدي الصلوات الخمس مع كمال شروطها وأركانها واجتناب مبطلاتها حسب قدرته وإمكانه ، وله الجلوس ثم الاضطجاع ثم الاستلقاء والإيماء إذا وجد ما تبيحه على ما قرر في المذهب ، فإن كثر ضرره واشتد مرضه وخشي ترك الصلاة رأساً فلا بأس بتقليد أبي حنيفة ومالك ، وإن فقدت بعض الشروط عندنا. وحاصل ما ذكره الشيخ محمد بن خاتم في رسالته في صلاة المريض أن مذهب أبي حنيفة أن المريض إذا عجز عن الإيماء برأسه جاز له ترك الصلاة ، فإن شفي بعد مضي يوم فلا قضاء عليه ، وإذا عجز عن الشروط بنفسه وقدر عليها بغيره فظاهر المذهب وهو قول الصاحبين لزوم

[31] Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, *al-Majmū' fi Sharhi al-Muhadhdhab*, Maktabah al-Irshād, 2008, Juz. 2, 287.
[32] Ibid, 279-280

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ذلك ، إلا إن لحقته مشقة بفعل الغير ، أو كانت النجاسة تخرج منه دائماً ، وقال أبو حنيفة : لا يفترض عليه مطلقاً ، لأن المكلف عنده لا يعد قادراً بقدرة غيره ، وعليه لو تيمم العاجز عن الوضوء بنفسه ، أو صلى بنجاسة أو إلى غير القبلة مع وجود من يستعين به ولم يأمره صحت.[33]

e). al-Majmū' fi Sharhi al-Muhadhdhab, Juz. 2, 333-335.

[فصل] في حكم الصلوات المأمور بهن في الوقت مع خلل للضرورة قال أصحابنا العذر ضربان عام ونادر فالعام لا قضاء معه للمشقة ومن هذا الضرب المريض يصلي قاعدا أو موميا أو بالتيمم خوفا من استعمال الماء ومنه المصلي بالايماء في شدة الخوف والمسافر يصلي بالتيمم لعجزه عما يجب عليه ان يستعمله وأما النادر فقسمان قسم يدوم غالبا وقسم لا يدوم فالاول كالمستحاضة وسلس البول والمذى ومن به جرح سائل أو رعاف دائم أو استرخت مقعدته فدام خروج الحدث منه ومن أشبههم فكلهم يصلون مع الحدث والنجس ولا يعيدون للمشقة والضرورةوأما الذى لا يدوم غالبا فنوعان نوع يأتي معه ببدل للخلل ونوع لا يأتي فمن الثاني من لم يجد ماء ولا ترابا والمريض والزمن ونحوهما ممن لا يخاف من استعمال الماء لكن من يوضئه ومن لا يقدر علي التحول إلى القبلة والاعمي وغيره ممن لا يقدر على معرفة القبلة ولا يجد من يعرفه اياها ومن على بدنه أو جرحه نجاسة لا يعفى عنها ولا يقدر على ازالتها والمربوط على خشبة ومن شد وثاقه والغريق ومن حول عن القبلة أو أكره على الصلاة الي غيرها أو على ترك القيام فكل هؤلاء يجب

[33] Abdurrahman Bā 'Alawiy, *Bughyah al-Mustarshidīn fī Talkhīṣi fatāwī Ba'ḍi al-Aimmah min al-Ulamā' al-Muta'akhirīn*, Dār al-fikr, 2011, Juz.1 hal. 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عليهم الصلاة علي حسب الحال وتجب الاعادة لندور هذه الاعذار.[34]

Kelima *'ibārat* tersebut di atas secara sarih menjelaskan tentang tata cara shalat orang yang sakit. Orang yang sakit dan tidak bisa melakukan shalat dengan sempurna (karena tidak bisa wudlu) atau karena tubuhnya kena najis, dia diberikan rukhshah untuk melakukan shalat *alā qadr al-imkān* (semampunya). Wajib mengulang shalatnya kembali ketika sembuh.

11). Hukum aqad dan transaksi sales yang berkeliling menawarkan dagangan mereka ke toko-toko baik di kota maupun di desa, kemudian menitipkan barang dagangan mereka di toko tersebut dan akan menagih uangnya pada waktu yang telah disepakati.

Hukum : Jika praktek akad tersebut tidak menyebutkan masalah keuntungan, maka termasuk akad Wakalah Ṣahīhah (perwakilan yang sah/benar). Jika dalam akad menyebutkan keuntungan, maka termasuk akad Wakalah Fasidah (perwakilan yang tidak sah/rusak).

Ta'bir :

a). al-Yāqūt al-Nafīs, 97.

[34] Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, *al-Majmū' fī Sharhi al-Muhadhdhab*, (Maktabah al-Irshād, 2008) Juz.2, Hal.333-335.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الوكالة اصطلاحا تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة الى غيره بصيغة لا ليفعله بعد موته.[35]

b). Bughyah al-Mustarshidīn, Juz.1, 151.

(مسألة) : قال لآخر : بع هذا بمكان كذا ولك من ربحه الربع مثلاً ، فسدت الوكالة لفساد الصيغة بجهالة الجعل ، ونفذ تصرفه لعموم الإذن ، واستحق أجرة المثل ، ربح أم لا ، ولو وكله أن يبيع بمكان كذا ويشتري بثمنه كذا صح ، واستحق الجعل كاملاً بإتيانه بجميع ما أمر به من البيع والشراء ، فإن باع ولم يشتر ما أمر به فهل يستحق قسطه كالأجير إذا تعذر عليه بعض العمل أم لا ؟ كالجعل لا يستحق إلا بتمام العمل محل نظر ، نعم قد يؤيد الأوّل ما حكاه ابن حجر في فتأويه عن العمراني أنه لو استأجر أجيراً لحمل كتاب إلى آخر وردّ جوابه فأوصله ولم يرد جوابه فله من الأجرة بقدر ذهابه ، بل قال القاضي : لو وجد المكتوب إليه غائباً استحق القسط ولا عبرة بعرف يخالفه اهـ. ولا يلزم الوكيل فعل ما وكل فيه ، ولو بجعل ما لم تكن بلفظ الإجارة بشرطه.[36]

c). Mughnī al-Muhtāj , Jilid 2, 217.

فإن قيل إذا كان تصرفه نافذا مع فساد الوكالة فما فائدة صحتها أجيب بأن الفائدة في ذلك استقرار الجعل المسمى إن كان بخلاف الفاسدة فإنه يسقط ويجب أجرة المثل كما أن الشرط الفاسد في النكاح يفسد الصداق المسمى ويوجب مهر المثل وإن لم يؤثر في النكاح ويجريان.[37]

---

[35] Ahmad Bin Umar al-Shatiri, *al-Yāqūt al-Nafīs*, Dār al-Minhāj, 2011, Hal.97.

[36] Abdurrahman Ba "Alawiy, *Bughyah al-Mustarshidīn fī Talkhīṣi fatāwī Ba'ḍi al-Aimmah min al-Ulamā' al-Muta'akhirīn*, Dār al-fikr, 2011, Juz.1, 151.

[37] Shihabuddin Muhammad bin Muhammad al-Sharbini, *Mughnī al-Muhtāj ilā ma'rifati ma'ānī al-Minhāj,* Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, Jilid 2, hal 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d). Bughyah al-Mustarshidīn, Juz.1, 133.

وصورته ان يتفق المتبايعان على ان البائع متى اراد رجوع المبيع اليه أتى بمثل الثمن المعقود عليه وله ان يقيد الرجوع بمدة فليس له الفك الا بعد مضيها ثم بعد المواطأة يعقدان عقدا صحيحا بلا شرط إذ لو وقع شرط العهدة المذكور في صلب العقد أو بعده في زمن الخيار أفسده، فاليتنبه لذلك فانه مما يغفل عنه.[38]

Berdasarkan *'ibārat* tersebut di atas jelas bahwasanya akad yang dilakukan oleh pihak sales kepada pemilik toko tersebut termasuk akad wakalah. Jika akad tersebut tidak menyebutkan keuntungan, maka dikategorikan akad wakalah sahihah, dan jika menyebutkan keuntungan maka dikategorikan akad wakalah yang rusak.

12). Berikut orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat dari hasil usaha tersebut, apakah sales ataukah pemilik tokonya yang berkewajiban zakat ?

Hukum : Jika Prakteknya adalah akad wakalah, maka yang wajib mengeluarkan zakat barang tersebut adalah muwakkil (agen/distributor). Jika prakteknya toko membeli barang kepada agen dengan pembayaran tempo/kontan, maka yang wajib mengeluarkan zakatnya adalah toko.

Ta'bir :

[38] Abdurrahman Ba "Alawiy, *Bughyah al-Mustarshidīn fī Talkhīṣi fatāwī Ba'ḍi al-Aimmah min al-Ulamā' al-Muta'akhirīn*, Dār al-fikr, 2011, Juz.1, 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a). I'ānatu al-Tālibīn, Juz 2, 148.

وذكر لمن تجب عليه زكاتهما خمسة شروط متنا وشرحا وهي إسلام وحرية وتعين مالك ونصاب وحول وبقي من الشروط قوة الملك ويعبر عنه بالملك التام ليخرج به ما ملكه المكاتب فلا زكاة فيه عليه لضعف ملكه عن احتمال المواساة.[39]

b). al-Iqnā' fī halli alfāziI Abī Shujā', Juz 1, 196.

(و) الثالث (الملك التام) فلا تجب فيما لا يملكه ملكا تاما كمال كتابة إذ للعبد إسقاطه متى شاء، وتجب في مال محجور عليه والمخاطب بالاخراج منه وليه، ولا تجب في مال وقف لجنين إذ لا وثوق بوجوده وحياته. وتجب في مغصوب وضال ومجحود وغائب وإن تعذر أخذه ومملوك بعقد قبل قبضه لانها ملكت ملكا تاما، وفي دين لازم من نقد وعروض تجارة لعموم الادلة ولا يمنع دين ولو حجر به وجوبها.[40]

Dari kedua ta'bir di atas (I'ānatu al-Tālibīn, Juz 2, 148, dan al-Iqnā' fī halli alfāziI Abī Shujā', Juz 1, 196), ditemukan adanya kesamaan syarat wajib zakat, yaitu: *al-milk al-tam* (milik penuh). Oleh karenanya apabila agen (distributor) itu mewakilkan dan menitipkan barangnya ke toko, maka yang wajib mengeluarkan zakat agen tersebut. Apabila toko telah membeli barang itu dari

[39] Abu Bakar Uthman Bin Shata al-Bakri, *I'ānatu al-Tālibīn,* Dār ihyā' al-kutub al-Arabiyyah, Juz 2, 148.

[40] Shamsuddin Muhammad Bin Muhammad al-Khatib al-Sharbini, *al-Iqnā' fī halli alfāziI Abī Shujā'*, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004, Juz 1, 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agen, maka yang wajib mengeluarkan zakat adalah pemilik toko.

13). Bolehkah bisnis dengan cara mengadakan promosi serta iming-iming hadiah?, sebagaimana yang dilakukan pak Tejo, dalam bisnis kolam pancingnya pak Tejo menggelar lomba memancing dengan iming-iming hadiah. Kalau tidak boleh bagaimana solusinya?, karena bisnis seperti contoh di atas sudah menjamur.

Hukum : Tidak boleh.

Ta'bir :

a). Mughnī al-Muhtāj, jilid 2, 275.

ولا يصح بيع كتب الكفر والتنجيم والشعوذة والفلسفة كما جزم به في المجموع ولا بيع السمك في الماء إلا إذا كان في بركة صغيرة لا يمنع الماء رؤيته وسهل أخذه فيصح في الأصح فإن كانت البركة كبيرة لا يمكن أخذه إلا بمشقة لم يصح على الأصح.[41]

b). al-Majmū' fi Sharhi al-Muhadhdhab, Juz. 9, 285.

قال الشافعي والاصحاب لا يجوز أن يستأجر البركة لاخذ السمك منها لان الاعيان لا تملك بالاجارة..[42]

c). Kashshāf al-Qanā'an Matni al-Iqnā', Juz 12, 40.

[41] Shihabuddin Muhammad bin Muhammad al-Sharbini, *Mughnī al-Muhtāj ilā ma'rifati ma'ānī al-Minhāj,* Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, Jilid 2, hal 275.
[42] Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, *al-Majmū' fi Sharhi al-Muhadhdhab*, Maktabah al-Irshād, 2008, Juz. 9, Hal.285.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قال ابن عقيل يجوز استئجار البئر ليستقي منه أياما معلومة ، أو) يستقي منها (دلاء معلومة ؛ لأن هواء البئر وعمقها فيه نوع انتفاع بمرور الدلو فيه ، فأما الماء فيؤخذ على الإباحة انتهى) ؛ لأنه إنما يملك بالحيازة كما تقدم قال في المغني : وهذا التعليل يقتضي أنه يجوز أن يستأجر منه بركته ليصطاد منها السمك مدة معلومة انتهى وهو واضح إذا لم تعمل للسمك ؛ ؛ لأن هواء البركة وعمقها فيه نوع انتفاع بمرور آلة الصيد والسمك يؤخذ على الإباحة وأما إذا عملت للسمك فإنه يملك بحصوله فيها كما يأتي في الصيد فلا تصح الإجارة لأخذه لكن إن أجرها قبل حصول السمك بها لمن يصطاده منها مدة معلومة صح فإذا حصل فيها فله صيده.[43]

d). al-Majmū' fi Sharhi al-Muhadhdhab, Juz.15, 113.

يجوز عقد الجعالة وهو أن يبذل الجعل لمن عمل له عملا من رد ضالة ورد آبق وبناء حائط وخياطة ثوب وكل ما يستأجر عليه من الاعمال، والدليل عيله قوله تعالى (ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم.[44]

e). Rawḍah al-Tālibīn wa 'Umdah al-Sālikīn, Juz 3, 356-357.

الثالثة: لا يجوز بيع السمك في الماء، والطير في الهواء، وإن كان مملوكا له، لما فيه من الغرر. ولو باع السمك في بركة لا يمكنه الخروج منها، فإن كانت صغيرة يمكن أخذه بغير تعب ومشقة، صح. وإن كانت كبيرة لا يمكن أخذه إلا بتعب شديد، لم يصح على الاصح. وحيث صححنا، فهو إذا لم يمنع الماء رؤيته،

[43] Mansur Bin Yunus Bin Idris al-Bahūti al-Hanbali al-Miṣri, *Kashshāf al-Qanā' 'an Matni al-Iqnā'*, 'Ālam al-Kutub,1983, Juz 12, Hal. 40

[44] Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, *al-Majmū' fi Sharhi al-Muhadhdhab*, Maktabah al-Irshād, 2008, Juz. 15, Hal.113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فإن منعها، فعلى قولي بيع الغائب إن عرف قدره وصفته، وإلا، فلا يصح قطعا.[45]

Dari beberapa redaksi (*ta'bir*) di atas, dapat disimpulkan bahwa model bisnis yang dilakukan P.Tejo tidak sah dan tidak boleh, apabila yang dimaksud P.Tejo adalah *ijarah* (menyewakan kolam untuk diambil ikannya). Karena hal itu sama dengan menjual ikan di dalam kolam (air) yang tidak bisa diperoleh ikan itu kecuali dengan sangat sulit. Redaksi kitab al-Majmū' fi Sharhi al-Muhadhdhab, Juz.15, 113 tidak cukup dijadikan hujjah pembolehan akad yang dilakukan P.Tejo, yaitu akad *Ju'alah*, karena ṣarih untuk kasus ini dan tidak memenuhi syarat *ju'alah*.

14). Kalau tidak boleh bagaimana solusinya? karena bisnis seperti contoh di atas sudah menjamur.

Hukum : Uang pendaftaran dijadikan *hibah bī al-thawāb* (agar diperbolehkan ikut memancing) sedangkan perlombaan memancingnya adalah sayembara atau *ju'alah*.

Ta'bir :

a). Rawḍah al-Tālibīn wa 'Umdah al-Sālikīn Juz 11, 158-159

فرع قد ذكرنا أن الرشوة حرام مطلقا، والهدية جائزة في بعض الاحوال، فيطلب الفرق بين حقيقتيهما مع أن

[45] Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, *Rawḍah al-Tālibīn wa 'Umdah al-Sālikīn*, al-Maktab al-Islamiy, 1991, Juz 3, Hal.356-357.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الباذل راض فيهما، والفرق من وجهين، أحدهما ذكره ابن كج: أن الرشوة هي التي يشرط على قابلها الحكم بغير الحق، أو الامتناع عن الحكم بحق، والهدية: هي العطية المطلقة. والثاني قال الغزالي في الاحياء: المال إما يبذل لغرض آجل فهو قربة وصدقة، وإما لعاجل، وهو إما مال، فهو هبة بشرط ثواب، أو لتوقع ثواب، وإما عمل، فإن كان عملا محرما، أو واجبا متعينا، فهو رشوة، وإن كان مباحا فإجارة أو جعالة، وإما للتقرب والتودد إلى المبذول له، فإن كان بمجرد نفسه، فهدية، وإن كان يتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصد، فإن كان جاهه بالعلم أو النسب، فهو هدية، وإن كان بالقضاء والعمل، فهو رشوة.[46]

b). I'ānatu al-Tālibīn, Juz 3, 123.

(تتمة) في بيان أحكام الجعالة التي تركها المؤلف وكان حقه أن يذكرها تبعا لغيره من الفقهاء واختلفوا في موضع ذكرها فمنهم من ذكرها عقب الإجارة كالغزالي وصاحب التنبيه وتبعهم في الروضة لاشتراكهما في غالب الأحكام إذ الجعالة لا تخالف الإجارة إلا في خمسة أحكام أحدها صحتها على عمل مجهول عسر علمه كرد الضالة والآبق فإن لم يعسر علمه اعتبر ضبطه كما سيأتي إذ لا حاجة إلى احتمال الجهل حينئذ ثانيها صحتها مع غير معين كأن يقول من رد ضالتي فله علي كذا ثالثها كونها جائزة من الطرفين طرف الجاعل وطرف العامل رابعها العامل لا يستحق الجعالة إلا بعد تمام العمل خامسها عدم اشتراط القبول ومنهم من ذكرها عقب اللقطة وهم

[46] Ibid, Juz 11, Hal.158-159

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الجمهور وتبعهم النووي في منهاجه نظرا إلى ما فيها من التقاط الضالة.[47]

Berdasarkan keterangan kitab Rawd}ah dengan mengutip pendapat imam al-Ghazali di atas, akad yang dilakukan P.Tejo diperbolehkan apabila pembayaran yang dilakukan peserta itu diniati *hibah bi tsawab,* dan lombanya dimasukkan akad ju'alah (sayembara).

15). Batasan makmum masbuq fatihahnya ditanggung imam?.

Hukum : Ketika ma'mum masbuq *takbirotul ihram*, sedangkan Imam masih dalam keadaan ruku' yang sah (mahsub).

Ta'bir :

a). al-Majmū' fi Sharhi al-Muhadhdhab, Juz. 4, 216.

وهذا الذى ذكرناه من ادراك المأموم الركعة بادراك ركوع الامام هو فيما إذا كان الركوع محسوبا للامام فان لم يكن محسوبا له بان كان الامام محدثا أو قدسها وقام إلى الخامسة فادركه المسبوق في ركوعها أو نسى تسبيح الركوع واعتدل ثم عاد إليه ظانا جوازه فأدركه فيه لم يكن مدركا للركعة علي المذهب الصحيح الذى قطع به الجمهور لان القيام والقراءة انما يسقطان عن المسبوق لان الامام يحملها عنه وهذا الامام غير حامل لان الركوع في الصورة المذكورة غير محسوب له وفيه وجه أنه يكون مدركا وهو

[47] Abu Bakar Uthman Bin Shata al-Bakri, *I'ānatu al-Tālibīn,* Dār ihyā' al-kutub al-Arabiyyah, Juz 3, Hal.123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ضعيف وسنوضحه ان شاء الله تعالي في باب صفة الائمة في مسألة الصلاة خلف المحدث.[48]

b). Tuhfah al-Muhtāj Fī Syarh al-Minhāj, Juz 8, 392.

(وَإِنْ أَدْرَكَهُ) أَيْ الْمَأْمُومُ الْإِمَامَ (رَاكِعًا أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ) (قُلْت) إنَّمَا يُدْرِكُهَا (بِشَرْطِ أَنْ) يَكُونَ ذَلِكَ الرُّكُوعُ مَحْسُوبًا لَهُ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُهُ فِي الْجُمُعَةِ بِأَنْ لَا يَكُونَ مُحْدِثًا عِنْدَهُ فَلَا يَضُرُّ طُرُوُّ حَدَثِهِ بَعْدَ إدْرَاكِ الْمَأْمُومِ لَهُ مَعَهُ وَلَا فِي رُكُوعٍ زَائِدٍ سَهَا بِهِ وَسَنَذْكُرُ فِي الْكُسُوفِ أَنَّ رُكُوعَ صَلَاتِهِ الثَّانِي لَا يُدْرِكُ بِهِ الرَّكْعَةَ أَيْضًا لِأَنَّهُ ، وَإِنْ حُسِبَ لَهُ بِمَنْزِلَةِ الِاعْتِدَالِ. وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ سَوَاءٌ أَتَمَّ الْإِمَامُ الرَّكْعَةَ فَأَتَمَّهَا مَعَهُ أَمْ لَا كَأَنْ أَحْدَثَ فِي اعْتِدَالِهِ ، وَسَوَاءٌ أَقَصَرَ الْمَأْمُومُ فِي تَحَرُّمِهِ حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ ثُمَّ أَحْرَمَ أَمْ لَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَحَكَى ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ بَعْضِ شُرُوحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّهُ إذَا قَصَّرَ فِي التَّكْبِيرِ حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ لَا يَكُونُ مُدْرِكًا لِلرَّكْعَةِ.[49]

Penjelasan kedua ta'bir di atas sebagai berikut, fatihah makmum masbuq ditanggung imam dan dihitung rakaat apabila masbuq tadi masih mendapati imam sedang melakukan ruku'dengan sempurna. Apabila makmum masbuq ketika ruku' tidak mendapati imam ruku' dengan sempurna, maka apa yang dia lakukannya tidak dihitung rakaat.

---

[48] Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, *al-Majmū' fi Sharhi al-Muhadhdhab*, Maktabah al-Irshād, 2008, Juz. 4, Hal. 216.

[49] Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtāj Fī Syarh al-Minhāj*, (al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, Mesir 1983) Juz 8, 392.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

16). Hukum orang hadats membawa HP yang mengandung file lafaẓ ayat – ayat al-Qur'an.

Hukum : Boleh, asalkan tidak menyentuh tulisannya ketika file dibuka.

Ta'bir :

a). Minhāj al-Ṭālibīn, juz:1:4

وَيَحْرُمُ بِالْحَدَثِ الصَّلَاةُ وَالطَّوَافُ، وَحَمْلُ الْمُصْحَفِ، وَمَسُّ وَرَقِهِ، وَكَذَا جِلْدُهُ عَلَى الصَّحِيحِ، وَخَرِيطَةٌ، وَصُنْدُوقٌ فِيهِمَا مُصْحَفٌ، وَمَا كُتِبَ لِدَرْسِ قُرْآنٍ كَلَوْحٍ فِي الْأَصَحِّ، وَالْأَصَحُّ حِلُّ حَمْلِهِ فِي أَمْتِعَةٍ، وَتَفْسِيرٍ، وَدَنَانِيرَ لَا قَلْبِ وَرَقِهِ بِعُودٍ. وَأَنَّ الصَّبِيَّ الْمُحْدِثَ لَا يُمْنَعُ. قُلْتُ: الْأَصَحُّ حِلُّ قَلْبِهِ بِعُودٍ وَبِهِ قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ...وَيَحْرُمُ بِالْحَدَثِ الصَّلَاةُ وَالطَّوَافُ، وَحَمْلُ الْمُصْحَفِ، وَمَسُّ وَرَقِهِ، وَكَذَا جِلْدُهُ عَلَى الصَّحِيحِ، وَخَرِيطَةٌ، وَصُنْدُوقٌ فِيهِمَامُصْحَفٌ،وَمَاكُتِبَ لِدَرْسِ قُرْآنٍ كَلَوْحٍ فِي الْأَصَحِّ، وَالْأَصَحُّ حِلُّ حَمْلِهِ فِي أَمْتِعَةٍ، وَتَفْسِيرٍ، وَدَنَانِيرَلَاقَلْبِ وَرَقِهِ بِعُودٍ.وَأَنَّ الصَّبِيَّ الْمُحْدِث لَايُمْنَعُ.قُلْتُ:الْأَصَحُّ حِلُّ قَلْبِهِ بِعُودٍ وَبِهِ قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ.[50]

17). Bagaimana hukum tritis (teras) masjid yang menjorok ke jalan keluar melampaui batas tanah, karena terbatasnya lahan dan masjid terletak di sebelah jalan.

Hukum : Boleh dengan catatan tidak menimbulkan *iḍrār* (bahaya).

[50] Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, *Minhāj al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn*, (Dār al-Minhāj) Juz 1, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ta'bir :

a). Minhāj al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn, Juz 1, 4.

أما النافذ فالناس كلهم يستحقون المرور فيه وليس لأحد أن يتصرف فيه بما يبطل المرور ولا أن يشرع فيه جناحا أو يتخذ على جدرانه ساباطا يضر بالمارة فإن لم يضر فلا منع منهما ويرجع في معرفة الضرر وعدمه إلى حال الطريق.[51]

b). Hāshiyah al-Bujairimī 'alā Sharhi al-Manhaj, juz 3, 8.

(فصل) في التزاحم على الحقوق المشتركة (الطريق النافذ لا يتصرف فيه) بالبناء للمفعول (ببناء) لمسطبة أو غيرها (أو غرس) لشجرة، وإن لم يضر ذلك لأن شغل المكان بذلك مانع من الطروق وقد تزدحم المارة فيصطكون به، وتعبيري ببناء أعم من تعبيره ببناء دكة (ولا بما يضر مارا) في مروره لأنه حق له الى ان قال .....(قوله مانع من الطروق) أي شأنه ذلك فلا ينافي قوله، وإن لم يضر إلخ قال م ر في شرحه نعم يغتفر ضرر محتمل عادة كعجن طين إذا بقي قدر المرور للناس وإلقاء الحجارة للعمارة فيه إذا تركت بقدر مدة نقلها وربط الدواب فيه بقدر حاجة النزول والركوب أي ومع جواز ذلك فالأقرب أنه يضمن ما تلف به لأن الارتفاق بالشارع مشروطة بسلامة العاقبة.[52]

c). Hāshiyah al-Bujairimī 'alā Sharhi al-Manhaj, Juz 3, 8

[51] Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, *Rawḍah al-Tālibīn wa 'Umdah al-Sālikīn*, al-Maktab al-Islamiy, 1991, Juz 4,, Hal. 204.

[52] Sulaiman Bin Muhammad Bin Umar al-Bujairimi al-Shafi'i, *Hāshiyah al-Bujairimī 'alā Sharhi al-Manhaj*, (al-Maktabah al-Islamiyah, Turki, 1950), Juz 3, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الباب الثاني في التزاحم على الحقوق الطريق النافذ بالمعجمة ويعبر عنه بالشارع مباح لا يملك لأحد من الناس فلكل منهم فتح باب من ملكه إليه كيف شاء ولكل مسلم التصرف فيه بما لا يضر المارة فله إشراع أي إخراج جناح أي روشن وساباط فيه أي سقيفة بين حائطيه لا يشق ظلامه ولا يضر المار الماشي المنتصب تحته وعلى رأس الحمولة العالية سواء أكانت الطريق واسعة أم ضيقة لا تمر فيها القوافل والفوارس وسواء أذن الإمام فيه أم لا لإطباق الناس على فعله من غير إنكار وتقييده الظلام بالمشقة أخذه من قول الأصل وفي التتمة إن انقطع الضوء كله أثر وإن نقص فلا وتصريحه بالمسلم هنا من زيادته وكذا لا يضر مع ذلك بالمحمل مع كنيسة أي أعواد مرتفعة عليه معدة لأن يوضع عليها سترة تقي الراكب من الحر والبرد وتستره على البعير إن كانت أي الطريق جادة أي واسعة تمر فيها القوافل والفوارس لأن ذلك وإن كان نادرا فقد يتفق والأصل في جواز ذلك أنه ﷺ نصب بيده ميزابا في دار عمه العباس رواه الإمام أحمد والبيهقي والحاكم .[53]

Berdasarkan dua ta'bir di atas, pada prinsipnya fasilitas umum (seperti jalan umum) yang merupakan hak umum, tidak diperkenankan untuk didirikan bangunan, ditanami pepohonan, atau hal lain yang dapat mengganggu fungsi fasilitas tersebut, mengganggu orang yang lewat. Kecuali hal-hal tersebut tidak mengganggu orang yang lewat, maka yang demikian dimaafkan/ditolerasi.

[53] Zakariya Bin Muhammad Bin Zakariya al-Ansari, *Asnā al-Maṭālib fī Sharhi Raudlatu al-Tālib,* (Dār al-Kitāb al-Islāmi, 2010), Juz 2, 218-219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

18). Bagaimana hukum membangun tempat wudlu' di atas saluran air (parit) yang termasuk lahan milik umum sebagaimana tersebut dalam deskripsi ?.

Hukum : Tidak boleh, karena lahan tersebut milik umum.

Ta'bir :

a). al-Fatāwī al-Fiqhiyyah al-Kubrā, Juz 4, 61.

وسئل: ـ رضى الله تعالى عنه ـ سؤالاً صورته سئل بعض المفتين من أكابر المتأخرين عن صحراء يسيل ماؤها في معمور فأراد رجل أن يبني في تلك الصحراء بيتاً بحيث لا يمنع نزول الماء إلى المعمور فهل يجوز له ذلك بغير إذن صاحب المعمور فأجاب بقوله نعم يجوز له أن يبني بيتاً في الصحراء وإن لم يأذن أهل المعمور إذا لم يضر ذلك بهم وهذا من إحياء الموات والله أعلم أ هـ . جوابه فهل جوابكم كذلك. فأجاب: بقوله أن ذلك المحل الذي يريد البناء فيه إن كان مجرى ماء المعمور أو من حريمه فلأَهل المعمور منعه من البناء فيه مطلقاً وإن لم يكن كذلك فليس لهم منعه مطلقاً نعم ذكر جماعة من أئمتنا أن الأنهار المباحة فضلاً عن المملوكة لا يجوز لأحد أن يبني على حافاتها ولا في حريمها لأن لعامة المسلمين فيها حقاً فهي كالشوارع والله أعلم.[54]

b). Hāshiyah al-Bujairimī 'alā Sharhi al-Manhaj, Juz 3, 8.

(فصل) في التزاحم على الحقوق المشتركة (الطريق النافذ لا يتصرف فيه) بالبناء للمفعول (ببناء) لمسطبة أو غيرها (أو غرس) لشجرة، وإن لم يضر ذلك لأن

[54] Ahmad Shihabuddin Ibnu Hajar al-Haitami al-Makki, *al-Fatāwī al-Fiqhiyyah al-Kubrā, Fatāwī ibn Hajar al-Haitami*, (Dār al-Ma'rifah, Beirut Libanon, tt),Juz 4, 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

شغل المكان بذلك مانع من الطروق وقد تزدحم المارة فيصطكون به، وتعبيري ببناء أعم من تعبيره ببناء دكة (ولا بما يضر مارا) في مروره لأنه حق له.[55]

Berdasarkan kedua ta'bir diatas, maka membangun tempat wudlu' di atas saluran air (parit) yang termasuk lahan milik umum sama halnya dengan mendirikan bangunan atau menanam pohon di jalan yang menjadi fasilitas umum, artinya tidak boleh, karena mengganggu dan membahayakan orang lain.

19). Bolehkah dana masjid digunakan untuk kebutuhan lain (menyumbang masjid lain, operasional lembaga pendidikan, dan kegiatan keagamaan), dan bagaimana cara mentasarrufkan barang dari bongkaran masjid ?.

Hukum : Dana masjid tidak boleh dialokasikan ke masjid lain, begitu juga ke lembaga pendidikan/kegiatan keagamaan yang tidak ada maslahah bagi kemakmuran masjid.

Ta'bir :

a). Ghāyah Talkhīs al-Murād Min Fatāwī Ibnu zayād, juz 1,188.

(مسألة): يجب على ناظر الوقف خاصاً أو عاماً فعل الأصلح، وما هو أقرب إلى أغراض الواقفين، وإن لم يصرحوا به إذا لم يخالف شرطهم.[56]

[55] Sulaiman Bin Muhammad Bin Umar al-Bujairimi al-Shafi'i, *Hāshiyah al-Bujairimī 'alā Sharhi al-Manhaj*, (al-Maktabah al-Islamiyah, Turki, 1950), Juz 3, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b). al-Fatāwī al-Fiqhiyyah al-Kubrā, Juz 3, 155.

وأن المسجد ..... فلا يجوز التصرف فيه إلا بما فيه مصلحة تعود عليه أو على عموم المسلمين وأما مجرد المصلحة الخاصة فلا يكتفي بها في مثل ذلك فاتضح أنه لا يجوز إلا للمصلحة الخاصة بالمسجد أو العامة لعموم المسلمين ولا تتحقق تلك المصلحة إلا بتلك الشروط فلم نجوزه إلا بها[57].

c). al-Fatāwī al-Fiqhiyyah al-Kubrā, Juz 4, 188.

وسئل: إذا كان السلطان يقبض من غلات المساجد والمدارس ما فضل عن مصالحهما في عين كل سنة ثم يصرف بعض ذلك إلى المحتاجين من علماء بلده والمتعلمين هل يجوز الأخذ من ذلك إذ لو امتنعوا من الأخذ لما رد إلى مصرفه الأصلي والذي يغلب على الظن أن صرف ذلك إلى من ذكر وإن لم يكن على شرط الواقف أحب إليه من صرفه على الجند وشحن الحصون به أوضحوا لنا ذلك. فأجاب: لا يجوز الأخذ من الفاضل من غلة مسجد إذا خالف ذلك الأخذ شرط الواقف سواء أكان الإمام يصرف ذلك في مصارفه أم لا ولا نظر إلى قول السائل والذي يغلب على الظن الخ. لأن مثل ذلك لا يجوز العمل بخلاف شرط الواقف والله سبحانه وتعالى أعلم.[58]

Ta'bir kitab yang pertama (*Ghāyat Talkhīs*) menjelaskan:

sebagai naẓir waqaf wajib melakukan hal yang lebih banyak

---

[56] Abdurrahman Bin Ziyad al-Zabidi, *Ghāyah Talkhīs al-Murād Min Fatāwī Ibnu zayād*, Dar al-Fir, tt, 188.

[57] Ahmad Shihabuddin Ibnu Hajar al-Haitami al-Makki, *al-Fatāwī al-Fiqhiyyah al-Kubrā, Fatāwī ibn Hajar al-Haitami*, (Dār al-Ma'rifah, Beirut Libanon, tt) Juz 3, 155.

[58] Ahmad Shihabuddin Ibnu Hajar al-Haitami al-Makki, *al-Fatāwī al-Fiqhiyyah al-Kubrā, Fatāwī ibn Hajar al-Haitami*, Dār al-Ma'rifah, Beirut Libanon, tt,Juz 4, 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maslahahnya bagi barang waqaf dan hal lain yang lebih mendekati pada tujuan waqif dalam mewaqafkan walaupun waqif tidak menyatakannya dengan jelas. Sedang ta'bir kitab yang kedua dan ketiga (*al-Fatāwi*) menjelaskan: Tidak boleh mentasarufkan segala hal milik masjid kecuali untuk kemaslahatan masjid tersebut atau kemaslahatan yang kembali kepada segenap kaum muslimin. Bahkan seorang *Imam* (penguasa) tidak boleh mengambil hal yang dihasilkan masjid untuk ditasarufkan kcuali harus sesuai dengan syarat yang ditentukan seorang waqif.

20). Bolehkah bongkaran masjid ditasarrufkan ke masjid atau bangunan lain, seperti muṣalla atau tempat pendidikan ?.

Hukum : Bila sudah tidak dibutuhkan, maka boleh dipindahkan ke masjid lain (tidak boleh kepada selain masjid).

Ta'bir :

a). Fathul Mu'īn,

(وسئل) شيخنا عما إذا عمر مسجد بآلات جدد وبقيت آلاته القديمة فهل يجوز عمارة مسجد آخر قديم بها أو تباع ويحفظ ثمنها (فأجاب) بأنه يجوز عمارة مسجد قديم وحادث بها حيث قطع بعدم احتياج ما هي منه إليها قبل فنائها ولا يجوز بيعه بوجه من الوجوه انتهى. ونقل نحو حصير المسجد وقناديله كنقل آلته.[59]

[59] Ahmad Bin Abdul Aziz Bin Zainuddin al-Malibari al-Hindi, *Fathul Mu'īn*, Dar Ibn Hazm, 2004, tt

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan ta'bir dari kitab fathul mu'in di atas, maka semua barang milik masjid (bongkaran masjid, tikar masjid, lampu masjid) tidak boleh ditasarufkan dan dipindahkan untuk pembangunan masjid lain selama masjid tersebut masih membutuhkannya. Apabila masjid asal sudah tidak membutuhkannya boleh ditasarufkan ke masjid lainnya (tidak ke tempat selain masjid).

21). Sahkah aqad nikah yang dipaksa oleh aparat desa (ketua RT) karena hamil akibat perbuatan zina ?.

Hukum : Nikah yang dipaksa oleh aparat desa atau polisi tidak sah menurut syafi'iyyah, bila tidak ada *dilālat al-ikhtiyār* (Petunjuk bahwa itu dilakukan atas kehendaknya sendiri).

Ta'bir :

a). Al-Ashbāh wa al-Naẓāir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Shāfi'iyyah, 137.

أمر السلطان هل يكون إكراها اختلف فى أمر السلطان هل ينزل منزلة الإكراه على وجهين أو قولين (أحدهما) لا وإنما الإكراه بالتهديد صريحا كغير السلطان (والثانى) نعم لعلتين (أحدهما) أن الغالب من حالة السطوة عند المخالفة (الثانى) أن طاعته واجبة فى الجملة فينتهض ذلك شبهة قال الرافعى ومقتضى ما ذكره الجمهور صريحا ودلالة أنه ينزل منزلة الإكراه قال ومثل السلطان فى إجراء الخلاف الزعيم

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

والمتغلب لأن المدار على خوف المحذور من مخالفته.[60]

b). Fath al-Wahhāb Bi Sharhi Manhaj al-Tullāb, Juz 2, 72-73

(وشرط الإكراه قدرة مكره) بكسر الراء (على) تحقيق (ما هدد به) بولاية أو تغلب (عاجلا ظلما وعجز مكره) بفتح الراء (عن دفعه) بهرب وغيره كاستغاثة بغيره (وظنه) أنه (إن امتنع) من فعل ما أكره عليه (حققه) أى ما هدد به (ويحصل) الإكراه بتخويف بمحذور كضرب شديد) أو حبس أو إتلاف مال.[61]

c). Bughyah al-Mustarshidīn, Juz.1, 231.

(مسألة) أمره الحاكم بالطلاق فطلق لم يقع وإن لم يتهدده لأن الأئمة ألحقوا حكم الحاكم بالإكراه ولا فرق بين قدرة الحاكم على إجباره حسا أم لا إذ هو إكراه شرعا.[62]

d). al-Iqnā' fi Halli Al-fāzi Abi Shujā', Juz 2, 157.

فإن ظهر من المكره قرينة اختيار منه للطلاق كأن أكره على ثلاث طلقات فطلق واحدة أو على طلاق صريح فكنى ونوى أو على تعليق فنجز أو بالعكس لهذه الصور وقع الطلاق فى الجميع لأن مخالفته تشعر باختياره فيما أتى به.[63]

---

[60] Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuti, *Al-Ashbāh wa al-Naẓāir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Shāfi'iyyah*, (Dār al-Kitāb al-Ilmiyyah, 1983), 137.

[61] Shaikh al-Islam Abu Yahya Zakariya al-Ansari, *Fath al-Wahhāb Bi Sharhi Manhaj al-Tullāb,* (Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut Lebanon) Juz 2, 72-73.

[62] Abdurrahman Ba "Alawiy, *Bughyah al-Mustarshidīn fī Talkhīṣi fatāwī Ba'ḍi al-Aimmah min al-Ulamā' al-Muta'akhirīn*, (Dār al-fikr, 2011) Juz.1, 231.

[63] Shamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Sharbini, *al-Iqna' Fi Halli Al-fazi Abi Shuja'*, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut Lebanon, 2004, Juz 2, 157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e). al-Fiqhu al-Islami wa adillatuhu, Juz 7, 78-79.

وقال الحنفية: حقيقة الرضا ليست شرطا لصحة النكاح, فيصح الزواج ومثله الطلاق مع الإكراه والهزل, لأن المستكره قاصد عقد الزواج, لكنه غير راض بالحكم الذى يترتب عليه, فهو مثل الهازل, والهزل لا يمنع صحة الزواج, لقول النبى ﷺ: (ثلاث جدهن جد, وهزلهن جد: النكاح, والطلاق, والرجعة) لكن هذا القياس يصادم الثابت فى السنة. اهـ[64]

f). Hāshiyah al-Bājūrī, Juz 2, 100.

وشروط الزوج كونه حلالا فلا يصح نكاح محرم ولو بوكيله وكونه مختارا فلا يصح نكاح مكره بغير حق بخلاف ما لو كان مكرها بحق كما لو أكره على نكاح من طلقها طلاقا بائنا بدون الثلاث وهى مظلومة فى القسم فإنه يصح. اهـ [65]

Dari beberapa kitab rujukan di atas menyatakan: bahwa pernikahan orang yang dipaksa oleh aparat ataupun pemimpin pemerintahan dihukumi tidak sah (batal), kecuali ada tanda *ikhtiyar* (si mukrah dapat menentang paksaan itu) maka nikahnya dihukumi sah sebagaimana ucapan talak orang yang dipaksa bisa jatuh apabila memang ada qarinah si mukrah dapat menentang paksaan itu sebagimana keterangan kitab *al-Iqna'* di atas, bahkan dalam kitab *al-Fiqh al-Islami,* ridha hakikatnya

[64] Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa adillatuhu*, (Dār al-Fikr, Beirut) Juz 7, 78-79.
[65] Ibrahim Bin Muhammad Bin Ahmad al-Bajuri, *Hāshiyah al-Bājūrī*, (Dār al-Minhāj, Jeddah al-Saudiyyah) tt, Juz 2, 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak menjadi syarat sahnya nikah, artinya orang yang dipaksa menikah, sah nikahnya demikian halnya dengan talak.

22). Bagaimanakah hukum donor darah ?

Hukum : Boleh.

Ta'bir :

a). Fatāwī al-Alūkah Fī jawāz naqli al-Dam min Insān ilā insān ākhar wa inikhtalafa dīnuhumā.

هل يجوز نقل الدم من إنسان إلى آخر وإن اختلف دينهما ؟ إذا مرض إنسان واشتد ضعفه ولا سبيل لتقويته أو علاجه إلا بنقل دم من غيره إليه، وتعين ذلك طريقاً لإنقاذه، وغلب على ظن أهل المعرفة انتفاعه بذلك - فلا بأس بعلاجه بنقل دم غيره إليه، ولو اختلف دينهما، فينقل الدم من كافر ولو حربياً لمسلم، وينقل من مسلم لكافر غير حربي، أما الحربي فنفسه غير معصومة فلا تجوز إعانته؛ بل ينبغي القضاء عليه إلا إذا أُسِر فلإمام المسلمين أو نائبه أن يفعل به ما يراه مصلحة للمسلمين: من قتل أو استرقاق، أو مَنٍّ عليه، أو قبول فداء منه أو من أوليائه، وإلا إذا أمّن فيجار حتى تبيّن له الحجة، فإن آمن فيها وإلا بلغ مأمنه.[66]

Kitab fatawi al-Alukah tersebut menjelaskan boleh donor darah kepada resipien yang sangat membutuhkannya untuk menyelamatkan hidupnya walaupun antara keduanya berbeda agama.

[66] Saīd Bin Abdillah al-Hamīd, *Fatāwī al-Alūkah Fī jawāz naqli al-Dam min Insān ilā insān ākhar wa inikhtalafa dīnuhumā.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

23). Bagaimana hukum menjual darah seperti yang di lakukan bank darah seperti PMI ?.

Hukum : Tidak boleh.

Ta'bir :

a). al-Fiqhu al-Islami wa adillatuhu

كما يجوز عند الجمهور نقل بعض أعضاء الإنسان لآخر كالقلب والعين والكُلْية إذا تأكد الطبيب المسلم الثقة العدل موت المنقول عنه؛ لأن الحي أفضل من الميت، وتوفير البصر أو الحياة لإنسان نعمة عظمى مطلوبة شرعاً. وإنقاذ الحياة من مرض عضال أو نقص خطير أمر جائز للضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، ولكن لا يقبل بيع هذه الأعضاء بحال، كما لا يجوز بيع الدم، وإنما يجوز التبرع بدفع عوض مالي على سبيل الهبة أو المكافأة عند نقل العضو أو التبرع بالدم في حالة التعرض لهلاك أو ضرر بالغ. فإن تحتم دفع ا لعوض ولا يوجد متبرع من الأقارب أو غيرهم، جاز للدافع الدفع للضرورة.[67]

Menurut keterangan kitab *al-Fiqh al-Islami* di atas, sebagaimana tidak boleh menjual anggota tubuh, demikian juga menjual darah, kecuali jika resipien memberi uang atas nama *hibah*.atau membalas kebaikan pendonor.

24). Kepada siapakah *ilhāq* nasab janin yang lahir dari pemindahan janin ghoib ?.

[67] Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa adillatuhu*, Dār al-Fikr, Beirut Lebanon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum : Pemindahan janin mirip dengan pemindahan sperma yang memang haram hukumnya. Hal yang perlu dipertimbangkan anak siapa ketika sang buah hati sudah lahir? Apakah anak ibu yang pertama kali mengandung atau anaknya ibu yang melahirkan.

Ta'bir :

a). Nihāyah al-Muhtāj ilā Sharhi al-Minhāj, Juz 29, Hal. 414.

(قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ مَسَحَ ذَكَرَهُ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ أَلْقَتْ امْرَأَةٌ مُضْغَةً أَوْ عَلَقَةً فَاسْتَدْخَلَتْهَا امْرَأَةٌ أُخْرَى حُرَّةٌ أَوْ أَمَةٌ فَحَلَّتْهَا الْحَيَاةُ وَاسْتَمَرَّتْ حَتَّى وَضَعَتْهَا الْمَرْأَةُ وَلَدًا لَا يَكُونُ ابْنًا لِلثَّانِيَةِ ، وَلَا تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً لِلْوَاطِئِ لَوْ كَانَتْ أَمَةً لِأَنَّ الْوَلَدَ لَمْ يَنْعَقِدْ مِنْ مَنِيِّ الْوَاطِئِ وَمَنِيِّهَا بَلْ مِنْ مَنِيِّ الْوَاطِئِ وَالْمَوْطُوءَةِ فَهُوَ وَلَدٌ لَهُمَا .وَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَصِيرَ الْأُولَى مُسْتَوْلَدَةً بِهِ أَيْضًا حَيْثُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا مُصَوَّرًا.[68]

Berdasarkan *ibarah* kitab Nihayah tersebut, maka *ilhāq* nasab anak yang yang lahir dari pemindahan janin adalah kepada ayah dan ibu awal yang mengandungnya, bukan wanita kedua yang melahirkannya.

25). Bagaimana hukum mendirikan dua jum'atan dalam satu dusun?

[68] Muhammmad Bin Abi al- Abbas Shihabuddin al-Ramli, *Nihāyah al-Muhtāj ilā Sharhi al-Minhāj*, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut Lebanon, 2003, Juz 29, Hal. 414.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum : Tidak boleh, kecuali area masjid benar-benar tidak mencukupi atau adanya perpecahan antar warga dan masing-masing kubu memenuhi standard mendirikan jum'atan.

Ta'bir :

a). Bughyah al-Mustarshidīn, Juz.1, 164.

مسألة) : وقع حرب واختلاف بين جندين في بلدة وتحزب كل ، وخاف بعض الرعية من حضور الجمعة في جامعها الأصلي ، فأحدثوا جمعة في محلهم غير الجمعة الأصلية ، حرم عليهم إقامتها والحال ما ذكر فضلاً عن ندبها أو أنها تلزمهم ، إذ لم يقل أحد من أئمة المذهب إن المعذورين بعذر من أعذار الجمعة والجماعة إذا اجتمع منهم أربعون في جانب من البلدة الواحدة يلزمهم أن يقيموا جمعة ، بل ولا من أئمة المذاهب الثلاثة ، إلا ما نقل عن الإمام أحمد من جواز تعددها للحاجة ، وإنما الخلاف فيما إذا كان المعذورون بمحل يجوز فيه تعدد الجمعة ، كما يعلم من عبارة التحفة وغيرها. والحاصل من كلام الأئمة أن أسباب جواز تعددها ثلاثة : ضيق محل الصلاة بحيث لا يسع المجتمعين لها غالباً ، والقتال بين الفئتين بشرطه ، وبعد أطراف البلد بأن كان بمحل لا يسمع منه النداء ، أو بمحل لو خرج منه بعد الفجر لم يدركها ، إذ لا يلزمه السعي إليها إلا بعد الفجر .[69]

b). al-Majmū' fi Sharhi al-Muhadhdhab, Juz. 4, Hal. 586.

(والرابع) لا تجوز الزيادة على جمعة في بغداد ولا في غيرها وهذا ظاهر نص الشافعي المذكور ورجحه

[69] Abdurrahman Bā 'Alawiy, *Bughyah al-Mustarshidīn fī Talkhīṣi fatāwī Ba'ḍi al-Aimmah min al-Ulamā' al-Muta'akhirīn*, Dār al-fikr, 2011, Juz.1 hal. 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الشيخ أبو حامد والمحاملى والمتولي وصاحب العدة قالوا وانما لم ينكره الشافعي علي أهل بغداد لان المسألة اجتهادية وليس لمجتهد أن ينكر علي مجتهد وأجاب بعضهم فيما حكاه صاحب العدة وغيره بأن الشافعي لم يقدر علي الانكار باليد ولم يقدر علي أكثر من أن ينكرها بقلبه وسطرها في كتبه والصحيح هو الوجه الاول وهو الجواز في موضعين واكثر بحسب الحاجة وعسر الاجتماع قال امام الحرمين طرق الاصحاب متفقة علي جواز الزيادة علي جمعة ببغداد واختلفوا في تعليله والله أعلم.[70]

Berdasarkan keterangan kitab *Bughyah* tersebut, boleh berbilangnya pelaksanaan shalat jum'at dalam satu desa apabila dibutuhkan dan memenuhi tiga syarat: *pertama* : masjid tersebut sempit, tidak dapat menampung semuah jamaah, *kedua* : terjadi perselisihan diantara mereka, sehingga tidak mungkin dipertemukan dalam satu masjid, keterangan ini juga sesuai dengan *ibarah* kitab *majmu', ketiga* : jauhnya pojok kampung satu dengan pojok lainnya, sekiranya antar kedua pojok kampung tersebut tidak saling mendenga kumandang adzan.

26). Adakah dalam madzhab Syafi'i yang memperbolehkan melakukan jum'atan kurang dari 40 orang ?.

Hukum : Kalangan syafi'iyyah ada yang berpendapat, paling sedikit mendirikan shalat jum'at adalah 4 orang, atau 12 orang.

[70] Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, *al-Majmū' fi Sharhi al-Muhadhdhab*, Maktabah al-Irshād, 2008, Juz. 4, Hal. 586.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ta'bir :

a). I'ānatu al-Tālibīn, Juz 2, 70.

(قوله: وقد أجاز جمع من العلماء) أي غير الإمام الشافعي (1).
وقد علمت اختلافهم في تعيين العدد الذي تنعقد به الجمعة.
(1) (قوله: أي غير الأمام الشافعي) أي باعتبار مذهبه الجديد، فلا ينافي أن له قولين قديمين في العدد أيضا، أحدهما أقلهم أربعة، حكاه عنه صاحب التلخيص، وحكاه شرح المهذب واختاره من أصحابه المزني، كما نقله الأذرعي في القوت، وكفى به سلفا في ترجيحه، فإنه من كبار أصحاب الشافعي ورواة كتبه الجديدة. وقد رجحه أيضا أبو بكر بن المنذر في الاشراف، كما نقله النووي في شرح المهذب. ثانى القولين اثنا عشر. وهل يجوز تقليد أحد هذين القولين الجواب: نعم.فانه قول للامام، نصره بعض أصحابه ورجحه، وقولهم القديم لا يعمل به: محله ما لم يعضده الاصحاب ويرجحوه، وإلا صار راجحا من هذه الحيثية،، وان كان مرجوحا من حيث نسبته للامام.وقال السيوطي: كثيرا ما يقول أصحابنا بتقليد أبي حنيفة في هذه المسألة، إذ هو قول للشافعي قام الدليل على رجحانهاهـ ز .وحينئذ تقليد أحد هذين القولين أولى من تقليد أبي حنيفة.فتنبه.[71]

Ibarah kitab *I'anah* ini menjelaskan bahwa selain qawl jadid Imam Syafi'I yang menyatakan jamaah shalat jum'ah minimal 40 orang, Beliau juga mempunyai dua qawl qadim, pertama: boleh dan sah shalat jum'ah dengan empat orang jamaah, yang

[71] Abu Bakar Uthman Bin Shata al-Bakri, *I'ānatu al-Tālibīn,* Dār ihyā' al-kutub al-Arabiyyah, Juz 2, Hal.70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua shalat jum'ah dengan jamah dua belas orang dan masing-masing pendapat ini didukung oleh ulama besar dari syafi'iyyah.

27). Bagaimanakah hukum bagi orang tua yang tidak merestui dan tidak mau menjadi wali pernikahan anaknya ?.

Hukum : Jika calon si anak sudah memenuhi standar *kafa'ah* (sederajat) dan tindakan tidak setujunya orang tua tidak berdasar syara', maka penolakan yang dilakukan orang tua (tidak merestui) tidak dibenarkan dan termasuk dosa kecil. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah seorang wali bisa dinyatakakan *'aḍal* (menolak menjadi wali bagi anaknya yang menikah), jika sudah di tetapkan melalui pengadilan agama.

Ta'bir :

a). al-Hāwī al-Kabīr Fī Fiqh al-Mazhab al-Imām al-Syāfi'i, juz 9, hal 112.

مسألة : قال الشافعي ، رحمه الله تعالى : " ولو عضلها الولي زوجها السلطان ، والعضل أن تدعو إلى مثلها فيمتنع " . قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا دعت المرأة وليها إلى تزويجها ، فعليه إجابتها ، وهو حرج إن امتنع قصدا للإضرار : لقوله تعالى : فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن [البقرة : 232][72]

b). Hāshiyah I'ānatu al-Tālibīn, Juz 3, Hal.362.

[72] Abu al-Hasan Ali Bin Muhammad al-Mawardi al-Basri, *Al-Hāwī al-Kabīr Fī Fiqh al-Mazhab al-Imām al-Syāfi'i*, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut Lebanon, 1994, juz 9, hal 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وعبارة التحفة مع الاصل: وكذا يزوج السلطان إذا عضل القريب أو المعتق أو عصبته إجماعا، لكن بعد ثبوت العضل عنده بامتناعه منه أو سكوته بحضرته بعد أمره به والخاطب والمرأة حاضران أو وكيلهما أو بينة عند تعززه أو تواريه.نعم: إن فسق بعضله لتكرره منه مع عدم غلبة طاعاته على معاصيه أو قلنا بما قاله جمع إنه كبيرة زوج الابعد، وإلا فلا: لان العضل صغيرة وإفتاء المصنف بأنه كبيرة بإجماع المسلمين مراده أنه عند عدم تلك الغلبة في حكمها لتصريحه هو وغيره بأنه صغيرة.اه.وقوله لتكرره منه: قال في الروض: ولا يفسق إلا إذا تكرر ثلاث مرات.[73]

c). Nihāyah al-Zain Fī Irshād al-Mubtadi'īn, juz 3, 9.

(أو عضل) أي الولي أي منع (مكلفة) ولو سفيهة (دعت إلى كفء) وإن كان منعه لنقص المهر بخلاف ما لو دعت إلى غير الكفء ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج ومن خطبة الكفء لها ومن تعيينها له ولو بالنوع بأن خطبها أكفاء ودعت إلى أحدهم ومحل تزويج القاضي بالعضل إذا لم يتكرر فإن تكرر ثلاثا ولم تغلب طاعاته على معاصيه في ذلك اليوم عددا صار كبيرة يفسق بها العاضل فيزوج الأبعد وإلا فالولاية للقاضي وإن تكرر العضل ألف مرة والمراد بالثلاث الثلاث بالنسبة لعرض الحاكم ولو في نكاح واحد ولا يشترط أن تكون في ثلاثة أنكحة.[74]

Ta'bir ketiga kitab di atas menjelaskan bahwa apabila seorang wanita meminta sorang walinya untuk menikahkannya, maka wajib atas wali mengabulkannya,

[73] Abu Bakar Uthman Bin Shata al-Bakri, *Hāshiyah I'ānatu al-Tālibīn,* Dār ihyā' al-kutub al-Arabiyyah, Juz 3, Hal.362.

[74] Muhammad Bin Umar al-Nawawi al-Jāwi, *Nihāyah al-Zain Fī Irshād al-Mubtadi'īn*, (Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002) 309.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila enggan dan tidak mau menikahkannya (‘aḍal) padahal ada kafa’ah (kecocokan), maka wali tersebut berdosa, apabila tetap menentang dan tidak mengindahkan perintah qāḍi, maka dia termasuk fasiq dan berdosa besar.

28). Sahkah pernikahan yang dilakukan dua sejoli (Bondet dan Bunga) di Kalimantan, menjauhi orang tua (wali) yang tidak merestui ?.

Hukum : Tafsil :Tidak sah, jika di sana masih ada hakim resmi. Sah, jika tidak ada hakim, atau ada hakim tetapi memungut biaya di atas kemampuan mempelai.

Ta’bir :

a). Kifāyah al-Akhyār fī Halli Ghāyah al-Ikhtisār, 473.

فرع روى يونس بن عبد الأعلى أن الشافعي رضي الله عنه قال : إذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لها فولت أمرها رجلا حتى زوجها جاز لأن هذا من قبيل التحكيم والمحكم يقوم مقام الحاكم قال النووي : ذكر الماوردي فيما إذا كانت امرأة في موضع ليس فيه ولي ولا حاكم ثلاثة أوجه : أحدها لا تزوج والثاني تزوج نفسها للضرورة والثالث تولي أمرها رجلا يزوجها وحكى الشاشي أن صاحب المهذب كان يقول في هذا : تحكم فقيها مجتهدا وهذا الذي ذكره في التحكيم صحيح بناء على الأظهر في جوازه في النكاح ولكن شرط المحكم أن يكون صالحا للقضاء وهذا يعسر في مثل هذه الحال والذي نختاره صحة النكاح إذا ولت أمرها

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عدلا وإن لم يكن مجتهدا وهو ظاهر نصه الذي نقله يونس وهو ثقة والله أعلم.[75]

b). Nihāyah al-Zain Fī Irshād al-Mubtadi'īn, 309.

وإن لم تقم بينة فيحلفها وجوبا (أو فقد) أي الولي الأقرب بأن انقطع خبره بحيث لا يعلم موته ولا حياته ولم ينته إلى مدة يحكم فيها بموته (أو عضل) أي الولي أي منع (مكلفة) ولو سفيهة (دعت إلى كفء) –الى ان قال- نعم لو كان القاضي يأخذ دراهم لها مقدار عظيم لا تحتمل عادة النسبة للزوجين جاز لهما تولية أمرهما حرا عدلا مع وجود القاضي فعلم أنه لا يجوز للمرأة أن توكل مطلقا.[76]

Bardasarkan *ta'bir* kedua kitab di atas, dapat dipahami bahwasanya: jika seorang wanita berada di suatu tempat yang tidak ada wali di sana, maka ia bisa dinikahkan oleh *qāḍi* atau *hākim* wilayah tersebut. Apabila dia berada di tempat yang tidak ada wali dan hakim, atau ada hakim tapi memungut biaya yang besar untuk pernikahannya, sehingga wanita itu tidak mampu, maka menurut Imam Mawardi, wanita tersebut dapat menguasakan urusannya kepada seorang laki-laki merdeka yang adil, dan shalih (*muhakam*) untuk menikahkannya.

---

[75] Taqiyyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini al-Hisni, *Kifāyah al-Akhyār fī Halli Ghāyah al-Ikhtisār*, (Dār al-Minhāj, 2008) 473.

[76] Muhammad Bin Umar al-Nawawi al-Jawi, *Nihāyah al-Zain Fī Irshād al-Mubtadi'īn*, (Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002) 309.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

29). Bagaimana hukum mengubur mayit muslim dan non muslim dalam satu area ?. Kalau tidak boleh siapakah yang berdosa, dan bagaimana solusinya?.

Hukum : Tidak boleh karena jika suatu area tanah dijadikan kuburan secara mutlak, maka kuburan itu dikhususkan bagi orang Islam. Dan jika tanah itu milik desa (gendom) dan didalamnya sudah ada kuburan orang Islam, maka non muslim tidak boleh dikubur di dalamnya.

Ta'bir :

a). Nihāyah al-Muhtāj ilā Sharhi al-Minhāj, Juz 11, Hal. 275.

قَالَ فِي الرَّوْضَةِ : وَلَا يُدْفَنُ مُسْلِمٌ فِي مَقْبَرَةِ الْكُفَّارِ وَلَا كَافِرٌ فِي مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ .قَالَ فِي الْخَادِمِ : ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّهُ حَرَامٌ ، وَلِهَذَا قَالَ فِي الذَّخَائِرِ لَا يَجُوزُ بِالِاتِّفَاقِ ا هـ .وَانْظُرْ إذَا لَمْ يُوجَدْ مَوْضِعٌ صَالِحٌ لِدَفْنِ الذِّمِّيِّ غَيْرُ مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا أَمْكَنَ نَقْلُهُ لِصَالِحٍ لِذَلِكَ هَلْ يَجُوزُ دَفْنُهُ حِينَئِذٍ فِي مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ دَفْنُهُ إلَّا فِي لَحْدٍ وَاحِدٍ مَعَ مُسْلِمٍ هَلْ يَجُوزُ لِلضَّرُورَةِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَيُحْتَمَلُ الْجَوَازُ لِلضَّرُورَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى تَرْكِهِ مِنْ غَيْرِ دَفْنٍ فَلْيُتَحَرَّرْ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ : وَيُقَالُ مِثْلُهُ فِي الْمُسْلِمِ الَّذِي لَمْ يَتَيَسَّرْ دَفْنُهُ إلَّا مَعَ الذِّمِّيِّينَ[77]

b). Nihāyah al-Maṭlab Fī Dirāyah al-Madhhab, Juz 8, 398

ولو جعل بقعة مقبرة، اشترك فيها كافة المسلمين، وخرج عن إطلاق الوقف الكفارُ؛ فإن مطلق اللفظ يقتضي القربةَ، وقرينةُ الحال تشهد بذلك، فحمل الوقف

[77] Muhammmad Bin Abi al- Abbas Shihabuddin al-Ramli, *Nihāyah al-Muhtāj ilā Sharhi al-Minhāj*, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut Lebanon, 2003, Juz 11, Hal. 275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عليه.ولو جعل بقعة مقبرة لمخصوصين بالذكر، فقد ظهر اختلاف أصحابنا فيه، فذهب بعضهم إلى تنزيل المقابر منزلةَ المساجد، حتى لا يسوغ التخصيص فيها.[78]

Berdasarkan kedua Ta'bir di atas, mayit muslim tidak boleh dimakamkan di kuburan orang kafir dan sebaliknya. Dan apabila suatu tempat dijadikan *maqbarah,* maka secara mutlak kuburan tersebut diperuntukkan semua orang muslim, bukan untuk orang kafir. Beda halnya kalau peruntukannya disebutkan secara khusus.

30). Kalau tidak boleh siapakah yang berdosa? Dan Bagaimana solusinya ?

Hukum : Yang berdosa adalah orang mukallaf di desa itu.

Solusi : dibuatkan batas pemisah antara qubur islam dan non islam (bagi yang sudah terlanjur). Untuk ke depannya orang non islam dibuatkan tempat tersendiri yang berjauhan dari quburan orang islam.

Ta'bir :

a). al-Majmū' fi Sharhi al-Muhadhdhab, Juz. 5, 282.

[78] Abdul malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad al-Juwaini Abu al-Ma'ali Imam al-Haramain, *Nihāyah al-Maṭlab Fī Dirāyah al-Madhhab*, (al-Maktabah al-Waqfiyyah, 2007) Juz, 398-399.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وقد علم ان فرض الكفاية إذا تعطل اثم به كل من دخل في ذلك الفرض دون غيرهم قال صاحب الحاوى رحمه الله في اول باب غسل الميت.[79].

b). Kashshāf al-Qanā' 'an Matni al-Iqnā', Juz 2, 1051.

(ويلتزم تمييز قبورهم عن قبورنا تمييزا ظاهرا كالحياة وأولى) وذلك بأن لا يدفنوا أحدا منهم في مقابرنا (وينبغي مباعدة مقابرهم عن مقابر المسلمين وظاهره: وجوبا، لئلا تصير المقبرتان مقبرة واحدة ; لأنه لا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين وكلما بعدت) مقابرهم (عنها كان أصلح) للتباعد عن المفسدة.[80]

Kedua ta'bir dari kitab tersebut di atas sudah sesuai dengan uraian dan ulasan jawaban di atas. Prinsipnya kuburan orang muslim harus dibedakan dari kuburan orang kafir, semakin jauh satu dengan lainnya semakin lebih baik dan membawa maslahah.

31). Tanah wakaf masjid dimanfaatkan untuk beribadah, bersuci dan buang hajat, dan siapakah nadzirnya ?

Hukum : Orang yang di kehendahi wakif, kemudian *hakim/qadli* jika waqif tidak menetapkan seseorang untuk menjadi naẓir, lalu tokoh masyarakat daerah tersebut (*sulahā' al-balad*) jika tidak ada hakim.

Ta'bir :

---

[79] Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, *al-Majmū' fi Sharhi al-Muhadhdhab*, (Maktabah al-Irshād, 2008) Juz. 5, 282

[80] Mansur Bin Yunus Bin Idris al-Bahūti al-Hanbali al-Miṣri, *Kashshāf al-Qanā' 'an Matni al-Iqnā'*, ('Ālam al-Kutub,1983), Juz 2, 1051.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a). Hashiyatā al-Qalyubi, Juz 1, 164, Juz 3, 110.

فصل إن شرط الواقف النظر لنفسه أو غيره اتبع شرطه (وإلا) أي وإن لم يشرطه لأحد. (فالنظر للقاضي على المذهب) والطريق الثاني فيه ثلاثة أوجه قيل للواقف وقيل للموقوف عليه وقيل للقاضي، بناء على أن الملك في الموقوف للواقف أو للموقوف عليه، أو لله تعالى، والطريق الثالث للواقف من غير خلاف وفي الروضة، كأصلها والمحرر الذي يقتضي كلام معظم الأصحاب الفتوى به أن يقال إن كان الوقف على جهة عامة، فالتولية للحاكم أو على معين فكذلك إن قلنا الملك، ينتقل إلى الله تعالى، وإن جعلناه للواقف أو للموقوف عليه، فكذلك التولية. (وشرط الناظر العدالة والكفاية والاهتداء إلى التصرف) هو المهم من الكفاية ذكر للتنبيه عليه وهو مزيد على الروضة وأصلها.[81]

b). Bughyah al-Mustarshidīn, Juz.1, 362.

(مسألة ج) : يجوز للناظر ولو من جهة الواقف عزل نفسه كالوكيل والولي ، فيتولاه غيره ممن شرط ثم الحاكم ثم أهل الحل والعقد من صلحاء البلد ، نعم إن لم يوجد صالح غير الناظر حرم عزله بل لا ينفذ كالوصي.[82]

Ta'bir dari kitab *hāshiyah qalyūbi* menjelaskan, bahwasanya yang boleh menjadi naẓir atas barang waqaf adalah seseorang yang disebutkan oleh waqif ketika akad

[81] Shihabuddib Ahmad Bin Ahmad al-Qolyubi dan Shibuddin Ahmad al-Barlisi "Amirah, *Hashiyatā al-Qalyubi wa 'Amirah Ala Sharhi al-Mahalli*. (Maṭba'ah Mustafa al-Halabi, 1956) Juz 1, Hal. 164 dan Juz 3, 110.

[82] Abdurrahman Bā 'Alawiy, *Bughyah al-Mustarshidīn fī Talkhīṣi fatāwī Ba'ḍi al-Aimmah min al-Ulamā' al-Muta'akhirīn*, (Dār al-fikr, 2011) Juz.1, 362.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waqaf, baik naẓir itu dirinya sendiri, atau orang lain yang dimaksud oleh waqif. Kalau waqif tidak mensyaratkan seseorang menjadi naẓir, maka yang menjadi naẓir adalah qaḍi/hakim wilayah tersebut, lalu orang-orang shalih daerah tersebut.

32). Bolehkah salah satu wakif tersebut mengangkat dirinya sendiri sebagai nadzir jika dia memang ahlinya?

Hukum : Boleh jika hal tersebut tertuang dalam syarat wakaf, jika tidak ada , maka tidak boleh, karena secara hukum fiqih sudah ada nadlir secara automatis yang telah ditetapkan, baik *'am* (hakim) maupun *khas* (orang yang dipercaya/ditentukan waqif ketika shighat wakaf) sebagaimana urutan nadlir di atas.

Ta'bir :

a). al-Majmū' fi Sharhi al-Muhadhdhab, Juz. 15, Hal. 363.

ثم إن شرط الواقف النظر لنفسه أو غيره اتبع كبقية شروطه، لما روى أن عمر (رض) ولى أمر صدقته لحفصة ما عاشت، ثم لاولى الرأى من أهلها، وقبول من شرط له النظر كقبول الوكيل فيما يظهر لا الموقوف عليه ما لم يشرط له شئ من ريع الوقف ، ودعوى السبكى أنه بالاباحة أشبه فلا يرتد بالرد بعيد، بل لو قبله ثم أسقط حقه منه سقط إلا أن يشترط نظره حال الوقف، فلا ينعزل بعزل نفسه على الراجح خلافا لمن زعم خلافه.قال الرملي: نعم يقيم الحاكم متكلما غيره مدة إعراضه، فلو أراد العود لم يحتج إلى تولية جديدة، فإذا لم يشرط الواقف النظر لاحد فالنظر

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

للقاضى الموجود ببلد الموقوف عليه كما مر نظيره في مال اليتيم، إذ نظره عام فهو أولى من غيره، ولو كان واقفا أو موقوفا عليه.وما جزم به الماوردى من ثبوته للواقف بلا شرط في مسجد المحلة، والخوارزمي في سائر المساجد، وزاد أن ذريته مثله مردود.[83]

Uraian jawaban tersebut sudah sesuai dengan ta'bir kitab *al-Majmu'* di atas. Intinya seorang waqif boleh menjadi nadzir atas barang waqafnya jika disebutkan dalam syarat. Kalau tidak ada syarat dalam sighat *waqaf*, maka hak *naẓr* jatuh pada hakim/qadli sebagaimana uraian jawaban pada masalah nomor. 31.

33). Bolehkah masyarakat dan musafir memanfaatkan fasilitas masjid tersebut ?

Hukum : Boleh jika ada qarinah fasilitas tersebut digunakan untuk umum.

Ta'bir :

a). Hāshiyah I'ānatu al-Tālibīn, Juz 1, Hal.69.

وسيذكر الشارح في باب الوقف أنه حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمنه لانه بمنزلة شرط الواقف.قال: ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب.ثم قال: وسئل العلامة الطنبداوي عن الجوابي والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة

[83] Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, *al-Majmū' fi Sharhi al-Muhadhdhab*, Maktabah al-Irshād, 2008, Juz. 15, Hal. 363.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

للشرب أو للوضوء أو الغسل الواجب أو المسنون أو غسل النجاسة ؟.فأجاب: أنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع جاز جميع ما ذكر، من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها. ومثال القرينة جريان الناس على تعميم الانتفاع بالماء من غير نكير من فقيه وغيره، إذ الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة، فمثل هذا إيقاع يقال بالجواز.وقال: إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكره.[84]

b). Hāshiyah I'ānatu al-Tālibīn, Juz 3, 202.

(قوله: حيث أجمل الواقف شرطه) أي جعله مجملا، أي غير واضح الدلالة، كما إذا قال وقفت هذا على من يقرأ على قبر أبي الميت، وأطلق القراءةولم يعينها بقدر معلوم ولا بسورة معينة، فيعمل بالعرف المطرد في زمنه، كما تقدم (قوله: اتبع فيه) أي في شرطه المجمل أو في الوقف، فالضمير يصح رجوعه للاول وللثاني، وقوله في زمنه، أي الواقف.وفي التحفة، وظاهر كلام بعضهم اعتبار العرف المطرد الآن في شئ فيعمل به، لان الظاهر وجوده في زمن الواقف، وإنما يقرب العمل به، حيث انتفى كل من الاولين.اه.والمراد بالاولين، العرف المطرد في زمنه، وما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين (قوله: لانه) أي العرف المطرد في زمنه، (وقوله: بمنزلة شرطه) أي الواقف (قوله: ثم ما كان أقرب الخ) أي ثم إذا فقد العرف المطرد، اتبع ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين (قوله: ومن ثم امتنع الخ) أي من أجل أنه يتبع ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين إذا فقد العرف المطرد: امتنع في السقايات، أي التي لم يعلم فيها قصد

[84] Abu Bakar Uthman Bin Shata al-Bakri, *Hāshiyah I'ānatu al-Tālibīn,* Dār ihyā' al-kutub al-Arabiyyah, Juz 1, Hal.69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الواقف غير الشرب، وامتنع نقل الماء منها، ولو للشرب، وذلك لان الاقرب إلى قصد الواقفين، الشرب فيها فقط.[85]

Kedua ta'bir dari kitab *I'anah* di atas menunjukkan bahwasanya pemanfaatan fasilitas masjid tersebut tergantung dengan syarat ketika waqaf. Apabila waqafnya bersifat *mujmal* (global), maka yang berlaku *urf* (kebiasaan dan tradisi setempat), karena *urf* kedudukannya sama dengan syarat waqif. Di samping itu juga perlu memperhatikan adanya *qarinah* (hal-hal yang menunjukkan bahwa pemanfaatan fasilitas masjid tersebut diperuntukkan semua manusia, dan tidak seorang *faqih* pun yang inkar.

34). Masalah zakatnya galian apakah profesi ini termasuk yang wajib mengeluarkan zakat ?, dan siapa yang wajib zakat ?

Hukum : Wajib zakat jika mencapai nisab dan haul. Yang berkewajiban zakat: a. Pembeli/penyewa. b. Petani dengan rincian: sebagai berikut : jika memenuhi syarat harta dagangan/ *"urudlu tijaroh* maka hukumnya wajib zakat. Syarat -syarat zakat tijaroh galian C-1. Tanah/ material yang diperjual belikan

[85] Ibid, Juz 3, 202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah hasil akad jual beli / sewa (bukan warisan, atau pemberian), 2. Adanya niat untuk diperjual belikan.

Ta'bir :

a). Asnā al-Maṭālib fī Sharhi Raudlatu al-Tālib, Juz 5, Hal.110.

(وَمَتَى مَلَكَ عَرْضًا بِمُعَاوَضَةٍ بِقَصْدِ التِّجَارَةِ) وَهِيَ تَقْلِيبُ الْمَالِ بِالْمُعَاوَضَةِ لِغَرَضِ الرِّبْحِ (تَهَيَّأَ لِلزَّكَاةِ) أَيْ لِوُجُوبِهَا بَعْدَ مُضِيِّ حَوْلِهَا الْمُنْعَقِدِ مِنْ حِينَئِذٍ (سَوَاءٌ اشْتَرَاهُ بِنَقْدٍ أَوْ عَرْضِ قِنْيَةٍ) بِكَسْرِ الْقَافِ وَضَمِّهَا (أَوْ دَيْنٍ) حَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ (وَلَا يَحْتَاجُ تَجْدِيدَ الْقَصْدِ) أَيْ قَصْدِ التِّجَارَةِ (لِلتَّصَرُّفِ) أَيْ فِي كُلِّ تَصَرُّفٍ (مَا لَمْ يَنْوِ) بِمَالِهَا (الْقِنْيَةَ) فَإِنْ نَوَاهَا بِهِ انْقَطَعَ الْحَوْلُ فَيَحْتَاجُ إِلَى تَجْدِيدِ قَصْدٍ مُقَارِنٍ لِلتَّصَرُّفِ.[86]

b). al-Muhaẓẓab Fī Fiqh al-Imām Shāfi'i, Juz 1, Hal. 159.

(باب زكاة التجارة) تجب الزكاة في عروض التجارة لما روى أبو ذر أن النبي ﷺ قال في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته ولان التجارة يطلب بها نماء المال فتعلقت بها الزكاة كالسوم في الماشية (فصل) متى يصير العرض للتجارة ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين أحدهما أن يملكه بعقد يجب فيه العوض كالبيع والإجارة والنكاح والخلع. والثاني أن ينوي عند العقد أنه يتملكه للتجارة فأما إذا ملكه بإرث أو وصية أو هبة من غير شرط الثواب لم يصر للتجارة بالنية وإن ملكه بالبيع والإجارة ولم ينو عند العقد أنه للتجارة لم يصر للتجارة. وقال الكرابيسي من أصحابنا إذا ملك عرضا

[86] Zakariya Bin Muhammad Bin Zakariya al-Ansari, *Asnā al-Maṭālib fī Sharhi Raudlatu al-Tālib, Dār al-Kitāb al-Islāmi*, 2010, Juz 5, Hal.250. Juga Juz 5, Hal.110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ثم نوى به التجارة صار للتجارة كما إذا كان عند متاع للتجارة ثم نوى القنية صار للقنية بالنية والمذهب الأول لان ما لا يكون للزكاة من أصله لم يصر للزكاة بمجرد النية كالمعلوفة إذا نوى إسامتها ويفارق إذا نوى القنية بمال التجارة لان القنية هي الإمساك بنية القنية وقد وجد الإمساك والنية.[87]

Uraian dan rincian jawaban tersebut sudah sesuai dengan keterangan kedua ta'bir kitab di atas. Intinya penghasilan dari profesi galian C juga diwajibkan zakat, apabila tanah galian tersebut diper-jualbeli-kan, karena sama halnya dengan harta *tijarah*. Adapun yang wajib bayar zakat adalah orang yang menyewa/membeli tanah.

35). Apakah pemilik dump truck diatas juga wajib zakat ?.

Hukum : Ya, wajib zakat.

Ta'bir :

a). Kifāyah al-Akhyār fī Halli Ghāyah al-Ikhtisār,174.

ولو أجر الشخص ماله أو نفسه وقصد بالأجرة إذا كانت عرضا للتجارة تصير مال تجارة لأن الإجارة معاوضة وكذا الحكم فيما إذا كان تصرفه في المنافع بأن كان يستأجر المستغلات ويؤجرها على قصد التجارة فإذا أردت معرفة ما يصير مال تجارة وما لايصير فاحفظ الضابط وقل كل عرض ملك بمعاوضه محضه بقصد التجاره فهو مال تجارة فإن لم يكن معاوضة أو كانت ولكنها غير محضة فلا تصير

[87] Abu Ishaq Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf al-Fairuz Abadi al-Shairozi, *al-Muhaẓẓab Fī Fiqh al-Imām Shāfi'i*, Dār al-Fikri, Beirut, Juz 1, Hal. 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

العروض مال تجارة وإن قصد التجارة ولهذا تتمة تأتي عند كلام الشيخ وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به والله أعلم.[88]

b). al-Fiqhu al-Islami wa adillatuhu, Juz 3, 293.

وقد قرر مؤتمر علماء المسلمين الثاني ومؤتمر البحوث الإسلامية الثاني عام 1385هـ /1965 م: أن الأموال النامية التي لم يرد نص ولا رأي فقهي بإيجاب الزكاة فيها حكمها كالآتي: لا تجب الزكاة في أعيان العمائر الاستغلالية والمصانع والسفن والطائرات وما أشبهها، بل تجب في صافي غلتها عند توافر شروط النصاب، وحولان الحول.
ومقدار الزكاة: هو ربع العشر في نهاية الحول، أي ربع عشر صافي الغلة في نهاية الحول (أي 52 %) كزكاة التجارة والنقود.[89]

Menurut keterangan kitab *al-fiqh al-Islāmi* di atas, bahwa semua harta yang tumbuh dan berkembang itu wajib dibayarkan zakatnya, walaupun tidak ada nas al-Qur'an dan al-Hadits, ataupun pendapat fiqhnya. Bukan hakikat barangnya yang wajib dizakati (misalnya: pabrik, kapal, pesawat), akan tetapi penghasilan dari barang-barang tersebut yang wajib dizakati.

36). Termasuk akad apakah orang yang beraqiqah dengan cara pesan dan tidak tahu prosesnya serta hanya menyerahkan uangnya ?.

---

[88] Taqiyyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini al-Hisni, *Kifāyah al-Akhyār fī Halli Ghāyah al-Ikhtisār*, Dār al-Minhāj, 2008, Hal.174.
[89] Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa adillatuhu*, (Dār al-Fikr, Beirut) Juz 3, 293.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum : Jika dalam penyerahan uang terdapat akad perwakilan maka termasuk akad *wakālah*.

Ta'bir :

a). Hāshiyah I'ānatu al-Tālibīn, Juz 2, 380-381.

(سئل) رحمه الله تعالى جرت عادة أهل بلد جاوى على توكيل من يشتري لهم النعم في مكة للعقيقة أو الأضحية ويذبحه في مكة والحال أن من يعق أو يضحي عنه في بلد جاوى فهل يصح ذلك أو لا أفتونا (الجواب) نعم يصح ذلك ويجوز التوكيل في شراء الأضحية والعقيقة وفي ذبحها ولو ببلد غير بلد المضحي والعاق كما أطلقوه فقد صرح أئمتنا بجواز توكيل من تحل ذبيحته في ذبح الأضحية وصرحوا بجواز التوكيل أو الوصية في شراء النعم وذبحها وأنه يستحب حضور المضحي أضحيته ولا يجب.[90]

Menurut keterangan kitab *I'ānat al-Ṭālibīn,* mewakilkan seseorang untuk membeli hewan ternak (onta, sapi, kerbau, kambing) dan untuk disembelih di daerah (negara) lain atas nama aqiqah, hukumnya boleh dan sah (karena termasuk akad *wakālah*), walaupun yang aqiqah tidak hadir di tempat.

37). Sahkah Aqiqoh dengan paket jadi?

Hukum : Sah.

Ta'bir :

[90] Abu Bakar Uthman Bin Shata al-Bakri, *Hāshiyah I'ānatu al-Tālibīn,* Dār ihyā' al-kutub al-Arabiyyah, Juz 2, Hal.335.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a). Hashiyatā al-Qalyubi, Juz 4, 353.

(وَتُشْتَرَطُ النِّيَّةُ) لِلتَّضْحِيَةِ (عِنْدَ الذَّبْحِ) لِمَا يُضَحِّي بِهِ (إنْ لَمْ يَسْبِقْ تَعْيِينٌ) لِأَنَّهُ أُضْحِيَّةٌ (وَكَذَا إنْ قَالَ : جَعَلْتُهَا) أَيْ الشَّاةَ مَثَلًا ، (أُضْحِيَّةً) ، وَهَذَا تَعْيِينٌ يُشْتَرَطُ فِيهِ النِّيَّةُ عِنْدَ ذَبْحِهَا (فِي الْأَصَحِّ) وَالثَّانِي قَالَ : يَكْفِي تَعْيِينُهَا هَذَا إنْ لَمْ يُوَكِّلْ (وَإِنْ وَكَّلَ بِالذَّبْحِ نَوَى عِنْدَ إعْطَاءِ الْوَكِيلِ) مَا يُضَحِّي بِهِ (أَوْ) عِنْدَ (ذَبْحِهِ) التَّضْحِيَةَ بِهِ ، وَقِيلَ : لَا تَكْفِي النِّيَّةُ عِنْدَ إعْطَائِهِ وَلَهُ تَفْوِيضُهَا إلَيْهِ أَيْضًا وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ النِّيَّةِ عَلَى الذَّبْحِ فِي الْأَصَحِّ الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ جَوَازُهَا عِنْدَ إعْطَاءِ الْوَكِيلِ فَيُقَيَّدُ اشْتِرَاطُهَا عِنْدَ الذَّبْحِ بِمَا إذَا لَمْ تَتَقَدَّمْهُ وَلَوْ نَوَى جَعْلَ هَذِهِ الشَّاةِ أُضْحِيَّةً وَلَمْ يَتَلَفَّظْ بِشَيْءٍ فَالْجَدِيدُ أَنَّهَا لَا تَصِيرُ أُضْحِيَّةً بِخِلَافِ مَا لَوْ تَلَفَّظَ بِذَلِكَ. (قوله أو إمام) معطوف على وكيل أي وتكفي النية عند إعطاء إمام الزكاةلأن الإمام نائب المستحقين فالدفع إليه كالدفع إليهم ولهذا أجزأت وإن تلفت عنده بخلاف الوكيل. قال في التحفة مع الأصل والأصح أن نيته أي السلطان تكفي عن نية الممتنع باطنا لأنه لما قهر قام غيره مقامه في التفرقة فكذا في وجوب النية.[91]

Menurut keterangan kitab *Hāshiyatā Qalyūbi*, hukum penyembelihan aqiqah sama dengan penyembelihan qurban, disyaratkannya niat. Jika seorang yang aqiqah telah berniat ketika pasrah kepada *wakīl* (orang yang dipasrahi), untuk membeli dan sekaligus menyembelih

[91] Shihabuddib Ahmad Bin Ahmad al-Qolyubi dan Shibuddin Ahmad al-Barlisi "Amirah, *Hashiyatā al-Qalyubi wa 'Amirah Ala Sharhi al-Mahalli*. (Maṭba'ah Mustafa al-Halabi, 1956). Juz 4, 353.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hewan tersebut, maka cukup dan sah. Hal ini juga sesuai dengan keterang kitab *I'ānat al-Ṭālibīn* sebagaimana ta'bir pada masalah nomor: 36 di atas.

38). Siapa yang dimaksud Imam/ hakim dalam pembentukan badan amil zakat ?

Hukum : Imam adalah pemimpin tertinggi negara yang mempunyai kewenangan terbesar (*Presiden*).

Ta'bir :

a). al-Majmū' fi Sharhi al-Muhadhdhab, Juz. 19, 191.

والمراد بالامام الرئيس الأعلى للدولة، والامامة والخلافة وإمارةالمؤمنين مترادفة، والمراد بها الرياسة العامة في شئون الدين والدنيا.ويرى ابن حزم أن الامام إذا أطلق انصرف إلى الخليفة، أما إذا قيد انصرف إلى ما قيد به من إمام الصلاة وإمام الحديث وإمام القوم.[92]

Yang dimaksud *Imam* sesuai dengan pertanyaan/ permasalahan di atas adalah pemimpin tertinggi dalam satu kedaulatan dan pemerintahan, sebagaimana keterangan kitab *al-Majmū'*. Karena istilah *"al-Imāmah, al-Khalīfah, Imārat al-mu'minīn"* memiliki arti yang sama, yaitu pemimpin tertinggi dalam segala urusan

[92] Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, *al-Majmū' fi Sharhi al-Muhadhdhab*, Maktabah al-Irshād, 2008, Juz. 19, Hal. 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(dunia dan agama). Termasuk imam yang berhak membentuk panitia amil zakat.

39). Bolehkah membentuk panitia zakat tanpa ada surat pengangkatan dari *imam* atau *na'ibul imam* (dalam masalah zakat) dan bolehkan panitia tersebut menerima zakat atas nama amil ?

Hukum : Pada prinsipnya, fiqh memperbolehkan masyarakat untuk membuat kepanitian zakat seperti ini. Tetapi Panitia ini belum bisa disebut amil zakat karena belum memperoleh legalitas dari badan yang telah diberi kewenangan oleh presidan (BAZ).

Ta'bir :

a). Hāshiyah al-Jamal 'alā Sharh al-Manhaj, Juz 10, 625.

والمولي هو الإمام الأعظم أو نائبه بإذنه وشرطه نفوذ تصرفه فيما يولي فيه وأهليته كما يأتي والمتولي هو النائب وشرطه صحة تصرفه فيما يتولى فيه واعتبار أهليته أيضا والمتولى فيه هو ما يتصرف فيه وشرطه جوازه شرعا وتعيينه من الأنكحة أو الدماء أو الأموال أو غير ذلك ومحل الولاية مكان نفوذ تصرفه ويشترط تعيينه ببلد أو محلة أو إقليم أو غير ذلك والصيغة إيجاب ولو بكتابة أو رسالة أو إخبار موثوق به أو نحو ذلك وهو صريح كوليتك القضاء وخلفتك فيه واستنبتك فيه واقض بين الناس واحكم بينهم أو كناية كاعتمدت

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عليك في كذا وفوضته إليك وأنبتك فيه ووكلتك فيه وقبول كالوكالة.[93]

b). Hāshiyah al-Jamal ‘alā Sharh al-Manhaj, Juz 10, 625.

(الثانية) له أن يوكل في صرف الزكاة التي له تفريقها بنفسه فان شاء وكل في الدفع إلى الامام والساعى وان شاء في التفرقة على الاصناف وكلا هما جائز بلا خلاف وإنما جاز التوكيل في ذلك مع أنها عبادة لانها تشبه قضاء الديون ولانه قد تدعوا الحاجة إلى الوكالة لغيبة المال وغير ذلك قال أصحابنا سواء وكله في دفعها من مال الموكل أو من مال الوكيل فهما جائزان بلا خلاف قال البغوي في أول باب نية الزكاة ويجوز أن يوكل عبدا أو كافرا في اخراج الزكاة كما يجوز توكيله في ذبح الاضحية.[94]

Istilah amil zakat, oleh peserta bahtsul masail dalam permasalahan ini dikategorikan sebagai *al-mutawalli* (pemimpin yang memiliki wilayah kekuasaan) yang diangkat oleh pemimpin tertinggi (presiden). Oleh karenanya panitia zakat belum bisa disebut amil zakat kalau tidak diangkat pemimpin wilayah yang berwenang. Panitia zakat hanya sebagai *wakīl* (orang yang dipasrahi muzakki untuk menghimpun dan menyalurkan harta zakat

[93] Sulaiman Bin Umar Bin Mansur al-“ajili al-Ma’ruf bi al-Jamal, *Hāshiyah al-Jamal ‘alā Sharh al-Manhaj*, Dār a;-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut Lebanon, Juz 10, Hal. 625.
[94] Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, *al-Majmū’ fī Sharhi al-Muhadhdhab*, Maktabah al-Irshād, 2008, Juz. 6, Hal. 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada *asnāf* nya, sebagaimana keterangan dari kitab *Hāshiyat al-Jamāl*, juz.10, 625.

40). Bagaimana hukum mengganti pelakasanaan ibadah hajinya orang yang masih hidup ?.

Hukum : Boleh, dengan syarat orang yang mewakilkan hajinya benar-benar tidak mampu berdasarkan rekomendasi dua dokter, dan yang menggantikan (wakilnya) sudah haji dan mendapat izin dari yang digantikan.

Ta'bir :

a). al-Majmū' fi Sharhi al-Muhadhdhab, Juz. 7, Hal. 116.

(فرع) يعرف كون المريض مأيوسا منه بقول مسلمين عدلين من أهل الخبرة.[95]

b). Asnā al-Maṭālib fī Sharhi Raudlatu al-Tālib, Juz 1, 450.

ولا تصح استنابة عمن لزمه الحج ثم جن لأنه قد يفيق فيحج بنفسه فلو استناب عنه وليه ولم يكن به عضب فمات قبل الإفاقة لم يجزه ولا عن مريض يرجى زوال مرضه وإن اتصل مرضه بالموت لأنه يتوقع مباشرته له ويصح كون الأجير فيما ذكر عبدا أو صبيا لا في الفرض ولو نذرا لأنه من أهله في ذاك دون هذا.[96]

c). al-Majmū' fi Sharhi al-Muhadhdhab, Juz. 7, Hal. 118.

---

[95] Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, *al-Majmū' fi Sharhi al-Muhadhdhab*, Maktabah al-Irshād, 2008, Juz. 7, Hal. 116.

[96] Zakariya Bin Muhammad Bin Zakariya al-Ansari, *Asnā al-Maṭālib fī Sharhi Raudlatu al-Tālib, Dār al-Kitāb al-Islāmi*, 2010, Juz 1, 450.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(ولا يحج عن الغير من لم يحج عن نفسه لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال (سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال أحججت عن نفسك قال لا قال فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة) ولا يجوز أن يعتمر عن غيره من لم يعتمر عن نفسه قياسا علي الحج قال الشافعي رحمه الله وأكره أن يسمي من لم يحج صرورة لما روى ابن عباس قال (قال رسول الله ﷺ لا ضرورة في الاسلام).[97]

Berdasarkan uraian jawaban di atas boleh menggantikan pelaksanaan ibadah haji orang yang masih hidup dengan syarat: *pertama;* orang tersebut dalam kondisi sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya berdasarkan keterangan dua orang yang ahli dan adil, dokter (*al-Majmu'* dan *Asnā al-Matālib*), *kedua;* Orang yang menggantikan sudah pernah melaksanakan haji (*al-Majmu'*, juz. 7, 118).

41). Bagaimana hukum mengganti pelaksanaan ibadah hajinya orang yang sudah meninggal dengan tanpa wasiat ?

Hukum : Wajib jika si mayit pada masa hidupnya sudah berkewajiban haji dan memungkinkan untuk berangkat haji.

Ta'bir :

a). Asnā al-Maṭālib fī Sharhi Raudlatu al-Tālib, Juz 1, Hal.450

[97] Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, *al-Majmū' fī Sharhi al-Muhadhdhab*, Maktabah al-Irshād, 2008, Juz. 7, Hal. 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ويصح الاستنابة عن الميت من الوارث والأجنبي كقضاء الدين وللأخبار السابقة لا في تطوع لم يوص به إذ لا اضطرار إلى الاستنابة فيه بخلاف ما إذا أوصى به وقيل تصح من الوارث وإن لم يوص به نقله الأصل في الوصية عن السرخسي بعد نقله المنع عن العراقيين. ويجب على من عليه قضاء دينه من وارث ووصي وحاكم إذا خلف الميت تركة أن يستنيب عنه في الحج عند استقراره عليه وإن لم يوص به لخبر مسلم السابق ولخبر الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج وماتت قبل أن تحج أفأحج عنها فقال لو كان على أختك دين أكنت قاضيه قال نعم قال فاقضوا حق الله فهو أحق القضاء فإن لم يخلف تركة استحب للوارث أن يحج عنه فإن حج هو أو أجنبي عنه بنفسه أو باستئجار سقط الحج عنه كما سيأتي في الوصية.[98]

Berdasarkan keterangan kitab *Asnā al-Matālib* menggantikan pelaksanaan ibadah hajinya orang yang sudah meninggal hukumnya sah apabila si mayit tidak meninggalkan harta kekayaan, dan tidak sah apabila ibadah hajinya sunnah dansi mayit tidak wasiat, serta wajib jika mayit meninggalkan harta dan semasa hidupnya dia sudah kewajiban haji, namun belum melaksanakannya walaupun si mayit tidak wasiat.

42). Bagaimana hukum panitia zakat mencampur beras zakat yang kemungkinan kembali kepada muzakki ?

[98] Zakariya Bin Muhammad Bin Zakariya al-Ansari, *Asnā al-Maṭālib fī Sharhi Raudlatu al-Tālib, Dār al-Kitāb al-Islāmi*, 2010, Juz 1, Hal.450

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum : Jika panitia adalah *amil* maka boleh. Jika bukan amil tidak boleh.

Ta'bir :

a). *al-Umm*, Dār al-Wafā' 2001, Juz 2, 77.

{ إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ } الْآيَةَ لَا يَخْتَلِفُ وَسَوَاءٌ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ على ما وَصَفْت فإذا قَسَمَهُ الْوَالِي فَفِيهِ سَهْمُ الْعَامِلِينَ منه سَاقِطٌ لِأَنَّهُ لَا عَامِلَ عليه يَأْخُذُهُ فَيَكُونُ له أَجْرُهُ فيه وَالْعَامِلُونَ فيه عَدَمٌ فَإِنْ قال رَبُّ الْمَالِ فَأَنَا إلى أَخْذُهُ من نَفْسِي وَجَمْعُهُ وَقَسْمُهُ فَآخُذُ أَجْرَ مِثْلِي قِيلَ إنَّهُ لَا يُقَالُ لَك عَامِلُ نَفْسِك وَلَا يَجُوزُ لَك إذَا كانت الزَّكَاةُ فَرْضًاعَلَيْك أَنْ يَعُودَ إلَيْك منها شَيْءٌ فَإِنْ أَدَّيْت ما كان عَلَيْك أَنْ تُؤَدِّيَهُ وَإِلَّا كُنْت عَاصِيًا لو مَنَعْته فَإِنْ قال فَإِنْ وَلَّيْتهَا غَيْرِي قِيلَ إذَا كُنْت لَا تَكُونُ عَامِلًا على غَيْرِك لم يَكُنْ غَيْرُك عَامِلًا إذَا اسْتَعْمَلْته أنت وَلَا يَكُونُ وَكِيلُك فيها إلَّا في مَعْنَاك أو أَقَلَّ لِأَنَّ عَلَيْك تَفْرِيقُهَا فإذا تَحَقَّقَ مِنْك فَلَيْسَ لَك الِانْتِقَاصُ منها لَمَّا تَحَقَّقْت بِقِيَامِهِ بها.[99]

Berdasarkan keterangan kitab *al-Umm* di atas, panitia zakat tidak boleh mencampur beras zakat yang kemungkinan kembali pada dirinya sendiri sebagai muzakki, karena panitia zakat dalam hal ini bukan sebagai bagian *asnāf* yang berhak menerima zakat.

43). Bolehkah panitia zakat menerima bagian atas nama amil zakat?

Hukum : Tidak boleh karena panitia tersebut bukan amil syar'an, tetapi hanya sebatas relawan zakat.

[99] Abu Abdillah Muhammad Bin Idris al-Shafi'i, *al-Umm*, Dār al-Wafā' 2001, Juz 2, Hal.77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ta'bir :

a). Asnā al-Maṭālib fī Sharhi Raudlatu al-Tālib, Juz 1, 401.

فرع قال الدارمي وإنما يجوز أن يعطى العامل إذا لم يوجد متطوع نقله الأذرعي عنه وأقره وهو يقتضي أن من عمل متبرعا لا يستحق شيئا على القاعدة وهو ما جزم به ابن الرفعة.[100]

Menurut keterangan *Asnā al-Maṭālib* di atas, seorang amil zakat boleh dan berhak menerima harta zakat yang dihimpun apabila tidak ada relawan. Sebaliknya relawan (panitia zakat) tidak boleh dan tidak berhak atas harta zakat, karena dia bukan amil zakat.

Jika tidak boleh bagaimana solusinya ?

Solusinya: Berdasarkan undang-undang zakat (UU No 13/2014) dan keputusan MUNAS Alim Ulama PBNU 2017 di Lombok NTB, yang menyatakan bahwa LAZISNU sudah tergolong dalam Amil Zakat maka semua kepanitian zakat di tingkat bawah (Masjid/Mushalla) diharapkan bergabung dengan LAZISNU di wilayah masing-masing, agar kepanitiaan ini bisa disebut sebagai amil zakat secara syar'an.

[100] Zakariya Bin Muhammad Bin Zakariya al-Ansari, *Asnā al-Maṭālib fī Sharhi Raudlatu al-Tālib, Dār al-Kitāb al-Islāmi*, 2010, Juz 1, Hal.401.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

44). Apakah sikap mudin yang enggan menikahkan wanita yg di tinggal pergi suami selama enam tahun, dan wanita tersebut baru mengurus surat cerai ke pengadilan dan surat cerai belum keluar karena dalam surat masa iddah belum habis padahal tanggal pernikahan sudah terlanjur ditetapkan bisa dibenarkan menurut syari'at ?.

Hukum : Ya dibenarkan.

Ta'bir :

a). al-Majmū' fi Sharhi al-Muhadhdhab, Juz. 18, Hal. 155

(فصل) إذا فقدت المرأة زوجها وانقطع عنها خبره ففيه قولان (أحدهما)وهو قوله في القديم إن لها أن تنفسخ النكاح ثم تتزوج، لما روى عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة " أن رجلا استهوته الجن فغاب عن أمرأته، فأتت عمر بن الخطاب رضى الله عنه فأمرها أن تمكث أربع سنين، ثم أمرها أن تعتد ثم تتزوج " ولانه إذا جاز الفسخ لتعذر الوطئ بالتعنين وتعذر النفقة بالاعسار، فلان يجوز ههنا - وقد تعذر الجميع - أولى (والثانى) وهو قوله في الجديد وهو الصحيح أنه ليس لها الفسخ، لانه إذا لم يجز الحكم بموته في قسمة ماله لم يجز الحكم بموته في نكاح زوجته، وقول عمر رضى الله عنه يعارضه قول علي عليه السلام " تصبر حتى يعلم موته " ويخالف فرقة التعنين والاعسار بالنفقة، لان هناك ثبت سبب الفرقة بالتعنين، وههنا لم يثبت سبب الفرقة وهو الموت فإن قلنا بقوله القديم قعدت أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة ثم تتزوج، لما رويناه عن عمر رضى الله عنه، ولان بمضي أربع سنين يتحقق براءة رحمها ثم تعتد: لان الظاهر أنه

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مات فوجب عليها عدة الوفاة قال أبو إسحق يعتبر ابتداء المدة حين أمرها الحاكم بالتربص. ومن أصحابنا من قال يعتبر من حين انقطع خبره، والاول أظهر، لان هذه المدة ثبتت بالاجتهاد فافتقرت إلى حكم الحاكم كمدة التعنين، وهل يفتقر بعد انقضاء العدة إلى الحكم بالفرقة ؟ فيه وجهان (أحدهما) أنه لا يفتقر، لان الحكم بتقدير المدة حكم بالموت بعد انقضائها (والثانى) أنه يفتقر إلى الحكم لانه فرقة مجتهد فيها فافتقرت إلى الحاكم كفرقة التعنين.[101]

b). Bughyah al-Mustarshidī, Juz.1, 155.

وقال ابن حجر وهو متجه مدركاً لا نقلاً ، بل اختار كثيرون وأفتى به ابن عجيل وابن كبن وابن الصباغ والروياني أنه لو تعذر تحصيل النفقة من الزوج في ثلاثة أيام جاز لها الفسخ حضر الزوج أو غاب.[102]

Berdasarkan *qawl qadīm* imam Syafi'i seorang wanita yang ditinggal suaminya selama empat tahun dan tidak ada khabar suami tersebut dihukumi sudah meninggal, dan setelah melaksanakan iddah meninggal, dia boleh menikah dan tidak ada alasan seseorang menghalangi pernikahannya (termasuk mudin). Namun menurut *qawl jadīd* Imam Syafi'i (*qawl ṣahih*) wanita tersebut tidak boleh fasakh nikah, harus bersabar menunggu hingga diketahui pasti kematiannya, baru dia *iddah* kemudian

[101] Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, *al-Majmū' fī Sharhi al-Muhadhdhab*, Maktabah al-Irshād, 2008, Juz. 18, Hal. 155

[102] Abdurrahman Bā 'Alawiy, *Bughyah al-Mustarshidīn fī Talkhīṣi fatāwī Ba'ḍi al-Aimmah min al-Ulamā' al-Muta'akhirīn*, (Dār al-fikr, 2011) Juz.1, 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikah. Sebagaimana keterangan kitab *al-Majmū'* di atas. Beda halnya dengan keterangan kitab *Bughyah*, yaitu: seorang wanita boleh *faskh nikah* jika selama tiga hari suami tidak memberikan nafkah, dan wanita tersebut sulit mendapatkannya dari suami, baik suami di rumah atau dalam bepergian.

45). Apakah masih wajib bagi Mukidi untuk melaksanakan ibadah haji ?, dulu ketika muda kaya raya namun belum sempat melaksanakan haji, dan sekarang dia kena musibah usahanya bangkrut dan jatuh miskin.

Hukum : Masih wajib.

Ta'bir :

a). al-Fatāwī al-Fiqhiyyah al-Kubrā, Juz 4, Hal. 61.

وَسُئِلَ رضي اللَّهُ عنه عن رَجُلٍ اسْتَقَرَّ عليه الْحَجُّ ثُمَّ افْتَقَرَ فلم يَقْدِرْ على الْأُهْبَةِ أو اسْتَقَرَّ عليه لِكَوْنِهِ لم يَكُنْ له زَوْجَةٌ وَلَا أَوْلَادٌ ثُمَّ تَزَوَّجَ وَجَاءَ له أَوْلَادٌ هل يُكَلَّفُ على الْحَجِّ أو لَا بُدَّ من الِاسْتِطَاعَةِ فَأَجَابَ نَفَعَ اللَّهُ بِعُلُومِهِ من اسْتَطَاعَ الْحَجَّ ثُمَّ افْتَقَرَ اسْتَقَرَّ الْوُجُوبُ في ذِمَّتِهِ فَيَلْزَمُهُ الْحَجُّ وَلَوْ مَاشِيًا إنْ قَدَرَ عليه نعم إنْ كان له من تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ لم يَلْزَمْهُ الْحَجُّ إلَّا إنْ وَجَدَ ما يَكْفِيهِمْ ذَهَابُهُ وَإِيَابُهُ وَكَذَلِكَ لَا بُدَّ أَنْ يَجِدَ ما يُنْفِقُهُ على نَفْسِهِ ذَهَابًا وَإِيَابًا أَيْضًا لَكِنْ في الْإِحْيَاءِ لو اسْتَطَاعَ الْحَجَّ ثُمَّ أَخَّرَهُ حتى أَفْلَسَ لَزِمَهُ كَسْبُ مُؤْنَتِهِ أو سُؤَالُهَا من زَكَاةٍ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أو صَدَقَةٍ لِيَحُجَّ وَإِلَّا مَاتَ عَاصِيًا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.[103]

Berdasarkan keterangan kitab *al-Fatāwī* di atas, maka Mukidi masih berkewajiban haji jika dia mampu. Karena barang siapa yang mampu berhaji, tapi tidak berhaji, kemudian dia jatuh miskin dan fakir, maka keawajiban tersebut masih dalam tanggungannya.

46). Bolehkah melaksanakan badal haji untuk kasus di atas ?.

Hukum : Boleh.

Ta'bir :

a). Ṣahīh Muslim Bi Sharh al-Nawawi:

والجمهور أن النيابة في الحج جائزة عن الميت والعاجز المأيوس من برئه واعتذر القاضي عياض عن مخالفة مذهبهم لهذه الأحاديث في الصوم عن الميت والحج عنه بأنه مضطرب وهذا عذر باطل وليس في الحديث اضطراب وانما فيه اختلاف جمعنا بينه كما سبق ويكفى في صحته احتجاج مسلم به في صحيحه والله أعلم.[104]

Menurut Jumhur Ulama' badal haji boleh untuk orang yang meninggal dan orang sakit yang tidak bisa

[103] Ahmad Shihabuddin Ibnu Hajar al-Haitami al-Makki, *al-Fatāwī al-Fiqhiyyah al-Kubrā, Fatāwī ibn Hajar al-Haitami*, Dār al-Ma'rifah, Beirut Libanon, tt,Juz 4, Hal. 61.

[104] Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, *Ṣahīh Muslim Bi Sharh al-Nawawi*, Bait al-Afkār al-Dauliyyah, tt.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharapkan sembuhnya. Pendapat ini dinukil dalam *Ṣahīh Muslim bi Sharh al-Nawawi*.

47). Apakah ucapan selamat hari raya agama lain seperti ucapan selamat natal dan tahun baru menjadikan kufur (Membatalkan Syahadat) ?.

Hukum : Tafshil : (1). Berdampak kufur jika meyakini kebenaran aqidah mereka. (2). Berdampak haram jika tidak meyakini kebenaran aqidah mereka hanya sekedar ucapan (*tahni'ah*) jika tidak ada unsur hajat. (3). Boleh mengucapkannya jika ada tuntutan, karena keadaan darurat dan demi kemaslahatan asal tidak meyakini kebenaran aqidah mereka. Misalnya dia public figure, relasi bisnis, tetangga rumah, relasi dinas dll.

Ta'bir :

a). al-Tafsīr al-Kabīr Mafātih al-Ghaib, Juz 1, 1124.

واعلم أن كون المؤمن موالياً للكافر يحتمل ثلاثة أوجه:أحدها : أن يكون راضياً بكفره ويتولاه لأجله ، وهذا ممنوع منه لأن كل من فعل ذلك كان مصوباً له في ذلك الدين ، وتصويب الكفر كفر والرضا بالكفر كفر ، فيستحيل أن يبقى مؤمناً مع كونه بهذه الصفة.وثانيها : المعاشرة الجميلة في الدنيا بحسب الظاهر ، وذلك غير ممنوع منه.والقسم الثالث : وهو كالمتوسط بين القسمين الأولين هو أن موالاة الكفار بمعنى الركون إليهم والمعونة ، والمظاهرة ، والنصرة

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إما بسبب القرابة ، أو بسبب المحبة مع اعتقاد أن دينه باطل فهذا لا يوجب الكفر إلا أنه منهي عنه ، لأن الموالاة بهذا المعنى قد تجره إلى استحسان طريقته والرضا بدينه ، وذلك يخرجه عن الإسلام فلا جرم هدد الله تعالى فيه فقال : وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَىْءٍ.[105]

b). Barīqah Mahmūdiyyah fī sharhi Ṭarīqah Muhammadiyyah wa sharī'ah Nabawiyyah fī sirati Ahmadiyyah, Juz 2.

وَأَنَا أَقُولُ فِيهِ أَيْضًا اسْتِحْبَابُ تَعْظِيمِ الْمُعَظَّمِ عِنْدَ النَّاسِ وَلَوْ كَافِرًا إنْ تَضَمَّنَ مَصْلَحَةً وَفِيهِ أَيْضًا إيمَاءٌ إلَى طَرِيقِ الرِّفْقِ وَالْمُدَارَاةِ لِأَجْلِ الْمَصْلَحَةِ وَفِيهِ أَيْضًا جَوَازُ السَّلَامِ عَلَى الْكَافِرِ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ كَمَا نُقِلَ عَنْ التَّجْنِيسِ مِنْ جَوَازِهِ حِينَئِذٍ ؛ لِأَنَّهُ إذًا لَيْسَ لِلتَّوْقِيرِ بَلْ لِلْمَصْلَحَةِ وَلِإِشْعَارِ مَحَاسِنِ الْإِسْلَامِ مِنْ التَّوَدُّدِ وَالِائْتِلَافِ وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يَخُصُّ بِالْخِطَابِ فِي السَّلَامِ عَلَى الْكَافِرِ وَلَوْ لِمَصْلَحَةٍ بَلْ يَذْكُرُ عَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ.[106]

c). Hāshiyah al-Bujairimī 'alā Sharhi al-Manhaj, Juz 12, 196.

قوله : (من وافق الكفار في أعيادهم) بأن يفعل ما يفعلونه في يوم عيدهم وهذا حرام.[107]

d). al-Majmū' fi Sharhi al-Muhadhdhab, Juz. 19, 415.

قالت الحنابلة ويمنعون من تعلية البناء على المسلمين ويحرم القيام لهم وتصديرهم في المجالس وبداء تهم

[105] Fakhruddin al-Razi, *al-Tafsīr al-Kabīr Mafātih al-Ghaib*, Dār al-Fikr, 1981, Juz 1, Hal. 1124.

[106] Muhammad Abu Said al-Khadimi al-Hanafi, *Barīqah Mahmūdiyyah fī sharhi Ṭarīqah Muhammadiyyah wa sharī'ah Nabawiyyah fī sirati Ahmadiyyah*, Maṭba'ah al-Halabiy, 2010, Juz 2.

[107] Sulaiman Bin Muhammad Bin Umar al-Bujairimi al-Shafi'i, *Hāshiyah al-Bujairimī 'alā Sharhi al-Manhaj*, (al-Maktabah al-Islamiyah, Turki, 1950), Juz 12, 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بالسلام وبكيف أصبحت أو أمسيت أو كيف أنت أو حالك وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم.[108]

e). Rūh al-Ma'āni, Juz 2, 477.

ولعل الصحيح أن كل ما عده العرف تعظيماً وحسبه المسلمون موالاة فهو منهي عنه ولو مع أهل الذمة لا سيما إذا أوقع شيئاً في قلوب ضعفاء المؤمنين ولا أرى القيام لأهل الذمة في المجلس إلا من الأمور المحظورة لأن دلالته على التعظيم قوية وجعله من الإحسان لا أراه من الإحسان كما لا يخفي.[109]

f). Ahkām ahli al-Dhimmah, Juz 1, 161.

فليحذر الوقوع في الألفاظ التي تدل على رضاه بدينه، مثل (أعزك الله)، وما قاربها... وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم، فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثماً عند الله، وأشد مقتاً من التهنئة بشرب الخمر، وقتل النفس، وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك، ولا يدري قبح ما فعل، فمن هنأ عبداً بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه.[110]

Keterangan dari keenam sumber kitab di atas sama, sebagaimana rincian jawaban yang telah diuraikan. Ada

---

[108] Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, *al-Majmū' fī Sharhi al-Muhadhdhab*, Maktabah al-Irshād, 2008, Juz. 19, 415.

[109] Shihab al-Din al-Sayyid Mahmud al-Alusiy al-Baghdadi, *Rūh al-Ma'āni*, (Dār al-Kutub, Beirut, Lebanon, tt), Juz 2, 477.

[110] Muhammad Bin Abu Bakar Bin Ayyub Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Ahkām ahli al-Dhimmah*, (Ramādi li al-Nashr al-Dimām, 1997) Juz 1, 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedikit yang berbeda dari keterangan kitab *Barīqah mahmūdiyah*, menurut kitab ini, mengagungkan dan menghormati seseorang yang layak dihormati dan diagungkan hukumnya *sunnah,* walaupun orang tersebut kafir. Bahkan mengucapkan salam kepada kafir pun boleh, asal bukan untuk mengagungkan akan tetapi untuk kemaslahatan dan untuk menunjukkan kebaikan ajaran Islam.

48). Apakah menggunakan atribut agama lain seperti atribut natal juga berdampak kufur ?.

Hukum : Atribut natal (baju dan topi sinterklas, serta pohon natal) merukapan identitas agama kristen, maka menggunakannya adalah haram dan berdampak kufur,

Ta'bir :

a). al-Fatāwī al-Fiqhiyyah al-Kubrā, Juz 4, 238.

إذا رأوا أفعالهم يفعلون مثلهم فهل يكفر أو يأثم المسلم إذا عمل مثل عملهم من غير اعتقاد تعظيم عيدهم ولا اقتداء بهم أو لا؟. فأجاب نفع الله تبارك وتعالى بعلومه المسلمين بقوله: لا كفر بفعل شيء من ذلك، فقد صرح أصحابنا بأنه لو شد الزنار على وسطه أو وضع على رأسه قلنسوة المجوس لم يكفر بمجرد ذلك اهـ، فعدم كفره بما في السؤال أولى وهو ظاهر بل فعل شيء مما ذكر فيه لا يحرم إذا قصد به التشبه بالكفار لا من حيث الكفر وإلا كان كفراً قطعاً، فالحاصل أنه إن فعل

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ذلك بقصد التشبه بهم في شعار الكفر كفر قطعاً أو في شعار العيد مع قطع النظر عن الكفر لم يكفر، ولكنه يأثم وإن لم يقصد التشبه بهم أصلاً ورأساً فلا شيء عليه، ثم رأيت بعض أئمتنا المتأخرين ذكر ما يوافق ما ذكرته فقال: ومن أقبح البدع موافقة المسلمين النصارى في أعيادهم بالتشبه بأكلهم والهدية لهم وقبول هديتهم فيه وأكثر الناس اعتناء بذلك المصريون، وقد قال : «من تشبه بقوم فهو منهم» ، بل قال ابن الحاج : لا يحل لمسلم أن يبيع نصرانياً شيئاً من مصلحة عيده لا لحماً ولا أدماً ولا ثوباً ولا يعارون شيئاً ولو دابة إذ هو معاونة لهم على كفرهم وعلى ولاة الأمر منع المسلمين من ذلك.[111]

b). Tuhfah al-Habīb ‘ala Sharhi al-Khatīb, Juz 5, 183

فَإِنْ قِيلَ : الْمَيْلُ الْقَلْبِيُّ لَا اخْتِيَارَ لِلشَّخْصِ فِيهِ. أُجِيبَ : بِإِمْكَانِ دَفْعِهِ بِقَطْعِ أَسْبَابِ الْمَوَدَّةِ الَّتِي يَنْشَأُ عَنْهَا مَيْلُ الْقَلْبِ كَمَا قِيلَ : إنَّ الْإِسَاءَةَ تَقْطَعُ عُرُوقَ الْمَحَبَّةِ . قوله : (تحرم مودّة الكافر) أي المحبة والميل بالقلب وأما المخالطة الظاهرية فمكروهة وعبارة شرح م ر وتحرم موادّتهم وهو الميل القلبي لا من حيث الكفر وإلا كانت كفراً وسواء في ذلك أكانت لأصل أو فرع أم غيرهما وتكره مخالطته ظاهراً ولو بمهاداة فيما يظهر ما لم يرج إسلامه ويلحق به ما لو كان بينهما نحو رحم أو جوار اه وقوله : ما لم يرج إسلامه أو يرج منه نفعاً أو دفع شرّ لا يقوم غيره فيه مقامه كأن فوّض إليه عملاً يعلم أنه ينصحه فيه ويخلص أو قصد بذلك دفع ضرر عنه.[112]

---

[111] Ahmad Shihabuddin Ibnu Hajar al-Haitami al-Makki, *al-Fatāwī al-Fiqhiyyah al-Kubrā, Fatāwī ibn Hajar al-Haitami*, Dār al-Ma’rifah, Beirut Libanon, tt, Juz 4, 238.

[112] Sulaiman Bin Muhammad Bin Umar al-Bujairimi al-Shafi’i, *Tuhfah al-Habīb ‘ala Sharhi al-Khatīb,* Dār al-Fikr, 2007. Juz 5, Hal. 183

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ta'bir kitab *al-Fatāwī* di atas menerangkan. Apabila seseorang memakai pakaian yang menyerupai orang-orang kafir dan dia ikut mensyiarkan atribut kekufuran tersebut, maka dia menjadi kafir.

49). Bagaimana hukum memeriahkan dan menyemarakkan tahun baru dengan meniup trompet dan menyalakan kembang api ?.

Hukum : Dosa besar.

Ta'bir :

a). al-Fatāwī al-Fiqhiyyah al-Kubrā, Juz 4, Hal. 328.

فالحاصل أنه إن فعل ذلك بقصد التشبه بهم في شعار الكفر كفر قطعاً أو في شعار العيد مع قطع النظر عن الكفر لم يكفر، ولكنه يأثم وإن لم يقصد التشبه بهم أصلاً ورأساً فلا شيء عليه.[113]

Berdasarkan ta'bir kitab *al-Fatāwī al-Kubrā* di atas, siapapaun yang melakukan hal di atas dengan tujuan menyerupai mereka dalam syiar identitas kekufuran, maka dia menjadi kafir. Apabila dalam batas mensyiarkan identitas hari raya mereka, dia tidak kafir, tapi berdosa besar atas perbuatan tersebut.

[113] Ahmad Shihabuddin Ibnu Hajar al-Haitami al-Makki, *al-Fatāwī al-Fiqhiyyah al-Kubrā, Fatāwī ibn Hajar al-Haitami*, Dār al-Ma'rifah, Beirut Libanon, tt,Juz 4, Hal. 328.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

50). Bolehkah Pria yang sudah terlanjur dewasa tidak mau berkhitan karena alasan takut dan berbagai alasan lainya sehingga ajal menjemput tetap tidak berkhitan?.

Hukum : Boleh , Jika pria tersebut dikhitan akan berdampak kerusakan tubuh.

Ta'bir :

a). Raudah al-Tālibīn wa 'Umdah al-Muftīn , Juz 4, Hal. 95.

وقال صاحب المهذب ومن تابعه يمنع من ختان الكبير دون الصغير لخوف التلف.[114]

Kitab ini (*Rawḍat al-Ṭālibīn*) menegaskan larangan mengkhitan seorang laki-laki dewasa, jika dikhawatirkan terjadinya kerusakan.

51). Bagaimana status shalatnya orang yang tidak berkhitan, dan apakah wajib qadla' ?

Hukum : Sebelum 7 tahun shalatnya sah dan setelahnya hukum Shalat pria tersebut sah seperti shalatnya *fāqid al-Ṭahūrain*. Dan jika sudah meniggal maka tidak wajib diqadla'.

Ta'bir :

a). al-Hāwī al-Kabīr, Juz 13, 433

فَإِنْ أَخَّرَ عن اليوم السابع المستحب بعده أن يختتن فِي الْأَرْبَعِينَ يَوْمًا؛ لِأَنَّ فِيهِ أَثَرًا. فَإِنْ أخر عنه فالمستحب

[114] Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, *Raudah al-Tālibīn wa 'Umdah al-Muftīn* , Dār 'Ālam al-Maktabāt, 2008, Juz 4, Hal. 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بعده أن يختتن فِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ؛ لِأَنَّهُ الْوَقْتُ الَّذِي يُؤْمَرُ فيه بالطهارة والصلاة، ويميز بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَخْتَتِنْ حَتَّى بَلَغَ، صَارَ وَقْتُ الْخِتَانِ فَرْضًا، يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ فِعْلُهُ فِي نَفْسِهِ، وَيُؤْخَذُ بِهِ جَبْرًا فِي أَوَّلِ أوقات إمكانه. وَلَا يُؤَخِّرُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مِنْ وَقْتِ الِاسْتِحْبَابِ أَوْ وَقْتِ الْإِيجَابِ إِلَّا لِعُذْرٍ فِي الزَّمَانِ مِنْ شِدَّةِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ أَوْ لِعُذْرٍ في بدنه من شدة مرض يخاف عَلَى نَفْسِهِ إِنْ خُتِنَ، فَيُؤَخِّرُ إِلَى زَوَالِ العذر.[115]

b). Hāshiyah al-Jamal ‘alā Sharh al-Manhaj, Juz 1, Hal. 161.

(قَوْلُهُ وَمَاتَحْتَ الْقُلْفَةِ) أَيْ؛لِأَنَّهَا مُسْتَحِقَّةُ الْإِزَالَةِ وَلِهَذَا لَوْ أَزَالَهَا إنْسَانٌ لَمْ يَضْمَنْهَا وَهِيَ بِضَمِّ الْقَافِ وَإِسْكَانِ اللَّامِ وَبِفَتْحِهِمَا مَايَقْطَعُهُ الْخَاتِنُ مِنْ ذَكَرِ الْغُلَامِ وَيُقَالُ لَهَا غُرْلَةٌ بِمُعْجَمَةٍ مَضْمُومَةٍ وَرَاءٍ سَاكِنَةٍ اه ـ بِرْمَاوِيٌّ وَ مَحِلُّ وُجُوبِ غَسْلِ مَاتَحْتَ الْقُلْفَةِ إِنْ تَيَسَّرَ ذَلِكَ بِأَنْ أَمْكَنَ فَسْخُهَا وَإِلَّا وَجَبَتْ إِزَالَتُهَا،فَإِنْ تَعَذَّرَتْ صَلَّى كَفَاقِدِا لطَّهُورَيْنِ.[116]

Uraian jawaban di atas sesuai dengan ta’bir dua kitab (*al-Hāwī al-Kabīr dan Hāshiyat al-Jamal*) di atas. Bahwasanya orang yang meninggal dan belum sempat khitan, maka shalat yang telah dilakukan tidakalah wajib diqadla’ termasuk oleh ahli warisnya. Karena dia dihukumi sama dengan *fāqid al-tahūrain.*

[115] Abu al-Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib al-Mawardi al-Basri, *al-Hāwī al-Kabīr Fī Fiqh Madhhab al-Imām al-Shāfi’iy* , (Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994) Juz 13, 433.

[116] Sulaiman Bin Umar Bin Mansur al-“ajili al-Ma’ruf bi al-Jamal, *Hāshiyah al-Jamal ‘alā Sharh al-Manhaj*, Dār a;-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut Lebanon, Juz 1, Hal. 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

52). Bagaimana status jenazah pria tersebut (belum khitan) yg terlanjur sudah di makamkan dan anggota yang ada di bawah *Qulfah* (kulit yang membungkus *hashafah*)?.

Hukum : Tidak wajib digali kembali.

Ta'bir :

a). Nihāyah al-Zain Fī Irshād al-Mubtadi'īn, 38.

وَقَالَ ابْن حجر بِصِحَّتِهِ وَمن ثَمَرَات الْخلاف أَن الأقلف إِذا مَاتَ وَتعذر غسل مَا تَحت القلفة وَكَانَ مَا تحتهَا متنجس اقَالَ الرَّمْلِيّ يدْفن بلَا صَلَاة عَلَيْهِ وَلَا ييمم عَمَّا تَحت القلفة لنجاسته وَقَالَ ابْن حجر ييمم عَمَّا تَحت القلفة وَيصلى عَلَيْهِ.[117]

Berdasarkan keterangan kitab *Nihāyat al-Zain,* Orang yang belum khitan meninggal, dan kesulitan untuk membasuh anggota najis yang ada di bawah *qulfah,* maka dia boleh dimakmkan tanpa dishalati terlebih dahulu, atau anggota mayit yang dibawa *qulfah* tersebut ditayamumi lebih dulu,kemudian dishalati. Sehingga mayit tersebut kalau sudah terlanjur dimakamkan, tidak perlu digali kembali, walaupun anggota di bawah *qulfah* belum terbasuh atau ditayamumi.

53). Bagaimana hukumnya mengumpulkan antara laki-laki dan perempuan ?

[117] Muhammad Bin Umar al-Nawawi al-Jāwi, *Nihāyah al-Zain Fī Irshād al-Mubtadi'īn*, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002, Hal.38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum : Hukumnya diperbolehkan selama tidak menimbulkan fitnah dan *ikhtilaṭ*.

Ta'bir :

a). Hāshiyah I'ānatu al-Tālibīn, Juz 1, Hal 272.

ومنه الوقوف ليلة عرفة أو المشعر الحرام والاجتماع ليالي الختوم آخر رمضان ونصب المنابر والخطب عليها فيكره ما لم يكن فيه اختلاط الرجال بالنساء بأن تتضام أجسامهم فإنه حرام وفسق.[118]

b). al-Fatāwī al-Fiqhiyyah al-Kubrā, Juz 1, 201.

وَمِنْ أَكْبَرِ الْمُنْكَرَاتِ ما يَفْعَلُهُ جَهَلَةُ الْعَوَامّ في الطَّوَافِ من مُزَاحَمَةِ الرّجَالِ بِأَزْوَاجِهِمْ سَافِرَات عن وُجُوهِهِنَّ وَرُبَّمَا كان ذلك في اللّيْلِ وَبِأَيْدِيهِمْ الشُّمُوعُ مُتَّقِدَةٌ وفي الْأَنْوَارِ في آخِرِ كِتَابِ الْجِهَادِ الْمُنْكَرَاتُ الْمَأْلُوفَةُ أَنْوَاعٌ الْأَوَّلُ مُنْكَرَاتُ الْمَسَاجِد قال وَلَوْ كان الْوَاعِظُ شَابًّا مُتَزَيِّنًا كَثِيرَ الْأَشْعَار وَالْحَرَكَات وَالْإِشَارَاتِ وقد حَضَرَ مَجْلِسَهُ النِّسَاءُ وَجَبَ الْمَنْعُ فإن فَسَادَهُ أَكْثَرُ من صَلَاحِهِ بَلْ لَا يَنْبَغِي أَنْ لَا يُسَلَّمَ الْوَعْظُ إلَّا لِمَنْ ظَاهِرُهُ الْوَرَعُ وَهَيْئَتُهُ السَّكِينَة وَالْوَقَارُ وَزِيُّهُ زِيُّ الصَّالِحِينَ وَإِلَّا فَلَا يَزْدَادُ الناس بِهِ إلَّا تَمَادِيًا في الضَّلَالِ فَيَجِبُ أَنْ يُضْرَبَ بين الرِّجَالَ وَالنِّسَاءِ حَائِلٌ يَمْنَعُ من النَّظَرِ فإنه مَظِنَّةُ الْفَسَادِ وَيَجِبُ مَنْعُ النِّسَاءِ من حُضُورِ الْمَسَاجِد لِلصَّلَاةِ وَلِمَجَالِسِ الذِّكْرِ إذَا خِيفَتْ الْفِتْنَةُ فَتَأَمَّلْهُ تَجِدْهُ صَرِيحًا أَيْضًا فِيمَا قَدَّمْته وفي الْمُهَذَّبِ في بَابِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَلِأَنَّهَا أَيْ الْمَرْأَةُ لَا تَخْتَلِطُ بِالرِّجَالِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ

[118] Abu Bakar Uthman Bin Shata al-Bakri, *Hāshiyah I'ānatu al-Tālibīn,* Dār ihyā' al-kutub al-Arabiyyah, Juz 1, Hal 272.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَتَأَمَّلْهُ تَجِدْهُ صَرِيحًا في حُرْمَةِ الِاخْتِلَاط وهو كَذَلِكَ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ الْفِتْنَة.[119]

c). al-Zawājir ‘An Iqtirāf al-Kabaʾir, Juz 1, 331.

(الْكَبِيرَةُ الرَّابِعَةُ وَالسَّبْعُونَ : كَشْفُ الْعَوْرَةِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ وَمِنْهُ دُخُولُ الْحَمَّامِ بِغَيْرِ مِئْزَرٍ سَاتِرٍ لَهَا) أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ عَلَى غَائِطِهِمَا يَنْظُرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ.[120]

Menurut keterangan dua kitab (*Ḥāshiyat I’ānat al-Ṭālibīn dan al-Fatāwī al-Fiqhiyyah*) di atas, berkumpulnya kaum laki dan perempuan dalam satu tempat hukumnya makruh, kalau sampai terjadi ikhtilat (bercampurnya) laki dan perempuan hingga bersentuhan kulit mereka menjadi haram. Dan wajib mencegah wanita menghadiri masjid untuk shalat atau majlis ta’lim, kecuali jika aman dari fitnah.

54). Apakah ucapan si bapak tersebut (Jika kamu jual tanah tersebut maka nanti ketika aku meninggal kamu sudah tidak berhak mendapat warisan) dapat menggugurkan warisan si anak?.

Hukum : Tidak bisa menggugurkan warisan.

Ta’bir :

a). Kifāyah al-Akhyār fī Halli Ghāyah al-Ikhtisār, Juz 2, 33.

---

[119] Ahmad Shihabuddin Ibnu Hajar al-Haitami al-Makki, *al-Fatāwī al-Fiqhiyyah al-Kubrā, Fatāwī ibn Hajar al-Haitami*, Dār al-Ma’rifah, Beirut Libanon, tt, Juz 1, 201.

[120] Ahmad Shihabuddin Ibnu Hajar al-Haitami al-Makki, *al-Zawājir ‘An Iqtirāf al-Kabaʾir*, Dār al-Ma’rifah, Beirut Libanon, tt, Juz 1, 331.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وهل تصح الوصية للوارث؟ فيه خلاف: قيل لا تصح ألبتة لقوله عليه الصلاة والسلام (لا وصية لوارث) وهو حديث حسن صحيح. قاله الترمذي، والأصح الصحة، وتوقف على إجازة الورثة لقوله عليه الصلاة والسلام (لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة) رواه الدارقطني .قال عبدالحق: المشهور أنه منقطع ووصله بعضهم، فعلى الصحيح إجازة الورثة تنفيذ على الصحيح لا يحتاج إلى إيجاب وقبول وتكفي الإجازة والله أعلم.[121]

b). Kifāyah al-Akhyār fī Halli Ghāyah al-Ikhtisār, Juz 2, 34.

(فرع) الهبة للوارث كالوصية له وكذلك ضمان الدين عنه لأجنبي، وأطلق العراقيون أن الوصية لعبد الوارث كالوصية له والله أعلم.[122]

c). al-Majmū' fī Sharhi al-Muhadhdhab, Juz. 6, 405.

فصل : إذا أوصى أن يحجَّ عنه رجل بمائة درهم، ويدفع ما بقي من الثلث إلى آخر، وأوصى بالثلث لثالث وصيغتها عند الشافعي رحمه الله: «لو قال: أحجّوا عني رجلاً بمائة درهم، وأعطوا ما بقي من ثلثي فلاناً، وأوصى بثلث ماله لرجل بعينه، قال: «فللموصى له بالثلث نصف الثلث، وللحاج والموصى له بما بقي من الثلث نصف الثلث، ويحجّ عنه رجل بمائة درهم» . وهذا الرجل، أو الموصي قد أوصى بثلثي ماله. فإن أجاز الورثة ذلك، دفع ثلث المال إلى الموصى له بالثلث ولا يشاركه أحد، ودفع من الثلث الآخر مائة درهم إلى الموصى له بالحج، فإذا بقيت بعد المائة فضلة، دفعت إلى الموصى له بما بقي من الثلث. هذا حكم الوصية إذا أجازها الورثة.أمّا إذا لم يجز الورثة ذلك، ردَّت الوصايا إلى الثلث، فينظر: إذا كان

[121] Taqiyyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini al-Hisni, *Kifāyah al-Akhyār fī Halli Ghāyah al-Ikhtisār*, Dār al-Minhāj, 2008, Juz 2, 33.
[122] Ibid, Juz 2, 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الثلث مائة درهم فما دون، قسمت بين الموصى له بالثلث، وبين الموصى له بالمائة نصفين، لكل واحدٍ منهما خمسون، لاتفاقهما في قدر ما يستحقان، وهو المائة[123].

Berdasarkan ta'bir kitab Kifāyat al-Akhyār di atas, maka ucapan si mayit tidak bisa menggugurkan hak ahli waris atas harta warisan, karena wasiat kepada ahli waris dihukumi tidak sah, berdasarkan hadits riwayat al-Tirmidzi.

2. Ada 16 Permasalahan fiqh yang hukumnya diputuskan dengan metode *ilhāqi,* yaitu :

1) Bagaimana hukum shalatnya ma'mum masbuq yang imamnya batal kemudian diganti salah satu ma'mum?,

Hukum : Shalatnya sah.

Ta'bir :

a). Hawāshī Tuhfat al-Minhāj Bi Sharh al-Minhāj, Juz 8, 392.

(وَإِنْ أَدْرَكَهُ) أَيْ الْمَأْمُومُ الْإِمَامَ (رَاكِعًا أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ) أَيْ مَا فَاتَهُ مِنْ قِيَامِهَا وَقِرَاءَتِهَا ، وَإِنْ قَصَّرَ بِتَأْخِيرِ تَحَرُّمِهِ لَا لِعُذْرٍ حَتَّى رَكَعَ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ بِذَلِكَ وَبِهِ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ الْخُرُوجُ مِنْ خِلَافِ جَمْعٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُ لَا يُدْرِكُهَا لِمُخَالَفَتِهِمْ لِسُنَّةٍ صَحِيحَةٍ فَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ الِاحْتِيَاطُ تَوَقِّي ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَضِيقَ الْوَقْتُ أَوْ تَكُونَ ثَانِيَةَ الْجُمُعَةِ يُرَدُّ بِمَا ذَكَرْته وَلَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ وَأَمْكَنَهُ إدْرَاكُ رَكْعَةٍ بِإِدْرَاكِ رُكُوعِهَا مَعَ مَنْ يَتَحَمَّلُ

[123] Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, *al-Majmū' fi Sharhi al-Muhadhdhab*, Maktabah al-Irshād, 2008, Juz. 6, 405.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْهُ الْفَاتِحَةَ لَزِمَهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قُلْت) إنَّمَا يُدْرِكُهَا (بِشَرْطِ أَنْ) يَكُونَ ذَلِكَ الرُّكُوعُ مَحْسُوبًا لَهُ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُهُ فِي الْجُمُعَةِ بِأَنْ لَا يَكُونَ مُحْدِثًا عِنْدَهُ فَلَا يَضُرُّ طُرُوُّ حَدَثِهِ بَعْدَ إدْرَاكِ الْمَأْمُومِ لَهُ مَعَهُ وَلَا فِي رُكُوعٍ زَائِدٍ سَهَا بِهِ وَسَنَذْكُرُ فِي الْكُسُوفِ أَنَّ رُكُوعَ صَلَاتِهِ الثَّانِي لَا يُدْرِكُ بِهِ الرَّكْعَةَ أَيْضًا لِأَنَّهُ ، وَإِنْ حُسِبَ لَهُ بِمَنْزِلَةِ الِاعْتِدَالِ.وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ سَوَاءٌ أَتَمَّ الْإِمَامُ الرَّكْعَةَ فَأَتَمَّهَا مَعَهُ أَمْ لَا كَأَنْ أَحْدَثَ فِي اعْتِدَالِهِ ، وَسَوَاءٌ أَقَصَرَ الْمَأْمُومُ فِي تَحَرُّمِهِ حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ ثُمَّ أَحْرَمَ أَمْ لَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَحَكَى ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ بَعْضِ شُرُوحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّهُ إذَا قَصَّرَ فِي التَّكْبِيرِ حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ لَا يَكُونُ مُدْرِكًا لِلرَّكْعَةِ.[124]

Ta'bir kitab *Tuhfat al-Minhāj* yang bergaris bawa diatas, menyatakan bahwa seorang makmum dianggap mendapatkan rakaat sempurna apabila dia mendapati imam dalam keadaan ruku' dengan sempurna, baik imam tersebut dapat menyempurnakan rakaat shalat ataupun setelah ruku' dia (imam) hadats atau batal shalatnya. Hadatsnya imam yang baru datang tidak berpengaruh terhadap shalatnya makmum tersebut, diagnti imam atau tidak.

2) Dengan menabung di bank, apakah menjadikan kita wajib melaksanakan ibadah haji ?,

[124] Ibnu Hajar al-Haitami, Abdul Hamīd al-Sharwāni dan Ibnu Qāsim al-'Ubādi, *Hawāshī Tuhfah al-Minhāj Bi Sharh al-Minhāj*, al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1938, Juz 8, Hal. 392.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum : Tidak/belum, karena masih belum sepenuhnya dikategorikan *istiṭa'ah* (mampu).

Ta'bir :

a). Mughnī al-Muhtāj Juz.5, 399.

(وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ) مَا ذُكِرَ مِنْ (الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ) مَعَ الْمَحْمِلِ وَالشَّرِيكِ (فَاضِلِينَ عَنْ دَيْنِهِ) حَالًّا كَانَ أَوْ مُؤَجَّلًا ، سَوَاءٌ كَانَ لِآدَمِيٍّ أَمْ لِلَّهِ تَعَالَى كَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ فِي ذِمَّةِ شَخْصٍ مَالٌ فَإِنْ أَمْكَنَ تَحْصِيلُهُ فِي الْحَالِ فَكَالْحَاصِلِ عِنْدَهُ وَإِلَّا فَكَالْمَعْدُومِ (وَ) عَنْ (مُؤْنَةِ) أَيْ كُلْفَةِ (مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ مُدَّةَ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ) لِئَلَّا يُضَيَّعُوا.[125]

Kitab *Mughnī al-Muhtāj* di atas menerangkan seseorang bisa dikatakan *istiṭa'ah* (mampu) apabila saku dan biaya kendaraan sudah melebihi dari tanggungan hutangnya baik kepada sesama atau hutangnya kepada Allah, seperti nadzar atau kafarat.Terkait dengan orang yang belum mampu haji tapi melaksanakan ibadah tersebut, kitab *Tuhfatul Muhtāj* menjelaskan bahwa sah hajinya orang yang fakir tersebut.

b). Tuhfah al-Muhtāj Fī Syarh al-Minhāj, Juz 14, 247.

[125] Khatib al-Sharbini, *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāẓi al-Minhāj*, Dār al-Ma'rifah, 1997, Juz.5, 399.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(فيجزئ حج الفقير) وعمرته عن حجة الإسلام وعمرته أداء أو قضاء لما أفسده كما لو تكلف مريض حضور الجمعة وغني خطر الطريق.[126]

3) Hukum uang tabungan yang sudah cukup dibuat daftar haji, lalu dipergunakannya untuk hajat dan kebutuhan lain.

Hukum : Boleh tapi makruh.

Ta'bir :

a). Mughnī al-Muhtāj, juz.5, 415.

(النَّوْعُ الثَّانِي : اسْتِطَاعَةُ تَحْصِيلِهِ) أَيْ الْحَجِّ لَا بِالْمُبَاشَرَةِ بَلْ (بِغَيْرِهِ، فَمَنْ مَاتَ وَفِي ذِمَّتِهِ حَجٌّ) وَاجِبٌ مُسْتَقِرٌّ بِأَنْ تَمَكَّنَ بَعْدَ اسْتِطَاعَتِهِ مِنْ فِعْلِهِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ ، وَذَلِكَ بَعْدَ انْتِصَافِ لَيْلَةِ النَّحْرِ وَمُضِيِّ إمْكَانِ الرَّمْيِ وَالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ إنْ دَخَلَ الْحَاجُّ بَعْدَ الْوُقُوفِ ثُمَّ مَاتَ أَثِمَ وَلَوْ شَابًّا ، وَإِنْ لَمْ تَرْجِعْ الْقَافِلَةُ (وَجَبَ الْإِحْجَاجُ عَنْهُ) وَلَوْ كَانَ قَضَاءً أَوْ نَذْرًا مُسْتَأْجَرًا عَلَيْهِ فِي ذِمَّتِهِ وَزَادَ عَلَى الْمُحَرَّرِ قَوْلَهُ (مِنْ تَرِكَتِهِ).[127]

Sebagaimana orang tersebut masih mempunyai tanggungan kewajiban haji, karena dianggap sudah *istiṭa'ah* (mampu), maka apabila harta (uang tabungan) itu dialihkan untuk kepentingan yang lain, maka hukumnya makruh.

---

[126] Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtāj Fī Syarh al-Minhāj*, (al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, Mesir 1983) Juz 14, 247.

[127] Khatib al-Sharbini, *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāẓi al-Minhāj*, Dār al-Ma'rifah, 1997, Juz.5, 415.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Bagaimana hukum mendirikan masjid di tanah waqaf untuk pendidikan seperti tanah waqaf pondok pesantren?.

Hukum : Tidak boleh karena waqif (orang yang wakaf), sudah menentukan syarat wakafnya untuk pondok pesantren.

Ta'bir :

a). Bughyah al-Mustarshidīn , Juz.1 hal. 130.

مسألة ي) : اشترى بيتاً ووقفه مسجداً صح ، وأعطى حكمه وحرم عليه وعلى غيره هدمه وتوسيعه إلا لضرورة أو حاجة ، كخوف سقوط جدار ، ودفع حرّ وبرد ، وضيق على نحو المصلين ، فيجوز حينئذ بشرط أن يبنيه في تلك الأرض الموقوفة ، وأن يعم جميعها بالبناء ، وله أن يدخل غيرها معها ، وللزيادة المذكورة حكم الوقف إن بنيت في أرض موقوفة مسجداً ، أو وقفت كذلك وإلا فلا ، وأن يكون المعاد صورة مسجد بأن يطلق عليه اسمه لا نحو رباط ، إذ يمتنع تغيير الوقف بما يغيره بالكلية عن اسمه الذي كان عليه حال الوقف بخلاف ما لا يغيره ، وإن قدم مؤخراً أو جعل محراباً صحناً أو رحبة وعكسه ، وأن يأذن الإمام أو نائبه إن كانت الزيادة فتح باب أو هدم حائط ، بخلاف نحو التحويط خارجه ، والزيادة المتصلة ببابه ، نعم لا يجوز فعل نحو حوض فيه مما يغير هيئة المسجد ، إلا إن شرطه الواقف في صلب الوقف متصلاً به كأن يقول : وقفت هذه الأرض مسجداً بشرط أن يفعل فيها حوض للماء مثلاً ، أو اطردت عادة موجودة في زمن الواقف علم بها بفعل نحو الحوض.[128]

[128] Abdurrahman Ba "Alawiy, *Bughyah al-Mustarshidīn fī Talkhīṣi fatāwī Ba'ḍi al-Aimmah min al-Ulamā' al-Muta'akhirīn*, Dār al-fikr, 2011, Juz.1 hal. 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut keterangan kitab *Bughyat al-Mustarshidīn,* mengubah kandungan waqaf, sehingga tidak sesuai dengan sighat ketika waqaf tidak diperkenankan. Sebgaimana tidak diperkenankan mengubah waqaf masjid untuk sarana pendidikan dan lainnya, demikian juga mendirikan masjid di tanah waqaf untuk pendidikan seperti tanah waqaf pondok pesantren juga tidak boleh.

5) Bagaimana hukum menjadikan sebagian besar daging kurban untuk hajatan seorang tokoh (mudin) ?,

Hukum : Tafsil, jika qurban wajib maka harus disedekahkan semuanya, jika qurban sunnah maka boleh dengan seizin *Muḍahhi* (orang yang berkorban).

Ta'bir :

a). al-Muhaẓẓab Fī Fiqh al-Imām Shāfi'i, juz 1, 350.

فصل : ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لأن تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن والإذن يعرف بالنطق وبالعرف فإن تناول الإذن تصرفين وفي أحدهما إضرار بالموكل لم يجز ما فيه إضرار.[129]

b). Hāshiyah al-Bājūrī, Juz 1. Hal. 387.

وشرط الموكل فيه أن يكون قابلاً للنيابة، فلا يصح التوكيل في عبادة بدنية إلا الحج وتفرقة الزكاة (قوله

[129] Abu Ishaq Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf al-Fairuz Abadi al-Shairozi, *al-Muhaẓẓab Fī Fiqh al-Imām Shāfi'i*, Dār al-Fikri, Beirut, Juz 1, 350.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وتفرقة الزكاة) مثلا اي وكذبح أضحية وعقيقة وتفرقة كفارة ومنذور ولا يجوز له أخذ شيء منها إلا إن عين له الموكل قدرا منها.[130]

c). Hāshiyah al-Bujairimī ‘alā Sharhi al-Manhaj, Juz 4, 295.

قوله (كجعلت هذه أضحية) وحينئذ فما يقع في ألسنة العوام كثيرا من شرائهم ما يريدون التضحية به من أوائل السنة وكل من سألهم عنها يقولون له تلك أضيحة مع جهلهم بما يترتب على ذلك من الأحكام تصير به أضحية واجبة يمتنع عليه أكله منها ولا يقبل قوله أردت أني أتطوع بها خلافا لبعض المتأخرين شرح م ر.[131]

d). Hashiyatā al-Qalyubi Juz 16, 131.

قَالَ شَيْخُنَا : وَيَجِبُ التَّصَدُّقُ بِجَمِيعِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ ، وَلَا يَجُوزُ أَكْلُ الْأَغْنِيَاءِ مِنْهَا وَلَا النَّاظِرِ عَلَى وَقْفِهَا ، وَلَا ذَابِحِهَا لِتَعَذُّرِ إذْنِ الْمَيِّتِ فِي الْأَكْلِ .نَعَمْ إنْ كَانَ الذَّابِحُ مِمَّنْ فِيهِ شَرْطُ الْمَيِّتِ فَيَنْبَغِي جَوَازُ أَكْلِه.[132]

e). Tuhfah al-Habīb ‘Alā Sharh al-Khaṭīb, Juz 13, 244.

(ويطعم الفقراء والمساكين) من المسلمين ، على سبيل التصدق من أضحية التطوع بعضها وجوبا ولو جزءا يسيرا من لحمها بحيث ينطلق عليه الاسم ويكفي الصرف لواحد من الفقراء أو المساكين.[133]

---

[130] Ibrahim Bin Muhammad Bin Ahmad al-Bajuri, *Hāshiyah al-Bājūrī*, Dār al-Minhāj, Jeddah al-Saudiyyah, tt, Juz 1. Hal. 387.

[131] Sulaiman Bin Muhammad Bin Umar al-Bujairimi al-Shafi’i, *Hāshiyah al-Bujairimī ‘alā Sharhi al-Manhaj*, Maṭba’ah al-Halabī, 1950, Juz 4, 295.

[132] Shihabuddib Ahmad Bin Ahmad al-Qolyubi dan Shibuddin Ahmad al-Barlisi “Amirah, *Hashiyatā al-Qalyubi wa ‘Amirah Ala Sharhi al-Mahalli*. (Maṭba’ah Mustafa al-Halabi, 1956). Juz 16, 131.

[133] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Shafi.iy al-Bujairimiy, *Hāshiyah al-Bujairimiy ‘Alā al-Khaṭīb, Tuhfah al-Habīb ‘Alā Sharh al-Khaṭīb,* (al-Maktabah al-Waqfiyyah), 2007, Juz 13, 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam keterangan kitab *Hāshiyat al-Bājūri*, disebutkan bahwasanya hal yang boleh diwakilkan adalah bukan jenis *ibadah badaniyah,* kecuali haji dan membagikan zakat, termasuk penyembelihan qurban. Artinya seorang *wakīl* (yang dipasrahi) tidak diperkenankan mengambil dan mentasarrufkan daging kurban kecuali sesuai dengan yang ditentukan oleh *muḍahhi.*

6) Bagaimana hukum menjual kulit dan tanduk sapi qurban seperti diatas ?

Hukum : Hukum menjual hewan qurban itu tidak boleh bahkan sampai kulit, tanduk, dan bulunya.

Ta'bir :

a). Kifāyat al-Akhyār fī Halli Ghāyah al-Ikhtisār, Juz 2, 242.

واعلم أن موضع الأضحية الانتفاع فلا يجوز بيعها بل ولا بيع جلدها ولا يجوز جعله أجرة للجزار وإن كان تطوعا بل يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به من خف أو نعل أو دلو أو غيره ولا يؤجره والقرن كالجلد.[134]

Dalam kitab *Kifāyat al-Akhyār* tersebut di atas dijelaskan, bahwasanya hewan qurban itu diambil kemanfaatannya, oleh

[134] Taqiyyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini al-Hisni, *Kifāyah al-Akhyār fī Halli Ghāyah al-Ikhtisār*, Dār al-Minhāj, 2008, Juz 2 Hal.242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena itu tidak boleh menjual daging qurban bahkan kulitnya sekalipun. Tanduk hukumnya sama dengan kulit.

7) Bolehkah menjual kulit sapi kurban yang sudah dipesan sebelum disembelih seperti di atas ?,

Hukum : Tidak boleh. Karena hukum kulit sapi belum dapat dimiliki.

Ta'bir :

a). al-Muhaẓẓab Fī Fiqh al-Imām Shāfi'i, Juz 2, Hal. 12.

فصل : ولايجوز بيع مالا يملكه من غير إذن مالكه لما روى حكيم بن حزام أن النبي (ص) قال : [لا تبع ماليس عندك] ولأن مالا يملكه لا يقدر على تسليمه فهو كالطير في الهواء أو السمك في الماء
فصل : ولا يجوز بيع ما لم يستقر ملكه عليه كبيع الأعيان المملوكة بالبيع والإجازة والصداق ومأأشبهها من المعاوضات قبل القبض لما روي أن حكيم بن حزام قال يا رسول الله إني أبيع بيوعا كثيرة فما يحل لي منها مما يحرم قال : [لاتبع ما لم تقبضه] ولأن ملكه عليه غير مستقر لأنه بما
هلك فانفسخ العقد وذلك غرر من غير حاجة فلم يجز.[135]

Dalam kitab al-Muhadhab di atas dijelaskan, bahwasanya tidak boleh menjual sesuatu yang bukan dan belum milik tetapnya, kecuali dia telah menerimanya sebagai milik tetap. Demikian halnya dengan kulit sapi qurban yang belum disembelih dan

[135] Abu Ishaq Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf al-Fairuz Abadi al-Shairozi, *al-Muhaẓẓab Fī Fiqh al-Imām Shāfi'i*, Dār al-Fikri, Beirut, Juz 2, Hal. 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum dibagikan, bagi *wakīl* (orang yang dipasrahi) tidak boleh mnjualnya.

8) Sahkah aqiqah pada warung yang menyediakan jasa aqiqah ?,

Hukum : sah, jika prakteknya sesuai dengan prosedur aqiqah.

Ta'bir :

a). Hāshiyah I'ānatu al-Tālibīn, Juz 2, 380-381.

وأما نقل دراهم من بلد إلى بلد أخرى ليشتري بها أضحية فيها فهو جائز. وقد وقفت على سؤال وجواب يؤيد ما ذكرناه لمفتي السادة الشافعية، بمكة المحمية، فريد العصر والاوان مولانا السيد أحمد بن زيني دحلان. (سئل) رحمه الله تعالى: جرت عادة أهل بلد جاوى على توكيل من يشتري لهم النعم في مكة للعقيقة أو الاضحية ويذبحه في مكة، والحال أن من يعق أو يضحي عنه في بلد جاوى فهل يصح ذلك أو لا ؟ أفتونا.

(الجواب) نعم، يصح ذلك، ويجوز التوكيل في شراء الاضحية والعقيقة وفي ذبحها، ولو ببلد غير بلد المضحي والعاق كما أطلقوه فقد صرح أئمتنا بجواز توكيل من تحل ذبيحته في ذبح الاضحية، وصرحوا بجواز التوكيل أو الوصية في شراء النعم وذبحها، وأنه يستحب حضور المضحي أضحيته.ولا يجب.وألحقوا العقيقة في الاحكام بالاضحية، إلا ما استثني، وليس هذا مما استثنوه، فيكون حكمه حكم الاضحية في ذلك.وبينوا تفاريع هذه المسألة في كل من باب الوكالة والاجارة فراجعه[136]

b). Fatāwī al-Sheikh Muhammad Ibn Sulaiman al-Kurdī

[136] Abu Bakar Uthman Bin Shata al-Bakri, *Hāshiyah I'ānatu al-Tālibīn,* Dār ihyā' al-kutub al-Arabiyyah, Juz 2, 380-381.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(وصورة السؤال) ما قولكم دام فضلكم هل يجوز نقل الاضحية من بلد إلى بلد آخر أم لا ؟ وإذا قلتم بالجواز، فهل هو متفق عليه عند ابن حجر والرملي أم لا ؟ وهل من نقل الاضحية إرسال دراهم من بلد إلى بلد آخر ليشتري بها أضحية وتذبح في البلد الآخر أم لا ؟.وهل العقيقة كالاضحية أم لا ؟ بينوا لنا ذلك بالنص والنقل، فإن المسألة واقع فيها اختلاف كثير، ولكم الاجر والثواب.(وصورة الجواب) الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.اللهم هدايةللصواب.[137]

Dalam kitab *I'ānat al-Ṭālibīn* di atas, dijelaskan bahwa aqiqah dalam beberapa hukumnya di-*ilhāq*-kan dengan qurban. Artinya sebagaimana bolehnya seseorang pasrah wakil pada orang lain untuk membeli dan menyembelih qurban, demikian halnya pesan aqiqah kepada warung yang menyediakan jasa aqiqah (sah hukumnya).

9) Lebih baik mana cara penyembelihan dengan cara tradisional atau pembiusan ?.

Hukum : Lebih baik dengan cara tradisional.

Ta'bir :

a). Sharh Ṣahīh al-Bukhāri li Ibn al-Baṭṭāl, Juz 5, 428.

قال ابن المنذر : وقال أحمد وإسحاق : لا تؤكل المصبورة والمجثمة. قال غيره : ولا أعلم أحدًا من

[137] Muhammad Bin Sulaiman al-Qurdi, *Fatāwī al-Sheikh Muhammad Ibn Sulaiman al-Kurdi*, al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, tt

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

العلماء أجاز أكل المصبورة وكلهم يحرمها ؛ لأنه لا ذكاة فى المقدور عليه إلا فى الحلق واللبة . قال المهلب : وهذا إنما هو نهى عن العبث فى الحيوان وتعذيبه من غير مشروع . وأما تجثيمها للنحر وما شاكله فلا بأس به ، وإنما يكره العبث لحديث شداد بن أوس أن النبى (ﷺ) قال : (إن الله كتب الإحسان على كل شيء ؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته) وكره أبو هريرة أن تحد الشفرة والشاة تنظر إليها ، وروى أن النبى (ﷺ) رأى رجلا أضجع شاة ، فوضع رجله على عنقها ، وهو يحد شفرته فقال له (ﷺ) : (ويلك ، أردت أن تميتها موتتان ؟ هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها).[138]

b). Tuhfah al-Ahwadhi Sharh Jāmi' al-Tirmidhiy, Juz 4, 553.

(فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة) وبكسر القاف الحالة التي عليها القاتل في قتله كالجلسة والركبة والمراد بها المستحقة قصاصا أو حدا والإحسان فيها الاختيار أسهل الطرق وأقلها ألما (وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة) قال النووي يروى بفتح الذال وبغير هاء في أكثر النسخ يعني نسخ صحيح مسلم وفي بعضها بكسر الذال وبالهاء كالقتلة (وليحد) بضم الياء وكسر الحاء وفتح الدال المشددة ويجوز كسرها (أحدكم شفرته) بفتح الشين أي سكينته ويستحب أن لا يحد بحضرة الذبيحة ولا يذبح واحدة بحضرة الأخرى ولا يجرها إلى مذبحها (وليرح ذبيحته) بضم الياء وكسر الراء أي ليتركها حتى تستريح وتبرد من قولهم أراح الرجل إذا رجعت إليه نفسه بعد الاحياء والاسم الراحة وهذان

[138] Abu al-Hasan Ali bin Khalaf bin Abdul Malik Ibn al-Battal, *Sharh Ṣahīh al-Bukhāri li Ibn al-Baṭṭāl*, (Maktabah al-Rushd, 2008), Juz 5, 428.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الفعلان كالبيان للإحسان في الذبح –الى ان قال - قال القارىء قال علماؤنا وكره السلخ قبل التبرد وكل تعذيب بلا فائدة لهذا الحديث ، ولما أخرج الحاكم في المستدرك عن بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته فقال له النبي صلى الله عليه و سلم أتريد أن تميتها موتتين هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها انتهى.[139]

c). Faiḍ al-Qadīr Sharh al-Jāmi' al-Saghīr, Juz 2, Hal.245.

(وإذا ذبحتم) بهيمة تحل (فأحسنوا الذبحة) بالكسر بالرفق بها فلا يصرعها بعنف ولا يجرها لتذبح بعنف وبإحداد الآلة وتوجيهها للقبلة والتسمية والإجهاز ونية التقرب بذبحها وإراحتها وتركها إلى أن تبرد وشكر الله حيث سخرها لنا ولم يسلطها علينا ولا يذبحها بحضرة أخرى سيما بنتها أو أمها.[140]

d). al-Fatāwī al-Islāmiyyah Min Dār al-Iftā' al-Misriyyah, Juz 10, 147.

وعملية الكهرباء فى ذاتها إذا كان الغرض منها فقط إضعاف مقاومة الحيوان والوصول إلى التغلب عليه وإمكان ذبحه ، جائزة ولا بأس ، وان لم يكن الغرض منها هذا أصبحت نوعا من تعذيب الحيوان قبل ذبحه ، وهو مكروه ، دون تأثير فى حله إذا ذبح بالطريقة الشرعية حال وجوده فى حياة مستقرة . أما إذا مات

[139] Muhammad bin Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarkafuriy, *Tuhfah al-Ahwadhi Sharh Jāmi' al-Tirmidhiy*, (Dār al-Fikr, 2008), Juz 4, 553.
[140] Muhammad Abdu al-Ra'uf al-Manawi, *Faiḍ al-Qadīr Sharh al-Jāmi' al-Saghīr*, Dār al-Ma'rifah,1971. Juz 2, Hal.245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

صعقا بالكهرباء فهو ميتة غير مباحة ومحرمة قطعا.[141]

Dari keempat ta'bir di atas, ditemukan kejelasan hukum, bahwasanya Rasulullah mengajarkan kepada kita cara penyembelihan hewan yang baik dan benar secara syar'i. Artinya penyembelihan tradisional lebih baik dari pada penyembelihan dengan pembiusan. Pembiusan diperbolehkan dengan syarat: tidak ada unsur *ta'dhīb al-hayawān,* mempermainkan hewan.

10) Bagaimana fiqih menyikapi penggunaan lahan di atas sungai ?.

Hukum : hukumnya adalah *Tafsil* : Jika bangunan berbentuk kepemilikan hukumnya tidak boleh, jika hanya *irtifāq* maka boleh.

Ta'bir :

a). Hawāshī Tuhfah al-Minhāj bi Sharh al-Minhāj, Juz 6, 227.

وأما مجرد الانتفاع بحريمه بشرط عدم الضرر فلا مانع منه وقد يقضي هذا جواز بناء نحو بيت في حريمه للارتفاق حيث لا تضرر لاحد به ويجري ذلك في بناء بيت بمنى لذلك حيث لا تضرر به اه.[142]

[141] Dār al-Iftā' al-Misriyyah, *al-Fatāwī al-Islāmiyyah Min Dār al-Iftā' al-Misriyyah*, (al-Majlis al-A'lā li Shu'ūn al-Islāmiyyah, Miṣr, 1993) Juz 10, 147.

[142] Ibnu Hajar al-Haitami, Abdul Hamīd al-Sharwāni dan Ibnu Qāsim al-'Ubādi, *Hawāshī Tuhfah al-Minhāj Bi Sharh al-Minhāj*, al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1938, Juz 6 Hal. 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b). Hāshiyah al-Bujairimī ‘alā Sharhi al-Manhaj, Juz 3, Hal. 190.

قوله (الأمر فيه إلى رأي الإمام)....وليس للسلطان تمليكها لأحد فإنه ليس له تمليك شيء من النهر أو حريمه وإن انكشف عنه لأنه لا يخرج عما كان عليه بانكشاف الماء عنه لأنه بصدد أن يعود الماء إليه نعم له دفعها لمن يرتفق بها حيث لا يضر بالمسلمين.[143]

Berdasarkan keterangan kitab *Hawāshī Tuhfah al-Minhāj* dan *Hāshiyah al-Bujairimī* di atas, pemanfaatan lahan di atas sungai (misalnya membangun rumah) hukumnya tidak ada larangan (boleh), dengan syarat: tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain, dan bukan untuk dimiliki. Karena seorang penguasa (imam) pun tidak diperbolehkan memberi hak milik seseorang pada sungai tersebut.

11) Bagaimana hukumnya pemerintah mengkomersilkan lahan tersebut ?.

Hukum : Tidak boleh.

Ta’bir :

a). al-Hāwī li al-Fatāwī li al-Suyūṭi, Juz 1, 193.

قال الرافعي في الشرح والنووي في الروضة: حريم المعمور لا يملك بالإحياء والحريم هو المواضع

[143] Sulaiman Bin Muhammad Bin Umar al-Bujairimi al-Shafi’i, *Hāshiyah al-Bujairimī ‘alā Sharhi al-Manhaj*, Maṭba’ah al-Halabī, 1950, Juz 3, Hal. 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

القريبة التي نحتاج إليها لتمام الانتفاع كالطريق ومسيل الماء ونحوه.[144]

Hukum lahan tersebut di atas (sungai) sama dengan hukumnya jalan umum, tempat aliran air dan yang sejenisnya, artinya tidak bisa dimiliki seseorang hanya dengan *ihyā'* (ngramut dan merawat).

12) Bagaimanakah hukum telor asin tersebut bila ditinjau dari proses pembuatannya?, pengasinan dengan batu bata adalah proses pembuatan bata yang kadang dicampur dengan kotoran hewan ?,

Hukum : Hukumnya adalah Suci.

Ta'bir :

a). al-Majmū' fi Sharhi al-Muhadhdhab, Juz. 2, 556.

(مسألة : ي) : لحم عليه دم غير معفوّ عنه ذر عليه ملح فتشربها طهر بإزالة الدم ، وإن بقي طعم الملح كحب أو لحم طبخ ببول فيكفي غسل ظاهره ، وإن بقي طعم البول بباطنه إذ تشرب ما ذكر كتشرب المسام ، كما في المجموع شرح المهذب.[145]

Telor asin dengan proses pengasinannya sebagaimana di atas, dihukumi suci. Hal ini sama dengan daging hewan yang berlumuran darah, lalu di atas daging tersebut ditaburkan

[144] Abdurrahman Bin Abu Bakar al-Suyuti Jalaluddin, *al-Hāwī li al-Fatāwī li al-Suyūṭi*, (Dār al-Kutub al-Ilmiyyah), 2000, Juz 1, 193.
[145] Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, *al-Majmū' fi Sharhi al-Muhadhdhab*, (Maktabah al-Irshād, 2008), Juz. 2, 556.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

garam, garam tersebut meresap dalam daging itu, maka daging itu menjadi suci dengan hilangnya darah. Hal ini juga sama dengan biji atau daging yang dimasaka dengan air kencing, maka daging itu suci, cukup dengan membasuh bagian luarnya dengan air yang suci mencucikan, walaupun air kencing tersebut masih terasa dari dalam daging.

13) Bagaimana hukum mengkonsumsi telor asin tersebut ?,

Hukum : Halal dikonsumsi.

Ta'bir :

a). Bughyah al-Mustarshidīn, Juz.1 hal. 34.

(فرع) البيضة الطاهرة إذا استحالت دما ففى نجاستها وجهان الاصح النجاسة كسائر الدماء والثانى الطهارة كاللحم وغيره من الاطعمة إذا تغيرت ولو صارت مدرة وهى التى اختلط بياضها بصفرتها فطاهر بلا خلاف صرح به صاحب التتمة وغيره وكذا اللحم إذا خنز وأنتن فطاهر علي المذهب وفيه وجه أنه نجس حكاه الشاشي وصاحب البيان في باب الاطعمة وهو شاذ ضعيف جدا.[146]

Hukum telor asin oleh forum bahtsul masail disamakan dengan hukum telor yang berubah dari asalnya (putih telor bercampur dengan kuningnya) dan hukum daging yang berubah bau dan aromanya, ketiganya dihukumi suci dan halal dikonsumsi.

[146] Abdurrahman Bā 'Alawiy, *Bughyah al-Mustarshidīn fī Talkhīṣi fatāwī Ba'ḍi al-Aimmah min al-Ulamā' al-Muta'akhirīn*, Dār al-fikr, 2011, Juz.1 hal. 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

14) Bagaimana hukumnya Biro jasa dalam banyak hal ?,

Hukum : bisa sah atau fasid (rusak/haram) tergantung syaratnya terpenuhi atau tidak.

Ta'bir :

a). al-Majmū' fi Sharhi al-Muhadhdhab, Juz. 15, 119.

(فرع)تصح الجعالة على عمل مجهول كما ذكر ذلك المصنف لان الجهالة احتملت في القراض لحصول زيادة، فاحتمالها في رد الحاصل أولى، وهو مقيد كما أفاده جمع بما إذا عسر ضبطه لا كبناء حائط فيذكر محله وطوله وسمكه وارتفاعه وما يبنى به، وخياطة ثوب فيصفه كالاجارة.أما صحتها على المعلوم فأولى.ومثال ذلك قوله: من رد على ضالتي من مكان كذا فله كذا، وهذا هو الاصح.[147]

b). al-Majmū' fi Sharhi al-Muhadhdhab, juz,15, 120.

(والثانى) المنع للاستغناء عنه بالاجارة، وقد عرفت أنه لا بد من كون العمل فيه كلفة أو مؤنة، كرد آبق أو ضال، أو أداء حج أو خياطة ثوب أو تعليم علم أو حرفة، أو إخبار فيه غرض وصدق فيه، فلو رد من هو بيده ولا كلفة فيه فلا شئ له، إذ مالا كلفة فيه لا يقابل بعوض فلو قال من دلنى على مالى فله كذا فدله غير من هو بيده استحق، لان الغالب أنه تلحقه مشقة.[148]

c). al-Fiqhu al-Islami wa adillatuhu, juz, 5, 487.

الإجارة نوعان: إجارة على المنافع، أي أن المعقود عليه هو المنفعة،

[147] Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, *al-Majmū' fi Sharhi al-Muhadhdhab*, Maktabah al-Irshād, 2008, Juz. 15, Hal. 119.
[148] Ibid, Juz. 15, Hal. 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وإجارة على الأعمال، أي أن المعقود عليه هو العمل.
أحكام إجارة المنافع :إجارة المنافع كإجارة الدور والمنازل والحوانيت والضياع، والدواب للركوب والحمل، والثياب والحلي للبس، والأواني والظروف للاستعمال.ويجوز العقد على المنافع المباحة، أما المنافع المحرمة كما عرفنا فلا تجوز الإجارة عليها، لأنها محرمة، فلا يجوز أخذ العوض عليها كالميتة والدم، وذلك باتفاق العلماء.[149]

d). al-Fiqhu al-Islami wa adillatuhu, juz 5, 494.

أحكام الإجارة على الأعمال :الإجارة على الأعمال: هي التي تعقد على عمل معلوم كبناء وخياطة قميص وحمل إلى موضع معين وصباغة ثوب وإصلاح حذاء ونحوه.والأجير نوعان: أجير خاص وأجير مشترك.[150]

Berdasarkan keempat sumber di atas, forum bahtsul masail meng-*ilhaq*-kan hukum biro jasa dengan akad *ju'ālah* atau *ijārah*. Berdasarkan keterangan kitab *al-Majmū'*, boleh dan sah akad *ju'alah* walaupun terhadap pekerjaan yang belum jelas. Pendapat yang lain Biro jasa dapat disamakan *ijārah* (menyewa seseorang untuk dikasih upah) atas pekerjaan yang sudah ditentukan.

15) Bagaimana hukumnya mengunjungi wisata pantai yang banyak mempertontonkan keindahan aurat, serta tempat-tempat wisata seperti candi bila tempat itu masih digunakan acara ritual ?,

[149] Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa adillatuhu*, (Dār al-Fikr, Beirut) Juz 5, 487.
[150] Ibid, Juz 5, 494.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum : Tempat-tempat yang terdapat unsur kemaksiatan adalah *mahallu al-la'nat wa al-ghadhab* demikian juga tempat peribadatan orang-orang kafir.

Ta'bir :

a). Ihyā' Ulūm al-Dīn, Juz.2, 324.

وهو كل منكر موجود في الحال ظاهر للمحتسب بغير تجسس معلوم كونه منكراً بغير اجتهاد فهذه أربعة شروط فلنبحث عنها الأول كونه منكراً ونعني به أن يكون محذور الوقوع في الشرع وعدلنا عن لفظ المعصية إلى هذا لان المنكر أعم من المعصية إذ مَنْ رَأَى صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا يَشْرَبُ الْخَمْرَ فعليه أن يريق خمره ويمنعه وَكَذَا إِنْ رَأَى مَجْنُونًا يَزْنِي بِمَجْنُونَةٍ أَوْ بهيمة فعليه أن يمنعه منه.[151]

Tempat wisata pantai dan candi-candi yang masih digunakan acara ritual hukum mengunjunginya disamakan dengan mengunjungi tempat-tempat ma'siat dan melihat kemungkaran, kita wajib melarangnya dan mencegahnya.

16) Bagaimana hukum jama' dan qasar bagi pengunjung wisata pantai yang banyak mempertontonkan keindahan aurat, sah atau tidak ?.

Hukum : Boleh, kalau memang yang menjadi tujuan utama wisata tersebut adalah mubah, sedangkan rekreasinya merupakan tujuan tambahan (*taba'an*).

[151] Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad al-Ghazali, *Ihyā' Ulūm al-Dīn*, Dar Ibn Hazm, tt, Juz.2, Hal. 324.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ta'bir :

a). Ithāf al-Sādāh al-Muttaqīn Bi Sharh Ihyā' Ulūm al-Dīn, juz 7, 515-516.

(وبالجملة فلا يسافر الانسان اي في غرض) من الاغراض (والغرض هو المحرك) له على سفره (فان كان تحصيل ذلك الغرض حراما ولولا ذلك الغرض لا ينبعث لسفره فسفره معصية ولا يجوز فيه الترخص) فلا يقصر ولا يفطر ولا ينتفل على الراحلة ولا يجمع بين الصلاتين ولا يمسح ثلاثة ايام وله ان يمسح يوما وليلة على الصحيح الى أن قال... واما الفسق في السفر بشرب الخمر وغيره لا يمنع الرخصة بل كل سفر ينهى الشرع عنه فلا يعين) وفي نسخة فلا يعان (عليه بالرخصة , ولو كان له باعثان احدهما مباح والاخر محظور وكان بحيث لو لم يكن له الباعث المخطور لكان المباح مستقلا بتحريكه ولكان لا محالة يسافر لاجله فله الترخص) قال الرافعي : واما العاصي في سفره وهو ان يكون السفر مباحا ويرتكب المعاصي في طريقه فله الترخص ولو انشأ سفرا مباحا ثم جعله معصية فالاصح انه لا يترخص , ولو أنشا معصية ثم تاب وغير قصده من غير تغيير صوب السفر قال الاكثرون : ابتداء سفره من ذلك الموضع ان كان منه الى مقصده مسافة القصر ترخص والا فلا . وقيل في الترخص وجهان كما لو نوى مباحا ثم جعله معصية.[152]

Hukum jama' dan qasar shalat bagi musafir bergantung pada tujuan dia dalam bepergian. Jika tujuannya haram maka bepergiannya juga maksiat. Oleh karenanya musafir

[152] Muhammad Bin Muhammad al-Husaini al-Zubaidi, *Ithāf al-Sādāh al-Muttaqīn Bi Sharh Ihyā' Ulūm al-Dīn*, al-Maṭba'ah al-Maimaniyyah, 1311 H, Juz 7, Hal. 515-516.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mendapatkan rukhsah.Tidak boleh jama' dan qasar shalat, tidak boleh berbuka puasa karenanya. Maka berlaku hukum sebaliknya.

3. Ada 15 Permasalahan fiqh yang hukumnya diputuskan dengan metode *manhaji,* yaitu :

1) Bagaimana hukumnya menaruh HP yang ada file – file positif seperti file lafaẓ Allah, al-Qur'an, lantunan ayat – ayat suci al-Qur'an dan lain-lain di dalam saku celana ?.

Hukum: Boleh, karena bukan *muṣhaf* (hanya pancaran sinar).

Ta'bir :

a). Hawāshī Tuhfah al-Minhāj Bi Sharh al-Minhāj, Juz 1, 149.

(كَلَوْحٍ) ينْبَغِي بِحَيْثُ يعَدُّ لَوْحًا لِلْقُرْآنِ عُرْفًا فلَوْ كَبرَ جِدًّا كَبَابٍ عَظِيمٍ فَالْوَجْهُ عَدَمُ حُرْمَةِ مَسِّ الْخَالِي مِنْهُ عَنْ الْقُرْآنِ سم عِبَارَةُ ع ش يؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مِمَّا يُكْتَبُ عَلَيْهِ عَادَةً حَتَّى لَوْ كُتِبَ عَلَى عَمُودٍ قرْآنًا لِلدِّرَاسَةِ لَمْ يَحْرُمْ مَسُّ غَيْرِ الْكِتَابَةِ خَطِيبٌ وَزِيَادِيٌّ وَيؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ نقَشَ الْقُرْآنَ عَلَى خَشَبَةٍ وَخَتَمَ بِهَا الْأَوْرَاقَ بِقَصْدِ الْقِرَاءَةِ وَصَارَ يقْرَأُ يَحْرُمُ مَسُّهَا[153]

b). Minhāj al-Tālibīn Wa 'Umdah al-Muftīn, Juz 1, 4.

وَيَحْرُمُ بِالْحَدَثِ الصَّلَاةُ وَالطَّوَافُ، وَحَمْلُ الْمُصْحَفِ، وَمَسُّ وَرَقِهِ، وَكَذَا جِلْدُهُ عَلَى الصَّحِيحِ، وَخَرِيطَةٌ،

[153] Ibnu Hajar al-Haitami, Abdul Hamīd al-Sharwāni dan Ibnu Qāsim al-'Ubādi, *Hawāshī Tuhfah al-Minhāj Bi Sharh al-Minhāj*, al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1938, Juz 1, Hal. 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَصُنْدُوقٌ فِيهِمَا مُصْحَفٌ، وَمَا كُتِبَ لِدَرْسِ قرْآنٍ كَلَوْحٍ فِي الْأَصَحِّ، وَالْأَصَحُّ حِلُّ حَمْلِهِ فِي أَمْتِعَةٍ، وَتفْسِيرٍ، وَدَنَانِيرَ لَا قلْبِ وَرَقِهِ بِعُودٍ. وَأَنَّ الصَّبِيَّ الْمُحْدِثَ لَا يُمْنَعُ. قلْتُ: الْأَصَحُّ حِلُّ قلْبِهِ بِعُودٍ وَبِهِ قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ...[154]

Berdasarkan ta'bir di atas, hukum membawa HP yang di dalamnya ada file al-Qur'an boleh, walaupun di saku celana, asalkan file al-Qur'an tidak kondisi terbuka. Karena kasus ini sama dengan ayat al-Qur'an yang ditulis di papan untuk dipakai pembelajaran, boleh disentuh dan dipegang selain yang ada tulisan ayat tersebut.

2) Bagaimana hukum perempuan haid mengaji dan mengajar ngaji di dalam masjid ?,

Hukum : Jika yang diajarkan adalah al-Quran *(mushaf)*, maka jelas keharaman hal ini. Jika yang diajarkan adalah ayat-ayat al-Quran yang telah dibukukan untuk metode TPQ, seperti ; Iqro', Qiraati, Dirosati, Tartili, An-Nahdhiyyah dan sejenisnya, maka bagi wanita yang sedang haidl diperbolehkan (tidak haram), dikarenakan penyusunan dari buku-buku tersebut untuk belajar/mengajar Al Quran.

Ta'bir :

[154] Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, *Minhāj al-Tālibīn Wa 'Umdah al-Muftīn,* (Dār al-Minhāj, tt), Juz 1, 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a). Tuhfah al-Habīb ‘ala Sharhi al-Khatīb, Juz 3, 274.

(وَ) الْخَامِسُ (دُخُولُ الْمَسْجِدِ) بِمُكْثٍ أَوْ تَرَدُّدٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا } قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ : أَيْ لَا تَقْرَبُوا مَوَاضِعَ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا عُبُورُ سَبِيلٍ بَلْ فِي مَوَاضِعِهَا وَهُوَ الْمَسْجِدُ ، وَنَظِيرُهُ قَوْله تَعَالَى { لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ } وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا لِجُنُبٍ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهَا .وَخَرَجَ بِالْمُكْثِ وَالتَرَدُّدِ الْعُبُورُ لِلْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ إذَا لَمْ تَخَفْ الْحَائِضُ تَلْوِيثَهُ ، وَخَرَجَ بِالْمَسْجِدِ الْمَدَارِسُ وَالرُّبُطُ وَمُصَلَّى الْعِيدِ وَنَحْوُ ذَلِكَ.[155]

Ta’bir kitab *Tuhfah* menjelaskan keharaman wanita haid dan orang junub masuk (berdiam diri dan mondar-mandir) di dalam masjid, kecuali berjalan melewati masjid tanpa berdiam diri, yang demikian hukumnya boleh. Berkaitan dengan mengaji dan mengajar ayat-ayat al-Qur’an yang sudah tertulis dalam berbagai metode TPQ, hukumnya tidak disebutkan dalam ta’bir di atas. Forum bahtsul masail dengan ijtihadnya menyatakan hukumnya boleh, karena prinsipnya guru tidak mengajarkan al-Qur’an, tapi mengajarkan metode TPQ.

3) Bolehkah seorang muslim menerima donor darah dari non muslim atau sebaliknya ?,

[155] Sulaiman Bin Muhammad Bin Umar al-Bujairimi al-Shafi’i, *Tuhfah al-Habīb ‘ala Sharhi al-Khatīb,* Dār al-Fikr, 2007. Juz 3, Hal. 274.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum : Boleh.

Ta'bir :

a). Fatāwī al-Alūkah Fī jawāz naqli al-Dam min Insān ilā insān ākhar wa inikhtalafa dīnuhumā. 1.

هل يجوز نقل الدم من إنسان إلى آخر وإن اختلف دينهما ؟
إذا مرض إنسان واشتد ضعفه ولا سبيل لتقويته أو علاجه إلا بنقل دم من غيره إليه، وتعين ذلك طريقاً لإنقاذه، وغلب على ظن أهل المعرفة انتفاعه بذلك - فلا بأس بعلاجه بنقل دم غيره إليه، ولو اختلف دينهما، فينقل الدم من كافر ولو حربياً لمسلم، وينقل من مسلم لكافر غير حربي، أما الحربي فنفسه غير معصومة فلا تجوز إعانته؛ بل ينبغي القضاء عليه إلا إذا أُسِر فلإمام المسلمين أو نائبه أن يفعل به ما يراه مصلحة للمسلمين: من قتل أو استرقاق، أو مَنٍّ عليه، أو قبول فداء منه أو من أوليائه، وإلا إذا أمّن فيجار حتى تبيّن له الحجة، فإن آمن فيها وإلا بلغ مأمنه[156]

Seorang muslim boleh menerima donor darah dari non muslim atau sebaliknya apabila: untuk menguatkan kondisi tubuh resipien yang melemah, untuk pengobatan dan penyembuhannya, dan untuk menyelamatkan jiwanya. Kecuali kafir harbi, jiwanya tidak maksum, maka tidak boleh menolong dan membantunya.

4) Bagaimana hukum memindah janin secara ghaib?,

[156] Sa'īd Bin Abdillah al-Hamīd, *Fatāwī al-Alūkah Fī jawāz naqli al-Dam min Insān ilā insān ākhar wa inikhtalafa dīnuhumā.* 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum : Memindahkan janin bagi calon ibu pada Rahim wanita lain baik melalui cara ghoib atau lainnya tidak dibenarkan oleh syari'at dan termasuk dosa besar. Al-Imam Ibnu Katsir dalam menafsiri QS al-Isrā' ayat 32, juz: 5: 72. Beliau juga mengutip sebuah hadits riwayat Ibnu Abi Dunya dari riwayat Haitsam bin Malik Al-Thoiy.

Ta'bir :

a). Tafsīr al-Qur'ān al-Aẓīm, Juz 5, 72.

{ وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا (32) }

.

يقول تعالى ناهيًا عباده عن الزنا وعن مقاربته، وهو مخالطة أسبابه ودواعيه { وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً } أي: ذنبًا عظيمًا وَسَاءَ سَبِيلا } أي: وبئس طريقًا ومسلكًا.-الى ان قال -وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا عمار بن نصر، حدثنا بَقِيَّةُ، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن الهيثم بن مالك الطائي، عن النبي ﷺ قال: "ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له.[157]

b). Rawḍah al-Tālibīn wa 'Umdah al-Sālikīn, Juz 9, 346.

وقال أبو جعفر الاسترابادي من أصحابنا لا حقيقة للسحر وإنما هو تخييل والصحيح أن له حقيقة كما قدمناه وبه قطع الجمهور وعليه عامة العلماء ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة .ويحرم فعل السحر بالإجماع ومن اعتقد إباحته فهو كافر وإذا قال

[157] Ismā'il Bin Umar Bin Kathīr al-Qurashiy al-Dimashqiy Abū al-Fidā' 'imād al-Dīn, *Tafsīr al-Qur'ān al-Aẓīm*, (Dār al-Tayyibah, 1999) Juz 5, 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إنسان تعلمت السحر أو أحسنه استوصف فإن وصفه بما هو كفر فهو كافر بأن يعتقد التقرب إلى الكواكب السبعة قال القفال ولو قال أفعل بالسحر بقدرتي دون قدرة الله تعالى فهو كافر وإن وصفه بما ليس بكفر فليس بكافر

وأما تعلم السحر وتعليمه ففيه ثلاثة أوجه الصحيح الذي قطع به الجمهور أنهما حرامان والثاني مكروهان والثالث مباحان وهذان إذا لم يحتج في تعليمه إلى تقديم اعتقاد هو كفر

قلت قال إمام الحرمين في كتابه الإرشاد لا يظهر السحر إلا على فاسق ولا تظهر الكرامة على فاسق وليس ذلك بمقتضى العقل ولكنه مستفاد من إجماع الأمة وذكر المتولي في كتابه الغنية نحو هذا والله أعلم.[158]

Ada 2 permasalahan dalam kajian soal keempat di atas, pertama pemindhan janin, kedua cara pemindahan janin dengan ghaib. Al-Imam Ibnu Katsir dalam menafsiri QS al-Isrā' ayat 32, juz: 5: 72 menjelaskan keharaman pemindahan janin, karena sama halnya dengan memindahkan sperma ke dalam rahim wanita yang tidak halal dan dianggap dosa besar. Sedangkan berkaitan dengan cara pemindahan janin tersebut menurut kitab *Rawḍat al-Ṭālibīn,* bahwa pemindahan seperti itu dianggap cara sihir, hukumnya haram.

[158] Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, *Rawḍah al-Tālibīn wa 'Umdah al-Sālikīn*, al-Maktab al-Islamiy, 1991, Juz 9, 346.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Bagaimana hukum penyembelihan dengan cara pembiusan (anestesi) ?

Hukum : Hal itu termasuk *ta'dhīb al-hayawān* yang diharamkan karena menyakitkan.

Ta'bir :

a). Awn al-Ma'būd, juz 11, 299.

وَقَدْ قِيلَ إِنَّ فِي شَرْعِ هَذَا النَّبِيّ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَتْ الْعُقُوبَة لِلْحَيوَانِ بِالتَّحْرِيقِ جَائِزَة فَلِذَلِكَ إِنَّمَا عَاتبَهُ اللَّه تعَالَى فِي إِحْرَاق الْكَثِير لَا فِي أَصْل الْإِحْرَاق ، أَلَا ترَى قوْله فهَلَّا نَمْلَة وَاحِدَة وَهُوَ بِخِلَافِ شَرْعِنَا، فَإِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَنْ تعْذِيب الْحَيوَان بِالنَّارِ وَقَالَ " لَا يعَذِّب بِالنَّارِ إِلَّا اللَّه تعَالَى " فَلَا يَجُوز إِحْرَاق الْحَيوَان بِالنَّارِ إِلَّا إِذَا أَحْرَقَ إِنْسَانًا فَمَاتَ بِالْإِحْرَاقِ فَلِوَارِثِهِ الِاقْتِصَاص بِالْإِحْرَاقِ لِلْجَانِي اِنتهَى كَلَام الْعَلَّامَة الدَّمِيرِيّ.[159]

b). al-Fiqhu al-Islami wa adillatuhu, juz 4, 333.

لا مانع من استخدام وسائل تضعف من مقاومة الحيوان، دون تعذيب له (1) ، وبناء عليه: يحل في الإسلام استعمال طرق التخدير المستحدثة غير المميتة قبل الذبح، مثل استعمال ثاني أكسيد الفحم، إذا ذبح الحيوان، وكان الغالب على الظن وجود الحياة الطبيعية فيه عند ذبحه، لأنه لا يترتب عليه إيلام الحيوان، ويحرم الصرع بمسدس، أو بمثقل كخشب وقدوم وعصا، أو تيار كهربائي ونحوها من كل مخدر

[159] Muhammad Ashraf Bin Amir Bin Ali Bin Haidar Abu Abd al-Rahman, *Awn al-Ma'būd Sharah Sunan Abī Daud wa hāshiyah Ibn al-Qayyim*, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut Lebanon, Juz 11, Hal.299.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

غير ضار، لما فيها من تعذيب الحيوان المنهي عنه شرعاً. ولكن استعمال ما ذكر لا يمنع من أكل الحيوان بعد ذبحه، إذا ظل حياً حياة مستقرة، وإن كان سيموت بعد مدة لو ترك بغير ذبح، ولو بعد استعمال هذه الوسائل التي يراد منها تسهيل عميلة الذبح.[160]

Pembiusan hewan sama halnya dengan menyiksa hewan dengan api yang dilarang oleh syara'. Karena tidak ada yang boleh menyiksa dengan api kecuali Allah swt. Adapun media dan sarana lain yang tidak menyakiti dan tidak ada unsur penyiksaan diperbolehkan dan tidak dilarang.

6) Jika berdampak pada bencana -banjir misalnya- yang sampai merenggut nyawa atau kerugian materi pada orang lain, siapa yang bertanggung jawab ?.

Hukum : Jika merugikan orang lain maka berdosa dan wajib *ḍaman* (ganti rugi). Tapi jika murni bencana alam, maka tidak wajib *ḍamān*.

Ta'bir :

a). Fatāwī al-Ramliy Fī Furū'i al-Fiqhi al-Shāfi'iy, Juz 3, 340

(سُئِلَ) عَمَّا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ عَمَلِ النَّشَادِرِ خَارِجَ الْبَلَدِ لِأَنَّ نَارَهُ يُوقَدُ بِالرَّوْثِ وَالْكِلْسِ فَإِذَا شَمَّتْ الْأَطْفَالُ دُخَانَهُ حَصَلَ لَهُمْ مِنْهُ ضَرَرٌ عَظِيمٌ فِي الْغَالِبِ وَرُبَّمَا مَاتَ بعْضُهُمْ مِنْهُ فعَمِلَ شَخْصٌ مَعْمَلَ نَشَادِرٍ فِي وَسَطِ الْبَلَدِ وَأَوْقَدَ عَلَيْهِ بِمَا ذُكِرَ فَشَمَّ دُخَانَهُ طِفْلٌ رَضِيعٌ

[160] Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa adillatuhu*, (Dār al-Fikr, Beirut) Juz 4, 333.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَمَرِضَ مَرَضًا شَدِيدًا فَهَلْ الْإِيقَادُ حَرَامٌ فَيَأْثَمُ بِهِ وَيعَزَّرُ عَلَيْهِ وَيَجِبُ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ وَيُمْنَعُ مِنْهُ وَيَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِهِ ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْإِيقَادُ الْمَذْكُورُ إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ تَضَرُّرُ الْغَيْرِ بِهِ فَيَأْثَمُ بِهِ وَلِلْحَاكِمِ تعْزِيرُهُ عَلَيْهِ وَيَجِبُ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ بِسَبَبِهِ وَمَنْعِهِ مِنْهُ وَيَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِسَبَبِهِ مُطْلَقًا فقَدْ قَالُوا وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُلَّاكِ يتَصَرَّفُ فِي مِلْكِهِ عَلَى الْعَادَةِ وَلَا ضَمَانَ بِهِ إذَا أَفْضَى إلَى تلَفٍ نعَمْ لَوْ تعَدَّى ضَمِنَ وَلَوْ أَوْقَدَ فِي مِلْكِهِ أَوْ فِي مَوْضِعٍ مُخْتَصٍّ بِهِ بِإِجَارَةٍ أَوْ عَارِيَّةٍ أَوْ فِي مَوَاتٍ وَطَارَ الشَّرَارُ إلَى بيْتِ غَيْرِهِ أَوْ كَرْمِهِ أَوْ زَرْعِهِ وَأَحْرَقَهُ فَلَا ضَمَانَ إنْ لَمْ يُجَاوِزْ الْعَادَةَ فِي قَدْرِ النَّارِ وَلَمْ يُوقِدْ فِي رِيحٍ عَاصِفَةٍ فَإِنْ جَاوَزَ أَوْ أَوْقَدَ فِي عَاصِفَةٍ ضَمِنَ[161]

b). Hāshiyah al-Bujairimī ‘alā Sharhi al-Manhaj, Juz 4, 178

فرع لا يضمن المتولد من نار أوقدها في ملكه أو على سطحه إلا إذا أوقدها وأكثر على خلاف العادة أو في ريح شديد لا أن اشتد الريح بعد الإيقاد فلا يضمن ولو أمكنه إطفاؤها فلم يفعل كما لو بنى جداره مستويا ثم مال وأمكنه إصلاحه ولم يفعل حتى وقع على شيء فأتلفه فلا ضمان وكالمالك مستحق المنفعة س ل قوله (وأذن الإمام) أو أقره بعد الفعل س ل قوله (لجوازه) أي الحفر وهو راجع لجميع المسائل ولما ورد على تعليله المسألة الأخيرة من صور المنطوق فإن الحفر فيها جائز مع وجود الضمان أتى بقوله مع عدم التغرير أي في الأخيرتين وأما تلك ففيها التغرير فلذا ضمن قوله (والمصالح العامة الخ) جواب عن سؤال مقدر تقديره كيف ينتفى الضمان مع حصول الضرر قوله (بحث الزركشي) معتمد. قوله (بمسجد) أي

[161] Syihabuddin Ahmad bin Hamzah al-Ramliy, *Fatāwī al-Ramliy Fī Furū’i al-Fiqhi al-Shāfi’iy*, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2017, Juz 3, 340

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بخلاف الطريق فلا ضمان وهو راجع للغاية التي ذكرها بقوله وإن حفرت لمصلحة نفسه بالنسبة للمسجد تأمل.[162]

Galian C yang bisa berakibat banjir dan bencana alam serta merugikan orang lain belum ditemukan secara jelas hukumnya. Dua ta'bir dari 2 kitab di atas berkaitan dengan pabrik-pabrik industri yang asap bahan bakarnya bisa dihirup orang lain yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Maka apabila hal ini dilakukan karena kecerobohan sehingga menimbulkan kerusakan maka yang bersangkutan wajib ganti rugi. Dalam kasus galian C ketika menimbulkan bahaya kepada orang lain dan kerusakan alam maka hukumnya haram, karena hukum islam didasarkan pada kemaslahatan umum.

7) Bagaimanakah hukum mengumandangkan adzan sebelum masuknya waktu jumat ?,

Hukum : Tidak boleh dan haram jika sudah tahu hukumnya.

Ta'bir :

a). Hāshiyatā al-Qolyūbi, Juz 2.

(وَشَرْطُهُ) أَيْ الْأَذَانِ (الْوَقْتُ) لِأَنَّهُ لِلْإِعْلَامِ بِهِ فَلَا يَصِحُّ قبلَهُ (إلَّا الصُّبْحَ فَمِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ) يَصِحُّ الْأَذَانُ

[162] Sulaiman Bin Muhammad Bin Umar al-Bujairimi al-Shafi'i, *Hāshiyah al-Bujairimī 'alā Sharhi al-Manhaj*, (al-Maktabah al-Islamiyah, Turki, 1950), Juz 4, 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَهَا كَمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ – الى ان قال -قوله : (وشرطه الوقت) أي ولو في الواقع كما علم من عدم احتياجه إلى نية كما مر . ويحرم قبله مع العلم.[163]

Secara umum syarat bolehnya kumandang adzan itu telah masuknya waktu shalat. Karena tujuan adzan adalah pemberitahuan datangnya waktu shalat, kecuali shalat subuh (boleh adzan dipertengahan malam). Maka haram adzan sebelum datangnya waktu shalat, termasuk adzan shalat jum'ah.

8) Bagaimana hukum shalat qobliyah dengan mengikuti adzan tersebut ?,

Hukum : Shalat sunnahnya bukan rawatib, tapi menjadi shalat sunnah mutlak.

Ta'bir :

a). Nihāyah al-Zain Fī Irshād al-Mubtadi'īn, Juz 1, 101.

ويدخل وقت الرواتب التي قبل الفرض بدخول وقت الفرض والرواتب التي بعد الفرض يدخل وقتها بفعل الفرض.[164]

b). al-Fawā'id al-Janniyyah, juz 1.

لا عبرة بالظن البين خطؤه – الى ان قال- ومن فروعها ما لو صلى بالاجتهاد) اى فى الوقت او القبلة

[163] Qalyubi dan Amirah, *Hāshiyatā al-Qolyūbi wa 'Amīrah alā Sharh al-Mahallī alā Minhāj al-Ṭālibīn*, Mustafa al-Babi al-Halabi, 1955, Juz 2.

[164] Muhammad Bin Umar al-Nawawi al-Jawi, *Nihāyah al-Zain Fī Irshād al-Mubtadi'īn*, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002, Juz 1, Hal.101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

او الماء (ثم تبين الخطاء) اى فى الاجتهاد كأن ظن دخول الوقت فصلى ثم بان انه لم يدخل فان صلاته لا تقع عن الفرض. نعم ان كانت عليه فائتة من جنسها وقعت عنها والا وقعت له نفلا مطلقا.[165]

Shalat sunnah rawatib itu ada 2 : *qabliyyah* dan *ba'diyyah.* Qabliyyah dapat dan sah dilaksanakan setelah datangnya waktu shalat dan ba'diyah dapat dan sah dilaksanakan setelah melaksanakan shalat fardu. Apabila rawatib dilaksanakan tidak sesuai waktu di atas, maka tidak dianggap rawatib, akan tetapi shalat sunnah mutlak.

9) Bagaimana hukum melaksakan umroh bagi wanita yang sedang iddah seperti kasus di atas ?

Hukum : Sah, tapi berdosa.

Ta'bir :

a). Ithāf al-Sādāh al-Muttaqīn Bi Sharh Ihyā' Ulūm al-Dīn, Juz 4, 293.

وقال اصحابنا شرط في حج المرأة سواء كانت شابة او عجوزا شيئان – الى ان قال – والثاني عدم العدة من طلاق بائن او رجعي او وفاة حتى لو كانت معتدة عند خروج اهل بلدها لا يجب عليها الحج وان حجت وهي في العدة جاز حجها وكان عاصية اه[166]

[165] Muhammad Yasin Bin Isa al-Fadaniy al-Makkiya, *al-Fawā'id al-Janniyyah Hāshiyah al-Mawāhib al-Sanniyyah Sharah al-Farāid al-Bahiyyah Fī Naḍmi al-Qawāid al-Fiqhiyyah,* (Dār al-Bashair al-islamiyyah, tt), Juz 1.

[166] Muhammad Bin Muhammad al-Husaini al-Zubaidi, *Ithāf al-Sādāh al-Muttaqīn Bi Sharh Ihyā' Ulūm al-Dīn*, al-Maṭba'ah al-Maimaniyyah, 1311 H, Juz 4, Hal. 293.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan keterangan kitab Ithāf di atas, wanita yang dalam masa iddah tidak wajib haji. Apabila dia haji, padahal masih dalam iddah, maka boleh dan sah hajinya tapi dia berdosa karena dianggap maksiat.

b). Hāshiyat al-Jamal ‘alā Sharh al-Manhaj, juz 4, 465.

(قوله فوجبت في طريق إلخ) سكت عما إذا وجبت قبل الخروج وفي الروض لم تسافر قال في شرحه وقيل تتخير لأن عليها ضررا في إبطال سفرها).[167]

Menurut keterangan kitab Hāshiyat al-Jamāl wanita dalam masa iddah tidak boleh bepergian termasuk untuk haji. Pendapat yang lain, wanita tersebut disuruh memilih antara berat atau tidak pergi haji kalau dia merasakan bahaya yang menimpanya jika sampai mengurungkan keberangkatannya.

c). Tarshīh al-Mustafīdīn Hāshiyah Fath al-Mu’īn, 174.

(قوله مع امرأة ثقة) ليس بقيد كما في المغني وغيره فيجوز لها الخروج لفرض الاسلام ككل واجب ولو وحدها اذا امنت قال في بشرى الكريم ومن الواجب خروج المرأة الى محل حراثتها لأن طلب الحلال واجب ولو شابة [168]ـ

[167] Sulaiman Bin Umar Bin Mansur al-“ajili al-Ma’ruf bi al-Jamal, *Hāshiyah al-Jamal ‘alā Sharh al-Manhaj*, Dār a;-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut Lebanon, Juz 4, 465.

[168] Alawi Bin Ahmad Bin Abdurrahman al-Saqqaf, *Tarshīh al-Mustafīdīn Hāshiyah Fath al-Mu’īn,* (Dār Ihyā’ al-Kutub al-Arabiyyah, Miṣr, tt) 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ta'bir kitab Tarshīh ini beda dengan *Hāshiyat al-Jamāl* dan *Ithāf* di atas, menurutnya wanita yang dalam masa iddah boleh pergi untuk ibadah haji atau kewajiban-kewajiban Islam lainnya (termasuk keluarnya wanita ke tempat kerjanya) demi mencari rizqi yang halal, walaupun tanpa ditemani wanita lain yang dapat dipercaya, asalkan aman dari fitnah.

10) Bagaimana hukum melaksanakan ibadah umroh bagi wanita tanpa mahrom ?.

Hukum : *Tafṣil,* Jika umroh wajib, boleh umroh bersama wanita-wanita yang terpercaya. tidak disyaratkan mahrom. Jika umroh sunnah, maka harus bersama mahrom.

Ta'bir :

a). al-Majmū' fi Sharhi al-Muhadhdhab, Juz. 8, 340.

إذا أرادت الحج قال الماوردي والمحاملي وغيرهما من الأصحاب إن كان الحج فرضا جاز لها الخروج مع زوج أو محرم أو نسوة ثقات ويجوز مع امراة واحدة ان كان الطريق أمنا.[169]

b). al-Majmū' fi Sharhi al-Muhadhdhab, Juz. 8, 340.

(وأما) حج التطوع وسفر الزيارة والتجارة وكل سفر ليس بواجب فلا يجوز على المذهب الصحيح المنصوص إلا مع زوج أو محرم وقيل يجوز مع نسوة أو امرأة ثقة كالحج الواجب.[170]

---

[169] Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, *al-Majmū' fi Sharhi al-Muhadhdhab*, Maktabah al-Irshād, 2008, Juz. 8, Hal. 340.
[170] Ibid, Juz. 8, Hal. 340.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana haji, umrah juga demikian. Artinya boleh berangkat umroh wajib, harus disertai suami, atau mahram, atau beberapa wanita yang dapat dipercaya. seorang wanita wanita yang dapat dipercaya.

11) Adakah pendapat yang menyatakan tidak membatalkan wudlu' bersentuhan antara laki-laki dan perempuan ketika thowaf dalam maẓhab Syafii?.

Hukum : Ada, dari madzhab Syafii, yakni tidak membatalkan wudlu' khusus bagi yang tersentuh/disentuh. Tapi yang menyentuh batal wudlunya.

Ta'bir :

a). al-Iḍāh Fī Manāsik al-Hajj wa al-Umrah, juz 1, 114.

ومما تعم به البلوى في الطواف ملامسة النساء للزحمة فينبغي للرجل ان لايزاحمهن ولها ان لا تزامح الرجل خوفا من انتقاض الطهارة فان لمس احدهما بشرة الاخرى ببشرته انتقض طهور اللامس . وفي الملموس قولان للشافعي رحمه الله تعالى اصحهما عند اكثر اصحابه انه ينتقض وضوؤه وهو نصه في اكثر كتبة والثاني لاينتقض واختاره جماعة قليلة من اصحابه والمختار الاول.[171]

b). Sharh al-Bahjah al-Wardiyyah, Juz 2, 44

[171] Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, *al-Iḍāh Fī Manāsik al-Hajj wa al-Umrah*, Dār al- Bashā'ir al-Islāmiyyah, 1994, Juz 1, Hal. 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(قوله : وسواء إلخ) ولنا وجه أنه لا ينتقض وضوء الملموس ، ووجه أن لمس العضو الأشل أو الزائد لا ينقض ، ووجه لابن سريج أنه يعتبر الشهوة في الانتقاض قال الحناطي وحكي هذا عن نص الشافعي ، ووجه حكاه الفوراني وإمام الحرمين وآخرون أن اللمس لا ينقض إلا إذا وقع قصدا ، وأما تخصيص النقض بأعضاء الوضوء فليس وجها لنا بل مذهب الأوزاعي وحكي عنه أنه لا ينقض إلا اللمس باليد كذا في المجموع (قوله : وسواء في ذلك اللامس والملموس) ؛ لأنه نقض طهر اللامس فنقض طهر الملموس كالجماع .ا هـ.[172]

Berdsarkan ta'bir dua kitab di atas, Imam Syafi'I mempunyai dua qawl dalam maslah wudlunya orang yang tersentuh lawan jenis. Pertama: rusak dan batal wudlunya dan ini pendapat yang dipilih. Dan kedua tidak batal wudlunya karena dia tidak sengaja (tersentuh).

12) Apa yang harus dilakukan wanita yang sedang haid, ketika sampai berakhirnya masa haji, dia belum suci dan belum sempat melakukan thowaf rukun ?.

Hukum : Menurut madzhab Syafi'i, wanita tersebut bisa *tahallul* ditempat dimana ia kesulitan untuk kembali ke tanah Haram/Makkah dalam perjalanan pulang dengan konsekwensi/kewajiban melakukan thowaf rukun di lain waktu.

[172] Shaikhul Islam Zakariya Bin Muhammad al-Ansari, *Sharh al-Bahjah al-Wardiyyah, Hāshiyah Abdurrahman al-Sharbīniy wa Hāshiyah Ibn Qāsim al-Ubādiy*, (Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1997) Juz 2, 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ta'bir :

a). Hāshiyah al-Sharqāwī 'alā Tuhfah al-Ṭullāb, Juz 1, 470.

اما الحائض اذا حاضت قبل طواف الافاضة ولم يمكنها الافاضة حتى تطهر فلها ان ترحل فاذا وصلت الى محل يعتذر عليها الرجوع منه الى مكة جاز لها حينئذ ان تتحلل بذبح وازالة شعر مع نية التحلل معهما كالمحصر وتحل حينئذ من احرامها ويبقى الطواف في ذمتها الى ان تعود.[173]

Kandungan ta'bir kitab Hāshiyah al-Sharqāwi tersebut, sudah sesuai dengan uraian jawaban di atas.

13) Bagaimana hukum menyerahkan uang untuk urusan *Dam* kepada KBIH di tanah air, padahal belum pasti nantinya wajib membayar dam atau tidak ?.

Hukum : Boleh dan termasuk aqad *wakalah* dengan segala konsekuensi syarat-syaratnya.

Ta'bir :

a). Hāshiyah I'ānatu al-Tālibīn, Juz 3, 100.

ولا فيما لا يملكه الموكل، كالتوكيل في بيع ما سيملكه، نعم، يصح فيما ذكر تبعا: كوكلتك في بيع ما أملكه، وكل ما سأملكه.[174]

Kitab *Hāshiyah I'ānatu al-Tālibīn* tidak *ṣarīh* tentang pembayaran dam di tanah air, akan tetapi berkaitan dengan bolehnya mewakilkan sesuatu yang sudah menjadi

[173] Abdullah Bin Hijazi Bin Ibrahim al-Khalwati, *Hāshiyah al-Sharqāwī 'alā Tuhfah al-Ṭullāb*, Dār al-Fikr, Juz 1, Hal. 470.
[174] Abu Bakar Uthman Bin Shata al-Bakri, *Hāshiyah I'ānatu al-Tālibīn,* Dār ihyā' al-kutub al-Arabiyyah, Juz 3, 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

miliknya kepada orang lain. Ta'bir di atas berseifat umum.

b). Tuhfah al-Habīb 'ala Sharhi al-Khatīb, Juz 3, 459.

قوله : (إلا في نسك) ويندرج فيه توابعه كركعتي الطواف ، شرح المنهج . وحاصله أن العبادة على ثلاثة أقسام : إما أن تكون بدنية محضة فيمتنع التوكيل فيها إلا في ركعتي الطواف تبعاً للنسك فيجوز فلو أفردهما بالتوكيل لم يصح ، وإما أن تكون مالية محضة فيجوز التوكيل فيها مطلقاً ، وإما أن تكون مترددة بينهما كالحج بشرط أن تكون عن ميت أو معضوب . وهذه الأقسام الثلاثة مأخوذة من كلام الشيخ الزيادي ، اه م د على التحرير.[175]

Jika menyerahkan *dam* di tanah air termasuk *ibādah māliyyah,* maka menurut kitab *Tuhfah* di atas: boleh mewakilkan pembayaran *dam* kepada orang lain (KBIH). Jika pembayaran *dam* di tanah air itu dikategorikan ibadah *badaniyyah* dan *māliyyah* seperti haji, maka tidak boleh mewakilkan kepada orang lain kecuali orang tersebut sudah meninggal *atau ma'ḍūb.*

c). 'Umdat al-Sālik wa 'Uddat al-Nāsik, 166.

يُشترطُ في الموكِّل والوكيل أن يكونا جائزي التصرُّفِ فيما يوكَّلُ فيه، وتصحُّ وكالةُ الصبي في الإذْنِ في دخولِ الدارِ وحَمْلِ الهديةِ، والعبدِ في قبولِ النكاحِ.ويجوزُ التوكيلُ في العقودِ والفسوخِ والطلاقِ

[175] Sulaiman Bin Muhammad Bin Umar al-Bujairimi al-Shafi'i, *Tuhfah al-Habīb 'ala Sharhi al-Khatīb,* Dār al-Fikr, 2007. Juz 3, 459.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

والعِتْقِ، وإثباتِ الحقوقِ واستيفائها، وفي تمليكِ المباحاتِ كالصيدِ والحشيشِ والمياهِ.وأما حقوقُ اللهِ تعالى: فإن كانتْ عبادةً لمْ تَجُزْ إلا في تَفْرِقةِ الزكاةِ والحجِّ وذبحِ الأضحيةِ، وإنْ كانَ حدّاً جازَ في استيفائهِ دونَ إثباتهِ.وشَرطُها: الإيجابُ باللفظِ من غيرِ تَعليقٍ كوكَّلتُكَ أو بعْ هذا الثوبَ.والقبولُ باللفظِ أو الفعلِ وهو امتثالُ ما وُكِّلَ بهِ، ولا يُشترطُ الفوْرُ في القبول، فإنْ نجَّزها وعلَّقَ التصرُّفَ على شرطٍ جازَ، كقولهِ: وكَّلتُكَ ولا تبعْ إلى شهر.وليس للوكيلِ أنْ يوكِّلَ إلا بإذنه.[176]

Keterangan dalam kitab *'Umdah* di atas lebih jelas, bahwasanya hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak Allah, jika itu berupa ibadah maka tidak boleh diwakilkan kepada orang lain, kecuali dalam urusan penyembelihan hewan qurban, pembagian harta zakat, dan ibadah haji.

14) Adakah pendapat yang membolehkan dam dibayar dengan uang, dan mengikuti pendapat siapa?.

Hukum : Tidak ada dalam keempat madzhab.

Ta'bir :

a). al-Iqnā' fī Halli Alfāẓi Abī Shujā', juz 1, 271.

القسم الأول يشتمل على دم التمتع والقران والفوات والمنوط بترك مأمور به وهو ترك الإحرام من الميقات والرمي والمبيت بمزدلفة ومنى وطواف الوداع فهذه الدماء دماء ترتيب بمعنى أنه يلزمه الذبح ولا يجزئه العدول إلى غيره إلا إذا عجز عنه وتقدير

[176] Shihab al-Din Abi al-Abbas Ahmad Ibn Lu'lu' al-Qahiriy al-Shafi'iy, *'Umdat al-Sālik wa 'Uddat al-Nāsik*, (Dar al-Minhāj, tt) 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بمعنى أن الشرع قدر ما يعدل إليه بما لا يزيد ولا ينقص.[177]

Menurut ta'bir kitab *Iqna'* di atas, bahwasanya *dam tamattu'* atau *qirān* tidak boleh dibayarkan dengan uang, akan harus dengan menyembelih hewan *dam.* Maka kasus di tanah air (pembayaran dam di tanah air), harus dimasukkan dalam akad wakalah, yaitu jama'ah haji mewakilkan kepada KBIH untuk membeli dan menyembelih hewan atas nama bayar *dam.*

b). Hāshiyah Ibn Hajar al-Haitamiy, 540.

واما مكانه فيختص بالحرم، فيجوز ذبحه بالحرم، وتفرقة لحمه على المساكين الموجودين في الحرم سواء المستوطنون والغرباء الطارءون، ولكن المستوطنون افضل.[178]

Dalam Hashiyah Ibnu Hajar, ta'birnya lebih jelas. Artinya tempat, penyembelihan dan pembagian dagingnya dikhususkan untuk orang-orang miskin yang ada di tanah harap, baik orang-orang yang bertinggal di tanah haram, orang-orang asing ataupun orang yang baru datang pada musim haji. Tetapi yang lebih utama diberikan kepada orang yang tinggal di tanah haram.

---

[177] Muhammad Bin Muhammad al-Khatib al-Sharbini, *al-Iqnā' fī Halli Alfāẓi Abī Shujā'*, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004, Juz 1, 271.

[178] Ibn Hajar al-Haitamiy, *Hāshiyah Ibn Hajar al-Haitamiy 'Alā Sharh al-Iḍāh Fī Manāsik al-Hajj li al-Nawawi*, Maktabah al-Salafiyyah, al-Madinah al-munawwarah,tt, 540.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

15) Apakah sudah cukup membayar *dam* dengan pasrah bongko'an kepada KBIH seperti kasus di atas ?.

Hukum : Tidak cukup karena ada beberapa konsekwensi yang harus di penuhi termasuk niat.

Ta'bir :

a). Asnā al-Maṭālib fī Sharhi Raudlatu al-Tālib, Juz 4, 491.

(قوله وله تفويض النية إلى وكيله إلخ) كأن قال له زك هذا المال أو أد زكاتي أو فطرتي ولو دفع ثوبا إلى وكيله ليبيعه ويصرفه في زكاته ونوى عند دفع الثوب إليه لم يجز وإن نوى بعد حصول الثمن في يد الوكيل جاز لأنا وإن جوزنا تقديم النية فإنما نجوزها في وقت يقبل ذلك المال أن يكون زكاة قال القفال وعندي أنه يجوز يعني في الحالين لأنه ليس من شرط وجود النية في مال معين ويعلم ما يصرفه في الزكاة ألا ترى أنه لو وجب عليه خمسة دراهم زكاة فأمر وكيله بأدائها ونوى عند أمره بها فإنه يجوز وإن كان الوكيل ربما يحصلها ببيع متاع أو استقراض لدراهم وعلى هذا لو لزمه خمسة زكاة فقال لآخر أخرجها إلى الفقراء جاز سواء كان له عليه دين أو لم يكن ولو قال أقرضني خمسة وأدها عني زكاة جاز انتهى وقال الأذرعي وكلام كثيرين أو الأكثرين ينازع في أكثر ما ذكره.[179]

Menurut keterangan kitab *Asnā al-Maṭālib* di atas, bahwasanya boleh pasrah niat kepada wakil untuk pembayaran zakat mal atau fitrah. Pembayaran dam juga harus pasrah niat kepada wakil untuk membelikan,

[179] Zakariya Bin Muhammad Bin Zakariya al-Ansari, *Asnā al-Maṭālib fī Sharhi Raudlatu al-Tālib, Dār al-Kitāb al-Islāmi*, 2010, Juz 4, Hal.491.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyembelih, dan membagikan daging dam ketika membayarkan di tanah air kepada wakil (KBIH).

4. Ada 8 Permasalahan fiqh yang hukumnya diputuskan dengan metode gabungan *qawli ilhāqi*, yaitu:

1) Bagaimana hukum daging Aqiqah dan Qurban yang digunakan untuk suguhan hajatan yang dilaksanakan?.

Hukum : Aqiqah boleh digunakan untuk hajatan, sedangkan Qurban tidak boleh digunakan hajatan oleh orang yang berkurban.

Ta'bir :

a). Hāshiyah al-Jamal 'alā Sharh al-Manhaj, juz 4, 339.

(قوله وسن طبخها) أي، ولو منذورة وقول الزركشي كالأذرعي يجب التصدق بلحم المنذورة نيئا كالأضحية مردود إلا رجلها فتعطى للقابلة نيئة اهـ شوبري وقوله فتعطى نيئة للقابلة أي على سبيل الندب وإلا لو أعطيت لها مطبوخة لكفى لما تقدم من أنه مخير بين التصدق بالمطبوخ وبالنيء وبالبعض والبعض اهـ وإرسالها مع مرقها على وجه التصدق للفقراء أكمل من دعائهم إليها.[180]

b). Tuhfah al-Habīb 'ala Sharhi al-Khatīb, Juz 4, Hal. 339.

(ويطعم الفقراء والمساكين) من المسلمين، على سبيل التصدق من أضحية التطوع بعضها وجوبا ولو جزءا يسيرا من لحمها بحيث ينطلق عليه الاسم ويكفي

[180] Sulaiman Bin Umar Bin Mansur al-"ajili al-Ma'ruf bi al-Jamal, *Hāshiyah al-Jamal 'alā Sharh al-Manhaj*, Dār a;-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut Lebanon, Juz 4, 339.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الصرف لواحد من الفقراء أو المساكين. وإن كانت عبارة المصنف تقتضي خلاف ذلك بخلاف سهم الصنف الواحد من الزكاة لا يجوز صرفه لأقل من ثلاثة لأنه يجوز هنا الاقتصار على جزء يسير لا يمكن صرفه لأكثر من واحد ويشترط في اللحم أن يكون نيئا ليتصرف فيه من يأخذه بما شاء من بيع وغيره. كما في الكفارات فلا يكفي جعله طعاما ودعاء الفقراء إليه لأن حقهم في تملكه ولا تمليكهم له مطبوخا ولا تمليكهم غير اللحم من جلد وكرش وطحال ونحوها ولا الهدية عن التصدق ولا القدر التافه من اللحم كما اقتضاه كلام الماوردي ولا كونه قديدا كما قاله البلقيني. ولو تصدق بقدر الواجب وأكل ولدها كله جاز.[181]

Dalam keterangan kedua kitab di atas dijelaskan adanya persamaan antara hewan qurban dan hewan aqiqah. Bedanya di antara keduanya adalah: kalau hewan qurban lebih baik dibagikan dalam keadaan mentah (belum dimasak), kalau hewan aqiqah disunnahkan untuk dibagikan dagingnya dalam keadaan sudah dimasak (siap saji).

2) Bagaimana hukum bersedekah dengan cara disebar/dilempar ?.

Hukum : Boleh dengan catatan tidak ada *sum'ah* dan unsur *īdzā'* bagi yang lain.

Ta'bir :

[181] Sulaiman Bin Muhammad Bin Umar al-Bujairimi al-Shafi'i, *Tuhfah al-Habīb 'ala Sharhi al-Khatīb,* Dār al-Fikr, 2007. Juz 4, Hal. 339.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a). Hāshiyah I'ānatu al-Tālibīn, Juz 3, Hal 364

قال معروف الكرخى قدس الله سره : من هيأ لأجل مولد الرسول طعاما وجمع إخوانا وأوقد سراجا ولبس جديدا وتعطر وتجمل تعظيما لمولده حشره الله تعالى يوم القيامة مع الفرقة الأولى من النبيين وكان فى أعلى عليين . ومن قرأ مولد الرسول على دراهم مسكوكة فضة كانت او ذهبا وخلط تلك الدراهم مع دراهم أخر وقعت فيه البركة ولا يفتقر صاحبها ولا تفرغ يده ببركة مولد الرسول . وقال الامام اليافعى اليمنى : من جمع لمولد الرسول إخوانا وهيأ طعاما وأخلى مكانا وعمل إحسانا وصار سببا لقراءة مولد الرسول بعثه الله يوم القيامة مع الصديقين والشهداء والصالحين ويكون فى جنات النعيم.[182]

Kitab *Hashiyah I'ānat al-Ṭālibīn* secara spesifik tidak membahas terkait hukum permasalahan di atas, namun membahas tentang fadilah (keutamaan) dan keberkahan harta dan apapun yang kita siapkan untuk maulid Rasul.

b). Asnā al-Maṭālib fī Sharhi Raudlatu al-Tālib, Juz 3, 229.

(فصل) يجوز نشر السكر و الدنانير و نحوهما كلوز وجوز وتمر وزبيب ودراهم فى املاك او ختان وكذا سائر الولائم فى ما يظهر عملا للعرف وتركه أولى لانه سبب الى ما يشبه النهي ويجوز التفاطه لذلك وتركه اولى لانه يشيه النهي الا اذا ما لم يئثر االناثر بغضهم على بعض بان عرف منه الملتقط منه ذلك.[183]

---

[182] Abu Bakar Uthman Bin Shata al-Bakri, *Hāshiyah I'ānatu al-Tālibīn,* Dār ihyā' al-kutub al-Arabiyyah, Juz 3, Hal 364

[183] Zakariya Bin Muhammad Bin Zakariya al-Ansari, *Asnā al-Maṭālib fī Sharhi Raudlatu al-Tālib, Dār al-Kitāb al-Islāmi*, 2010, Juz 3, Hal.229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c). Asnā al-Maṭālib fī Sharhi Raudlatu al-Tālib, Juz 5, 250.

(وَالْأَفْضَلُ أَنْ تَكُونَ) الصَّدَقَةُ (سِرًّا) لِأَيَّةٍ {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ} وَلِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي خَبَرِ السَّبْعَةِ الَّذِي يُظِلُّهُمْ اللَّهُ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَدْرِي شِمَالُهُ مَا أَنْفَقَتْ يَمِينُهُ } نَعَمْ إِنْ أَظْهَرَهَا وَلَمْ يَقْصِدْ رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً بَلْ لِيَقْتَدِيَ بِهِ وَهُوَ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَأَذَّى الْآخِذُ بِهِ فَإِنْ تَأَذَّى بِهِ فَالْإِسْرَارُ أَفْضَلُ قَالَهُ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ.[184]

Kitab *Asnā al-Matālib* di atas menjelaskan, bahwasanya sadaqah itu lebih baik dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi. Apabila seseorang menyampaikan sadaqah dengan terang-terangan tidak apa-apa, asalkan tidak bermaksud riya dan sum'ah, serta tidak menyakiti orang lain. Misalnya: menyebar uang di dalam acara khitan atau walimah-walimah lainnya, hukumnya *jawāz* (boleh).

3) Bagaimana hukum menyebar uang tersebut di atas ketika pembacaan ṣalawat Nabi, bila dilakukan di dalam masjid ?.

Hukum : Boleh dengan catatan sebagaimana di atas dan tidak merusak kehormatan masjid.

Ta'bir :

a). Hāshiyah I'ānatu al-Tālibīn, Juz 3, 414.

[184] Zakariya Bin Muhammad Bin Zakariya al-Ansari, *Asnā al-Maṭālib fī Sharhi Raudlatu al-Tālib, Dār al-Kitāb al-Islāmi*, 2010, Juz 5, 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قال معروف الكرخي قدس الله سره: من هيأ لاجل قراءة مولد الرسول طعاما، وجمع إخوانا، وأوقد سراجا، ولبس جديدا، وتعطر وتجمل تعظيما لمولده حشره الله تعالى يوم القيامة مع الفرقة الاولى من النبيين، وكان في أعلى عليين.ومن قرأ مولد الرسول (ص) على دراهم مسكوكة فضة كانت أو ذهبا وخلط تلك الدراهم مع دراهم أخر وقعت فيها البركة ولا يفتقر صاحبها ولا تفرغ يده ببركة مولد الرسول (ص) وقال الامام اليافعي اليمنى: من جمع لمولد النبي (ص) إخوانا وهيأ طعاما وأخلى مكانا وعمل إحسانا وصار سببا لقراءة مولد الرسول بعثه الله يوم القيامة مع الصديقين والشهداء والصالحين ويكون في جنات النعيم.[185]

b). Hāshiyah I'ānatu al-Tālibīn, Juz 3, 415.

وقد قال عليه السلام: من أحبني كان معي في الجنة قال سلطان العارفين جلال الدين السيوطي في كتابه الوسائل في شرح الشمائل: ما من بيت أو مسجد أو محلة قرئ فيه مولد النبي (ص) هلا حفت الملائكة بأهل ذلك المكان وعمهم الله بالرحمة والمطوقون بالنور - يعني جبريل وميكائل وإسرافيل وقربائيل وعينائيل والصافون والحافون والكروبيون - فإنهم يصلون على ما كان سببا لقراءة مولد النبي (ص) قال: وما من مسلم قرئ في بيته مولد النبي (ص) إلا رفع الله تعالى القحط والوباء والحرق.والآفات والبليات والنكبات والبغض والحسد وعين السوء واللصوص عن أهل ذلك البيت، فإذا مات هون الله تعالى عليه

[185] Abu Bakar Uthman Bin Shata al-Bakri, *Hāshiyah I'ānatu al-Tālibīn,* Dār ihyā' al-kutub al-Arabiyyah, Juz 3 414.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

جواب منكر ونكير، وكان في مقعد صدق عند مليك مقتدر.[186]

Keterangan kitab *I'ānah* di atas menjelaskan tentang *fadīlah* (keutamaan) rumah atau masjid yang di dalamnya dibacakan shalawat Nabi, dengan menukil maqalah Imam *Jalāl al-Dīn al-Suyūṭi* yang artinya: Tidak satupun rumah, masjid atau tempat lainnya kecuali malaikat mengepung tempat itu dengan rahmah.

4) Bagaimana hukum meninggalkan jum'atan bagi karyawan yang aturan kerjanya sangat ketat dan disiplin sehingga mereka rela tidak jum'atan karena khawatir kehilangan pekerjaan mereka ?.

Hukum : Meninggalkan jum'atan bagi karyawan tersebut hukumnya boleh dengan syarat pekerjaan tersebut sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari (sandang, pangan & papan).

Ta'bir :

a). Hawāshī Tuhfah al-Minhāj bi Sharh al-Minhāj, Juz 2, 272.

ويظهر فى تحصيل تملك مال انه عذر ان احتاج اليه حالا والا فلا (قوله : ان احتاج اليه حالا) هل مثله ما لو احتاج اليه مألا لكنه يعلم انه لو لم يحصله الان لا يمكنه تحصيله عند الاحتياج اليه محل تأمل. بصرى.

[186] Ibid, Juz 3, 415

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وقد يقال هذا اولى بأن يعذر به مما يأتى من الاستيحاش بالتخلف عن الرفقة.[187]

b). Hawāshī Tuhfah al-Minhāj bi Sharh al-Minhāj, Juz 3, 278.

وأما ما جرت به العادة من إخضار الخبز لمن يخبزه ويعطى الاجرة فليس اشتغاله بالخبز عذرا بل يجب عليه خضور الجمعة وان ادى الى تلفه ما لم يكرهه صاحب الخبز على عدم الخضور فلا يعصى وينبغى انه لو تعدى ووضع يده عليه وكان لو تركه وذهب الى الجمعة تلف كان ذلك عذرا وان اثم بأصل اشتغاله به على وجه يؤدى الى تلفه لو ذهب الى الجمعة ومثله فى ذلك بقية العملة كالتجار والبناء ونحوهما وظاهر اطلاقه م ر كحجر انه حيث لم يفسد عمله يجب عليه الخضور وان زاد منه على زمن صلاته بمحل عمله.[188]

Kedua ta'bir di atas menjelaskan, bahwasanya usaha seseorang untuk menghasilkan uang (harta) yang dia butuhkan sesaat atau untuk keberlangsungan hidup merupakan uzur bagi orang tesebut, termasuk mendatangi shalat jum'ah. Karena urusan sandang, pangan dan papan merupakan kebutuhan yang bersifat *hajiyat* yang mendekati darurat.

5) Bagaimana hukum jasa layanan loundrey, termasuk akad apa jasa loundrey?,

Hukum : Jasa layanan loundry hukumnya sah, dan termasuk akad *ijārah ṣahīhah*.

---

[187] Ibnu Hajar al-Haitami, Abdul Hamīd al-Sharwāni dan Ibnu Qāsim al-'Ubādi, *Hawāshī Tuhfah al-Minhāj Bi Sharh al-Minhāj*, al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1938, Juz 2, Hal. 272.
[188] Ibid, Juz 3, 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ta'bir :

a). Asnā al-Maṭālib fī Sharhi Raudlatu al-Tālib, Juz 12, 75.

(والإجارة تكون) واردة (على العين كاستئجار دابة معينة) لركوب أو حمل (أو شخص معين لخياطة ثوب) أو نحوها (وتكون) واردة (في الذمة كاستئجار دابة موصوفة) لركوب أو حمل (أو إلزام ذمته خياطة كذا) وقوله (ونحوه).[189]

b). Hāshiyah I'ānatu al-Tālibīn, Juz 3, 109.

ويشترط في الأجرة والمنفعة ما سيذكره من كون الأجرة معلومة ومن كون المنفعة متقومة معلومة ويشترط في الصيغة جميع ما مر في صيغة البيع إلا عدم التأقيت وقد استوفاها الشارح في التعريف فقوله تمليك منفعة أي بعقد يستفاد منه الصيغة ومعلوم أنها تستلزم العاقد وقوله منفعة مع قوله بعوض هو المعقود عليه.[190]

Ta'bir dari kitab *Asnā al-Maṭālib* dan *I'ānah* tersebut menjelaskan hukum sesuai dengan uraian jawaban permasalahan di atas.

6) Bagaimana perspektif hukum fiqih menyikapi anggapan pasien yang merasa kesulitan untuk melakukan ibadah utamanya wudlu', ṣhalat dan berpuasa ketika sedang diinfus. Bahkan

[189] Zakariya Bin Muhammad Bin Zakariya al-Ansari, *Asnā al-Maṭālib fī Sharhi Raudlatu al-Tālib, Dār al-Kitāb al-Islāmi*, 2010, Juz 12, Hal.75.

[190] Abu Bakar Uthman Bin Shata al-Bakri, *Hāshiyah I'ānatu al-Tālibīn,* Dār ihyā' al-kutub al-Arabiyyah, Juz 3, 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak pasien berasumsi hal tersebut merupakan udzur untuk tidak shalat (di qaḍa' ketika sembuh) ?.

Hukum : Tidak bisa di benarkan, karena melakukan shalat tetap wajib selama masih berakal, walaupun dalam keadaan yang sangat lemah jika tidak memenuhi sebagian syarat, maka yang harus dilakukan adalah shalat sebisanya (shalat hurmat waktu) yang nantinya wajib *i'ādah* (mengulang kembali) ketika sembuh, walaupun ada pendapat yang memperbolehkan tanpa *i'ādah* tapi lemah (*ḍa'īf*).

Ta'bir :

a). Ṣahīh al-Bukhāri, Bab 2. 6858.

ولا تسقط الصلاة عنه ما دام يعقل لأنه مخاطب بالصلاة لوجود العقل والإدراك فيؤدي ما في وسعه أداؤه لقوله صلى الله عليه و سلم فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه[191] : (وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم).[192]

b). al-Majmū' fi Sharhi al-Muhadhdhab, Juz. 2 , 287.

(فرع) الاقطع والمريض الذي لا يخاف ضررا من استعمال الماء إذا وجد ماء ولم يقدر علياستعماله فقد قدمنا في باب صفة الوضوء أنه يلزمه تحصيل من يوضئه باجرة أو غيرها فان لم يجد وقدر على التيمم

[191] Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, *Ṣahīh al-Bukhāri*, Dār ibn Kathīr, 2002 *Kitāb al-I'tiṣām Bi al-Kitāb wa al-Sunnah*, Bab 2. 6858.

[192] al-Hajah Durriyah al-'aiṭah, *Fiqh al-Ibādāt alā al-madhhab al-Shāfi'ī,* Taqniyah Arabiyah, Marqoom, org, 284.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وجب عليه أن يتيمم ويصلى ثم يعيد كذا نص عليه الشافعي.[193]

c). al-Majmū' fi Sharhi al-Muhadhdhab, Juz. 2 , 279-280

والفرق على المذهب ان المرض يعم وقال الصيدلاني في هذا وفى الغريق يتعلق بعود ويصلى بالايماء ان استقبل القبلة فلا اعادة كالمريض يصلى بالايماء والا وجبت الاعادة وقال البغوي في الغريق يصلى بالايماء لا يعيد ما صلى إلى القبلة ويعيد غيره في اصح القولين وأما المريض إذا لم يجد من يحوله الي القبلة فيجب أن يصلى على حسب حاله وتجب الاعادة على الصحيح المشهور لندوره قال الروياني ومن أصحابنا من قال في الاعادة قولان وهذا شاذ والله أعلم.[194]

d). Bughyah al-Mustarshidīn, juz.1, 162.

فائدة : يجب على المريض أن يؤدي الصلوات الخمس مع كمال شروطها وأركانها واجتناب مبطلاتها حسب قدرته وإمكانه ، وله الجلوس ثم الاضطجاع ثم الاستلقاء والإيماء إذا وجد ما تبيحه على ما قرر في المذهب ، فإن كثر ضرره واشتد مرضه وخشي ترك الصلاة رأساً فلا بأس بتقليد أبي حنيفة ومالك ، وإن فقدت بعض الشروط عندنا. وحاصل ما ذكره الشيخ محمد بن خاتم في رسالته في صلاة المريض أن مذهب أبي حنيفة أن المريض إذا عجز عن الإيماء برأسه جاز له ترك الصلاة ، فإن شفي بعد مضي يوم فلا قضاء عليه ، وإذا عجز عن الشروط بنفسه وقدر عليها بغيره فظاهر المذهب وهو قول الصاحبين لزوم ذلك ، إلا إن لحقته مشقة بفعل الغير ، أو كانت النجاسة تخرج منه دائماً ، وقال أبو حنيفة : لا يفترض عليه مطلقاً ، لأن المكلف عنده لا يعد قادراً بقدرة

[193] Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, *al-Majmū' fi Sharhi al-Muhadhdhab*, Maktabah al-Irshād, 2008, Juz. 2 , 287.
[194] Ibid, Juz. 2 , 279-280

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

غيره. وعليه لو تيمم العاجز عن الوضوء بنفسه ، أو صلى بنجاسة أو إلى غير القبلة مع وجود من يستعين به ولم يأمره صحت.[195]

Ta'bir dari keempat kitab di atas memiliki kandungan dan maksud yang sama. Prinsipnya kewajiban shalat tidak gugur selama orang tersebut berakal dan sadar. Kalau tidak bisa melaksanakan shalat dengan berdiri, dia bisa shalat dengan duduk, tidur miring, terlentang, atau hanya dengan isyarat. Kalau tidak bisa berwudlu, dapat shalat dengan tayammum. Intinya shalat wajib dilaksanakan semampunya.

7) Bolehkah aparat memaksa gondes untuk menikahi gadis (bunga) yang tidak ingin ia nikahi ?.

Hukum : Tidak boleh.

Ta'bir :

a). Bughyah al-Mustarshidīn, Juz 1, 373.

(مسألة: ك): أمره الحاكم بالطلاق فطلق لم يقع وإن لم يتهدده، لأن الأئمة ألحقوا حكم الحاكم بالإكراه، ولا فرق بين قدرة الحاكم على إجباره حساً أم لا، إذ هو إكراه شرعاً، ومنه ما لو حلف ليطأنها الليلة فغلبه النوم بحيث لا يستطيع ردّه ولم يتمكن قبل غلبته بوجه فلا يحنث كما لو وجدها حائضاً، وشرط عدم وقوع الطلاق بالإكراه أن لا يكون بحق كما في المولى، وأن

[195] Abdurrahman Bā 'Alawiy al-Haḍrami, *Bughyah al-Mustarshidīn fī Talkhīṣi fatāwī Ba'ḍi al-Aimmah min al-Ulamā' al-Muta'akhirīn*, Dār al-fikr, 2011, Juz.1, 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لا توجد قرينة اختيار من المطلق، كأن أكره على ثلاث فوجد.[196]

Ta'bir kitab *Bughyat* di atas menjelaskan tentang hukum talak dengan perintah dan paksaan dari hakim, maka talaknya tidak jatuh (tidak dianggap), karena dipaksa. Demikian juga pernikahan tidak sah kalau dengan paksaan. Dan tidak boleh seseorang memkasa orang lain untuk menikah atau menjatuhkan talak.

8) Bagaimana hukumnya menarik kembali uang untuk haji tersebut di atas untuk dibagikan kepada ahli waris ?.

Hukum : Boleh jika melebihi kebutuhan biaya haji wajib.[197]

Jika ibadah hajinya mayit tidak dilakukan, maka ahli waris berdosa.

Ta'bir :

a). al-Majmū' fi Sharhi al-Muhadhdhab, Juz. 7, 116

(فرع)ذكرنا أن مذهبنا المشهور انه إن مات وعليه حج الاسلام أو قضاء أو نذر وجب قضاؤها من تركته أوصى بها أم لم يوص قال ابن المنذر وبه قال عطاء وابن سيرين وروى عن أبي هريرة وابن عباس وهو قول أبى حنيفة وأبى ثور وابن المنذر.[198]

---

[196] Ibid, Juz.1 hal. 373.

[197] Ahmad Shihabuddin Ibnu Hajar al-Haitami al-Makki, *al-Fatāwī al-Fiqhiyyah al-Kubrā, Fatāwī ibn Hajar al-Haitami*, Dār al-Ma'rifah, Beirut Libanon, tt, Juz 2, Hal. 113.

[198] Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, *al-Majmū' fi Sharhi al-Muhadhdhab*, Maktabah al-Irshād, 2008, Juz. 7 , Hal. 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b). al-Fatāwī al-Fiqhiyyah al-Kubrā, Juz 2,113.

وسئل فسح الله في مدته بما صورته هل إذا استطاع إنسان الحج ومات ولم يحج وخلف تركة وقلتم يحج عنه من تركته فقالت الورثة لم يجب الحج عليه لزيادة المراحل فهل يقبل قولهم في ذلك ويسقط عنه الحج وإن كان الميت لم يعرف المسألة وإذا علم إنسان أن الورثة لم يهتدوا للحج عنه لعدم فعل ذلك ببلدهم وعدم إقامة الحكم عليهم بذلك وتحكم العادة فهل له أن يعلمهم بعدم الوجوب ليخف عنهم الإثم وإذا كان الميت لم يعرف المسألة وأخر الحج لغير ذلك فهل يكون عاصيا وهل تجري المسألة في المعضوب كذلك أو لا فأجاب بقوله إذا استطاع إنسان الحج ومات ولم يحج وجب الإحجاج عنه من تركته وزيادة السفر على السير المعتاد إنما تمنع الوجوب والعصيان بالموت لا الاستقرار في الذمة ولا فرق في ذلك بين أن يموت قادرا أو يعضب قبل موته لكن متى تمكن المعضوب من الاستنابة فأخرها مات عاصيا فاسقا وبهذا التقرير تعلم الجواب عن جميع ما ذكره السائل في هذه المسألة.[199]

Ta'bir kitab al-Majmū' di atas, menjelaskan, barang siapa meninggal, dan dia mempunyai kewajiban haji, nazar, atau hutang, maka ahli waris wajib melaksanakan kewajiban tersebut dari harta tinggalannya, baik wasiat ataupun tidak.

[199] Ahmad Shihabuddin Ibnu Hajar al-Haitami al-Makki, *al-Fatāwī al-Fiqhiyyah al-Kubrā, Fatāwī ibn Hajar al-Haitami*, Dār al-Ma'rifah, Beirut Libanon, tt,Juz 2,113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Ada 1 Permasalahan fiqh yang hukumnya diputuskan dengan metode *qawli manhaji*, yaitu : Sebatas mana perselisihan yang memperbolehkan mendirikan dua jum'atan dalam satu dusun ?.

Hukum : Perselisihan dan permusuhan yang berakibat sulitnya mereka dikumpulkan jadi satu (*'usr al-ijtimā'*) walaupun disebabkan oleh satu orang saja.

Ta'bir :

a). Hāshiyah I'ānatu al-Tālibīn, Juz 2, 74.

(قوله: وعسر اجتماعهم إلخ) هذا ضابط الكثرة، أي كثروا بحيث يعسر اجتماعهم، أي اجتماع من يحضرون بالفعل عند سم، ولو كانوا أرقاء وصبيانا ونساء، حتى لو كانوا ثمانين مثلا وعسر اجتماعهم في مكان واحد بسبب واحد منهم فقط، بأن سهل اجتماع ما عدا واحد جاز التعدد.[200]

السادس أنه قد حصل النزاع والشقاق بين الفئتين في واقعتنا هذه فيجوز التعدد لذلك وقال البرماوي وفي صور التعدد ايضا وقوع خصام بين اهل جانبي البلد وان لم تكن مشقة وعليه لو نقص عدد جانب او محل جانب عن الاربعين لم تجب عليهم فيه ولا في الآخر.[201]

Ta'bir kitab Hāshiyah I'ānatu al-Tālibīn di atas menjelaskan alasan bolehnya melaksanakan shalat jum'ah lebih dari satu masjid dalam satu dusun, yaitu: *'usr al-ijtimā'*

[200] Abu Bakar Uthman Bin Shata al-Bakri, *Hāshiyah I'ānatu al-Tālibīn,* Dār ihyā' al-kutub al-Arabiyyah, Juz 2, 74.

[201] Ahmad al-Khatīb Ibn Abd al-Latīf al-Khatīb Ibn Abdillah al-Jāwi, *Ṣulh al-Jamā'atain Bi Jawāz Ta'addud al-Jum'atain,* al-Majīd Center.Org.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(sulitnya mereka dikumpulkan dalam satu masjid), disebakan oleh beberapa hal, yaitu: *pertama*; jama'ah terlalu banyak, sehingga masjid tidak dapat menampung. *Kedua* ; adanya pertikaian dan perselisihan dan permusuhan antara dua golongan.

6. Ada 3 Permasalahan fiqh yang hukumnya diputuskan dengan metode *istinbāṭ jamā'iy*, yaitu:

   1. Bagaimana solusi praktis dan mudah untuk di gunakan masyarakat awam dalam kedua masalah tersebut di atas,[202] apabila tidak memenuhi tuntutan syara'?,

      Hukum : Pakaian yang terkena najis disucikan terlebih dahulu, setelah itu dicuci bersama pakain yang tidak terkena najis.[203]

   2. Jika tidak boleh menerima zakat atas nama *'āmil* bagaimana solusinya ?.

      Hukum : Mendaftar sebagai UPZ (Unit Pengumpul Zakat) pada BAZ Kabupaten/Provinsi. *Hīlah* (rekayasa) ; dengan memberikan zakat kepada salah satu panitia yang termasuk ashnaf penerima zakat, untuk kemudian salah satu panitia ini membagikan kepada semua anggota panitia.

---

[202] *Pertama*; loundrey dengan mesin cuci dengan tidak memperhatikan kesucian pakaian, *kedua*; mesin cuci yang menampung air kurang dari dua qullah.

[203] Said Bin Muhammad Ba 'Alawi Baishan al-Dau'ani al-Hadrami,al-Syafi'I, *Bushrā al-Karīm Bi Sharh Masā'il al-Ta'līm*, Dār al-Minhāj, 2004, .43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Ucapan si Bapak kepada anaknya yang mau pergi kerja keluar negeri tapi tidak punya uang dan meminta pada si Bapak untuk menjual sebagian sawahnya dan berupa ucapan “nak.. bapak tidak punya uang, harta bapak yang bisa kamu gunakan adalah tanah sebelah rumah itu. Jika kamu jual tanah tersebut maka nanti ketika aku meninggal kamu sudah tidak berhak mendapat warisan ” si Adi menjawab “inggih pak, matur suwon, mboten angsal warisan mboten nopo2 sing penting kulo saget kerjo teng luar negeri. Pangestune pak, nggih” dikategorikan akad apa ?, dan sahkah akad tersebut ?.

   Hukum : Musyawirin peserta bahthu lebih setuju kasus itu termasuk *wasiat fāsidah* karena tidak ada *ta’līq* kematian atau *ṣighat* wasiat. Tapi umumnya cara seperti itu, di masyarakat dinamakan *hibah*. Dan sah kalau di-serahterima-kan semasa hidupnya. Dan fasidah juga bila tidak ada serah terima dan tanpa *ṣighat*. Andai pesannya " jika meninggal nanti....", maka ini jelas wasiat. Namun wasiat tidak boleh lebih dr 1/3 *tirkah* (harta yang ditinggal mati). Jika lebih harus mendapat persetujuan ahli waris yang lain. Jika ada yang tidak setuju, maka perkara ini diselesaikan oleh pengadilan.

   Kalau wasiat sudah jelas tidak boleh lebih dari 1/3 tirkah, kecuali jika semua ahli waris ridha. Sedangkan syarat hibah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada anak-anaknya, antara lain; dilakukan saat masih sehat, adil dan merata dalam pemberiannya, dan tidak ada tujuan menghalangi ahli waris yang lain.

Ta'bir :

a). al-Iqnā' fī Halli Alfāẓi Abī Shujā', Juz. 2, Hal.221

حكم الوصية للوارث (ولا تجوز الوصية) أي تكره كراهة تنزيه (لوارث) خاص غير جائز بزائد على حصته لقوله ﷺ: «لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ «رواه أصحاب السنن (إلا أن يجيزها باقي الورثة) المطلقين التصرف لقوله ﷺ: «لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إلاَّ أَنْ يُجِيزَهَا بَاقِي الوَرَثَة «رواه البيهقي بإسناد. قال الذهبي صالح وقياساً على الوصية لأجنبي بالزائد على الثلث.[204]

Ketiga permasalahan di atas, cara penetapan hukumnya berdasarkan ijtihad kolektif forum bahtsul masail berdasarkan kaidah-kaidah fiqh Syafi'i dan ketentuan umum dari masing-masing masalah. Mereka dalam menetapkan hukum setelah melalui proses berfikir *manhaji* yang panjang. Karena mereka sebenarnya juga telah memegangi dan mempelajari *manhaj* imam Syafi'i dan tidak menyalahi ketentuan tersebut. Ditetapkan dengan memperhatikan konteks lingkungan, mempertimbangkan sosio-politik dan sosio-budaya serta pola pikir yang melatarbelakangi.

[204] Muhammad Bin Muhammad al-Khatib al-Sharbini, *al-Iqnā' fī Halli Alfāẓi Abī Shujā'*, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004, Juz. 2, Hal.221

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Karakteristik Bahtsul Masail Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan pengamatan secara langsung, ditemukan bahwa kegiatan bahthul masail di kabupaten Mojokerto berjalan aktif dan rutin hampir setiap bulan antar MWC, antar pesantren dan bahtsul masail tingkat cabang. Dalam sekali bahtsul masail yang diselenggarakan, kadang hanya memutuskan 1 atau 2 permasalahan yang dibahas. Hal ini terjadi karena terbatasnya waktu (antara jam 21.00 – 24.00 wib). Di samping itu masing-masing peserta bahtsul masail saling adu argument untuk menguatkan dan mempertahankan *ibārah* dan *ta'birnya*. Kadang juga mereka masih mempermasalahkan *intiqāl* (pindah mazhab), karena takut *talfīq* mazhab. Dan hal-hal lain yang menjadi penghambat produktifitas bahtsul masail dalam menghasilkan keputusan hukum yang diharapkan masyarakat NU Mojokerto khususnya.

Peneliti mengamati secara langsung jalannya kegiatan bahtsul masail dalam kurun waktu yang lama dan melakukan wawancara dengan beberapa kyai (intelektual) NU. Dari itu didapatkan temuan-temuan yang menjadi karakteristik bahtsul masail yang diselenggarakan LBM NU kabupaten Mojokerto. Dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Prosedur dan cara menghimpun masalah-masalah (*as'ilah*) fiqh

Dalam menghimpun *as'ilah* fiqh, diawali oleh Pengurus Cabang Lembaga Bahtsul Masail menerbitkan surat permohonan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

as'ilah[205] kepada masing-masing Majelis Wakil Cabang. Dalam waktu satu minggu Majelis Wakil Cabang mengirimkan (setor) *as'ilah* tersebut kepada Pengurus Cabang Lembaga Bahtsul Masail. Kemudian as'ilah tersebut diakomodir dan dihimpun lalu dikonsultasikan kepada syuriah NU untuk diseleksi dan diverifikasi, kemudian ditetapkan sebagai *as'ilah* dalam bahtsul masail dengan mempertimbangkan skala prioritas dan yang mendesak untuk dicarikan jawabannya. Permasalahan yang muncul dan dibahas dalam forum bahtsul masail adalah masalah-masalah *wāqi'iyyah* (masalah yang terjadi di masyarakat).

2. Jenis permasalahan fiqh berdasarkan komisi bahtsul masail

Bahtsul Masail yang diselenggarakan oleh pengurus wilayah dan pengurus besar lembaga bahtsul masail selalu membahas ketiga komisi *as'ilah fiqhiyyah*, yaitu *masāil dīniyyah wāqi'iyyah, masāil dīniyyah maudhū'iyyah,* dan *masāil dīniyyah qānūniyyah*. Hal ini beda dengan bahtsul masail di kabupaten Mojokerto. Menurut analisa peneliti dari 97 *as'ilah fiqhiyyah* yang berhasil didokumentasikan tidak satupun yang berkaitan dengan permasalahan perundang-undangan (*masāil qānūniyyah*), yang merupakan penyikapan terhadap rencana UU yang diajukan pemerintah atau UU peralihan yang baru disahkan. Mereka

[205] As'ilah yang dimaksud adalah permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat sekitar, untuk dicarikan solusi hukumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beranggapan bahwa RUU dan UU sudah ada yang membahas dan membidanginya (ekskutif dan legeslatif).[206] *Masāil dīniyyah maudhū'iyyah* [207] ditemukan peneliti hanya satu permasalahan, yaitu tentang hukum dan status biro jasa. Sehingga permasalahan yang dibahas adalah *Masāil dīniyyah wāqi'iyyah.*[208]

3. Peserta bahtsul masail diperlakukan secara adil dan proporsional

Peserta bahtsul masail terdiri dari perwakilan dan utusan masing-masing pengurus MWC, santri utusan pondok pesantren, pengasuh pondok pesantren, dan kyai-kyai setempat. Dalam forum bahtsul masail *mubāhithīn* dibagi menjadi tiga, yaitu: peserta bahtsul masail, perumus, dan *muṣaḥḥiḥ* dan dipimpin oleh seorang moderator.

Peserta bahtsul masail terdiri dari santri utusan pondok pesantren dan utusan dari MWC. Perumus merupakan tim dari pengurus utama LBM yang lama dan anggota LBM wilayah yang berpengalaman dan memiliki kemampuan untuk memilih berbagai *qawl* yang *arjaḥ* dari yang *rājiḥ*, yang *aṣaḥ* dari yang *ṣaḥīḥ* dan *muqābil* nya, kemudian dirumuskan. *Muṣaḥḥiḥ* terdiri dari kyai-kyai

---

[206] Sebagaimana hasil wawancara kami dengan beberapa peserta bahtsul masail. Misalnya Gus Abdul Ghaffar, ketika ditanya, mengapa tidak ada masalah fiqh *qanūniyyah*?. Dia menjawab " Karena masalah fiqh *qanūniyyah* sudah ada ahlinya yang membidanginya (kalangan ekskutif dan legeslatif). Lembaga bahtsul masail khawatir dimanfaatkan dan diperalat untuk memutuskan hukum yang berpihak kepada pemerintah dan parlemen.

[207] Hal-hal yang bersifat tematis, dalam tataran konsep dan wacana.

[208] Hal-hal yang bersifat kasus, biasanya didahului dengan *taṣawwur* (deskripsi masalah) yang realistis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syuriah MWC dan PCNU, pengasuh pondok pesantren, dan kyai setempat.

Ketiga unsur ini tidak ada yang dominasi dalam kegiatan bahtsul masail. Mereka berhak untuk bersuara dan menyampaikan pendapatnya. Mereka mempunyai hak menyampaikan konsep jawaban yang sudah disiapkannya. Mereka bisa berhujjah sesuai yang diyakini. Mereka berhak mempertahankan hujjahnya dengan argumentasi yang kuat. Tidak ada dominasi kyai terhadap santri. Pendapat siapapun yang dinilai kuat dan bisa dipertanggung jawabkan itulah yang disepakati dan ditetapkan.

4. Metode Penetapan Hukum Lembaga Bahtsul Masail

Sebagaimana bahtsul masail yang diselenggarakan pengurus wilayah dan pengurus besar Nahdlatul Ulama, bahtsul masail yang berlangsung di kabupaten Mojokerto juga seringkali menggunakan metode *qawli* dan *ilhāqi* dalam menjawab permasahan yang terjadi dikalangan masyarkat Mojokerto. Dominasi *qawli* memang terbukti dan tidak dipungkiri. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku bahtsul masail. Berikut kutipan wawancara dengan Gus Abdul Aziz ketika ditanya tentang metode yang sering digunakan LBM Mojokerto dalam penetapan hukum. Beliau menjawab:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dalam menjawab permasahan yang terjadi dikalangan masyarkat, LBM Mojokerto sering menggunakan pendekatan hukum dengan menggunakan metode *Qauliy* dan *ilhaqy*. Dan terkadang juga menggunakan metode *manhajiy* (bila tidak ditemukan jawaban dengan metode *qauliy* dan *ilhaqy*)".

Ketika ditanya alasan mengapa metode tersebut sering mewarnai dalam bahtsul masail, beliau menjawab:

"Karena metode ini masih relevan untuk menjawab permasalahan-permasalahan sosial yang ada. Di samping itu permasalahan-permasalahan yang muncul di era sekarang tidak jauh beda dengan permasalahan yang muncul di era *mutaqaddimīn*".

Namun realita di lapangan ditemukan adanya terobosan baru dari peserta bahtsul masail di kabupaten Mojokerto. Keberanian memutuskan hukum dengan metode *manhaji* ataupun *istinbāṭ jamā'iy*. Hal demikian menjadi ciri dan karakter bagi lembaga bahtsul masail kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan data di atas (pada poin B) ditemukan adanya 54 permasalahan yang keputusan hukumnya dengan metode *qawli,* 16 Permasalahan yang keputusan hukumnya dengan metode *ilhāqi,* 15 Permasalahan yang keputusan hukumnya dengan metode *manhaji,* 8 Permasalahan yang keputusan hukumnya dengan metode gabungan *qawli ilhāqi,* 1 Permasalahan yang keputusan hukumnya dengan metode gabungan *qawli manhaji*, dan 3 Permasalahan yang keputusan hukumnya dengan metode *istinbāṭ jamā'iy*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, para kyai (intelektual) yang tergabung dalam lembaga bahtsul masail NU kabupaten Mojokerto tidak hanya berkutat pada metode *qawliy.* Bahkan 43 dari 97 permasalahan (44,3%) keputusan hukumnya dengan metode yang lain (bukan *qawliy*). Hal ini menjadi pertanda adanya kemampuan para peserta bahtsul masail NU kabupaten Mojokerto dalam memutuskan suatu hukum. Mereka dengan bekal intelektual yang cukup mempunyai kemampuan dan keberanian dalam bermazhab secara *manhaji*. Cara bermazhab inilah menuntut dan mendorong para kyai (intelektual) NU Mojokerto untuk melakukan *istinbaṭ* (memberlakukan) secara dinamis nas-nas fuqaha' tersebut. *Istinbaṭ* dalam pengertian tersebut dapat dilakukan oleh intelektual NU yang tergabung dalam bahtsul masa'il.

Kedua, Para kyai dan intelektual NU bisa melakukan *intiqāl al-maẓhab* sepanjang dalam lingkup *al-Madhāhib al-Arba'ah* ketika tidak ditemukan dalam rumusan tekstual fiqh syafi'iyyah.[209] Karena hal ini disamping tidak menyalahai AD/ART NU, juga menghindari terjadinya *mauqūf* (permasalahan yang tidak

[209] Semisal Muhammad Abu Said al-Khadimi *al-Hanafi* dalam kitabnya; *Barīqah Mahmūdiyyah fī sharhi Ṭarīqah Muhammadiyyah wa sharī'ah Nabawiyyah fī sirati Ahmadiyyah*, Ahmad Bin Idris al-Qarāfi *al-Maliki*, dalam kitabnya : *Anwār al-Burūq Fī Anwā'i al-Furūq, Hāshiyah ibn Husain al-Makki al-Mālikī*, Mansur Bin Yunus Bin Salahuddin Bin Idris al-Bahūti *al-Hanbali* al-Miṣri, Dia seorang ilmuwan besar dari kalangan Hanabilah, dalam kitabnya *Kashshāf al-Qanā' 'an Matni al-Iqnā'. Ghāyah Talkhīs al-Murād Min Fatāwī Ibnu zayād* merupakan kategori kitab *fiqh umum*. Akan tetapi Abdurrahman Bin Ziyad al-Zabidi adalah seorang *faqih syafi'i*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjawab).[210] Karena mereka telah memahami ibarat-ibarat kitab fiqh sesuai dengan terminologinya yang baku. Mereka dalam kegiatan bahtsul masa'il, membahas masalah-masalah *wāqi'iyyah* (yang terjadi) dengan merujuk pada referensi *kutub al-fuqahā'* (kitab-kitab karya ahli fiqh) baik syafi'iyyah ataupun fiqh lintas madhhab (hanafiyyah, malikiyyah, dan hanabilah) sepanjang bisa dinalar dan tidak bertentangan dengan akar kultural setempat. Hal ini terbukti dengan keputusan bahthul masa'il NU Mojokerto yang diwarnai dengan pendapat di luar mazhab syafi'i.

Ketiga, mereka menerapkan metode *istinbāṭ jamā'iy*. Metode ini mereka gunakan ketika memutuskan permasalahan-permasalahan yang secara *ṣarīh* tidak disebutkan dalam *aqwāl ulamā'* (keputusan hukum bersifat solutif). Diantaranya: hukum tentang cara berjama'ah dan *berṣaf* (berbaris) kaum perempuan dari kalangan nahdliyyin. Tidak ditemukan pendapat yang *ṣarīh* dari ulama tentang hukum dan keutamaannya. Ditemukan naṣ hadits berkaitan dengan keutamaan dan fadhilah berjama'ah, namun belum ditemukan naṣ hadits dan qawl ulama tentang fadilah dan

[210] Sebagi contoh; sejak dulu hingga sekarang warga nahdliyyin meyakini bahwasanya rangkaian doa dan tahlil yang dibaca dan dihadiahkan ke ahli qubur itu pahalanya sampai kepada si mayit. Hal ini berseberangan dengan pendapat Imam Syafi'i. Tetapi Ulama' syafi'iyyah justru mengikuti ijtihadnya Imam Ahmad Bin Hambal. Contoh lain dalam fiqh zakat, masyarakat di beberapa daerah menggunakan *qawl* di luar syafi'i mengenai padi yang belum dizakati, tapi si penuai padi sudah diberi upah. Padahal memberi upah kepada si penuai padi sebelum padi dizakati menurut imam Syafi'i tidak boleh. Akan tetapi sejak dulu upah si penuai diberikan sebelum padi dizakati. Pendapat ini diambil dari Imam Ahmad Bin Hambal. Dan para kyai memakai itu, karena umumnya mereka petani.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keutamaan cara berṣaf (berbais) mereka yang berada di samping kiri ataupun samping kanan jamaah laki-laki. Peserta bahtsul masail menetapkan keputusan hukumnya secara bersama-sama, bahwasanya ”kaum perempuan mendapatkan fadilah dan keutamaan jama’ah, tetapi tidak mendapatkan keutamaan *ṣaf* ”. Karena *ṣaf* wanita seharusnya di belakang kaum laki-laki. Berikutnya masalah BPJS diberlakukan sistem zonasi Rumah Sakit.[211]

Keempat, para kyai (intelektual) NU Mojokerto selalu memperhatikan konteks lingkungan dengan mempertimbangkan sosio-politik dan sosio-budaya serta pola pikir yang me-latarbelakangi-nya. Sehingga hasil penggalian hukum sangat sesuai dengan ruang dan waktunya.[212] Namun, mereka terkesan dan kelihatan tekstualis meskipun sudah memberikan fatwa hukum berdasarkan kaidah-kaidah fiqh, mereka tidak mau kalau tidak ada landasan teks/*naṣ*nya. Padahal penuangan teks itu setelah melalui proses berfikir *manhaji* yang panjang. Karena mereka sebenarnya juga telah memegangi dan mempelajari manhaj imam Syafi’i. Hal ini terlihat dalam kepustakaan dan kurikulum pesantren mereka.

[211] Kegiatan bahtsul masail di Pondok Pesantren Salafiyah An-Nahdliyyah Mengelo-Sooko-Mojokerto pada hari kamis, 10 November 2019.

[212] Hal ini pernah terjadi dalam penentuan status hukum galian C yang hasilnya berbeda, pertama: kasus galian C di Jatirejo dan galian C di Ngoro. Galian C di Jatirejo hasil keputusan bahthul masa’il hukumnya dilarang dan haram, karena berdampak pada mafsadah dan kerusakan lingkungan (bencana alam dan longsor). Akan tetapi Galian C di Ngoro diputuskan boleh dan jawaz, karena tidak berdampak mafsadah dan kerusakan lingkungan (kondisi tanahnya yang keras dan tidak mudah longsor), justru masyarakat setempat diuntungkan dalam aspek ekonomi dan sosial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti kitab-kitab *Waraqāt, Hujjah al-Wuṣūl, Jam'u al-Jawāmi', al-Mustashfā, al-Ashbāh wa al-Naẓā'ir, Qawā'id ibn Abd al-Salām* dan lain-lainnya.

5. *al-Kutub al-Mu'tabarah* [213] menjadi Refrensi dan rujukan bahtsul masail.

Para kyai (intelektual) NU Mojokerto menjadikan kitab-kitab empat mazhab sebagai rujukan dalam bahtsul masail. Mereka menghindari kitab selain empat mazhab. Mereka beranggapan kitab di luar empat mazhab tidak mu'tabarah. Mereka sadar hal ini tidak senafas dengan semangat fiqh sebagai produk ijtihad. Karena kriteria mu'tabar inilah yang menyebabkan adanya pandangan yang mengunggulkan pendapat imam tertentu dan merendahkan pendapat imam yang lain.

[213] Dirumuskan pada waktu Muktamar Situbondo (1984). Yang dimaksud *al-kutub al-mu'tabarah* pada mulanya adalah kitab-kitab ahlussunnah dan dipersempit lagi kitab-kitab *madhāhib arba'ah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terdapat 97 permasalahan fiqh sebagaimana penjelasan pada Bab IV tersebut di atas, dan dikelompokkan menjadi 7 kategori, yaitu : fiqh ibadah, fiqh mu'amalah, fiqh ṭaharah, fiqh munakahah, dan fiqh mawarith. Ada juga beberapa masalah fiqh yang substansinya bisa dikategorikan fiqh taharah dan fiqh mu'amalah, serta dikategorikan fiqh ibadah dan fiqh mu'amalah. Dari data di atas menunjukkan fiqh ibadah mendominasi dibanding fiqh-fiqh yang lain. Hasil penelusuran terhadap keputusan hukum lembaga bahtsul masail NU kabupaten Mojokerto berdasarkan deskripsi di atas didapatkan beberapa temuan, yaitu: Ada 47 permasalahan yang dikategorikan *fiqh ibādah*, Ada 32 permasalahan yang dikategorikan *fiqh mu'āmalah*, Ada 7 permasalahan yang dikategorikan *fiqh Ṭahārah*, Ada 5 permasalahan yang dikategorikan *fiqh mu'nākahah*, Ada 2 permasalahan yang dikategorikan *fiqh mawārith*, Ada 1 permasalahan yang dikategorikan *dan fiqh ṯahārah*, *fiqh mu'āmalah* karena memiliki dua kriteria tersebut, dan Ada 3 permasalahan yang dikategorikan *fiqh ibādah dan fiqh mu'āmalah*, karena memiliki dua kriteria tersebut. Dari data di atas menunjukkan fiqh ibadah mendominasi dibanding fiqh-fiqh yang lain. 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan fiqh tersebut merupakan *masāil dīniyyah wāqi'iyyah,* kecuali satu permasalahan, tergolong *masāil dīniyyah maudhū'iyyah,* yaitu permasalahan tentang apa itu biro jasa dan bagaimana hukumnya. Lembaga Bahtsul Masail kabupaten Mojokerto tidak membahas permasalahan perundang-undangan (*qānūniyyah*).

2. Penelusuran terhadap hasil keputusan hukum lembaga bahsul masail NU kabupaten Mojokerto didapatkan beberapa temuan tentang metode istinbat hukum lembaga bahtsul masail Nahdlatul Ulama kabupaten Mojokerto, yaitu : Ada 54 permasalahan fiqh yang hukumnya diputuskan dengan metode *qawli,* Ada 16 Permasalahan fiqh yang hukumnya diputuskan dengan metode *ilhāqi,* Ada 15 Permasalahan fiqh yang hukumnya diputuskan dengan metode *manhaji*, Ada 8 Permasalahan fiqh yang hukumnya diputuskan dengan metode gabungan *qawli ilhāqi*, Ada 1 Permasalahan fiqh yang hukumnya diputuskan dengan metode *qawli manhaji*, dan Ada 3 Permasalahan fiqh yang hukumnya diputuskan dengan metode *istinbāṭ jamā'iy*.
3. Karakteristik Bahtsul Masail Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto
   a). Prosedur dan cara menghimpun masalah-masalah (*as'ilah*) fiqh. Untuk menghimpun *as'ilah* fiqh, Pengurus Cabang lembaga bahtsul masail menerbitkan surat permohonan as'ilah kepada seluruh Majelis Wakil Cabang. Kemudian Majelis Wakil Cabang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengirimkan *as'ilah* tersebut kepada Pengurus Cabang Lembaga Bahtsul Masail. *As'ilah* tersebut diakomodir dan dihimpun lalu dikonsultasikan kepada majelis syuriah PCNU untuk diseleksi dan verifikasi, kemudian ditetapkan sebagai *as'ilah* dalam bahtsul masail berdasarkan skala prioritas dan yang dianggap urgen bagi kehidupan umat.

b). Jenis permasalahan fiqh berdasarkan komisi bahtsul masail.

Menurut analisa peneliti dari 97 *as'ilah fiqhiyyah* yang berhasil didokumentasikan tidak satupun yang berkaitan dengan permasalahan perundang-undangan (*masāil qānūniyyah*), yang merupakan penyikapan terhadap rencana UU yang diajukan pemerintah atau UU peralihan yang baru disahkan. *Masāil maudhū'iyyah* ditemukan peneliti hanya satu permasalahan, yaitu tentang hukum dan status biro jasa. Sehingga permasalahan yang dibahas benar-benar *wāqi'iyyah* (masalah yang terjadi di masyarakat).

c). Peserta bahtsul masail diperlakukan secara adil dan proporsional.

Bahtsul masail dalam pelaksanaannya diikuti oleh peserta yang terdiri dari tiga komponen, yaitu peserta, perumus, dan musahhih yang dipimpin oleh moderator. Ketiga unsur ini tidak ada yang dominasi dalam kegiatan bahtsul masail. Mereka berhak untuk bersuara dan menyampaikan pendapatnya. Mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai hak menyampaikan konsep jawaban yang sudah disiapkannya. Mereka bisa berhujjah sesuai yang diyakini. Mereka berhak mempertahankan hujjahnya dengan argumentasi yang kuat. Tidak ada dominasi kyai terhadap santri. Pendapat siapapun yang dinilai kuat dan bisa dipertanggung jawabkan itulah yang disepakati.

d). Metode Penetapan Hukum Lembaga Bahtsul Masail.

Peneliti menemukan adanya terobosan baru dari peserta bahtsul masail di kabupaten Mojokerto, yaitu:

pertama, keberanian memutuskan hukum dengan metode *manhaji*, di samping dengan metode *qawli* dan *ilhāqi*. Hal ini dibuktikan adanya 43 dari 97 permasalahan (44,3%) keputusan hukumnya dengan metode yang lain (bukan *qawliy*). Hal ini menjadi pertanda adanya kemampuan para peserta bahtsul masail NU kabupaten Mojokerto dalam memutuskan suatu hukum dengan bermazhab secara *manhaji*.

Kedua, Para kyai dan intelektual NU bisa melakukan *intiqāl al-maẓhab* sepanjang dalam lingkup *al-Madhāhib al-Arba'ah* ketika tidak ditemukan dalam rumusan tekstual fiqh syafi'iyyah. Karena hal ini disamping tidak menyalahai AD/ART NU, juga menghindari terjadinya *mauqūf* (permasalahan yang tidak terjawab).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, mereka menerapkan metode *istinbāṭ jamā'iy.* Metode ini mereka gunakan ketika memutuskan permasalahan-permasalahan yang secara *ṣarīh* tidak disebutkan dalam *aqwāl ulamā'* (keputusan hukum bersifat solutif).

Keempat, Pola pikir manhaji terkesan tekstualis. Maksudnya para kyai (intelektual) NU Mojokerto, terkesan dan kelihatan tekstualis meskipun sudah memberikan fatwa hukum berdasarkan kaidah-kaidah fiqh, mereka tidak mau kalau tidak ada landasan teks/*naṣ*nya. Padahal penuangan teks itu setelah melalui proses berfikir *manhaji* yang panjang. Karena mereka sebenarnya juga telah memegangi dan mempelajari manhaj imam Syafi'i. Hal ini terlihat dalam kepustakaan dan kurikulum pesantren mereka. Seperti kitab-kitab *Waraqāt, Hujjah al-Wuṣūl, Jam'u al-Jawāmi', al-Mustashfā, al-Ashbāh wa al-Naẓā'ir, Qawā'id ibn Abd al-Salām* dan lain-lainnya.

e). *al-Kutub al-Mu'tabarah*[1] menjadi Refrensi dan rujukan bahtsul masail.

Para kyai (intelektual) NU Mojokerto menjadikan kitab-kitab empat mazhab sebagai rujukan dalam bahtsul masail. Mereka menghindari kitab selain empat mazhab. Mereka

[1]. Dirumuskan pada waktu Muktamar Situbondo (1984). Yang dimaksud *al-kutub al-mu'tabarah* pada mulanya adalah kitab-kitab ahlussunnah dan dipersempit lagi kitab-kitab *madhāhib arba'ah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beranggapan kitab di luar empat mazhab tidak mu'tabarah. Mereka sadar hal ini tidak senafas dengan semangat fiqh sebagai produk ijtihad. Karena kriteria mu'tabar inilah yang menyebabkan adanya pandangan yang mengunggulkan pendapat imam tertentu dan merendahkan pendapat imam yang lain.

B. Implikasi Teoritik

Temuan dalam penelitian ini mendukung teori hasil penelitian Ahmad Zahro "Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, 1926-1999" (Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqh) yang substantifnya tertulis dalam sebuah buku " Tradisi Intelektual NU". Bahwasanya metode istinbat hukum lembaga bahtsul masail dalam penerapannya masih terlihat adanya dominasi pemakaian metode *qawliy* dan/atau *ilhāqiy* dan masih samarnya penggunaan metode *manhajiy*.[2] Metode-metode tersebut digunakan secara berjenjang dengan mendahulukan metode *qawliy*, lalu metode *ilhāqiy*, kemudian metode *manhajiy*.[3] Ada temuan baru dalam penelitian ini yang belum didapati dalam penelitian disertasi Ahmad Zahro di atas, yaitu adanya penerapan metode *istinbāṭ jamā'iy* dan *intiqāl al-maẓhab* dalam lingkup *al-Madhāhib al-Arba'ah* sebagai realisasi pengembangan metode *manhajiy*.[4] Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga bahtsul masail mengalami

[2]. Ahmad Zahra, *Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2004) 271.
[3]. Ibid, 269.
[4]. Yaitu metode yang telah diresmikan dan dikukuhkan dalam munas alim ulama di Bandar Lampung 1992. Dalam munas tersebut ditetapkan perlunya para kyai NU yang sudah mempunyai kemampuan intelektual cukup untuk bermazhab secara *manhajiy* dan beristinbat langsung pada teks dasar. (Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha' Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, (Surabaya: Khalista, 2010 M) viii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinamika yang menarik, lebih inovatif dan progresif dalam menetapkan hukum suatu masalah. Namun demikian, metode istinbat hukum lembaga bahtsul masail masih tetap terbuka untuk diperbincangkan dan didiskusikan, terutama dalam hal penerapan metode *manhajiy* secara praktis.

C. Keterbatasan Studi

Telah banyak penelitian dan karya ilmiah yang membahas tentang NU, diantaranya: ada yang mengambil tema yang bernuansa politik, faham keagamaan, maupun tokohnya. Ada yang terkait dengan fiqh tematis. ada juga yang mengkaji produk hukum dan metode ijtihad lembaga Bahtsul Masa'il. Ada beberapa penelitian ilmiah yang membahas tentang Lembaga Bahtsul Masa'il, Studi tentang Pola Pengkajian dan Penetapan Hukum Islam, yang berdasarkan kepada empat sumber hukum yang disepakati, yaitu al-Qur' an, hadis, *ijma'* dan *qiyas.* Penelitian ilmiah yang lebih intensif mengenai Lembaga Bahtsul Masa'il yang ditemukan penulis ada empat belas, yaitu: *Pertama,* tulisan Radino "Metode Ijtihad NU, Kajian Terhadap Keputusan Bahtsul Masa'il NU Pusat Pada Masalah-Masalah fiqh Kontemporer". *Kedua*, Muhammad Atho' Mudzhar,"Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia" (Studi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia). *Ketiga*, Iskandar Usman, " Istihsan Sebagai Suatu Metode Istinbat Hukum Dan relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam". *Keempat*, Helmi Karim, "Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam" (Kajian Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonsia Tahun 1975-1980).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelima, Fathurrahman Jamil, “Ijtihad Muhammadiyah Dalam Masalah Fiqh Kontemporer” (Studi Tentang Penerapan Maqasid al-Shari’ah). *Keenam,* tulisan Imam Yahya" Bahtsul Masa'il NU dan Transformasi SosiaI: Telaah Istinbath Hukurn Pasca Munas Bandar Lampung 1992", *Ketujuh*, tulisan Rifyal Ka'bah, dalam bukunya yang bertitel "Keputusan Lajnah Tarjih Muhammadiyyah dan Lajnah Bahtsul Masa'il NU sebagai Keputusan *Ijtihad Jama'i* di Indonesia," *Kedelapan*, tulisan Abd. Basid, "Bahts al-Masa'il dan Wacana Pernikiran *Fiqh,* Sebuah Studi Perkembangan Pemikiran Hukum Islam NU Tahun 1985-1995," *Kesembilan,* tulisan Ahmad Zahro “Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama’, 1926-1999” (Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqh). *Kesepuluh*, A. Faishal Haq,”Bahtsul Masail Di Bidang Fiqh Siyasah” (Studi Tentang Pemaknaan PWNU Jatim Terhadap Proses Dan Metode Penetapan Hukum Dan Hasil Bahtsul Masail Di Bidang Fiqh Siyasah). *Kesebelas*, Abd. Salam, “ Tradisi Fiqh Nahdlatul Ulama” (Analisis terhadap konstruksi elit NU Jawa Timur tentang penentuan awal bulan Islam). *Kedua belas,* Ahmad Muhtadi Anshor, “Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur” (Studi Tentang Dinamika Bermazhab). *Ketigabelas,* Luthfi Hadi Aminuddin, “Sistem Pengambilan Keputusan Hukum Nahdlatul Ulama” (Telaah *Taqrīr, Ilhāq, dan Istinbāt Jamā’i*). *Keempatbelas*, Syafi’i, “Istinbat Hukum Islam Di Lingkungan Ahli Tariqah” (Analisis Bahtsul Masail

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diniyyah Jam'iyyah Ahl al-Tariqah al-Mu'tabarah al-Nahdiyah). Dan beberapa penelitian ilmiyah lainnya yang belum penulis temukan.

Saat ini peneliti melakukan penelitian dengan memusatkan kajiannya pada lembaga bahtsul masail yang terfokus pada tiga hal, pertama; penelusuran dan pengklasifikasian permasalahan-permasalahan keagamaan yang terjadi di masyarakat menurut kategorinya berdasarkan istilah-istilah yang telah disepakati oleh ulama' fiqh *al-madhahib al-arba'ah,* kedua; metode *istinbaṭ* hukum Lembaga Bahtsul Masa'il dalam mengambil keputusan atas masalah-masalah keagamaan masyarakat, dan ketiga; Menganalisis model bahtsul masail kabupaten Mojokerto dan menentukannya sebagai karakteristik LBM kabupaten Mojokerto. Peneliti mengamati secara langsung dan menganalisa metode istibaṭ hukum yang digunakan dalam memutuskan permasalahan fiqh yang terjadi di masyarakat, sebagaimana yang dikodifikasi dalam satu buku. Peneliti bermaksud untuk mewujudkan kegiatan bahtsul masail yang lebih dinamis dan produktif dalam berbagai keputusan hukum yang ditetapkan. Dengan berbagai keterbatasan dan kekurangan peneliti, diharapkan adanya studi dan penelitian ilmiyah berikutnya yang mengkonsentrasikan pembahasannya di bidang kajian hukum Islam, utamanya yang berkaitan dengan metode istinbaṭ hukum lembaga bahtsul masail dalam upaya membangun tradisi bahtsul masail yang dinamis dan produktif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Rekomendasi

Dalam rangka membangun tradisi bahtsul masail yang dinamis dan produktif, ada prosedur yang harus ditempuh dalam pembahasan masail diniyyah di lingkungan lembaga bahtsul masail Nahdlatul Ulama' kabupaten Mojokerto. Dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Setiap keputusan hukum selalu menyertakan dalil naṣ baik al-Qur'an maupun al-Hadith sebagai pijakan dalil yang bersifat umum.
2. Permasalahan fiqh yang hukumnya dapat diputuskan dengan metode *qawli*, maka *aqwāl ulamā'* (pernyataan verbal ulama) yang sudah jadi itu lebih didahulukan.
3. Apabila permasalahan yang terjadi tidak ditemukan hukumnya dalam pernyataan verbal para ulama', maka peserta bahtsul masail memutuskan hukum dengan pendekatan *manhaji*, dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :
   a) Selalu memperhatikan konteks lingkungan dengan mempertimbangkan sosio-politik, sosio-budaya dan pola pikir yang me-latarbelakang-inya.
   b) Para kyai dan intelektual NU bisa melakukan *intiqāl al-maẓhab* sepanjang dalam lingkup *al-Madhāhib al-Arba'ah* ketika tidak ditemukan dalam rumusan tekstual fiqh syafi'iyyah. Karena hal ini untuk menghindari terjadinya *mauqūf* (permasalahan yang tidak terjawab).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Menghindari reduksi terhadap kriteria al-kutub al-mu'tabarah yang hanya dimaksudkan pada kitab-kitab madhhab empat, selainnya tidak. Karena hal ini tidak senafas dengan semangat fiqh sebagai produk ijtihad.

d) Intelektual dan kiai NU seyogyanya membangun lembaga bahtsul masail menjadi lembaga kajian hukum yang dinamis dan produktif. Melakukan terobosan-terobosan dalam menerapkan metode *istinbāṭ* hukum dengan metode *manhaji* (metodologis). Karena inilah satu diantaranya yang bisa mengembalikan fiqh pada wataknya yang asli sebagai produk dan hasil ijtihad, yaitu: fleksibel, dinamis, realistis, temporal, tidak kaku dan tidak permanen. Hasil penelitian ilmiah yang dilakukan peneliti inilah menjadi bagian ikhtiyar dalam mewujudkan cita-cita tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abaza, Mona. *Islamic Education, Perception and Exchanges: Indonesian Stu-dent in Cairo*, Paris: Cahier d'Archipel, 23 1994.

Abdul Hamid al-Sharwani dan Ibnu Qasim al-Ibadi, *Hawāshī Tuhfah al-Minhāj bi Sharhi al-Minhāj*, al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1938

Abdullah Bin Hijazi Bin Ibrahim al-Khalwati, *Hāshiyah al-Sharqāwī 'alā Tuhfah al-Ṭullāb*, Dār al-Fikr, tt.

Abdullah, Amin dan Asy'arie, Musa. *Implementasi Paradigm Integrasi-Interkoneksi*, Yogyakarta: LemLit UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Abdullah, Taufik dkk. *Ensiklopedi Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta : 2009.

Abdullah, Taufik dkk. *Ensiklopedi Islam.* PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta : 2009.

Abdurrahman Ba "Alawiy, *Bughyah al-Mustarshidīn fī Talkhīṣi fatāwī Ba'ḍi al-Aimmah min al-Ulamā' al-Muta'akhirīn*, Dār al-fikr, 2011.

Abdurrahman Bin Ziyad al-Zabidi, *Ghāyah Talkhīs al-Murād Min Fatāwī Ibnu zayād*, Dar al-Fir, tt.

Abu Abdillah Muhammad Bin Idris al-Shafi'i, *al-Umm*, Dār al-Wafā', 2001.

Abu Abdillah Muhammad Bin Isma'il al-Bukhari, *Ṣahīh al-Bukhārī*, Dar Ibn Kathir, Damashqus Beirut, 2002.

Abu al-Hasan Ali Bin Muhammad al-Mawardi al-Basri, *Al-Hāwī al-Kabīr Fī Fiqh al-Mazhab al-Imām al-Syāfi'i*, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut Lebanon, 1994.

Abu Bakar Bin Muhammad Shata, *al-Qawlu al-Munkih al-Maḍbūṭ Fī jawāz al-Ta'āmul wa wujūb al-Zakāt fī mā yata'allaqu bi Waraqi al-Nūt*, Dar al-Nashr, 1998.

Abu Bakar Uthman Bin Shata al-Bakri, *Hāshiyah I'ānatu al-Tālibīn,* Dār ihyā' al-kutub al-Arabiyyah.

Abu Bakar Uthman Bin Shata al-Bakri, *I'ānatu al-Tālibīn,* Dār ihyā' al-kutub al-Arabiyyah, tt.

Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad al-Ghazali, *Ihyā' Ulūm al-Dīn*, Dar Ibn Hazm, tt.

Abu Ishaq Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf al-Fairuz Abadi al-Shairozi, *al-Muhaẓẓab Fī Fiqh al-Imām Shāfi'i*, Dār al-Fikri, Beirut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adams, Charles. *Islamic Modernism in Egypt*, 1933, reprint New York, 1968. *Kajian klasik tentang biografi, karya dan pemikiran tokoh-tokoh seperti Jamal al-Din al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha dan para modernis Mus-lim lainnya di Mesir.*

Ahmad Bin Abdul Aziz Bin Zainuddin al-Malibari al-Hindi, *Fathul Mu'īn*, Dar Ibn Hazm, 2004.

Ahmad Bin Umar al-Shatiri, *al-Yāqūt al-Nafīs*, Dār al-Minhāj, 2011

Ahmad Shihabuddin Ibnu Hajar al-Haitami al-Makki, *al-Fatāwī al-Fiqhiyyah al-Kubrā, Fatāwī ibn Hajar al-Haitami*, Dār al-Ma'rifah, Beirut Libanon, tt.

Ahmad, Aziz. *Islamic Modernism in India and Pakistan, 1857-1964*, London, 1967.

al- Sharif al-Haḍrami, *Bughyatul Mustarshidīn*, al-Hidayah : Surabaya, tt.

Alallah, Hasan Mutawakkil. *NU Menjawab problematika Ummat,* Surabaya: Khalista, 2010.

al-Aqqad, Abbas Mahmud. *al-Ishlah wa al-Ta'lim al-Ustadz Muhammad Abduh.* Mesir: Maktabah al-Misri, tt.

al-Hajah Durriyah al-'aiṭah, *Fiqh al-Ibādāt alā al-madhhab al-Shāfi'ī,* Taqniyah Arabiyah, Marqoom, org,

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama' Bab XX Permusyawaratan Tingkat Nasional Pasal 72 di NU Online.

Ansari al, Zakariya Bin Muhammad Bin Zakariya, *Asnā al-Maṭālib fī Sharhi Raudlatu al-Tālib, Dār al-Kitāb al-Islāmi*, 2010.

Arief, Armai. *Membumikan nilai-nilai Islam dalam masyarakat Majmuk*, Jakarta: Suara ADI, 2009.

Arifin, Ahmad. *Pergulatan Pemikiran Fiqih dalam Nahdlatul Ulama'* "Analisis Paradigma atas Nalar Fiqh Tradisi", Yagyakarta: PPs UIN Yogyakarta, 2007.

Azra, Azyumardi. *NU: Islam Tradisional dan Modernitas di Indonesia*, Book Review terhadap buku *Nahdlatul Ulama': Tradisional Islam and Modernity in Indonesia*, Greg Fealy dan Gerg Barton, Studi Islamika, IV, 1997

Bahri, Syamsul. *Metodologi Hukum Islam,* Yogyakarta: Teras, 2008.

Bakri al,Abu Bakar Uthman Bin Shata.*Hāshiyah I'ānatu al-Tālibīn,* Dār ihyā' al-kutub al-Arabiyyah, tt.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barton, Greg "Neo-Modernism: A Vital Synthesis of Traditionalist and Modernist Islamic Thought in Indonesia", Studia Islamika, vol. 2, no. 3, 1995: Greg Barton, "*Indonesia's Nurcholish Madjid and Abdurrahman Wahid as In-tellectual 'Ulamī': The Meeting of Islamic Traditionalism and Modernism in neo-Modernist Thought*", Studio Islamika, 1997.

Bek, Muhammad Hudlari. *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*, Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra.

Broockelmann, Carl Ed.. *History of The Islamic Peoples*. London : Routledge and Kegan Paul, 1982.

Bruinessen, Martin van. "*Kitab Kuning: Books in Arabic Script Used in the Pesantren Milieu*", BKI, 146 1990, 226-269: "*Pesantren and Kitab Kuning: Maintenance and Continuation of a Tradition of Religious Learning*", Jakarta: Mizan, 1992.

Bruinessen, Martin van. *Traditionalist Muslims in a Modern-izing World.. The Nahdlatul Ulama' and Indonesia's New Order*.

Buchori, S. Ibrahim. *Sejarah Masuknya Islam dan Proses Islamisasi di Indonesia*. Jakarta: Publicita. 1971.

Bujairimi al, Sulaiman Bin Muhammad Bin Umar, *Hāshiyah al-Bujairimī 'alā Sharhi al-Manhaj*, Maṭba'ah al-Halabī, 1950.

Dhafier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LP3ES. 1982.

Dimyati, Shata al, *I'anatu al-Talibin*, Dar al-fikr, tt.

Djamil, Fathurrahman. *Mefode ljtihad Mlljlis Ta,jih Muhammadiyah* Jakana: Logos Publishing House, 1995.

Dokumen : SK PBNU Nomor: 294/A.II.04.d/11/2018. 21 Rabi'ul Awal 1440 H / 29 Nopember 2018 M tentang: Pengesahan PCNU Kabupaten Mojokerto Masa Khidmat: 2018 – 2023.

Fachri, Ali dan Effendy, Bahtiar. *Merambah Jalan Baru Islam Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru,* Bandung : Mizan 1986.

Fadeli, Soeleiman dan Subhan, Mohammad. *Antologi NU*, Khalista: Surabaya, 2008.

Fakhruddin al-Razi, *al-Tafsīr al-Kabīr Mafātih al-Ghaib*, Dār al-Fikr, 1981.

Geertz. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1981.

Hafni, Abdul Mun'im (al), *Ensiklopedia Golongan, Kelompok Aliran, Mazhab, Partai dan Gerakan Islam*, Jakarta : Grafindo Khazanah Ilmu, 2006.

Haidar, M. Ali. *Nahdatul Ulama' dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fiqh dalam Politik,* Jakarta: Gramedia, 1994.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Haitami al, Ibnu Hajar, Abdul Hamīd al-Sharwāni dan Ibnu Qāsim al-'Ubādi, *Hawāshī Tuhfah al-Minhāj Bi Sharh al-Minhāj*, al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1938.

Hamīd al, Sa'īd Bin Abdillah,. *Fatāwī al-Alūkah Fī jawāz naqli al-Dam min Insān ilā insān ākhar wa inikhtalafa dīnuhumā.* tt.

Hamka, Rusydi dan Iqbal M. Syarif Saimima, *Kebangkitan Islam dalam Pembahasan*. Jakarta: Nurul Islam.

Harits, Busyairi. *Islam NU* Pengawal Tradisi Sunni Indonesia, Khalista: Surabaya, 2010.

Hasan, Muhammad Tholhah. *Ahlussunnah Wal Jama'ah Dalam Persepsi dan Tradisi NU*, Jakarta : Lantaroba Press, 2005.

Hisni al,Taqiyyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini.*Kifāyah al-Akhyār fī Halli Ghāyah al-Ikhtisār*, Dār al-Minhāj, 2008.

Hourani, Albert. *Arabic Thought in The Liberal Age 1789-1939*. Cambridge: Cambridge University Press. 1983.

Ibnu Hajar al-Haitami, Abdul Hamīd al-Sharwāni dan Ibnu Qāsim al-'Ubādi, *Hawāshī Tuhfah al-Minhāj Bi Sharh al-Minhāj*, al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1938.

Ibrahim Bin Muhammad al-Bajuri al-Shafi'i, *Hāshiyah al-Bājuri alā Sharhi ibni Qāsim al-Ghiziy*, Dār al-Minhāj,

Ibrahim Bin Muhammad Bin Ahmad al-Bajuri, *Hāshiyah al-Bājūrī*, Dār al-Minhāj, Jeddah al-Saudiyyah, tt.

Imam AZ dan Nasikh, "Liputan: Dari halaqah Denanyar", *Santri,* No. 3, Th. I 1990.

Ismā'il Bin Umar Bin Kathīr al-Qurashiy al-Dimashqiy Abū al-Fidā' 'imād al-Dīn, *Tafsīr al-Qur'ān al-Aẓīm*, Dār al-Tayyibah, 1999.

Jalal al-Din Abd al-Rahman ibn Abi Bakar al-Suyuti, *al-Hāwī li al-Fatāwī*, Dār al-kutub al-Ilmiyyah, 2000.

Jamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam,* Jakarta:, Logos Wacana Ilmu, 1999.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah,* Jakarta : Amzah, 2010.

Khatib al-Sharbini, *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāẓi al-Minhāj*, Dār al-Ma'rifah, 1997.

Kholidah, "Melode ǰihad Dewan Fatwa al-Jam'iyatul Washliyah Periode 1988 - 1998",.Tesis MA, IAIN Sumatera Utara. Medan. 2000.

Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi,* Bandung : Mizan, 1993.

Lapidus, Ira M. *A History of Islamic Societies,* Cambridge: Cambridge University Press. 1993.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lubis, M. Ridwan dan Syahminan, *Perspektif pembaharuan Peemikiran Islam,* Medan: Pustaka Widyasarana, 1993.

Madjid, Nurcholis, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.

Mahfudh, Sahal. *Ahkamul Fuqaha' Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Surabaya: Khalista, 2010 M.

_____. *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 1994.

Manawi al, Muhammad Abdu al-Ra'uf , *Faiḍ al-Qadīr Sharh al-Jāmi' al-Saghīr*, Dār al-Ma'rifah,1971. Juz 2, Hal.245.

Mansur Bin Yunus Bin Idris al-Bahūti al-Hanbali al-Miṣri, *Kashshāf al-Qanā' 'an Matni al-Iqnā'*, 'Ālam al-Kutub,1983.

Mansur, *Rekontruksi Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta : Departemen Agama RI, 2005.

Mawardi, Kholid. *Mazhab Sosial Keagamaan NU*, Stain Purwokerto: Yogyakarta, 2006.

MB. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia:Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*, Teraju: Jakarta, 2002.

MT. Arifin. *Gagasan Pembaharuan Muhammadiyah*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya. 1987.

Mudzhar, M. Atho. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama' Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia. 1975 -1988,* Jakarta: INIS, 1993.

Mudzhar, M. Atho. *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek.*, Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Muhammad Abu Said al-Khadimi al-Hanafi, *Barīqah Mahmūdiyyah fī sharhi Ṭarīqah Muhammadiyyah wa sharī'ah Nabawiyyah fī sirati Ahmadiyyah*, Maṭba'ah al-Halabiy, 2010.

Muhammad Amin al-Kurdi al-Irbili, *Tanwīrul Qulūb, Fī Mu'āmalati 'allāmi al-Ghuyūb, Dār ihyā' al-kutub al-arabiyyah*, Indonesia,tt.

Muhammad Ashraf Bin Amir Bin Ali Bin Haidar Abu Abd al-Rahman, *Awn al-Ma'būd Sharah Sunan Abī Daud wa hāshiyah Ibn al-Qayyim*, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut Lebanon, tt.

Muhammad Bin Muhammad al-Khatib al-Sharbini, *al-Iqnā' fī Halli Alfāẓi Abī Shujā'*, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004.

Muhammad Bin Muhammad al-Husaini al-Zubaidi, *Ithāf al-Sādāh al-Muttaqīn Bi Sharh Ihyā' Ulūm al-Dīn*, al-Maṭba'ah al-Maimaniyyah,tt.

Muhammad Bin Muhammad al-Husaini al-Zubaidi, *Ithāf al-Sādāh al-Muttaqīn Bi Sharh Ihyā' Ulūm al-Dīn*, al-Maṭba'ah al-Maimaniyyah, tt.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Bin Umar al-Nawawi al-Jāwi, *Nihāyah al-Zain Fī Irshād al-Mubtadi'īn*, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002.

Muhammmad Bin Abi al- Abbas Shihabuddin al-Ramli, *Nihāyah al-Muhtāj ilā Sharhi al-Minhāj*, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut Lebanon, 2003.

Muhammmad Bin Abi al- Abbas Shihabuddin al-Ramli, *Nihāyah al-Muhtāj ilā Sharhi al-Minhāj*, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut Lebanon, 2003.

Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, *al-Iḍāh Fī Manāsik al-Hajj wa al-Umrah*, Dār al- Bashā'ir al-Islāmiyyah, 1994.

_____, *al-Majmū' fi Sharhi al-Muhadhdhab*, Maktabah al-Irshād, 2008.

_____, *Rawḍah al-Tālibīn wa 'Umdah al-Sālikīn*, al-Maktab al-Islamiy, 1991.

_____, *Raudah al-Tālibīn wa 'Umdah al-Muftīn* , Dār 'Ālam al-Maktabāt, 2008.

_____, *Ṣahīh Muslim Bi Sharh al-Nawawi*, Bait al-Afkār al-Dauliyyah, tt.

Nasr, Seyyed Hossein. *Traditional Islam in the Modern World, London & New York*,Kegan Paul International, 1990.

Nasution, Harun, *Teologi Islam Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, Jakarta: UI Press, 1986.

Nata, Abudin. *Peta Keragaman Pemkiran Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2001.

Nawawi al, Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf , *al-Majmū' fi Sharhi al-Muhadhdhab*, Maktabah al-Irshād, 2008.

Nawawi, al Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf. "al-Majmu' Syarh al-Muhazzab " dalam muqaddimahnya, Dar al-Qalam, Damsyiq.

Neil, Robert Van. *Munculnya Elite Modern Indonesia.* Jakarta: Pustaka Jaya. 1984.

Nia Kurnia dan Amelia Fauzia. Gerakan Modernisme.

Nizar, Samsul. *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta : Kencana, 2007.

Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900*-1942, Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia : 1982.

_____. *The Modernist Muslim Movement in Indonesia, 1900-1942,* Singapore: Oxford University Press, 1973.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

PP Muhammadiyah. 2010. *1 Abad Muhammadiyah*, tt.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qalyubi dan Amirah, *Hāshiyatā al-Qolyūbi wa 'Amīrah alā Sharh al-Mahallī alā Minhāj al-Ṭālibīn*, Mustafa al-Babi al-Halabi, 1955.

Qurdi al, Muhammad Bin Sulaiman, *Fatāwī al-Sheikh Muhammad Ibn Sulaiman al-Kurdi*, al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, tt.

Rahman, Fazlur. "*Islam: Past Inffluence and Present Challenge" dalam Islam: Challenges and Opportunities*", Edinburgh: Edinburgh Press, 1979.

Ridha, Sayyid Muhammad Rasyid. *Tarikh al-Ustadz al-Imam Muhammad Abduh.* Juz I,Mesir: Al-Manar, 1931.

Ridwan, Nur Khalik. *Islam Borjuis dan Islam Proletar: Konstruksi Baru Masyarakat Islam Indonesia*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.

Rosyada, Dede. *Metode Kajisn Hukum Dewan Persis,* Jakana: PT. Logos Wacana lmu, 1999.

S., Ahmed Akbar. *Post Modernism and Islam Predicement and Promise,* terj. M. Sirozi, *Post Modernism, Bahaya dan Harapan Islam,* Bandung: Mizan. 1994.

Saīd Bin Abdillah al-Hamīd, *Fatāwī al-Alūkah Fī jawāz naqli al-Dam min Insān ilā insān ākhar wa inikhtalafa dīnuhumā.*

Said Bin Muhammad Ba 'Alawi Ba;ishan al-Dau'ani al-Hadrami,al-Syafi'I, *Bushrā al-Karīm Bi Sharh Masā'il al-Ta'līm*, Dār al-Minhāj, 2004.

Salim, Peter dan Venny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Shaikh al-Islam Abu Yahya Zakariya al-Ansari, *Fath al-Wahhāb Bi Sharhi Manhaj al-Tullāb,* Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut Lebanon, tt.

Shamsu al-Din Shihab al-Din al-Ramli, *Nihāyah al-Muhtāj ilā Sharhi alminhāj*, Dār al-Fikr Beirut.

Shamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Sharbini, *al-Iqna' Fi Halli Al-fazi Abi Shuja'*, Beirut Lebanon : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004.

Sharbini al, Khatib. *Hashiyah al-shekh Sulaiman Bin Muhamma al-Sharbini,* Dar al-cutub al-Ilmiyyah.

Shiddieqy, Muhammad Hasbi Ash. *Filsafat Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Shihabuddin Ahmad Bin Ahmad al-Qolyubi dan Shibuddin Ahmad al-Barlisi "Amirah, *Hashiyatā al-Qalyubi wa 'Amirah Ala Sharhi al-Mahalli.* Maṭba'ah Mustafa al-Halabi, 1956.

Shihabuddin Muhammad bin Muhammad al-Sharbini, *Mughnī al-Muhtāj ilā ma'rifati ma'ānī al-Minhāj,* Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.

Sitompul, Einar Martahan. *NU dan Pancasila*, NU Online.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sulaiman Bin Muhammad Bin Umar al-Bujairimi al-Shafi'i, *Tuhfah al-Habīb 'ala Sharhi al-Khatīb,* Dār al-Fikr, 2007.

Sulaiman Bin Umar Bin Mansur al-"ajili al-Ma'ruf bi al-Jamal, *Hāshiyah al-Jamal 'alā Sharh al-Manhaj*, Dār a;-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut Lebanon, tt.

Suyuti al, Jalaluddin Abdurrahman, *Al-Ashbāh wa al-Naẓāir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Shāfi'iyyah*, Dār al-Kitāb al-Ilmiyyah, 1983.

Syamsu, Muhammad. Ulama pembawa Islam di Indonesia dan Sekitarnya. 1999.

Syaukani, Ahmad. *Perkembangan Pemikiran Modern Di Dunia Islam*. Bandung : Pustaka Setia, 2001.

Taqiyyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini al-Hisni, *Kifāyah al-Akhyār fī Halli Ghāyah al-Ikhtisār*, Dār al-Minhāj, 2008.

Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa adillatuhu*, Dār al-Fikr, Beirut Lebanon,tt.

Wahid, Abdurrahman. *Prisma Pemikiran Gus Dur*, Yogyakarta: LKiS, 2000.

Yahya, Imam. *Akar Sejarah Bahtsul Masa'il: Penjelasan Singkat*, dalam M. Imdadun Rahmad ed., *Kritik Nalar Fiqih NU.*

_____. *Dinamika Ijtihad NU,* Semarang:Walisongo Press, 2009.

Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: LSIK, 1993.

Zahra, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU* , Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2004.

Zakariya Bin Muhammad Bin Zakariya al-Ansari, *Asnā al-Maṭālib fī Sharhi Raudlatu al-Tālib, Dār al-Kitāb al-Islāmi*, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id